



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017



Direktorat
Pembinaan

NOVASI TATA KELOLA SEKOLAH DASAR



INOVASI TATA KELOLA SEKOLAH DASAR

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017

INOVASI TATA KELOLA SEKOLAH DASAR

Tim Penulis

Hamid Muhammad, Ph.D. (Pengarah)
Dr. Thamrin Kasman (Pengarah)
Drs. Wowon Widaryat, M.Si. (Pengarah)
Mukhlis, S.T. (Ketua Tim Penulis)
Bambang Hadi Waluya, S.Pd., M.Pd. (Anggota)
Dr. Juandaniisyah (Anggota)
Gusmayadi Muhammarsyah, SE., M.Ed (Anggota)
Drs. Agung Tri Wahyunto, M.Pd (Anggota)
Drs. Agus Salim (Anggota)
Drs. Gesit Mulyawan, M.Pd (Anggota)
Wahyu Haryadi, S.E., M.A. (Anggota)
Dhany Hamiddan Khoir, S.T., M.A. (Anggota)
Dr. Asep Suharta (Anggota)
Saiful Anam, M.Pd. (Anggota)
Ir. Dipo Handoko (Anggota)
Mukti Ali, S.Pd. (Anggota)
Rihad Wiranto, S.E (Anggota)
A. Fauzi Ramdani, S.Hum. (Anggota)
Nur Diansyah, S.Hum (Anggota)
Didik Haryadi, S.Si (Anggota)

Desain dan Tata Letak

Dipo Handoko, Arita Windi Astuti, dan Ari Subhan Hariri

Foto cover: Mukti Ali

Diterbitkan oleh

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lt 17-18 Kompleks Kemdikbud Senayan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta - 10270
Telp: 5725641, 5725642, Faks: 5725635, 5725637, 5725989
Laman: ditpsd.kemdikbud.go.id

ISBN 978-602-9412-77-2

Cetakan I, Desember 2017

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis

**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017**





SAMBUTAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Setidaknya ada lima hal pokok yang harus dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai landasan umum dalam menjalankan program-program Kementerian. Pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketiga, melakukan revolusi karakter bangsa. Keempat, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial di Indonesia. Kelima, penguatan tata kelola dan partisipasi publik.

Penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan juga masih menjadi isu utama yang dibahas dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017 pada awal tahun ini. Pertama, peningkatan pemerataan layanan pendidikan. Kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Ketiga, penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan.



Penguatan tata kelola dijabarkan oleh seluruh unit utama dan satuan kerja di lingkungan Kemendikbud dalam sejumlah kegiatan prioritas, meliputi penguatan terhadap pengawasan internal melalui Satuan Pengawas Internal, meningkatkan kualitas pengelola keuangan, penguatan e-procurement, e-office, simkeu, e-planning, sistem pengadaan barang dan jasa (simbaja), serta peningkatan layanan Unit Layanan Terpadu.

Di tingkat Kementerian, indikator tata kelola yang baik adalah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun-tahun ke depan, Kemendikbud berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatkan nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 80, dan nilai indeks kepuasan pemangku kepentingan.

Saya sangat senang Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (Dit. PSD) sudah memantapkan hati dan niat yang sungguh-sungguh dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik melalui pencanangan Zona Intertitas menuju Wilayah Bebas Korupsi . Saya sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Direktorat PSD, dan mendorong Direktorat lain mengikuti langkah Direktorat PSD.

Beragam inovasi sistem tata kelola sekolah dasar yang dirangkum dalam Inovasi Tata Kelola Sekolah Dasar ini arahnya adalah terwujudnya tata kelola yang baik dan bersih. Terwujudnya good governance pemerintahan membutuhkan tata kelola yang baik di tingkat satuan kerja, juga tata kelola sekolah. Selamat atas penerbitan buku ini, semoga dapat disebarluaskan ke satuan kerja dan sekolah-sekolah, sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan nasional

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP



SAMBUTAN

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah

Tata kelola menjadi salah satu fungsi yang diemban Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ditjen Dikdasmen menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah (Pasal 16 butir a).

Keberhasilan tata kelola sekolah yang baik akan menjadi kunci terselenggaranya pendidikan bermutu. Setiap membicarakan mutu sekolah, banyak kalangan hanya menyoroti komponen utamanya, yakni tersedianya sarana prasarana belajar yang memadai, guru dan tenaga kependidikan yang bagus dan merata, serta proses pembelajaran yang baik dan benar. Ketiga komponen utama tersebut akan terselenggara baik jika tata kelola sekolah juga sudah dilaksanakan dengan bagus.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahkan masih menempatkan pembangunan Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru, dan Rehabilitasi Ruang Kelas masih menjadi program prioritas Kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa sarana prasarana belajar yang terstandar masih menjadi persoalan besar pendidikan nasional.



Ditjen Dikdasmen menyambut baik keberhasilan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang sudah menyusun sistem manajemen tata kelola sekolah dasar. Sistem Tata Kelola SD menjadi salah satu wujud dari reformasi birokrasi yang dicanangkan Kemendikbud dalam hal pengelolaan penyaluran bantuan ke Sekolah Dasar dari dana yang bersumber dari APBN. Sistem Tata Kelola SD terbukti mampu memastikan keakuratan data calon penerima bantuan sehingga penyaluran dana lebih tepat sasaran.

Saya juga mengapresiasi Direktorat PSD sudah berupaya mengembangkan digitalisasi pada perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta administrasi dan pelaporan. Arahnya, semua satuan kerja di bawah Ditjen Dikdasmen, memang harus menerapkan E-Dokumen dan E-Filling.

Satu hal lagi yang patut saya apresiasi adalah Direktorat PSD merupakan direktorat pertama yang memulai deklarasi pencanangan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi. Direktorat PSD telah melewati proses panjang untuk bertekad bebas dari korupsi. Deklarasi tersebut menjadi indikator kuat bahwa Direktorat PSD melakukan tata kelola yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Buku Ragam Inovasi Tata Kelola Sekolah Dasar (2015-2017) Era Digital Sekolah Dasar ini patut menjadi rujukan dan referensi bagi satuan kerja lain di bawah Kemendikbud, khususnya Ditjen Dikdasmen. Semoga dapat disebarluaskan sehingga kebermanfaatannya berdampak lebih meluas.

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah

Hamid Muhammad, Ph.D



PENGANTAR

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Era digital yang serba cepat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat harus sigap pula disikapi, tak terkecuali Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. Inovasi manajemen pengembangan sekolah dasar harus menuju ke arah digitalisasi.

Buku *Inovasi Tata Kelola Sekolah Dasar* ini merupakan rangkuman beragam inovasi yang dikembangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar selama kurun waktu tahun 2015-2017. Pada tanggal 28 Agustus 2015, saya dipercaya mengemban amanah menjadi Direktur Pembinaan SD.

Langkah awal memang tidak mudah. Kami berhadapan dengan sekolah, dinas pendidikan di daerah, pemerhati pendidikan, di kiri dan kanan. Banyak hal yang harus dibereskan. Tetapi karena niat kami untuk memperbaiki bersama, pada akhirnya banyak yang membantu, baik dari sisi regulasi, maupun bermitra dalam melakukan terobosan inovasi tata kelola.

Penerapan inovasi manajemen pemberian bantuan prasarana SD melalui Aplikasi Takola, kami lakukan dengan menggandeng 611 SMK Jurusan Teknik Bangunan di seluruh Indonesia. Terbukti, langkah awal ini dapat mengatasi masalah salah sasaran dan *miss budgeting*. Data hasil verifikasi di lapangan lebih akurat dan valid.

Dengan aplikasi Takola SD ini, pencaloan proposal bantuan prasarana dapat dihilangkan karena melalui Takola tidak ada lagi proposal, sehingga bantuan dapat tepat sasaran, dan manajemen bantuan prasarana menjadi lebih efisien, lebih efektif, akuntabel. Aplikasi Takola SD juga terintegrasi dengan Aplikasi JAGA dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelak, harapan kami memiliki *golden record* sarana prasarana seluruh sekolah dasar di Tanah Air dapat terwujud.



Di bidang lain, terkait perencanaan, monitoring dan evaluasi, juga program dan kegiatan administrasi dan pelaporan. Dit. PSD telah menggulirkan program Sistem Pengendalian Internal Keuangan melalui Aplikasi SPIn Keuangan, Aplikasi e-Monev dalam pemantauan (monitoring) dan evaluasi program pembinaan SD. Terkait kepegawaian, Dit. PSD sudah menyediakan basis data pegawai melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian di Biro Kepegawaian Kemendikbud. Melalui aplikasi ini, pejabat terkait dapat menelusuri berbagai data dan informasi tentang kepegawaian Direktorat Pembinaan SD.

Selain itu, terdapat juga aplikasi E-Presensi dan E-SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang berbasis pada log harian, sehingga dapat menumbuhkan kedisiplinan dan kejujuran, meningkatkan kinerja, dan pemetaan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki secara berkesinambungan dan terukur.

Dit. PSD juga sudah mengembangkan aplikasi untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang mampu memudahkan pengolahan dan penyajian data yang cepat dan akurat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas PIP.

Subbag TU juga akan mengembangkan e-dokumen dan e-filling sistem berbasis TIK. Dokumen-dokumen di bidang keuangan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, dan pengadaan sudah dalam bentuk elektronik. Kelebihan e-dokumen dibandingkan dengan dokumen biasa adalah paperless, menghemat kertas, juga timeless, sangat menghemat waktu. (Lihat: Menghemat Kertas dan Waktu).

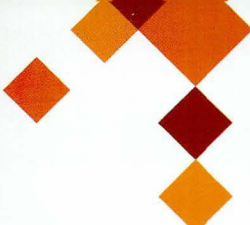
Pada Subdit Program dan Evaluasi akan dikembangkan sistem penganggaran terpadu dan e-monev berbasis android. Pada Subdit Peserta Didik juga akan dibuat pengembangan aplikasi penyajian penelusuran bakat peserta didik.

Subdit Kurikulum akan mengembangkan e-rapot, e-ijazah dan e-media pembelajaran. Sedangkan di Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, akan terus menyempurnakan Takola Sekolah Dasar. Salah satunya dengan menjadikan *golden record* data kondisi sekolah nasional sebagai pelengkap data dalam Data Pokok Pendidikan.

Beragam inovasi sistem tata kelola sekolah dasar itu menjadi pijakan kami untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih menuju *good governance*. Kami segenap pimpinan dan seluruh staf berkomitmen untuk mewujudkan Direktorat Pembinaan SD yang berpredikat sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Drs. Wowon Widaryat, M.Si



DAFTAR ISI

iv	SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP.
vi	SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Hamid Muhammad, Ph.D
viii	PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR Drs. Wowon Widaryat, M.Si
x	DAFTAR ISI
1	BAB 1 PENDAHULUAN
21	BAB 2 SOSOK DAN KIPRAH WOWON WIDARYAT Bekerja dengan Hati
55	BAB 3 INOVASI MANAJEMEN SARANA PRASARANA Inovasi Manajemen Sarana dan Prasarana
75	BAB 4 SANITASI SEKOLAH Sanitasi Sekolah: Memenuhi Standar Sarana Prasarana, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, serta Manajemen Sanitasi
97	BAB 5 PROGAS: MENINGKATKAN GIZI ANAK SEKOLAH DASAR Peningkatan Gizi Anak Sekolah Dasar

139	BAB 6 GELIAT PROGAS DI DAERAH Sarapan Bergizi untuk Anak Sekolah
197	BAB 7 PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER Revolusi Mental lewat Penguatan Pendidikan Karakter
237	BAB 8 PROGRAM INDONESIA PINTAR Memperluas Akses Pendidikan dan Mengembangkan Literasi Keuangan
263	BAB 9 INOVASI TATA KELOLA BOS Inovasi Tata Kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah
299	BAB 10 INOVASI TATA KELOLA DAK DAK Fisik Ciptakan Pemerataan Pendidikan
319	BAB 11 LOMBA BUDAYA MUTU SEKOLAH DASAR Revitalisasi Lomba Budaya Mutu di Sekolah Dasar
353	BAB 12 PEMBELAJARAN ABAD 21 Transformasi Pendidikan Hadapi Perubahan Zaman
379	BAB 13 PENGALAKAN KOMPETISI SISWA Berbagai Kompetisi Tingkatkan Kompetensi Siswa
411	BAB 14 PENGUATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)

1

PENDAHULUAN





Foto: Dipo Handoko

Pidato Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada acara *Budget Day* di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (22/11/2017) lalu langsung menyedot perhatian serius di kalangan pejabat, birokrat, praktisi, maupun pemerhati pendidikan. Betapa tidak. Di depan forum *Budget Day*, Sri Mulyani mengaku sangat sedih lantaran masih banyak sekolah yang rusak, meski anggaran pendidikan sejak beberapa tahun sudah menyentuh angka 20% dari APBN. Ia mendapat laporan adanya sekolah-sekolah rusak tersebut dari para pegawainya yang melakukan kegiatan bakti sosial dalam program Kemenkeu Mengajar.

"Saya merasa sangat sedih bahwa bangunan sekolah di mana teman-teman mengajar, masih ada yang sangat tidak baik dan ini terjadi pada saat anggaran pendidikan kita naik, dari yang hanya Rp140 triliun pada sepuluh tahun lalu, sekarang jadi Rp 400 triliun," katanya, sebagaimana dikutip detik.com.



Foto: Saiful Anam

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Drs. Wowon Widaryat, M.Si, yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), usai membaca berita langsung langsung merespons persoalan tersebut di depan peserta kegiatan *Workshop* Harmonisasi Bantuan Pemerintah Tahun 2017.

Wowon menegaskan, justru inovasi sistem tata kelola yang dicanangkannya sejak ia menjabat sebagai Direktur Pembinaan SD pada tanggal 28 Agustus 2015 lalu, untuk menjamin agar pelaksanaan renovasi bangunan SD yang rusak benar-benar transparan, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh lagi ada pemotongan-pemotongan dari pihak mana pun. Inovasi yang dilakukannya adalah melibatkan 611 SMK Teknik Bangunan seluruh Indonesia, yang bertugas melakukan pendataan, pemetaan, pelaporan, hingga

pengawasan dalam pelaksanaan renovasi sekolah rusak tersebut.

Direktorat Pembinaan SD tidak lagi menerima proposal yang diajukan oleh sekolah atau dinas pendidikan, bahkan kadang melalui jalur perantara tertentu, karena semua SD nantinya akan didata dan dipetakan oleh para siswa dan guru SMK tersebut. Wowon berharap, pelibatan SMK Teknik Bangunan ini dapat mempercepat penyelesaian renovasi sekolah rusak.

Direktur Pembinaan SD itu mengakui, buruknya kondisi gedung sekolah dasar itu merata di semua provinsi. Fakta inilah yang membuat Wowon bertekad memperbaikinya, baik rehab fisik bangunannya maupun tata kelolanya. "Gedung sekolah rusak itu bagaikan warisan abadi yang harus segera diberesi. Ini merupakan masalah laten yang wajib secepatnya diatasi," katanya.

Wowon mengingatkan, sejak tahun 2009 anggaran pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sebelumnya, sejak diberlakukan otonomi daerah pada tahun 1999, tanggung jawab pengelolaan SD berada di tangan pemerintah daerah. Mestinya, kondisi bangunan SD semakin baik. Apalagi penganggaran rehab gedung SD berasal dari berbagai sumber. Bahkan pemerintah pernah menargetkan seluruh rehab gedung SD rusak selesai di tahun 2014. Setelah itu diharapkan tidak ada lagi berita sekolah rusak atau sekolah ambruk.

Faktanya, hingga kini jumlah sekolah rusak ternyata masih sangat banyak. Masih banyak ruang kelas yang rusak, bahkan tidak bisa ditempati. Sejumlah murid sekolah dasar terpaksa belajar di tenda karena sekolah mereka rusak dan tidak kunjung diperbaiki.

DERETAN PENYEBAB SEKOLAH RUSAK

Kenyataan itu tentu saja membuat penilaian publik terhadap kinerja Kemdikbud negatif, meski setiap tahun sudah dilakukan upaya rehab sekolah. Oleh karena itu, Wowon kemudian mengkaji mengapa masih begitu banyak gedung sekolah yang rusak. Ia mencatat sejumlah faktor yang menyebabkan sekolah rusak itu bagaikan warisan abadi. *Pertama*, kompleksitas alur birokrasi merupakan penyebab utama. "Akibatnya, sekolah-sekolah yang rusak mengalami kesulitan dalam mengajukan rehab ke pemerintah daerah", kata Wowon.

Kedua, cukup banyak lokasi SD yang berada di Daerah Khusus, yakni daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T). Mereka banyak yang berada di ujung pelosok desa, dan pada umumnya tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan proposal rehab sekolahnya. "Boro-boro mengajukan proposal, untuk mengurus kegiatan pembelajaran sehari-hari saja sudah kerepotan, karena pada umumnya SDM yang bertugas di sekolah-sekolah tersebut berjumlah sedikit, tidak sebanding dengan jumlah siswa yang cukup banyak," tutur Wowon.

Ketiga, cukup sering terjadi ketidakadilan pemerintah daerah dalam memberikan rehab kepada sekolah. Sejumlah sekolah tertentu mendapat perlakuan istimewa, apalagi sekolah tersebut pintar mengajukan proposal rehab. "Akibatnya cukup sering dijumpai, yang direhab sekolah itu-itu saja. Padahal sekolah tersebut sebenarnya sudah cukup bagus," kata Wowon.

Keempat, cukup banyak kepala sekolah yang tergiur untuk melakukan korupsi. Cukup sering pemberitaan di media memuat kasus kepala sekolah divonis masuk penjara lantaran korupsi dana rehab sekolah atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kondisi ini membuat kepala sekolah lain menjadi gamang atau enggan mengajukan proposal rehab karena takut masuk penjara. "Daripada masuk penjara, mereka akhirnya memilih tidak mengajukan proposal rehab sehingga sekolahnya tetap dibiarkan rusak."

disetujui, dana yang diterima akhirnya harus terpotong-potong dari berbagai pihak tersebut. Dana tersisa yang digunakan menjadi tidak efisien. Spesifikasi bangunan dikurangi, sehingga kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan. Dampaknya, bangunan yang baru direhab tidak berusia lama, bahkan bisa roboh sewaktu-waktu.

Ketujuh, pemantauan dari Kemdikbud terhadap pelaksanaan rehab juga kurang intensif. "Bayangkan ribuan sekolah mengirim laporan pertanggungjawabannya ke kami dalam bentuk *hard copy*. Mana sempat membacanya secara menyeluruh. Paling yang dilihat hanya *cover* dan punggungnya saja. Isinya enggak sempat dilihat. Jadi bagaimana bisa mengontrol karena saking banyaknya", kata Wowon.

Kedelapan, seberapa besar bangunan SD kita dibuat pada tahun 1970-an dan 1980-an dalam program SD Inpres. Usianya memang sudah cukup tua. Apalagi pembangunan SD Inpres saat itu menggunakan pola kontraktual, yang kurang melibatkan masyarakat setempat.

Deretan faktor penyebab tersebut telah membuat perbaikan sekolah rusak yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, bagaikan berjalan di tempat. Lalu muncul berita bangunan sekolah seperti kandang kambing atau kandang ayam. Sekolah tidak ada atapnya. "Ini semua memperburuk citra pemerintah pusat, dalam hal ini Kemdikbud. Padahal Kemdikbud tidak berurusan dengan proses rehab di lapangan tersebut, karena yang punya sekolah adalah pemerintah daerah kabupaten/kota. Kemdikbud hanya berfungsi sebagai regulator," tegas Wowon.

Kendati begitu, Kemdikbud tidak tinggal diam. Dalam kasus-kasus tertentu, pada



Foto: Saiful Anam

akhirnya Kemdikbud langsung turun tangan terutama untuk mengatasi sekolah-sekolah yang menjadi sorotan atau rusak berat. Ia berharap pemerintah daerah lebih peduli terhadap kondisi bangunan sekolah yang menjadi kewenangannya, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T. Sayangnya, data yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kondisi sekolah-sekolah di remote area itu pada umumnya tidak memadai.

GOLDEN RECORD DAN PELIBATAN SMK

Berangkat dari permasalahan-permasalahan kompleks tersebut, Wowon terinspirasi dan tergerak untuk memperbaiki sistem tata kelola yang pada gilirannya berimplikasi terhadap peningkatan akses dan mutu SD. Acuan data untuk perbaikan tata kelola itu sumbernya hanya satu, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang mulai dikembangkan sejak tahun 2012.

Wowon menjelaskan, sejak tahun 2013 penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah menggunakan Dapodik, karena Dapodik memuat data lengkap mengenai profil sekolah

mulai dari jumlah siswa, guru, rombongan belajar, kondisi fisik bangunan, hingga alamat sekolah. Bahkan untuk daerah atau sekolah yang tidak meng-update Dapodik, diberikan *punishment*. Tidak akan diberikan dana BOS sampai datanya lengkap.

Di Dapodik terungkap data kondisi fisik sekolah secara umum, mulai dari kategori bagus, rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. Data-data tersebut di-input oleh operator Dapodik di sekolah. Akan tetapi, data fisik sekolah ini masih belum didukung dengan data teknis bangunan sekolah. "Ini tidak bisa disalahkan karena operator Dapodik di sekolah bukan orang yang paham tentang teknis bangunan. Hanya dilaporkan rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat, tapi tidak dideskripsikan secara teknis. Karena itu, data tersebut bisa menyesatkan karena tidak akurat," jelas Wowon.

Menurut Wowon, kenyataan tersebut agak menyusahkan Direktorat Pembinaan SD dalam menentukan jumlah kebutuhan dana rehabilitasi sekolah. Setiap tahun Kemdikbud menaikkan dana rehab, namun pertanyaannya: kapan selesainya? "Ini enggak selesai-selesai karena data yang diinput tersebut menyesatkan. Akibatnya kami kerja dua kali. Setelah diusulkan daerah, kemudian kita memverifikasi ke lapangan. Hal ini pemborosan karena banyak sekolah yang harus diverifikasi. Di Dapodik selain tidak merinci data teknis, juga tidak menyajikan foto-foto kondisi sekolah. Data Dapodik belum dapat mengindikasikan prioritas untuk rehab," ujar Wowon.

Oleh karena itu, Wowon kemudian melakukan inovasi sistem tata kelola yang mencakup dua program fundamental. *Pertama*, Direktorat Pembinaan SD harus memiliki master data dengan nama *golden record*. Di dalam *golden record* memuat profil seluruh SD yang berjumlah 148.000 lebih secara lengkap dan rinci menyangkut data teknis gedung, gambar bangunan, foto sekolah dari berbagai sisi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekolah berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), hingga data sekolah rawan bencana.

Kedua, untuk mengisi profil lengkap dan rinci seluruh SD tersebut ke dalam *golden record*, Direktorat Pembinaan SD menjalin kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Direktorat Pembinaan SMK melibatkan 611 SMK Jurusan Teknik Bangunan di seluruh Indonesia. Di dalamnya melibatkan sekitar 6000 guru, kurang lebih 24.000 siswa kelas XII yang dimungkinkan tetap dilibatkan setelah lulus, ditambah lagi sekitar 24.000 siswa kelas XI SMK yang akan Praktek Kerja Lapangan (PKL). SMK yang bertugas lokasinya yang paling dekat dengan SD yang didata. Jika di kabupaten/kota tersebut tidak ada SMK Teknik Bangunan, diambilkan dari SMK kabupaten/kota terdekat. "Jadi hampir 50.000 siswa dan 6000 guru yang terlibat," kata Wowon.

Pendataan yang dilakukan para guru dan siswa SMK Teknik Bangunan itu pelaporannya tidak lagi konvensional dalam bentuk *hard copy* atau setumpukan kertas, tetapi menggunakan



Foto: Saiful Anam

aplikasi teknologi informasi dari Android yang sudah diinstal. “Form-nya sudah kami buat, mereka tinggal mengisi. Tidak perlu membawa buku catatan, karena hasil pendataan dan fotonya itu tinggal memasukkan ke HP yang menggunakan Android, lalu mengirimkan ke kami. Semua masuk ke *golden record*. Servernya luar biasa besar, berkapasitas tinggi. Disimpan di Data Center, di Gedung Cyber,” ujar Wowon, yang meraih gelar sarjana pendidikan teknik elektro dari IKIP Bandung.

Sekolah yang akan didata harus di-*download* dulu dari Dapodik. Berikutnya, tinggal memverifikasi dan melaporkan secara rinci kondisi fisik sekolah, mulai dari dinding, atap, hingga lantai. Semua harus dilengkapi foto-foto. “Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) sudah kami lakukan ke SMK yang terlibat dan dinas pendidikan terkait,” lanjut ayah dua anak itu.

Wowon menambahkan, selain melaporkan kondisi fisik bangunan secara rinci beserta foto-fotonya, mereka juga diminta melaporkan data infrastruktur sekolah secara keseluruhan, mulai dari perpustakaan sekolah, sanitisasi, penataan lingkungan, hingga sarana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Sehingga kalau suatu saat nanti dilakukan pengembangan perpustakaan, sanitasi, penataan lingkungan, UKS, dan lain-lain, tinggal memanfaatkan data tersebut, tidak perlu verifikasi lagi ke sekolah.

Dengan inovasi tata kelola tersebut, maka data fisik sekolah yang dilaporkan benar-benar akurat, transparan, efisien dan akuntabel. Data tersebut dalam periode tertentu di-*update*. “Kami akan lebih mudah dalam menyusun anggaran yang diperlukan. Misalnya, setelah laporan nanti masuk akan diketahui berapa besar dana yang diperlukan untuk merehab semuanya dan dalam waktu



Foto: Saiful Anam

berapa tahun. Kalau tidak jujur akan ketahuan semua. Jadi data yang akurat itu akan memudahkan kami dalam menyusun anggaran. Kalau sebelumnya datanya tidak benar sehingga menyesatkan dan menyusahkan kami dalam menyusun anggaran,” papar Wowon. Selain itu, dengan data yang akurat, maka akan jelas target pengerjaannya. Sumber pendanaannya bisa dari APBN, APBD, bisa juga dari masyarakat.

Wowon melanjutkan, data yang dikumpulkan oleh SMK itu tidak hanya sekolah-sekolah yang rusak, tetapi semua sekolah. Nantinya akan kelihatan dari 148.000 lebih bangunan SD itu berapa sekolah yang kondisinya bagus, berapa yang rusak ringan, sedang, hingga berat. Semua dilengkapi foto. “Kami memberdayakan SMK sekaligus untuk memperkuat ekosistem sekolah. Anak-anak SMK melakukannya sekaligus untuk praktek dan melatih keahliannya. Bisa dibayangkan kalau kami menggunakan jasa pihak ketiga, berapa besar beayanya. Jadi yang kami lakukan ini sangat efisien. Anak-anak SMK juga praktek belajar langsung ke lapangan. Kami melibatkan anak-anak SMK karena mereka mengerti teknis bangunan”.

RAB rehab akan muncul secara otomatis berdasarkan data yang dilaporkan oleh siswa dan guru SMK karena aplikasinya



Foto: Saiful Anam

sudah dibuat. RAB itu akan keluar berdasarkan IKK di daerahnya masih-masing, sehingga tidak bisa dimanipulasi. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang pengusulannya melalui proposal. Pihak sekolah bias mengajukan dana semauanya sendiri. Meski sekolahnya hanya rusak rusak ringan, dilaporkan rusak sedang atau bahkan rusak berat, sehingga pengajuan dananya lebih besar. "Parahnya lagi, kami juga belum tentu melakukan verifikasi lantaran banyaknya proposal yang masuk. Dengan inovasi sistem tata kelola ini, ketidakjujuran seperti itu bisa dihindari," ujar Wowon.

Data kondisi fisik sekolah yang masuk itu selanjutnya dipetakan secara nasional berdasarkan kategori jumlah sekolah yang bagus, rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat. Bisa juga pemetaan tingkat provinsi hingga kabupaten kota dengan kategori yang sama. "Jadi sekarang kita balik. Kalau dulu

kita minta laporan dari daerah supaya mereka menyampaikan kondisi fisik sekolahnya, lalu kami memetakan. Sekarang, kami yang akan memberikan data kepada pemerintah daerah. Data kami peroleh dari siswa-siswa dan guru SMK," kata Wowon, yang pernah mengenyam pendidikan Sekolah Teknik Menengah (STM) Jurusan Elektronika di STM Pusat Pendidikan Perhubungan (Pusdikhub) milik TNI AD di Bandung.

Wowon menegaskan, tim dari SMK itu tidak hanya berperan dalam melaporkan kondisi fisik sekolah. Mereka akan terus dilibatkan juga sebagai tim teknis dalam pelaksanaan, pengendalian, hingga pengawasan rehab. Bahkan mereka nantinya juga akan dilibatkan dalam program pembuatan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), pengadaan perpustakaan hingga sanita sisekolah.





Foto: Aziz Purwanto (PASKA Kemendikbud)



Foto: Saiful Anam

Pelibatan SMK dalam inovasi tata kelola perbaikan sarpras SD itu, pada gilirannya membuat SMK Teknik Bangunan lebih terangkat derajatnya. Bagi Wowon, pelibatan SMK itu sama saja dengan memberdayakan kompetensi siswa SMK Teknik Bangunan dari “rumah” sendiri. Selama ini program peningkatan kompetensi siswa dan guru-guru SMK yang dikirim ke luar negeri hanya terbatas untuk program-program keahlian tertentu, seperti otomotif, kelutan, animasi. Sementara SMK Teknik Bangunan cenderung kurang mendapat perhatian, bahkan seperti dianaktirikan. Dengan adanya program inovasi tatakelola sarpras SD ini, martabat mereka diangkat. Perannya sangat menentukan, sehingga tidak lagi dipandang sebelah mata.

Selain melibatkan SMK, Direktorat Pembinaan SD juga menggandeng Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR). Pelibatan Ditjen Bina Konstruksi itu sekaligus untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK Teknik Bangunan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di atas.

Dengan inovasi baru ini, maka sistem monitoringnya juga berubah drastis. Tidak perlu lagi verifikasi ke sekolah yang selama ini terjadi pemborosan. "Selama ini dari sekolah yang akan dibantu, paling yang diverifikasi hanya 10%. Dengan inovasi sistem tata kelola ini, maka 100% sekolah yang akan direhab terdata semua secara lengkap," tandas Wowon yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (DPD ORARI) Jawa Barat.

DIMULAI DARI DAERAH 3T

Proses pendataan SD ini, kata Wowon, dimulai dari pinggiran dulu sesuai program Nawacita dari Presiden Jokowi, yaitu daerah 3T. Diharapkan pada tahun 2018 sudah selesai. Nanti akan kelihatan postur fisik SD, dan masyarakat bisa dengan mudah mengaksesnya. Tahun ini berjalan simultan, baik pendataan maupun rehab berjalan bareng. "Kita perbaiki sekolah karena kondisi sekolah berdampak pada mutu. Bagaimana kualitas akan bagus kalau sarana dan prasarana sekolah buruk," tegas Wowon.

"Kami serius membenahi SD karena merupakan fondasi pendidikan. Kalau SD tidak bermutu akan berdampak pada jenjang pendidikan di atasnya. Prioritas fundamental yang kami lakukan saat ini adalah memperbarui sistem tata kelola, yang selama ini tampak kurang tersentuh. Kami memanfaatkan teknologi informasi dalam memperbaiki tata kelola ini," kata Wowon.

Dalam pandangan Wowon, kalau pembenahan fisik sekolah sudah selesai, pengelolaanya sudah benar, insya Allah urusan yang lain lebih mudah. "Saya tidak mau dengar lagi ada sekolah seperti kandang ayam, sekolah roboh, dan lain-lain. Juga tidak ada lagi kepala sekolah yang berurusan dengan masalah hukum. Kami tidak Ikhlas ketika kepala sekolah dipenjara. Pada umumnya kepala sekolah jujur. Tetapi, akibat intervensi dari pihak lain akhirnya mereka tidak berdaya. Dampaknya, terjadi pengurangan kualitas bangunan lantaran anggarannya terpotong," ujarnya.

"Saya sangat berterima kasih kepada Pak Menteri, Pak Dirjen, dan kawan-kawan di internal direktorat yang sangat mensupport terobosan program ini. Dengan masa kerja saya yang terbatas, yang pensiun pada awal 2018, saya ingin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan kita khususnya sekolah dasar", tandas Wowon.



Foto: Saiful Anam

Inovasi sistem tata kelola perbaikan sarana dan prasarana SD itu hanya satu dari sekian banyak terobosan yang dilakukan Wowon Widaryat selaku Direktur Pembinaan Sekolah Dasar selama kurang lebih 2,5 tahun terakhir ini. Inovasi tata kelola sarpras memang menjadi garapan utama lantaran persoalan bangunan SD rusak terus menjadi sorotan publik hingga saat ini, padahal anggarannya cukup besar.

Selain inovasi sistem tata kelola sarpras, berbagai inovasi lain yang digulirkan Wowon adalah perbaikan tata kelola BOS, inovasi tata kelola DAK, penguatan Program Gizi Anak Sekolah (Progas), penggalakan kompetisi manajemen mutu maupun kompetisi antarsiswa, inovasi tata kelola sanitasi

sekolah, penguatan pendidikan karakter, percepatan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga penguatan integritas dan akuntabilitas.

TIGA KOMPONEN MUTU

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, Ph.D, mengakui bahwa kondisi sekolah dasar yang tidak memenuhi standar sarana prasarana itu pada gilirannya berdampak pada rendahnya mutu. "Kalau dari aspek, memang sudah bagus. Tetapi kalau dilihat dari mutu, SD paling paran dibanding SMP, SMA, dan SMK," katanya.

Ia menyebut sejumlah penyebab yang membuat kualitas SD terus memprihatinkan hingga saat ini. *Pertama*, pengadaan SD yang dilakukan seadanya. *Kedua*, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) maupun manajemen sekolah yang kurang baik. *Ketiga*, kegiatan pembelajarannya banyak yang tidak benar. Padahal ketiga komponen itu penentu utama bermutunya suatu sekolah.

Dengan demikian, tiga komponen menjadi kata kunci terselenggaranya pendidikan bermutu, yakni tersedianya fasilitas sarana prasarana belajar yang memadai; guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan merata serta manajemen yang baik; dan proses pembelajaran yang benar. Sayangnya, pada umumnya SD kurang memenuhi tiga



Hamid Muhammad, Ph.D.,
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Foto: Arita WA

komponen kunci itu, sehingga kualitasnya masih memprihatinkan.

Hamid memaparkan, pembangunan gedung SD dulu dilakukan dengan standar seadanya dalam Proyek SD Inpres yang dimulai awal tahun 1970-an hingga akhir 1980-an. Dalam kurun tersebut, telah dibangun puluhan ribu gedung SD di seantero Nusantara. Saat itu, lanjut Hamid, yang penting di setiap desa ada SD. "Pengadaan SD dengan standar seadanya dalam Proyek SD Inpres itu berdampak buruk sampai sekarang. Beda dengan SMP, SMA dan SMK, standarnya jelas. Luas tanah minimal sekian ribu meter baru bisa dibangun sekolah. Kalau SD dulu tidak begitu. Ada tanah luasnya hanya 500 m², bisa dibangun sekolah. Jadi dalam Proyek SD Inpres dulu pembangunannya memang dalam kondisi darurat, yang penting ada," katanya.

Sebagai contoh, ia pernah menjumpai di Kabupaten Bogor ada SD yang tiga ruang kelasnya dibangun di satu tempat, lalu berjarak sekitar 100 m dibangun tiga kelas lagi. "Karena

di lokasi pertama itu luas tanahnya hanya cukup untuk tiga kelas. Dulu yang penting cukup untuk kelas 1, 2, 3. Kemudian kelas 4,5,6 nya masuk siang. Setelah dirasa tidak cukup, dibangun lagi tidak jauh dari lokasi pertama" ujarnya.

Oleh karena itu, saat masih menjadi Direktur SMP, Hamid pernah mengusulkan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima SD sejak tahun 2003 dan jumlahnya paling banyak, lebih banyak digunakan untuk membangun ulang sekolah. Sekolah yang kondisi bangunannya sudah buruk, sebaiknya tidak direhab. "Kalau hanya direhab, kita tahu saat itu paling banter hanya dipelur saja dindingnya. Padahal struktur bangunannya sudah lemah. Lebih baik dibongkar total dan dibangun ulang. Karena itu kalau sampai sekarang masih banyak SD yang ambruk, tidak kaget karena struktur bangunannya memang sudah lemah," ujarnya. "Maka, saya selalu sampaikan dalam berbagai kesempatan, kalau sekolah rusak itu struktur bangunannya sudah



tidak nyaman, tata letaknya itu sudah tidak karuan, harus dibongkar total dan dibangun ulang”, lanjutnya.

Hamid optimistis, asal ada kemauan dari pemerintah daerah, hal itu bisa dilakukan. Ia mencontohkan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah yang sudah melakukannya. “Yang penting sebenarnya hanya kemauan saja dari pemerintah kabupaten dan kota. Apalagi sekolah-sekolah kita sudah banyak yang tidak layak dan tidak sedikit yang terletak di daerah berbahaya,” tandasnya.

Tidak usah jauh-jauh dari Jakarta, Hamid mencontohkan ada sekolah di pinggir jalan di kawasan Cibogo, yakni jalan menuju Puncak, Bogor. SD itu sudah tidak layak karena berada di tempat keramaian lalu lintas yang

sangat padat dan sering terjadi kecelakaan. “Kalau sudah seperti itu harus dipindahkan, cari tempat yang lebih nyaman. Mestinya ini urusan pemerintah daerah. Tapi bisa juga diusulkan ke Direktorat Pembinaan SD, lalu kita bangun. Kondisi yang seperti itu banyak di daerah lain,” tuturnya.

Guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor kedua yang membuat mutu pendidikan SD buruk. Guru-guru SD pada masa lalu banyak diangkat dalam Proyek Guru Inpres pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Mereka yang diangkat menjadi guru SD tidak hanya lulusan SPG dan PGA, tetapi juga lulusan SMA, SMEA, dan STM. Bahkan cukup banyak pula yang hanya lulusan SMP atau sederajat. Lebih parah lagi, di sejumlah daerah tertentu, terutama di Indonesia timur, terdapat guru SD yang hanya lulusan SD.

"Dulu asal mau jadi guru kan gampang. Tinggal ikut pelatihan paling lama setahun. Bahkan ada yang dilatih hanya sebulan, dua bulan, jadilah dia. Kalau dari SPG atau PGA masih lumayan. Tapi kalau hanya lulusan SD menjadi guru SD, coba bayangkan bagaimana mutunya," kata Hamid.

Tota jumlah guru sekitar 3 juta orang, setengahnya adalah guru SD. Berbagai upaya telah dilakukan Kemdikbud untuk meningkatkan mutu guru, mulai dari peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, pembinaan karir, hingga peningkatan kesejahteraan dengan memberikan berbagai tunjangan. Saat ini guru selain memperoleh gaji pokok, juga memperoleh tunjangan fungsional. Bagi mereka yang sudah lulus sertifikasi, mendapatkan tunjangan profesi. Dan mereka yang bertugas di daerah khusus, masih ditambah lagi tunjangan khusus.

Persoalan lain yang membelenggu guru adalah distribusinya tidak merata. Di kota numpuk, di desa kurang. Di daerah terpencil sering dijumpai hanya diisi satu orang kepala sekolah merangkap guru, yang mengajar semua kelas. Tahun 2011 lalu, pemerintah sebenarnya sudah pernah mengeluarkan Peraturan Bersama Lima Menteri yang mengatur redistribusi guru. "Tetapi tidak mempan karena saling sengkabut," ujar Hamid.

Ia mencontohkan, di sekolah-sekolah yang ada di kota atau pinggiran kota, guru-gurunya cukup banyak yang diisi istri tokoh atau pejabat

penting. "Ada istri pejabat Kodim, ada istri pejabat Polres, atau istri pejabat pemerintah daerah, siapa yang berani memindah," katanya. Bahkan di sebuah SD di Kabupaten Sumenep, Madura, yang lokasinya hanya 3 km dari pusat kota, ia pernah menjumpai guru agamanya sampai 5 orang. Padahal hanya ada satu rombongan belajar (rombel) per tingkat. Artinya hanya ada enam kelas.

Yang membuat Hamid merasa sangat prihatin, sudah kualitas bangunan SD buruk dan guru-gurunya kurang kompeten, distribusinya tidak merata, masih ditambah lagi dengan kegiatan pembelajaran yang tidak baik. Padahal, faktor ketiga ini paling menentukan. Saat ini, kata Hamid, jumlah guru honorer di SD saja sekitar 500 ribu, atau kurang lebih sepertiga dari total jumlah guru SD. Mereka diangkat oleh kepala sekolah, yang sering kali tidak memakai standar jelas. Ini tentu sangat mengkhawatirkan dari sisi mutu. "Celaknya, guru-guru kita yang sudah bersertifikasi, sudah cukup kompeten, cukup banyak yang menugaskan guru-guru honorer untuk ngajar. Sementara dia sendiri sibuk ikut kegiatan lain. Ini fenomena yang terjadi di kota. Di pedesaan, tambah tidak karuan," ujarnya.

Di SD yang berada di daerah terpencil kondisinya bisa lebih parah. Tidak ada yang mengontrol mutunya. "Siapa yang ngontrol. Baik pengawas sekolahnya, apalagi kepala dinas saja belum pernah ke sana. Jadi memang sangat memprihatinkan".



Foto: Saiful Anam

Menurut Hamid, karena SD dulu dibikin asal-asalan, baik pengadaan bangunannya maupun penyediaan guru-gurunya, akibatnya fondasi pendidikan kita lemah. Kondisi seperti ini terlalu lama dibiarkan saja.

Saat masih menjabat sebagai Direktur Pembinaan SMP, ia sudah mengungkapkan betapa banyak keluhan guru-guru SMP terhadap mutu lulusan SD. Pasalnya, anak-anak yang masuk kelas VII atau 1 SMP, harus diberikan pelajaran ekstra. Bahkan tidak sedikit guru yang melakukan matrikulasi agar anak-anak lulusan SD bisa mengikuti pelajaran di SMP. "Jadi anak-anak lulusan SD banyak yang tidak siap masuk SMP. Akhirnya saat itu saya berlakukan program khusus berupa matrikulasi di daerah-daerah tertentu, yakni SD yang lulusannya tidak memenuhi standar. Pemberian matrikulasi itu sekitar 3 bulan agar anak-anak bisa mengikuti pelajaran di SMP," kenang Hamid.

Dirjen Dikdasmen mengingatkan, mestinya anak-anak lulusan SD sudah matang dalam aspek literasi dasar, yakni membaca, menulis, dan berhitung (Calistung). Kenyataannya,

diakui Hamid, masih cukup banyak yang tidak bisa. Oleh karena itu, Hamid minta agar pemerintah daerah fokus mengurus pendidikan dasar atau SD dan SMP.

Saah satu upaya memacu mutu SD adalah memberdayakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), yang berada di bawah Ditjen Dikdasmen. LPMP tersebar di setiap provinsi. "Saya tugaskan mereka untuk melakukan pemetaan mutu sekolah per kabupaten/kota, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. LPMP saya minta bekerjasama dengan pengawas sekolah," katanya.

Hamid menegaskan bahwa memperbaiki pendidikan nasional harus dimulai dari sekolah dasar, karena SD merupakan fondasi. Ia optimistis, jika pemerintah daerah berkomitmen tinggi dan fokus mengurus pendidikan dasar (SD dan SMP), fasilitas gedung sekolah dibenai, guru dan kepala sekolahnya bekerja dengan baik, serta LPMP ikut memfasilitasi pemetaan dan peningkatan mutunya, maka akan terjadi perubahan besar ke arah perbaikan mutu. ●

2

**SOSOK DAN
KIPRAH
WOWON
WIDARYAT**



Foto: Mukti Ali



Bekerja dengan Hati



Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Drs. Wowon Widaryat, M.Si merupakan sosok yang sederhana. Bagi Wowon Widaryat, bekerja tidak perlu ngoyo, tapi istiqomah mengerjakan pekerjaan satu demi satu hingga selesai. Ia terbiasa datang pagi ke kantor dan pulang hingga malam tanpa menghitung-hitung jam kerja. Yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal.

Dengan perjuangan panjang, Wowon bisa meraih jabatan yang dahulu tidak pernah diimpikan sama sekali yakni sebagai Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, sejak 28 Agustus 2015. Di masa kecil, impian Wowon adalah bisa sekolah lalu bekerja agar bisa mandiri. Tidak ada bayangan suatu saat ia berkarier ke Jakarta dan menduduki jabatan penting di Kemendikbud.

Wowon Widaryat lahir 25 Januari 1958 di Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ia lahir enam bersaudara dari seorang ibu bernama Siti Chodidjah, yang berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar. Ayahnya, Sudjana Wiharja, seorang tentara berpangkat rendah. "Ayah saya bukan perwira. Saya hidup prihatin sehari-harinya. Berangkat ke sekolah, saya jalan kaki, *nyeker*," katanya mengenang. Sebagai seorang guru, ibunya sangat disiplin dalam mendidik anak. Wowon belajar banyak dari cara hidup Ibunda yang sederhana dan disiplin tersebut. "Saya anak kampung, masa kecilnya di Cimahi. Setiap hari saya hidup prihatin," katanya.



Foto: Dipo Handoko

Dengan disiplin tinggi itu, Wowon tetap semangat meski harus berjalan ke luar kota ketika sedang melaksanakan ujian SD. Saat itu, anak-anak dari beberapa SD digabung menjadi satu untuk melaksanakan ujian di kota. "Alhamdulillah nilai saya selalu bagus. Satu angkatan di SD, hanya saya yang sampai kuliah di perguruan tinggi," katanya bangga. Teman yang lain ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang bekerja di PT Dirgantara Indonesia, ada pula yang bekerja di luar negeri, Dubai, Uni Emirat Arab.

Wowon melanjutkan ke SMP Cibeureum, Bandung, Jawa Barat. "Saya naik sepeda dari rumah selama bersekolah di SMP," ujarnya. Lulus SMP, Wowon ingin sekolah di Sekolah Teknik Menengah (STM) Pembangunan Cimahi (sekarang SMKN 1 Cimahi). Tapi, setelah melalui beberapa tes, ia gagal. Saat itu, Wowon kurang konsentrasi karena harus membantu Ibu yang sendirian di rumah, sementara ayahnya sedang melaksanakan pendidikan. "Ibu sampai sakit, sehingga saya juga kurang konsentrasi saat belajar," katanya.

Gagal masuk STM Pembangunan, Wowon mendaftar di STM lain. "Motivasinya agar bisa cepat bekerja. Ibu memang ingin saya cepat kerja. Teman-teman juga banyak yang mendaftar ke sana," katanya. Akhirnya, Wowon diterima di STM Pusat Pendidikan Perhubungan Angkatan Darat. "Kebetulan komandannya adalah paman saya. Akhirnya saya sekolah di sana dengan tempaan ala militer," katanya.

Wowon memperoleh pengalaman sangat berharga di sana. Ia mendapatkan kesempatan belajar dan praktik bersama tentara Amerika. Kebetulan, Wowon senang dengan pelajaran mengenai listrik. "Saya mengambil arus lemah," katanya.

DISIPLIN ALA MILITER

Karena sekolah di kawasan tentara, ia belajar secara disiplin sekali. "Dapat tempeleng tiap hari, saya sudah biasa," katanya. Tiap pagi, ia berjalan tegap masuk ke sekolah. Wowon wajib memakai baju pramuka dari

Senin sampai Sabtu. Bahkan Minggu, ketika ada kegiatan, siswa juga tetap mengenakan pramuka. Awalnya, ia merasa kaget. Bahkan pada saat menerima rapor pertama kali, nilainya banyak yang merah. Namun, lama-kelamaan dia bisa menyesuaikan diri dan semakin menikmati sekolah yang super disiplin ala militer itu. "Meski tidak ada hari kosong, ujian pun harus pergi ke Bandung, saya malah semakin menikmati."

Ia bercerita, satu angkatan ada 80 anak yang dibagi dua kelas, masing-masing 40 anak. Enaknya di sana, peralatan dan teknologinya sangat maju karena milik Angkatan Darat, mengalahkan alat-alat yang dimiliki sekolah negeri di masa itu. Di sana, Wowon pun mulai berlatih membuat radio, pemancar, dan alat-alat lainnya. Saat diadakan pameran, karya-karyanya selalu terlihat menonjol dibandingkan ciptaan siswa lain.

Wowon termasuk yang berhasil di sekolah tersebut. Dari 40 anak dalam satu kelas yang lulus hanya 12 anak setelah melalui ujian negara. "Saya lulus bersama satu teman yang berhasil masuk ke perguruan tinggi. Teman lain ada yang mendaftar AKABRI (sekarang Akademi Militer). Ada yang jadi tentara, ada yang di Kementerian Luar Negeri," katanya. Ia bercerita, salah satu temannya kini menjadi perwira tinggi.

Pendidikan tinggi ditempuh Wowon Teknik IKIP Bandung, Jawa Barat (sekarang

Universitas Pendidikan Indonesia) "Karena dibekali ilmu teknik saat di STM, saya terbiasa praktik setiap hari di laboratorium," katanya. Kemampuan Wowon cukup menonjol dan akhirnya ia ditawarkan menjadi tenaga honor di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Bandung. Ketika itu BLPT berada di bawah Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (Dit. Dikmenjur), Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, yang didirikan pada tahun 1975.

Wowon kagum melihat peralatan di BLPT sangat lengkap. Kebetulan, guru-guru di sana tidak memahami dengan alat yang serba modern dan lengkap itu. "Saya yang dibekali ilmu saat belajar di STM lalu mencoba semua alat-alat yang bagus tersebut. Saya senang banget. Itu adalah proyek Bank Dunia pertama di Direktorat Dikmenjur sehingga alatnya lengkap."

Wowon kali pertama ditempatkan di gudang peralatan. Ia mempelajari berbagai ilmu administrasi, pembukuan, dan sebagainya. Kemudian, ia dipindah ke gudang komponen dan selanjutnya ke *maintenance*. Saat itu, Wowon belajar tentang televisi berwarna yang baru saja muncul di Indonesia. Wowon dengan keterampilan tinggi bahkan mengajar para guru yang sedang berlatih di balai pelatihan tersebut. Wowon kemudian diangkat menjadi CPNS dan bertugas sebagai pelaksana di BLPT Bandung pada 1 Maret 1981. Ia berbekal ijazah STM karena belum lulus dari IKIP Bandung.



BERTUGAS KE JAKARTA

Tahun 1985, Wowon lulus sarjana Pendidikan Teknik Listrik IKIP Bandung. Ia juga lulus Akta IV Pendidikan Teknik Listrik Arus Lemah. Tugas akhirnya berupa transceiver lengkap. "Saat itu belum ada yang membuat alat tersebut," katanya. Kepangkatan di BLPT Bandung pun disesuaikan dengan gelar sarjananya.

Selama kuliah di IKIP, Wowon sempat tertarik berpindah sekolah ke STT Telkom,

seperti rekan-rekannya. Sekolah tersebut memang sangat favorit saat itu. "Saya beberapa kali ikut tapi selalu gugur. Ketika ada panggilan ketiga, saya sudah malas. Mungkin saya memang ditakdirkan jadi guru," katanya lebih lanjut.

Di BLPT, Wowon terakhir menjabat sebagai Kepala Seksi Eletronik. Ia membawahi 40 guru dan 20 karyawan. Tahun 1992, Wowon ditarik ke Sekretariat Ditjen Dikdasmen dan ditempatkan di bagian yang mengurus perlengkapan barang dan jasa.

Selama bekerja, Wowon tidak berpikir macam-macam. Ia hanya bekerja dan tidak bermimpi muluk-muluk. "Saya datang ke Jakarta tidak ada saudara tidak akan yang membawa. Saya seperti tanaman merambat di tegalan. Kalau ada patok yang merambat saya baru bisa tumbuh cepat. Saya kan nggak punya saudara di sini," katanya. Karena itu, ia sering ketinggalan dibandingkan dengan rekan lain yang sudah pada naik jadi pimpinan. Tapi dengan kerja keras dan jerih payah Wowon tetap mendapat apresiasi dari pimpinan.

Wowon sempat merasa asing dengan pekerjaan administrasi, tapi ia kemudian belajar gigih dan menyesuaikan diri. "Saya belajar merayap. Setahun berikutnya baru bisa menyesuaikan kerja. Apa pun yang bisa dikerjakan, saya kerjakan. Saya kerjakan sana-sini. Prinsipnya saya kerja saja. Saya juga mau membantu siapa saja yang sedang melaksanakan proyek. Orang-orang pun senang karena saya bantu."

Pada tahun 1999, otonomi daerah mulai diterapkan. Wowon pun sempat ingin pulang ke daerah, sementara banyak temannya juga ingin kembali ke daerah. Tapi, Prof. Dr. Baedhowi, M.Si., saat Sekretaris Ditjen Dikdasmen (1996-2003) meminta Wowon tidak mengajukan pindah. Tahun 2000, Wowon mendapat kepercayaan menjadi pemimpin proyek daerah tertinggal bencana alam dan kerusakan. Wowon melibatkan siswa SMK jurusan bangunan. "Kami membereskan perbatasan negara. Kami bekerja sama dengan LSM, TV, dan publikasi besar-besaran. Saya mulai mengawasi tata kelola di sana."



Foto: Faisal Saleh

BERSENTUHAN DENGAN DUNIA KEUANGAN

Pada 1 Desember 2003, Wowon diangkat menjadi Kepala Subbagian Penyusun dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Bagian Keuangan, Sekretariat Ditjen Dikdasmen. "Saya harus mengikuti Diklat Adum dulu karena waktu itu belum mengikuti Diklat IV sebagai syarat untuk menjadi pegawai Eselon IV," katanya.

Wowon sendiri berprinsip tidak mencari jabatan. Ia bekerja giat seperti biasa dan sering bekerja bersama menteri sehingga seperti pejabat. Dia berprinsip jabatan itu amanah jadi ia siap kapan saja ditugaskan. Pada awalnya, Wowon sempat mengalami kesulitan di Subbag Penyusun dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, tapi dengan semangat belajar yang terus menerus ia akhirnya bisa mengerjakan tugas yang diembannya.

"Saya melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga seperti BPKP. Kami juga menyekolahkan enam akuntan hingga S2. Saya mulai membangun sistem keuangan. Pemberdayaan staf yang jurusan ekonomi." Ia juga menata sistem pengendalian internal berbasis IT.





Foto: Mukti Ali



Tahun 2006, nomenklatur organisasi Ditjen Dikdasmen ada perubahan, persisnya pada tanggal 21 Juni 2006, jabatan yang diemban berubah menjadi Kasubbag Evaluasi Anggaran, Bagian Keuangan.

Kala itu Wowon sudah bergolongan IVa. Kurang lebih 8 tahun, Wowon bergelut dengan dunia evaluasi anggaran. Hingga pada 1 April 2011, Wowon dipromosikan menjadi Kepala Bagian Keuangan.

Wowon sudah mengikuti Diklatpim III sebagai syarat menjadi pejabat Eselon III. "Setelah saya menyelesaikan Diklatpim III, saya malah sempat tertunda pengangkatannya. Sementara ada rekan yang belum lulus Diklatpim III malah diangkat. Ya sudah, saya kerja saja," katanya.

Sebagai Kabag Keuangan, Ditjen Dikdasmen, Wowon membenahi sistem keuangan di Ditjen Dikdasmen. "Saya harus mengelola uang begitu besar hingga Rp 32 triliun. Dengan pengelolaan yang baik, satu rupiah pun tak ada selisih."

KISAH BAJU BATIK PAK DIREKTUR

Pada 25 Januari 2014, saat usianya 56 tahun, Wowon masuk masa pensiun. "Saya sudah pamit ke Pak Dirjen. Meja sudah bersih. Tunggall menghitung hari saja. Tapi kemudian Pak Totok (Ir. Totok Suprayitno, Ph.D, sekarang Kepala Balitbang Kemendikbud), Kepala Biro Kepegawaian, bilang saya masih lolos ke aturan pensiun hingga 58 tahun. Akhirnya saya kerja lagi," katanya. Kala itu berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan pada 15 Januari 2014. Salah satu ketentuannya adalah usia pensiun ASN adalah 58 tahun.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada kebijakan baru pengangkatan pejabat tinggi di Eselon I dan Eselon II yakni melalui seleksi terbuka. Calon pejabat eselon harus mendaftar *online*. "Saya pun mendaftar dan secara administratif sudah memenuhi syarat untuk jabatan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar. Pada tahap berikutnya saya diminta menyusun makalah pengembangan Direktorat Pembinaan SD.

Wowon menyampaikan berbagai program pembenahan di bagian keuangan. Ia menyusun berbagai proposal pembenahan tata kelola sekolah dasar. Wowon menulis pemikirannya tersebut dalam ujian tertulis dengan komputer. Ia juga mengikuti tes psikologi dalam bentuk tanya jawab. "Dalam wawancara dua psikolog, saya jawab tanpa beban. Saya ikut tes tanpa impian. Saya ikut tes eselon II saja sudah bangga. Saya ditanya soal pengalaman sehari-hari. Saya ditanya dua jam, padahal peserta tes lain hanya sekitar satu jam."

Usai wawancara, psikolog asal Universitas Indonesia Jakarta itu menyatakan terkesan dengan pengalaman Wowon. "Saya banyak belajar dari Anda tentang bekerja dan belajar dengan hati," kata Wowon menirukan ucapan sang psikolog. Ia terkesan dengan komentar tersebut. "Saya renungkan apa arti semua ini. Sampai dua jam wawancara lancar. Tanpa beban". Ternyata hari Rabu ada pengumuman bahwa tes akan diulang. "O ternyata diulang. Enggak jadi. Nggak lulus, buktinya disuruh daftar ulang. Saya nggak daftar ulang. Saya nggak *ngoyo*."

Ada yang kabar mengagetkan datang Selasa pekan berikutnya. Saat itu Wowon sedang bertugas di Medan, Sumatera Utara. Selasa malam pukul 12, ada *miscall* (panggilan tak dijawab) saat Wowon masuk kamar dari Pak Sekjen dan Dirjen. Wowon kirim SMS balasan, ternyata langsung dibalas. "Beliau *nyahut*. Berarti Pak Dirjen dan Sekjen belum tidur. 'Besok ditunggu Pak Menteri jam 9 pagi' kata Pak Dirjen," kata Wowon menirukan.

Wowon dibuat tidak bisa tidur. Wowon pun keluar hotel menuju bandara jam 1 malam. Ia ingin mengubah jadwal penerbangan sepagi mungkin ke Jakarta. Akhirnya ia bisa mendapat pesawat pagi ke Jakarta dan langsung ke kantor, tiba jam 09.00 WIB.

Ternyata jam 09.00, tak ada panggilan menghadap menteri. Bahkan jam 12 siang ada perintah untuk memakai batik. Wowon sempat kelabakan karena tidak membawa batik. Ia menyuruh staf untuk membelikan batik. "Entah gugup atau apa, batik yang pertama beli kekecilan. Kemudian batik kedua juga kekecilan. Baru pas beli yang ketiga kalinya batiknya agak pas," ujarnya. Sesudah pakai batik, panggilan pun tidak datang-datang. "Jam 5 ditunggu belum juga, jam 8 malam nggak ada panggilan juga. Akhirnya diberitahu kalau ternyata dijadwal ulang."

Wowon pulang ke rumah dan besoknya berangkat mengenakan batik yang pas ukurannya. Kamis pagi jam 8, Pak Menteri Anies sedang mengikuti acara Unesco jam 13.00. Jam 17, Wowon bertanya kepada Pak Dirjen soal kepastian pelantikan. "Belum ada panggilan," kata Wowon menirukan Pak Dirjen. Akhirnya Wowon dipanggil ke ruang Pak Dirjen. Wowon dikasih amplop. "Setelah saya baca, ternyata saya akan dilantik besok," kata Wowon. Ia langsung telepon istri untuk membeli baju putih. "Besok dilantik," kata Wowon kepada istrinya.



Anies Baswedan, Ph.D.,
Mantan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI

Foto: unitingvalues.org

TERHARU MENJADI DIREKTUR PSD

Jumat pagi tanggal 28 Agustus 2015, Wowon ke kantor seperti biasa. Karyawan tidak ada yang tahu kalau hari itu Wowon akan dilantik sebagai Eselon II. Setelah jumat, istri Wowon datang ke kantor. "Para pegawai langsung ramai. Bapak dilantik ya. Akhirnya ramai sekali pegawai mengucapkan selamat kepada saya."

Jumat siang, Wowon pun dilantik. Ia berada di barisan paling depan. "Saya sore itu seharusnya berangkat ke Palembang untuk menutup FLS2N. Tapi karena yang memberi selamat banyak banget, akhirnya saya ketinggalan pesawat. Tapi saya tetap ke Palembang malam itu juga." Banyak yang kaget Wowon dilantik karena banyak calon lain yang juga lebih berminat. Satpam pun kaget.

Tanpa kenal lelah, Wowon berangkat ke acara penutupan FLS2N di Palembang. "Di acara itu dipanggilah saya untuk pertama kalinya sebagai Direktur Pembinaan Sekolah Dasar."

Tepuk tangan riuh sekali. Seluruh Indonesia banyak yang kenal dengan Wowon. "Saya dikerubutin teman-teman hingga tidak sempat ketemu Pak Dirjen."

Pada hari Sabtu, 29 Agustus 2015, diadakan *family gathering* lengkap bersama anggota keluarga. "Serah terima jabatan dilaksanakan di sana. Saya pun dikenalkan, diberitahu bahwa saya orang lama, sudah lama dikenal dan seterusnya."

Minggu, 30 Agustus 2015, Wowon minta doa restu kepada Ibunda. Hingga saat ini Ibunda masih sehat, berusia sekitar 87 tahun. Sementara Ayah meninggal lima tahun lalu. "Saya minta restu karena menjadi direktur SD. Wah terharu. Kejutan betul. Kebetulan Ibu kan guru SD."

Senin, 31 Agustus 2015, Wowon kerja keras menjalankan tugas barunya. Ia mendapat tugas berat mengelola uang hingga Rp1 triliun yang harus diselesaikan satu tahun. Ia melakukan presentasi minggu berikutnya bertemu dengan Pak Anies. "Saya harus menyelesaikn Rp1 triliun dalam



waktu 4 bulan tersisa. Saya pun memakai semua pengalaman saya saat di bagian keuangan. Saya konsentrasi penuh."

Wowon segera melakukan *broadcast* ke ribuan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan. Wowon juga melakukan berbagai perampingan dengan melepas sekitar 60 konsultan pembangunan fisik yang tidak diperlukan lagi. "Saya melepas 60 orang. Saya minta izin dirjen dan irjen. Irjen bilang sikat."

Wowon pun melakukan pembinaan kepada karyawan yang selama ini hanya menyuruh kepada konsultan. Setelah konsultan dilepas, para pegawai harus mengerjakan sendiri tugasnya. "Saya bekerja bagai merangkak. Ekpektasinya besar, dengan pengalaman sebagai orang teknik saya melakukan berbagai inovasi," katanya yakin. Sebagian karyawan ada yang pesimis. "Tapi saya bilang ini bisa. Saya orang teknik. Saya pun melakukan pembenahan tata kelola."

Awalnya memang tidak mudah. "Kita berhadapan dengan sekolah, dinas, pemerhati, kiri kanan, banyak hal yang harus dibereskan. Tapi karena niatnya untuk perbaikan bersama, banyak yang membantu," katanya kembali. Saat itu turun Inpres No 9 Tahun 2016 yang membantu. Dirjen didasmen juga ada MoU. "Ada saja yang memayungi. Ada Departemen Keuangan yang mendukung dengan peraturan no 168 sekarang no 173 tahun 2016. Jika bekerja secara tulus, ada saja jalan yang mendukung."

Satu tahun mengelola uang begitu besar sepertinya tak mungkin. Tapi Wowon bertekad tahun kedua harus jalan. "Tahun ketiga bukan saya yang menjabat," ujarnya. Patut disyukuri, tata kelola yang merupakan inovasi Wowon akhirnya diakui oleh pemerintah Presiden Joko Widodo pada tahun kedua. "Takola ini yang dipresentasikan menteri keuangan. Ini yang diinginkan pemerintah."



UBAH MINDSET

Keberhasilan Wowon dalam menjalankan program tak lain karena ia mengubah mindset . "Itulah semangatnya. Mengubah mindset tidak mudah. Membangun sistem satu tahun mudah tapi mindset satu tahun dua tahun tak cukup". Dengan mindset lama, pengerjaan proyek sudah terbiasa menggunakan pola proposal. "Yang bikin proposal orang luar. Makelar yang membuat. Kini peran mereka saya putus."

Selama ini, mereka sudah mengakar ke mana-mana. "Kalau ada kasus, yang jadi korban orang sini yang jadi saksi akibat kasus di daerah."

Banyaknya kasus seperti ini menandakan ada yang tidak benar. Dengan tata kelola yang

baru, kasus penyimpangan semakin menurun. "Tapi masih ada daerah sampai saat ini yang tidak ikhlas. Karena tak bisa main-main. Kita sabar dan tekun."

KPK pun mengakui aplikasi yang kita terapkan sudah klop dengan semangat pemberantasan korupsi. "Sebelum memebersihkan yang besar, bersihkan diri sendiri dulu. Kita harus memberi contoh". Ia menyatakan zona integritas untuk lembaga menjadi ujungnya.

Wowon adalah sosok yang tertib administrasi. Saya bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Tak ada upeti untuk direktur dan lain-lain. Alhamdulillah jalan. Saya mengalir saja. Sebelumnya ia sudah menertibkan administrasi jauh-jauh hari sebelum pensiun.

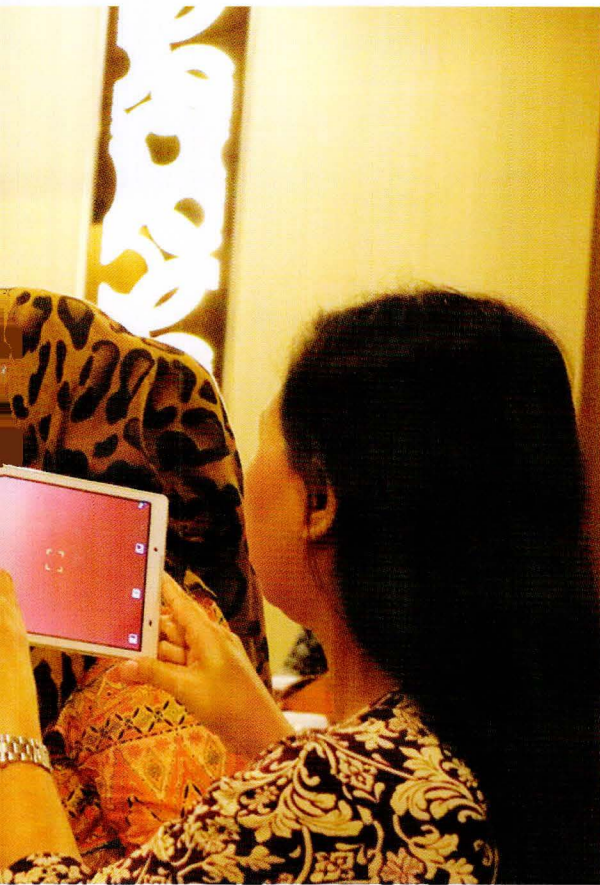


Foto: Mukti Ali

saja. Percaloabn taka ada, intervensi tak ada karena sudah ada data di puncak.”

Dulu kalau mendengar akan ada bantuan uang, maka mereka mengusulkan sebesar-besarnya. “Dulu yang terjadi seperti itu. paradigma itu kita balik. Kita data dapatkan dulu baru kita olah.”

Saat ini kita memiliki data kekurangan kelas baru. Lalu kita akan selesaikan berapa tahun. Semua bisa dilaksanakan secara terukur karena berdasar data riil. “Ini namanya golden record. Menyeluruh bukan hanya tepat sasaran tapi pertanggungjawabannya juga baik. Kalau pengawasan kurang maka konstruksi bangunannya sembarangan. Jika diawasi dengan baik maka kualitas bangunan pasti baik.”

“Mendekati pensiun, saya enjoy saja. Apa yang sudah dirintis bisa dipakai oleh yang seterusnya.”

Wowon berpendapat kalau sekolah terus mengurus sarpras, maka tidak ada waktu mengurus mutu. Karena itu, Wowon mengusulkan perbaikan seluruh sarpras, setelah itu tahun berikutnya mengadakan perbaikan mutu.

Dulu kita mengandalkan dapodik tapi yang menginput bukan orang teknik. “Kita perlu data lengkap dan akurat, golden record. Sekarang masih proses.”

Dengan pendataan yang akurat, kondisi sekolah bisa didata. “Sekolah seperti kandang ayam akan kelihatan. Jadi sekarang mau intervensi apa lagi? Tinggal tindak lanjuti

Untuk melaksanaman pendataan ini, 611 SMK dilibatkan. Karena kemampuan SMK di daerah berbeda-beda, maka para guru dilatih secara khusus misalnya tentang autocat, konstruksi, analisa kerusakan, dan sebagainya. “Soal ttraining bukan wilayah kami tapi GTK. Mereka yang melatih tapi materinya dari sini,” katanya. Wowon juga bekerjasama dengan Dikmenjur untuk penyediaan alat-alatnya. Wowon bekerjasama untuk membangun ekosistem. Program Sarpras sudah bekerja dengan data itu.

Sejauh ini program berjalan dengan baik. Saya juga sudah sampaikan kepada berbagai pihak bahwa semua harus berbasis elektronik. Efisiensi perjalanan dinas ditertibkan. Kini

tidak lagi menggunakan proposal, maka tidak ada rapat koordinasi sehingga lebih efisiensi. Taka da risiko penemuan pelanggaran hukum terkait tiket, administrasi, hotel dan sebagainya. "Kita benahi pelan-pelan. Kalau keras bisa didemo."

Penghematan terjadi akibat dari teknologi. Semua pakai WA, facebook dan medsos lain. "Data dari pelosok tinggal jepret foto kirim. Kalau semua sudah seperti itu, maka penghematan akan berjalan. Datang ke sekolah foto setiap sudut lalu kita bisa perkirakan butuh bantuan sekian. Perjalanan dinas sudah sangat turun. Risiko administrasi tak ada lagi. Jika 2018 diterapkan secara full system, pasti akan mengurangi pegawai seperti tukang input data, pegawai yang mengurus perjalanan dinas, pelaporan ke bank, sudah tak ada lagi.

Dari kabupaten, kini tersedia laporan kemahalan, tinggal disesuaikan harganya. Harga tersebut yang menentukan Bappeda. Tentu saja, sebagai sebuah sistem bisa saja terjadi human error tapi akan dievaluasi setiap waktu.

TINGKATKAN PRESTISE JURUSAN BANGUNAN

Saat ini, praktik kerja lapangan belum ada tempat buat jurusan bangunan. Peminat terhadap jurusan itu semakin kurang. Dengan adanya kegiatan praktik, masyarakat jadi tahu kalau pembangunan sudah banyak dibutuhkan.



Untuk memperkenalkan kepada masyarakat, sekolah yang dibangun akan diberi plakat dengan mencantumkan nama SMK yang terlibat. Dengan demikian, masyarakat paham tentang peran SMK jurusan bangunan.

Setelah anak SMK diikutkan dalam takola ini, jurusan bangunan makin diminati. Selama ini jurusan mesin kerja praktik di Astra. Sementara jurusan bangunan tidak mempunyai tempat praktik yang banyak. "Saat ini proyek pembangunan besar mana yang mau ambil anak SMK. Dengan ikut dalam proyek takola ini, anak-anak akan diberi sertifikat. Dia punya ketrampilan setara konsultan.

Dalam praktiknya, sekolah akan mendapatkan sekitar 4 persen dari proyek. Dana ini dipakai untuk transportasi anak-

Foto: Arien TW



anak selama menjalankan tugas hingga tempat terpencil. Wowon targetkan seluruh 148 ribu SD akan terdata. Ada kabupaten yang tidak punya SMK maka akan dibantu dari kabupaten sebelah. "Semua SD yang bagus hingga terjelek akan didata. Yang bagus sekolah mungkin toilet kurang sesuai rasio, tidak ada kantin dan sebagainya. Data-data tersebut juga bisa dipakai untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena lengkap dengan titik ordinatnya. Dengan adanya data tersebut, kita bisa tahu bahwa daerah tertentu memerlukan bangunan SD tahan gempa.

Inovasi lain yang dicanangkan Wowon adalah program gizi anak sekolah (Progas). Awalnya program seperti ini tidak ada. "Adanya dulu PMKS. Itu beda. Saya punya pemikiran. Idnoensia kaya



Foto: Dok. SMKN 7 Semarang



Foto: Dipo Handoko

buah, buah-buahan mengapa tak diolah? Makanya perlu diberdayakan masyarakat agar merasa memiliki berbagai kekayaan tersebut. Senpat terjadi perdebatan nama program tersebut.”

Akhirnya disepakati namanya Progras atau program gizi ananakolah. Kita publikasikan ke masyarakat dan ternyata sambutannya sangat baik. “Karena ini merupakan niat baik maka semua oranh ikut berpartisipasi. Perguruan pun tinggi ikut. Tahun kedua ini tambah lebar lagi. Di tingkat internasional juga diapresiasi.”

Wowon melihat ada yang ironis. “Di daerah nelayan, anak-anak malah tidak suka makan ikan. Sosialisasinya bagaimana. Ternyata setelah diteliti ada masalah dalam pengolahannya. Dengan melubatkan

masyarakat setempat, aneka makanan dari ikan pun sudah dibuat.”

Program nasional ini sudah masuk 100 kabupaten. “Kita mendorong pemerintah daerah untuk terlibat. MoU dengan bupati supaya menugaskan dinas kesehatan, pertanian, perikanan untuk berpartisipasi. Kita menyumbangkan polanya dengan melibatkan kementerian.”

Sambutan pun cukup positif. Dulu 11 kabupaten saja, kini Progas menyebar kemana-mana. “Kit ubah mindsetnya. Jangan memberi makan. Bukan seperti itu. Ayo gagasan ini dipublikasikan ke berbagai wilayah. Di Kadana, Thailand kita berbicara soal program ini. Semua itu berangkat dari hal-hal kecil tapi menjadi besar. Kita memberikan pemikiran sesuai masalah riil yang ada.”

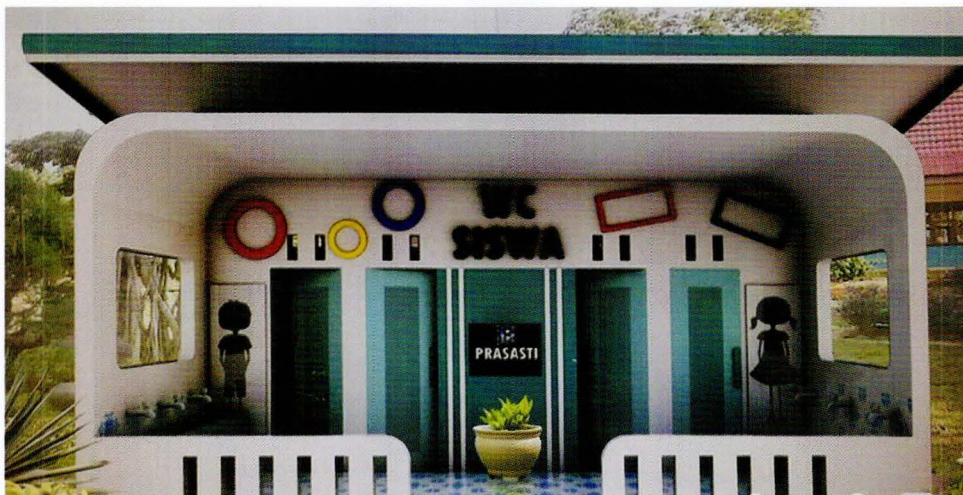


Foto: Dok. Dit. Pembinaan SD

MEMBANGUN TOILET DI DEPAN

Masalah lain yang menjadi perhatian Wowon adalah soal toilet. Wowon mencari akar masalah mengapa toilet di sekolah kurang terurus. "Masalahnya apa? Bukan mencari uangnya. Ini masakah tata keklolanya, kepedulian guru-guru. Karena ditempatkan di belakang. Maka toilet kasih di depan."

Toilet dikasih taman bersih, standar seperti di hotel. "Kalau bersih nginjek kan nggak mau. Kalau ada anak-anak kumpul berarti toilet bersih."

Baru satu tahun muncul respon-respon positif antara lain dari asosiasi internasional dan nasional. Ini inovasi untuk mengembangkan budaya bersih. Biasanya, di terminal toilet, air keluar terus dan tidak terawat.

Dengan adanya budaya bersih, anak SD dilatih sejak dini. Mereka masuk ke toilet dengan terbiasa mematikan kran air dan mematikan listrik saat keluar. Mereka menjaga toilet selalu bersih. "Kebiasaan ini dibawa ke rumah dan di masyarakat. Kecil tapi manfaatnya sangat luar biasa."

Kemudian muncul gagasan agar toilet di sekolah memiliki standar. Kementerian sosial, kementerian kesehatan juga terlibat untuk menyusun standar toilet. Dulu standar toilet di sekolah belum ada. Sekarang masalah toilet menjadi perhatian lintas kementerian. "Air yang keluar harus ada amdalnya. Maka kita melibatkan PUPR. Asosiasi makanan dan minuman juga ikut terlibat."

Para pejabat pun melihat toilet dari kacamata positif. Bahkan toilet diresmikan bupati di Mataram dan di Sumatera Selatan. Kuncinya ada pada tata kelolanya. Dulu dengan uang Rp100 juta membangun toilet tidak cukup karena diintervensi ke sana kemari. Kini pemerintah daerah termasuk pemerintah desa perlu didorong untuk terlibat dalam pembenahan sanitasi ini. "Bukan kita cari uang lalu mencari proyek. Dulu gitu. Kini diubah dengan menggali dari bawah. Desa bisa memasukan program toilet lewat dana desa sehingga biaya murah. Ini semua perlu dipublikasikan."



Foto: Dok. Dit. Pembinaan SD



PERHATIAN KE WILAYAH 3 T

Wowon menyatakan direktoratnya memiliki anggaran banyak yang mengurus sekolah dari kota hingga gunung. Wowon memikirkan bagaimana supaya media pembelajaran bisa sampai ke pelosok dengan murah. Maka, ia pun memperkenalkan media pembelajaran berbasis TIK. "Kita bangun sekolah rujukan di kabupaten. Kita manfaatkan itu. Media kirim ke sekolah rujukan tersebut. Server sudah ada dan jaringan Internet juga cukup bagus. Sekolah rujukan ini kemudian mengirim ke sekolah imbas. Jadi lebih ringan."

Namun saat ini, 32 kabupaten belum punya sekolah rujukan. Jika nanti semua sekolah rujukan sudah ada di setiap kabupaten maka pemanfaatan TIK akan semakin optimal. Manfaatkan TIK. Tema -tema pembelajaran sudah ada di youtube. Tak perlu bimtek pelatihan dan lainnya. "Semua pembelajaran ada, buka saja di YouTube."

Dulu jika mengadakan sebuah proyek, maka akan diikuti bimtek. "Saya baru pulang dari Halmahera Utara kami kumpulkan 200 kepala sekolah dari daerah terpencil. Ada komunikasi tatap muka dengan mereka. Ternyata apa kita inginkan di sini belum sampai di sana. Dinas belum sampai di ujung sana. Bagaimana mau bicara kurikulum, media pembelajaran dan sebagainya kalau informasi sampai ke daerah."

Wowon harus berpikir agar berbagai materi bisa sampai ke daerah. Ia bekerja



sama dengan PGSD di Halmahera. Mahasiswa ditempatkan di sekolah yang kekuaranga guru. Dengan tiga bulan praktik diharapkan akan membawa pengaruh positif terhadap sekolah. "Kita onlinekan dengan fakultas itu. Buku-buku di onlinekan sehingga lebih murah. Kepala dinas, perguruan tinggi, guru, ini polanya. Perguruan tinggi akan senang karena menambah kredibilitasnya." Kalau kompetensinya bagus kan universitas akan punya nilai tinggi. Di. Sentani Papua, sekolah SD Kampung Harapan di sana gurunya dari Pelita Harapan yang dikirim ke sana 2 bulan bahkan ada yang sampai setahun."

Program ini berjalan baik yang akan bisa mengatasi kekuarangan guru. kan semangat tinggi. Kalau harus angkat guru dengan APBN, uangnya tak cukup. "Kalau program itu berjalan dengan baik, maka akan mempercepat program pemerintah dalam pemerataan pendidikan.

KETERLIBATAN SWASTA

Sekarang ini, pihak swasta juga ikut berperan serta dalam peningkatan kualitas pendidikan. Di bidang kesenian, Yamaha

sudah membantu sekolah rujukan dengan memberi organ. Desember 2017, akan ada lomba inovasi penggunaan alat musik itu lalu di *upload* di *YouTube*. "Yamaha senang, masyarakat juga senang. Kita tak harus mengeluarkan uang. Dengan pemikiran dan strategi yang tepat, sebuah program bisa dilaksanakan dengan melibatkan mitra. Milo terlibat dalam program sekolah sehat dan dokter kecil. Kita tak mengeluarkan biaya."

Dalam lomba sains, OSN belum sentuh ke daerah. Di daerah terpencil pasti ada potensi tapi belum terjaring. "Saat ada lomba sains di Ancol, ada anak SD yang menciptakan kacamata untuk penderita tuna netra. "Anak-anak sudah mampu membuat robot, roket dan sebagainya. Potensi sudah ada tinggal dikembangkan dengan berbagai program kreatif. "Dengan melubatkan mitra, program akan bisa dilaksanakan dengan mudah. Kalau dari kita semua tak aka cukup waktu dan biaya."

Pembenahan lain yang dilakukan Wowon adalah pengelolaan dokumen dengan e-edocument. Sedang digarap sistem pengendalian internal berbasis TIK dari proses penyusunan anggaran sampai pelaksanaan



akan dilaksanakan secara terpadu. "Ini program harus jalan. Kita tidak perlu ISO. Dan nyatanya jalan."

Sudah lama ada "penyakit" orang yang ditugaskan melakukan evaluasi dan monitoring ke daerah kurang efektif. Petugas datang ke daerah tapi tidak melaksanakan tugas sesuai sasaran. Akibatnya hasil monitoring tak memadai. "Dulu petugas kadang tidak ke lokasi tapi mengundang pejabatnya ke hotel lalu mendengarkan laporan di sana"

Sekarang pengawasan dilakukan dengan berbasis android. Petugas harus membuat foto di lokasi dan hasilnya dikirim ke kantor pusat. "Tak perlu laporan sehingga lebih cepat. Sekarang petugas harus datang ke tempat karena ada ordinatnya di Map. Ini inovasi sederhana yang tidak membutuhkan dana besar tapi perlu komitmen tinggi. Program ini diharapkan akan selesai pada 2018.

JELANG PENSIUN

Menjelang pensiun awal tahun 2017, pelan-pelan Wowon masih menyesuaikan dengan kesibukan. "Saya pensiun pada Februari tahun depan. Dan dengan waktu yang kurang lebih tinggal empat bulan ini, ada beberapa program yang harus saya kebut. Oleh karena itu sisa waktu empat bulan ini harus benar-benar saya kebut dan saya perbaiki walaupun hanya sebagai penanaman tonggak dimulainya perbaikan. Untuk yang akan melanjutkan ini setidaknya kita sudah memiliki dasar dan acuan yang ada di depan yang lain karena ini memang hal yang baru," ujarnya.

Dengan berbagai terobosan seperti zona integritas, dengan program-program yang sudah dibuat, seperti tata kelola sistem pengendalian internal, SOP, pembinaan, dan sebagainya akan menjadi modal perbaikan di masa mendatang. "Programnya kan sudah mulai runing, termasuk zona integritas yang pada saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah. Memang yang menjadi rawan



Foto: Mukti Ali

itu ada di kita sendiri karena uangnya besar dan sentuhan dengan masyarakat itu paling banyak. Hal tersebut yang membuat kita rawan untuk menjaganya. Jika ini memang bersih, maka berarti niat kita ini sudah benar”.

Selepas pensiun, Wowon akan semakin menjaga kesehatan. “Saya sangat jarang sekali berolah raga dan olah raga pun hanya sekedar jalan sekuatnya saja. Tapi kalau sekarang sudah sangat jarang sekali karena saat pulang kerja waktunya sudah sore. Sabtu-Minggu pun juga ada kegiatan. Menurut saya olah raga itu penting, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya juga adalah membuat diri kita selalu senang”.

Seberat dan sesulit apapun permasalahan, intinya adalah dibuat senang saja, begitulah prinsip Wowon “Dalam hitungan kesehatan, saya adalah yang termasuk kurang tidur. Saya tidur kisaran jam 11 hingga jam 12 malam dan bangun kembali jam lima pagi. Namun memang jika sudah waktunya tidur, ya harus tidur walaupun hanya sebentar. Tapi karena sering makan makanan yang enak mengakibatkan berat badan yang naik. Oleh karena itu, sekarang saya sudah mulai mengontrol makanan yang saya konsumsi dan lebih makan makanan sehat seperti jenis ubi-ubian.” ●



BERBAGAI TANGGAPAN TERHADAP KINERJA WOWON WIDARYAT



Indra Djati Sidi, Ph.D

(Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Departemen Pendidikan Nasional, 1998-2005)

"Pak Wowon Widaryat saat itu mendapat tugas khusus untuk mengatasi sekolah-sekolah yang rusak pada daerah-daerah yang bermasalah. Lalu yang kedua adalah sekolah-sekolah yang terpencil yang memang sulit. Dan memang pada waktu Pak Wowon itulah mulai banyak juga dikembangkan lebih tajam".

"Beliau mengembangkan konsep tentang pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang lebih . Hitung-hitungan harga, kita juga mendapatkan lebih banyak kelas. Nah di situ ia sangat tajam pengalaman. Lalu juga bagusnya Pak Wowon adalah dia selalu *hand's on* dengan hal semacam itu sehingga tidak main perintah-perintah saja melainkan langsung datang dan menjalankan, bernegosiasi, membeli barang segala macam itu dia lakukan sendiri."

"Dengan kegemaran turun ke lapangan, lama-kelamaan Pak Wowon mengerti prosesnya dari hulu ke hilir. Dari semisal pemrograman, kemudian ada uangnya, lalu masalah pengiriman, pengawasan, desain sampai nantinya jadi sekolah. Hal itu menurut saya suatu *achievement* yang sangat luar biasa".

Pak Wowon berasal dari bagian keuangan bukan infrastruktur, tapi justru itu adalah pilihan yang tepat. Hanya Pak Wowon yang bisa menyelesaikan berbagai hal yang mana di saat itu juga kita membutuhkan gerakan yang cepat. Misalkan ada daerah konflik kemudian daerah terpencil dan daerah yang terkena bencana yang di mana kita semua harus segera membangun sekolah. Saat itu kan bukan hanya membangun sekolahnya saja, melainkan juga bukunya, peralatannya dan lain-lain”.

“Pak Wowon juga memiliki *background* pendidikan Teknik Elektro. Saat STM Teknik Elektro lalu sampai kuliah pun mengambil Teknik Elektro di IKIP Bandung. Jadi, memang ia juga memahami pengetahuan teknik, ia memahami *engineering*, peralatan dan segala macam. Bukan itu saja, ia mengorganisasikannya juga sehingga dapat berjalan dengan baik.”

“Dengan pengetahuan yang luas itu, Pak Wowon melakukan perbaikan dengan perhitungan lebih akurat. Artinya, kita tidak hanya memakai *unit cost* ringan, menengah dan berat. Tetapi tahu hingga detail apa yang rusak lalu kemudian dilakukan perbaikan. Menurut saya itu merupakan suatu inovasi yang baik. Dengan melibatkan dan memanfaatkan tenaga anak SMK untuk datang dan terlibat. Dengan demikian akan menjadi efisien dan tidak perlu mencari tenaga ahli yang lain-lain.”

“Apa yang dilakukan Pak Wowon sekaligus meningkatkan martabat atau memberdayakan SMK. Teknik Bangunan itu adalah jurusan yang tidak begitu diminati, tetapi saat dilibatkan dengan ini mereka jadi memiliki peran dan sekaligus seperti praktik lapangan. Dengan begitu, saya rasa juga salah satu cara mencegah korupsi. Jadi, jika kita ingin sesuatu yang berhasil, maka kita harus mengerjakannya dulu sendiri baru kemudian dapat menjadi contoh untuk diikuti oleh anak buah.”



Daryanto, Ak., MIS, M.Comm, D.Dip.Com, QIA, CA

Inspektur Jenderal Kemendikbud

"Tata kelola di Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (PSD) di bawah kepemimpinan Pak Wowon semakin bagus, khususnya dari unsur transparansinya."

"Pak Wowon itu orangnya jujur, penampilannya tenang, banyak senyum, dan ini modal kuat sebagai pemimpin untuk membawa organisasi sebesar Direktorat PSD ini. Kerjanya terstruktur dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)".

"Ada karya bagus dari Pak Wowon yang harus dipertahankan, yaitu Sistem Aplikasi Takola (tata kelola) untuk menangani dan memantau penyaluran bantuan rehab gedung sekolah maupun untuk ruang kelas baru, bahkan sistem ini harus terus diperkuat dan disinergikan dengan sistem aplikasi Jaga Sekolahku dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini sudah dirintis".

"Saya senang bekerjasama dengan Pak Wowon, semua tugas-tugasnya dikerjakan secara sistematis dan diselesaikannya dengan cepat dengan tetap mengedepankan integritas yang tinggi. Beliau cukup energik. Sepanjang yang saya ketahui beliau tidak pernah mengeluh betapun saya tahu bahwa tugas dan tanggung-jawabnya tidak ringan. Kesehatan fisiknya bagus, dan saya belum pernah mendengar beliau itu sakit, artinya kesehatannya cukup terjaga dengan baik."

"Selamat menjalani masa purna bakti Pak Wowon, semoga Tuhan memberkahi. Amin."



Prof. Suyanto, Ph.D

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2005-2010)
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (2010-2013)

"Saya sudah kenal lama dengan Pak Wowon. Sejak dulu beliau dulu di Kepala Bagian Keuangan. Sejak dulu sudah ada tanda-tanda beliau mampu menciptakan suatu sistem baik, yang terkontrol, terkendali, dan transparan. Saya tidak heran ketika beliau menjadi Direktur Pembinaan SD bisa menciptakan sistem tata kelola, sistem pembangunan, perbaikan sekolah dasar dengan baik.

Beliau punya pikiran, kemampuan, kapasitas, mampu mengeksekusi apa yang ada di pikirannya. Bisa menggerakkan orang, punya *leadership*, bukan sekadar manajerial. *How to make impossible think become possible*. Saya kira sukses ya. Direktorat PSD menjadi lebih profesional, transparan dan akuntabel

Harapannya, apa yang sudah dilakukan Pak Wowon dijadikan modal untuk melangkah, memperbarui, meningkatkan kinerja Direktorat. Disamping apa yang sudah dilakukan, masih ada mimpi-mimpi besar beliau yang harus diimplementasikan. Harapan saya, yang meneruskan Pak Wowon dapat membuat sebagai *starting point* menjadikan Direktorat PSD lebih baik lagi."



dr. Muchtaruddin Mansyur, Ph.D

Direktur SEAMEO REC FON

"Bapak Wowon Widaryat adalah Direktur Pembinaan Sekolah Dasar yang sangat responsif dan adaptif dengan perkembangan situasi yang baru dan bermanfaat. Hal ini ditunjukkan dalam Program Gizi Anak Sekolah (Progas) yang berhasil dilaksanakan di tingkat nasional di bawah kepemimpinan beliau.

Untuk kegiatan Progas, SEAMEO REC FON terlibat dalam penyusunan Modul Program Gizi Anak Sekolah serta menjadi narasumber Bimbingan Teknis tahun 2016. Pada tahun 2017, SEAMEO REC FON dipercaya untuk memimpin tim evaluasi Progas.

SEAMEO REC FON memandang Progas sebagai program yang sangat baik, utamanya karena empat hal berikut. Pertama, kegiatan utama Progas meliputi tiga hal, yaitu penyediaan sarapan sehat, pendidikan gizi serta pendidikan karakter bagi siswa. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan Progas tersebut sudah mencakup 'demand creation', di mana siswa akan memiliki kebutuhan untuk melakukan praktik gizi dan memiliki karakter yang baik, serta 'supply' dimana siswa diberikan sarapan sehat.

Kedua, Progas melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor, misalnya sektor kesehatan (Dinas Kesehatan serta Puskesmas), pendidikan, pemerintah daerah, orang tua murid, PKK, dan lainnya. Harapannya, keterlibatan berbagai sektor pada kegiatan ini menjadi pendorong mereka untuk lebih berperan dalam meningkatkan gizi anak sekolah.

Ketiga, sarapan yang diberikan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari area setempat, sehingga dapat meningkatkan permintaan bahan pangan lokal dan membantu petani setempat.

Keempat, salah satu hal penting dalam Progas yang juga menjadi kekuatan program ini adalah didorongnya pemerintah daerah untuk dapat mengambil peran utama dalam keberlangsungan program ini selanjutnya di daerah masing-masing. Dengan demikian, rasa memiliki terhadap program diharapkan dapat lebih baik, yang akan berdampak pada keberlangsungan program.

Kerjasama Direktorat Pembinaan SD dan SEAMEO RECFON terkait gizi anak sekolah selain Progas adalah penyusunan Modul Gizi dan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dasar dan *online training* gizi dan kesehatan untuk guru-guru SD rujukan Kemdikbud serta sekolah dasar yang ada di wilayah binaan SEAMEO RECFON. Hal ini sesuai dengan program unggulan SEAMEO RECFON yang pada Renstra Lima Tahunan kedua (2016-2021) mencanangkan Program *Nutrition Goes to School* (Gizi untuk Prestasi).

Kami merasa sangat senang dengan kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Pak Wowon dengan kepemimpinannya memungkinkan Direktorat Pembinaan SD selalu memberi tanggapan yang positif terhadap ide kerjasama yang kami sampaikan, serta memberi arahan yang jelas agar ide tersebut bisa sejalan dan saling melengkapi dengan program anak sekolah yang dimiliki oleh Kementerian. Setiap kesesuaian waktu, Pak Wowon datang langsung ke acara yang diselenggarakan RECFON terkait kegiatan gizi anak sekolah."



Ir. Rina Agustin Indriani, MURP

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Rumah dan Perumahan Rakyat

"Menurut saya Pak Wowon merupakan sosok yang terbuka. Beliau membuka diri atas masukan dari luar untuk meningkatkan kinerja organisasi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

Melalui program sanitasi sekolah saya mengenal beliau. Dari situ terus berlanjut ke pertemuan tentang perumahan untuk karyawan. Beliau menjalaninya, bekerja sama dengan pihak lain, untuk mencapai tujuan organisasi Direktorat.

Semoga apa yang sudah dilakukan beliau menjadi pembuka jalan bagi penerus beliau untuk tetap membuka masukan dari luar dan berbagi pengalaman untuk pihak luar."



Aidan Cronin, Ph.D

Chief Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) UNICEF

"It has been a great pleasure to work with you over the last few years – you have been a great supporter for improving WASH in Schools for the children of Indonesia. I will always remember how you played a critical role in supporting the International Learning Exchange on WASH in Schools held in Jakarta in November 2016. It was a wonderful occasion and your closing appreciation to all the participants from almost 20 countries was indeed one of my favourite memories from the occasion.

You also have always been very welcoming to your office of the UNICEF team –even with your very hectic schedule– and we always appreciated your kind friendship.

I wish you all the very best in your retirement and I hope you will have a very well deserved break and wish you all the very best of time with your family."

Warm regards,

Ini merupakan hal yang sangat membanggakan bisa bekerja sama dengan Pak Wowon selama beberapa tahun belakangan. Beliau seorang pendukung besar untuk mendorong program sanitasi sekolah demi kepentingan anak-anak di Indonesia. Saya akan selalu mengingat peran penting beliau dalam mendukung Pertukaran Pembelajaran Internasional pada program Sanitasi Sekolah yang diadakan di Indonesia pada November 2016. Hal itu merupakan kesempatan hebat di mana kata sambutan penutup dari Pak Wowon mendapat apresiasi peserta lebih dari 20 negara, saya akan selalu mengenang hal tersebut.

Beliau juga selalu membuka pintu kantor Direktorat PSD untuk tim dari Unicef, bahkan di tengah-tengah padatnya jadwal kegiatan beliau sehingga kami selalu menghargai kebaikan dan persahabatan kita.

Saya berharap yang terbaik untuk masa pensiun Bapak dan semoga Bapak mendapatkan masa istirahat yang terbaik serta waktu yang berharga dapat dihabiskan bersama keluarga.



Anthea Webb

Representative & Country Director WFP Indonesia

"As one of the key initiators of Progas in Indonesia, Pak Wowon is a wise leader figure who is always concerned with the development of elementary school children not only for education aspect but also from health and nutrition including character development aspects."

"I wish to convey my greatest gratitude for many years of Pak Wowon's active collaboration and sincere friendship between the Ministry of Education and Culture and the World Food Programme (WFP). Thanks to Pak Wowon, with his leadership, WFP has gained enormous trust and valuable opportunity to strengthen the implementation of Progas through enhancing the government capacity at the central as well as regional levels."

"WFP is proud to be involved in improving the quality of the nation's next generation to become healthier, smarter and stronger in 5 Provinces and 11 Districts in Indonesia through the provision of healthy & nutritious breakfasts at schools. Rest assured that our commitment to supporting national school meals programme will continue."

"Sebagai salah satu penggagas utama Progas di Indonesia, Pak Wowon adalah sosok pemimpin yang bijaksana yang selalu peduli dengan perkembangan anak sekolah SD tidak hanya dari sisi Pendidikannya saja tetapi juga dari aspek kesehatan dan gizi termasuk perkembangan karakter."

"Saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama aktif Pak Wowon dan pertemanan yang tulus antara WFP dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama ini. Kami berterimakasih kepada Pak Wowon, dibawah kepemimpinannya, WFP telah mendapatkan kepercayaan yang sangat besar dan kesempatan yang berharga untuk memperkuat pelaksanaan Progas melalui peningkatan kapasitas pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah."

"WFP sangat bangga dapat turut serta dalam memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa menjadi lebih sehat, cerdas dan kuat di 5 Propinsi dan 11 Kabupaten di Indonesia melalui pemberian sarapan sehat bergizi di sekolah. Komitmen WFP untuk mendukung program gizi anak sekolah akan terus berlanjut."

3

**INOVASI
MANAJEMEN
SARANA
PRASARANA**



Inovasi Manajemen Sarana Prasarana

Ada yang berbeda pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2017/2018 di SMK Negeri 6 Kota Bandung, Juli 2017 lalu. Masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan anak-anak mereka di jurusan yang baru dibuka tahun ini, yakni Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB). DPIB adalah gabungan paket keahlian Teknik Konstruksi Kayu dan Teknik Gambar Bangunan. Siswa baru yang lolos seleksi sebanyak 8 rombongan belajar (rombel), masing-masing 36 anak, atau sebanyak 288 siswa. Di kelas XI dan XII masih tersisa jurusan Teknik Gambar Bangunan masing-masing sebanyak 4 rombel.

“Peningkatan peminat siswa di program keahlian DPIB cukup signifikan. Biasanya yang mendaftar ke jurusan bangunan relatif kurang. Tahun ini DPIB mengalahkan jurusan Teknik Kendaraan Ringan, yang biasa menjadi favorit. Jumlahnya juga melebihi siswa jurusan Teknik

Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Pemesinan, dan Teknik Audio-Video,” kata Cecep Wawan, S.Pd., 57 tahun, Kepala Program Keahlian PDIB SMKN 6 Kota Bandung.

Melonjaknya peminat jurusan teknik bangunan itu tak lepas dari program rehabilitasi/revitalisasi sekolah dasar yang melibatkan siswa SMK. Kegiatan rehabilitasi/revitalisasi SD tersebut dilaksanakan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (Dit. PSD) dengan inovasi sistem tata kelola SD sejak tahun 2016 silam. Siswa XI dan XII jurusan Teknik Gambar Bangunan, yang masih tersisa, tak perlu jauh-jauh mencari tempat praktik kerja industri (Prakerin). Sebab mereka bisa prakerin di sekolah-sekolah yang mendapat paket bantuan pemerintah berupa rehabilitasi/renovasi. SMKN 6 Kota Bandung sendiri terpilih menjadi tim teknis, bersama 611 SMK yang memiliki jurusan teknik bangunan.



"Sekarang ini ada 32 siswa kelas XII yang sedang prakerin di 16 SD yang masih berlangsung rehabilitasi dan revitalisasi. Masing-masing sekolah ada dua siswa kami yang melaksanakan prakerin. Selain itu ada 9 siswa prakerin di Laboratorium Komputer dan 7 orang alumni yang lulus tahun ajaran lalu, juga masih masih ikut meninjau ke lapangan seminggu dua kali," kata Cecep.

SMKN 6 Bandung sebagai tim teknis mendampingi rehabilitasi bangunan sekolah di 19 SD, bangunan perpustakaan di 3 SD yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Di Kota Cimahi, mereka mendampingi rehabilitasi 11 SD, pembangunan sanitasi sehat di satu sekolah dan kantin sehat di dua sekolah. Selain itu juga pendampingan revitalisasi satu SD dan rehabilitasi tiga sekolah di Kota Bandung, serta revitalisasi 3 SD di Kab. Bandung.

Tim teknis bertugas dari pendataan sarana prasarana, perencanaan, penghitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga pengawasan pembangunan. Yang membedakan program rehabilitasi dan revitalisasi SD dibanding program serupa di masa silam, adalah penggunaan sistem tata kelola SD atau yang biasa disebut Takola SD, yang menggunakan teknologi berbasis web dan aplikasi berbasis android.

Siswa SMK memetakan kondisi sarana prasarana SD dengan bantuan aplikasi yang sudah *ter-install* di telepon pintar. Mereka memotret kondisi seluruh sarana prasarana yang langsung diunggah di Takola SD. Para siswa SMK itu juga menghitung kerusakan, baik yang ringan, sedang, dan rusak berat. Ketika Direktorat PSD menyetujui untuk pemberian bantuan rehabilitasi/revitalisasi, maka para siswa SMK itu terlibat perencanaan. Gambar rencana dikirim kembali ke Tim Teknik Direktorat PSD. Jika sudah disetujui, tim teknis SMK menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek pembangunan. Mereka tidak terlibat dalam pembangunan sekolah, namun dapat dilibatkan sebagai konsultan pengawasan.

"Di mata kami, regulasi baru tentang sistem Takola SD pada kegiatan rehabilitasi/revitalisasi bangunan SD yang melibatkan SMK, khususnya Paket Keahlian Teknik Bangunan, sungguh terobosan yang luar biasa," kata Cecep Wawan, yang sudah mengajar di SMK sejak tahun 1981, kala masih bernama STM.

Menurut Cecep, manfaat pelibatan SMK dalam rehab sekolah sangat signifikan. "Selama ini SMK Tekbang atau Teknik Bangunan dirasakan termarginalkan karena kesan dari masyarakat bahwa lulusan SMK



Tekbang akan menghasilkan tukang. Dengan dilibatkan dalam rehab SD ini, kami merasakan dampak bagus,” kata Cecep.

Manfaat bagi siswa jurusan Tekbang, kata Cecep, juga sangat besar karena pembelajaran tidak hanya dalam konsep tetapi konten dan konteksnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. “Siswa yang mengikuti PKL pada proyek rehabilitasi SD ini jelas akan mendapatkan peningkatan banyak kompetensi. Mulai dari perencanaan, desain rencana gambar, RAB, hingga pengawasan pembangunan di proyek,” kata Cecep.

Hambatan selama para siswa melaksanakan proyek rehabilitasi SD yang bersifat teknis bisa diatasi. “Ada siswa yang merasa kesulitan karena saat memverifikasi harus banyak yang dipotret, misalnya harus memotret tampak depan, samping, belakang. Dan banyak hal lain yang harus difoto,” kata Cecep.

Hambatan lain, justru yang bersifat nonteknis, yang menurut Cecep sangat mengganggu dan butuh solusi. “Kendala nonteknis berupa banyaknya oknum LSM dan wartawan yang mendatangi kami, juga pihak sekolah. Misalkan oknum LSM atau wartawan meminta orderan bahan bangunan ditangani mereka, sehingga harga menjadi relatif mahal

karena mereka memang sengaja mengambil untung,” kata Cecep.

Bagi Cecep, kehadiran oknum yang merecoki sekolah dan proyek rehabilitasi SD sulit penyelesaiannya di lapangan. “Kami sampai kasihan kepada kepala sekolah. Kami sering berpikir untuk mengatasinya apakah harus ada semacam pelindung dari pihak berwajib,” katanya.

Sebagian proyek yang didampingi Tim Teknis SMKN 6 Bandung sudah selesai 100%. Di antaranya proyek perpustakaan, sanitasi sehat dan kantin sehat. Misalnya pembangunan sanitasi sehat di SDN Cimuncang, Kab. Bandung dan SDN Cijerah, Kota Bandung. Pembangunan sarpras SD di sejumlah sekolah juga sudah banyak yang rampung menjelang akhir tahun 2017 ini. Warga SDN 1 Talagasari, Kabupaten Ciamis, juga sudah boleh senang karena rehabilitasi sudah rampung, pada November lalu. Peresmian bahkan dihadiri sejumlah pejabat penting, yakni Prof. Dr. Sc. Ahman Sya, M.Pd, M.Sc, M.Si (Deputi IV Kementerian Pariwisata), Puti Guntur Soekarno, S.IP (anggota DPR RI), Drs. H. Ling Syam Arifin, MM (Bupati Ciamis), dan Wowon Widaryat, didampingi sejumlah pejabat dan staf Direktorat PSD.

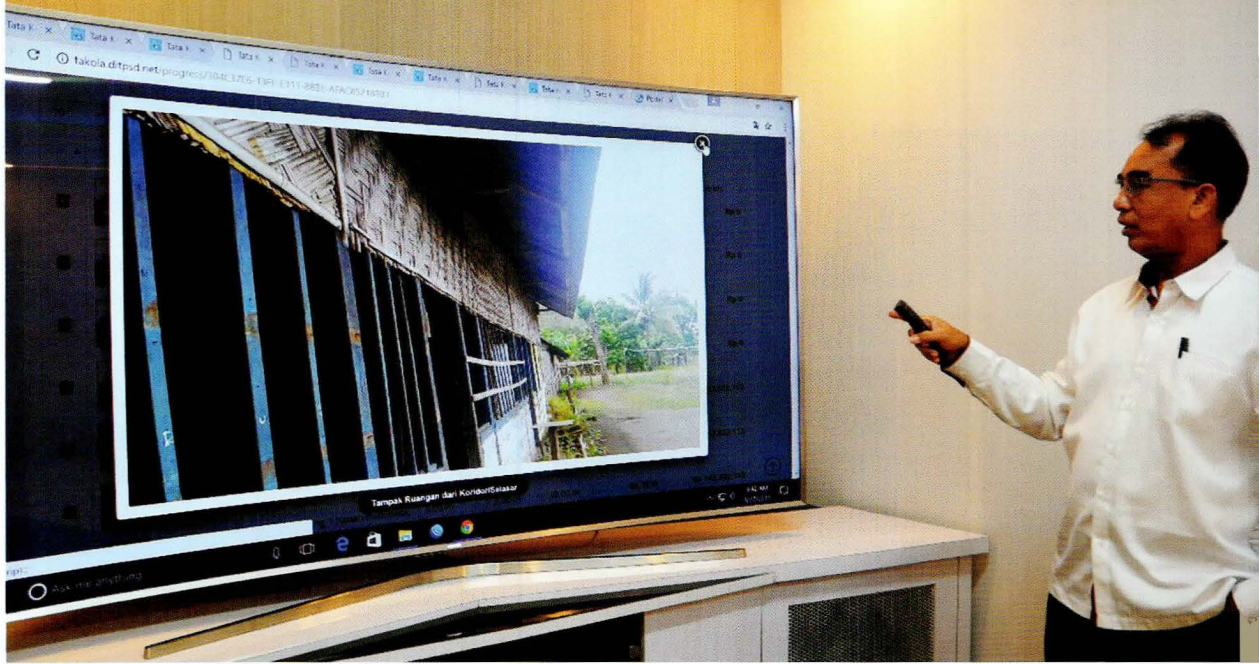


Foto: Dipo Handoko

TAKOLA SEKOLAH DASAR

Sistem tata kelola SD merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi yang dicanangkan Kemendikbud dalam hal pengelolaan penyaluran bantuan ke SD dari dana yang bersumber dari APBN. Sistem tata kelola SD berupaya memastikan keakuratan data calon penerima bantuan sehingga penyaluran dana lebih tepat sasaran.

Direktorat Pembinaan SD menggulirkan aplikasi Manajemen Tata Kelola SD, yang merupakan paket aplikasi data *warehouse* yang berfungsi menganalisis rasio, rekapitulasi kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai rekapitulasi secara nasional. "Dengan adanya aplikasi Takola SD ini, diharapkan data sarana prasarana yang dihasilkan lebih akurat, sehingga nantinya tidak ada lagi gedung sekolah yang rusak karena tidak mendapatkan bantuan pemerintah," kata Mukhlis, ST, Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat PSD.

Aplikasi Manajemen Takola SD dapat diakses melalui laman dengan alamat takola.

psd.net, juga dapat digunakan dengan ponsel pintar yang menggunakan sistem operasi berbasis android.

Untuk mengetahui kondisi terkini. Pada *dashboard* Takola per tanggal 24 November, misalnya, bisa disimak jumlah sekolah yang sudah dipetakan sebanyak 28.806 sekolah. Jumlah ruang rusak berat dan total sebanyak 20.539 ruang kelas. Perkiraan anggarannya yang dibutuhkan sebesar Rp1,758 triliun. Takola juga memantau jumlah verifikator yang melibatkan siswa SMK, di mana data terakhir tercatat sebanyak 2.904 orang.

Statistik pengiriman file dan foto dalam dua bulan terakhir, yakni September-Oktober 2017, juga tercatat dalam Takola. Progres rehabilitasi juga tersajikan dalam persentase, volume rehabilitasi, dan perkiraan biaya di semua provinsi, kabupaten/kota.

Para siswa SMK yang dilibatkan, seperti halnya para siswa SMKN 6 Bandung, terlebih dahulu mendapat pelatihan dari para guru SMK atau kepala program teknik bangunan SMK yang juga sudah mengikuti bimbingan teknis



Foto: A. Fauzi Ramdani

Takola SD. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Takola SD di antaranya Autocad, konstruksi, analisis kerusakan, dan sebagainya.

Tahun 2017, Bimtek Tenaga Teknis Bantuan Pemerintah Sekolah Dasar Tahun 2017, dilaksanakan di lima regional dan diikuti 1.218 orang, terdiri dari pelaksana teknis untuk verifikasi dan validasi SD dari SMK Jurusan Teknik Bangunan. Bimtek Regional V di Bogor, pada tanggal 27 hingga 29 April 2017, diikuti 304 orang yang berasal dari 14 provinsi, yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Papua dan Papua Barat.

"Kegiatan Bimtek Takola SD merupakan salah satu bagian dari program pemenuhan sarana dan prasarana yang meliputi pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas dan ruang perpustakaan dalam pembangunan pendidikan sekolah dasar.

Kita ketahui bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi Takola bekerjasama dengan SMK Jurusan Teknik Bangunan. Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif perlu diselenggarakan pelatihan teknis dan bimbingan teknis bagi SMK Teknik Bangunan," tutur Bambang Hadi Waluyo, S.Pd., M.Pd., Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Direktorat Sarana Prasarana dan Kelembagaan.

Menurut Bambang, para peserta diberikan bimbingan dan pelatihan teknis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para petugas teknis di lapangan agar mampu menghasilkan data sasaran pemerintah yang valid melalui aplikasi Takola. "Secara khusus tujuan Bimtek ini ada tiga. Pertama, menginformasikan mekanisme dan manajemen bantuan pemerintah sekolah dasar. Kedua, mengevaluasi data hasil pemetaan, dan ketiga, konsolidasi dan koordinasi pemutakhiran data SD penerima bantuan tahun 2017," ucap Bambang.



BERLATAR INSPRES REVITALISASI SMK

Pada 9 September 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. "Inpres Revitalisasi SMK ini sangat memberikan nuansa positif karena merupakan amanat Kemendikbud untuk berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi SMK melalui berbagai cara sesuai paket keahlian atau jurusan pada SMK," kata Drs. Wowon Widaryat, M.Si., Direktur Pembinaan SD.

Inpres Revitalisasi SMK tersebut ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja (termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), 34 Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam Inpres tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menteri, para gubernur, dan Kepala BNSP agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Presiden juga menginstruksikan supaya disusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.

Khusus untuk Mendikbud, Presiden Jokowi memberikan enam instruksi. Keenam instruksi tersebut adalah: a) membuat peta jalan SMK; b) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*); c) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; d) meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; e) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi



SMK; dan f) membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

Kepada Kepala BNSP, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik, dan tenaga pendidik SMK, serta mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.

Kemudian 34 gubernur mendapat instruksi agar memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing; menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas; melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; serta mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Selain Mendikbud, 11 Menteri Kabinet Kerja yang juga mendapat instruksi presiden adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Kesehatan.

Inpres Nomor 9 Tahun 2016 dikeluarkan untuk menguatkan sinergi antarpemangku kepentingan dalam merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Para menteri, gubernur, dan Kepala BNSP harus melaporkan pelaksanaan Inpres tersebut kepada Presiden paling sedikit enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Sebelumnya, ada peristiwa penting yang menurut Wowon Widaryat juga menjadi tonggak penting keberhasilan pelaksanaan sistem tata kelola SD. Yakni tentang terobosan peningkatan kompetensi SMK yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Kemendikbud dengan menggandeng Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad dan Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 21/SPIA/KH/2016 dan Nomor 2894/D5/DM/2016. Nota kesepahaman itu mengenai peningkatan kompetensi bidang konstruksi di SMK itu dilaksanakan di SMKN 26 Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2016.

Kerjasama itu bertujuan menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi yang dilaksanakan melalui penyiapan perangkat sistem sertifikasi dengan melibatkan Badan

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan sertifikasi BSNP diharapkan lulusan SMK teknik bangunan dapat lebih kompeten dan siap memasuki dunia kerja.

Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib mengatakan dengan sertifikasi diharapkan lulusan SMK dapat lebih kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk penyiapan sumber daya manusia yang handal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai. "Kehadiran kita di sini merupakan terobosan yang luar biasa penting dalam rangka menghasilkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang berkompeten yang dapat memenuhi kebutuhan industri konstruksi," ujarnya.

Menurutnya, target penciptaan SDM konstruksi berkompeten masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019. Untuk lima tahun ke depan,



target pembentukan SDM kompeten dalam Renstra Kementerian PUPR adalah 10.000 tenaga ahli/manajer proyek terlatih, 40.000 orang supervisor/foreman terlatih sebagai calon instruktur/asesor dan 10.000 orang instruktur pelatihan/asesor konstruksi. Kemudian 750.000 orang bersertifikat yang terdiri dari 50.000 orang insinyur konstruksi bersertifikat, 200.000 orang teknisi bersertifikat, dan 500.000 orang tenaga terampil bersertifikat.

"Tugas pembentukan SDM kompeten bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas bersama. Kita harus bersinergi antara dunia pendidikan, industri dan regulator bersama membangun SDM kompeten," ujarnya.

Sementara Dirjen Hamid Muhammad menyatakan bahwa kerjasama itu merupakan

salah satu bentuk sinergi ekosistem pendidikan yang sejalan dengan visi Kemendikbud yaitu terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong.

Penyusunan skema sertifikasi bidang konstruksi bagi SMK mulai disusun sejak akhir 2015 dan telah selesai dilaksanakan dengan hasil sembilan skema sertifikasi, yang terdiri atas lima skema dalam bentuk skema okupasi dan empat skema kualifikasi. Menurut Hamid, dari jumlah siswa SMK kurang lebih 4,4 juta anak, dengan setiap tahun meluluskan kurang lebih 1,3 juta tamatan SMK, namun tidak sampai separuh lulusannya dapat diterima di dunia industri.



Setidaknya ada tiga hal yang menjadi persoalan, yakni ketidaksesuaian kebutuhan industri dengan yang dihasilkan SMK, kelebihan *supply* bahwa pasarnya sedikit tetapi lulusan berlebih, serta masalah kualitas lulusan SMK. “Adanya penandatanganan nota kesepahaman ini sangat membantu para lulusan SMK di Indonesia lebih berkompeten dan bersertifikasi. Kami berkomitmen untuk mewajibkan seluruh siswa lulusan SMK untuk bersertifikat,” kata Hamid.

Payung hukum lain yang menguatkan digulirkannya sistem tata kelola SD adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/Tahun 2015, yang kemudian diperbarui menjadi Permenkeu No 173/PMK.05/Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Permenkeu ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden mengenai penyederhanaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)/Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan bantuan pemerintah.

MEMBERDAYAKAN SMK DARI RUMAH SENDIRI

SMK memang sudah lekat dalam diri Wowon Widaryat, yang juga lulusan STM Pusat Pendidikan Perhubungan Angkatan Darat Bandung (1976). Ketika menjadi pengajar di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Bandung, Wowon juga mengajar guru-guru SMK. Di masa silam, BLPT adalah satuan kerja di bawah Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (Dit. Dikmenjur), Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, yang didirikan pada tahun 1975.

Ketika menjadi bagian birokrasi pada Sekretariat Ditjen Dikdasmen, mulai 1992, Wowon juga bersentuhan kembali dengan siswa SMK. Ceritanya, pada tahun 2000, Wowon mendapat kepercayaan menjadi pemimpin proyek daerah tertinggal, bencana alam, dan kerusakan. Kala itu pun, Wowon sudah melibatkan siswa SMK jurusan bangunan dalam rehabilitasi bangunan sekolah.

"Pelibatan SMK dalam tata kelola prasarana SD adalah bagian dari upaya memberdayakan kompetensi siswa SMK Teknik Bangunan dari rumah sendiri. Selama ini program peningkatan kompetensi siswa dan guru-guru SMK lebih banyak untuk program-program keahlian, seperti teknik otomotif, animasi, kelautan, dan lain-lain. Sementara jurusan Teknik Bangunan kurang mendapat perhatian. Ada kesan mereka dianaktirikan. Dengan adanya program inovasi Takola ini, martabat mereka dinaikkan. Tdk lg dipandang sebelah mata.

Wowon juga berpendapat, bahwa selama ini sekolah setiap tahun masih terus menerus mengurus perbaikan sarpras. "Saya mengusulkan perbaikan seluruh sarpras. Setelah itu tahun berikutnya mengadakan perbaikan mutu," kata Wowon.

Perbaikan sarpras harus berbasis pendataan yang akurat. "Dulu kita mengandalkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sayangnya yang meng-input bukan orang teknik. Kita memerlukan data lengkap dan akurat, yakni melalui Takola SD, yang kami sebut *golden record*," kata Wowon.

Sekolah seperti kandang ayam akan terekam oleh tim teknis SMK. "Jadi sekarang mau intervensi apa lagi? Tinggal tindak lanjuti saja. Percaloan tak ada, intervensi tak ada, karena sudah ada data di puncak. Dulu kalau mendengar akan ada bantuan uang, maka mereka mengusulkan proyek sebesar-besarnya. Paradigma itu kita balik. Kita dapatkan dulu datanya, baru kita olah," katanya

Manfaat dilibatkannya SMK dalam rehabilitasi sarpras SD, juga dirasakan siswa jurusan teknik bangunan saat harus mengikuti prakerin. Selama ini jurusan tekbang SMK masih kesulitan mencari tempat buat prakerin. Peminat jurusan tekbang juga semakin berkurang. "Dengan adanya kegiatan praktik di SD yang direhabilitasi, masyarakat jadi tahu kalau dengan adanya pembangunan membutuhkan banyak SDM SMK. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat, sekolah yang dibangun akan diberi plakat dengan mencantumkan nama SMK yang terlibat. Dengan demikian, masyarakat paham tentang peran SMK jurusan teknik bangunan," kata Wowon.

Siswa yang mengikuti prakerin pada proyek-proyek Takola SD ini, mereka juga mendapat sertifikat. "Mereka punya keterampilan setara konsultan. Dalam praktiknya, Tim Teknis SMK sebagai konsultan akan mendapatkan sekitar 4 persen dari nilai proyek. Dana ini dipakai untuk transportasi anak-anak selama menjalankan tugas hingga ke sekolah," katanya.

Direktorat PSD menargetkan seluruh 148 ribu SD terdata dan terekam dalam *golden record*. Kabupaten yang tidak punya SMK akan dibantu dari kabupaten tetangga yang memiliki SMK bangunan. "Sekolah bagus dan jelek terdata. Sekolah bagus, bisa jadi ada toiletnya kurang sesuai rasio, atau tidak ada kantin sehat. Data tersebut juga bisa dipakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena lengkap dengan titik ordinatnya. Dengan adanya data tersebut, kita bisa tahu bahwa daerah tertentu memerlukan bangunan SD tahan gempa," katanya.



Foto: Akkopsi

MEWUJUDKAN GOLDEN DATA RECORD

Kebijakan Direktorat PSD melibatkan 611 SMK paket keahlian teknik bangunan, di bawah arahan Ditjen Dikdasmen, tujuan utamanya adalah mewujudkan *golden data record* dan tercapainya hasil pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi gedung sekolah dasar yang berkualitas. Langkah tersebut merupakan terobosan yang sangat strategis untuk mendukung Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Provinsi untuk membangun sistem pendataan bangunan SD yang lebih komprehensif dan detail. Dengan kumpulan data tersebut yang merupakan bagian dari *golden data record* dapat memberikan kemudahan untuk mengetahui seluruh sekolah dasar di wilayahnya yang begitu luas dan sangat tersebar hingga pelosok-pelosok daerah 3T dan perbatasan.

Peningkatan kompetensi SMK ini dilanjutkan dengan keterlibatannya sebagai unsur masyarakat membantu pada teknis pekerjaan selama pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi/renovasi gedung SD penerima bantuan pemerintah berlangsung serta memberikan bantuan pada administrasi teknis dan pelaporan. SMK adalah lembaga pendidikan yang mewadahi anak bangsa agar menjadi cerdas, tangguh, berkarakter positif, dan profesional.

Oleh karena itu, program peningkatan kompetensi SMK dan bertambahnya kemampuan SMK perlu diperjuangkan dan perlu dibanggakan oleh seluruh komponen bangsa. Kemajuan SMK merupakan aset khususnya bagi Kabupaten/Kota karena lembaga tersebut dapat menjadi mitra dalam membangun wilayahnya dan sebagai wadah peningkatan mutu dan profesionalisme.



BANGUNAN SEKOLAH BERARSITEKTUR ABAD 21

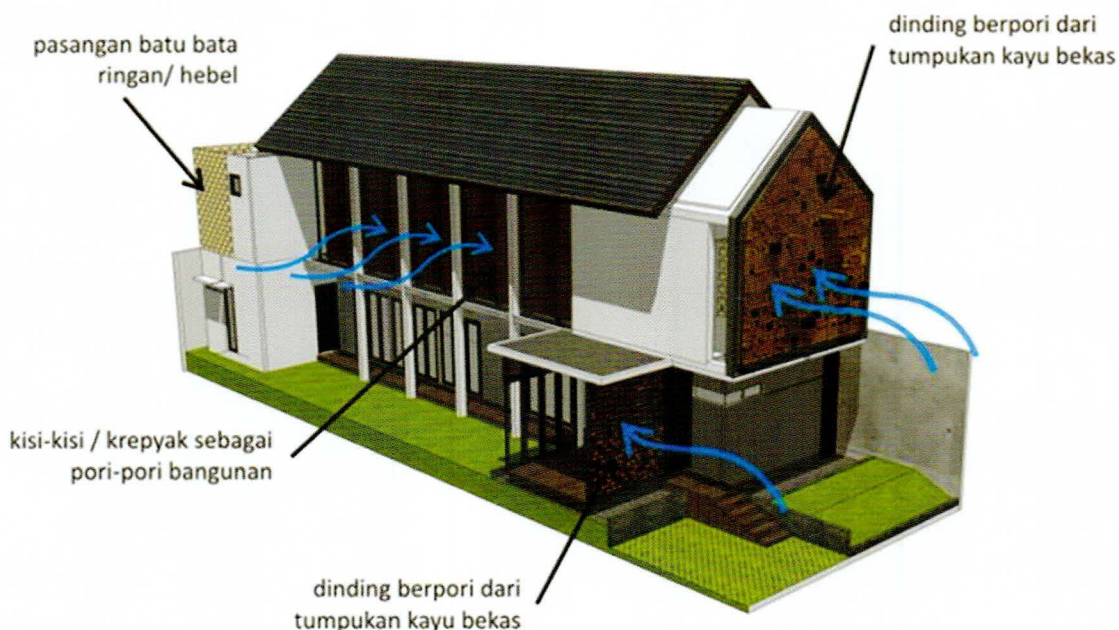
Keberadaan sarpras sekolah yang terstandar saja kini tak cukup, melainkan harus memperhitungkan konsep bangunan sekolah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman di abad ke-21. Konsep utama arsitektur abad 21 untuk bangunan SD menitikberatkan pada dua hal utama. Pertama, bangunan mengusung arsitektur tropis nusantara. Kedua, menggunakan material sisa dan bekas, berupa kayu maupun benda lain dengan tujuan mengurangi limbah tidak terpakai.

Di banyak daerah di Indonesia kental sekali bentuk bangunan bercirikan arsitektur tropis, terutama sekalian pada bangunan rumah tinggal. Masyarakat tradisional bahkan sudah membangun rumah-rumah mereka menyesuaikan dengan kondisi iklim tropis. Desain rumah-rumah tradisional sudah memperhitungkan beberapa unsur iklim

tropis, di antaranya, temperatur udara, cahaya matahari, angin, kelembaban, serta curah hujan.

Tren bangunan tropis yang berkembang di masyarakat juga banyak terlihat pada penggunaan material tertentu sebagai representasi dari kekayaan alam tropis, seperti kayu, batuan ekspos, dan material asli yang diekspos lainnya. Bangunan sekolah-sekolah swasta yang bermunculan sudah banyak pula yang mengadopsi arsitektur abad 21.

Bermunculan pula sekolah dengan konsep *green architecture*, di mana bentuk, tata letak ruangan, dan bukaan sudah memperhitungkan sirkulasi udara. Sekolah dengan desain ini banyak mengambil ruang terbuka untuk mengambil sirkulasi udara alami dan memanfaatkan kaca-kaca sebagai pencahayaan alami dari sinar matahari yang melimpah.



Direktorat PSD sudah menyusun konsep perencanaan arsitektural pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD tahun 2016. Konsep arsitektur abad 21 juga menjadi acuan kegiatan rehabilitasi ruang kelas, Ruang Kelas Baru (RKB), sanitasi dan perpustakaan.

Dari sisi fungsi, desain bangunan SD bercirikan abad 21, setidaknya mampu meningkatkan fungsi sekolah sebagai pusat bermasyarakat/bersosialisasi; meningkatkan keamanan siswa; dan fleksibel bagi guru dalam memberikan cara mengajar.

Secara filosofis, arsitektur abad 21 bangunan SD memperhatikan sejumlah unsur, meliputi:

- Adanya bentuk yang lebih dinamis
- Adanya ragam hias/ornamen menggunakan material lokal
- Adanya referensi sejarah/unsur pengingat budaya atau kearifan lokal
- Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

- Memanfaatkan seluruh ruang dapat digunakan sebagai sarana belajar
- Keamanan bangunan
- Keleluasaan guru dalam mengajar dan berfungsi sebagai fasilitator

Meningkatkan fungsi sekolah sebagai pusat bersosialisasi dan belajar didukung dengan keberadaan sudut baca, tempat mencuci tangan, dan tempat sampah. Mengapa perlu sudut baca di ruang kelas? Sudut baca berfungsi untuk memberikan tempat bagi siswa bersosialisasi dan membaca. Selain itu sudut baca juga memberikan pembelajaran bagi siswa untuk menyukai buku dan membaca.

Dari sisi keamanan, bangunan harus didukung struktur dan ketersediaan fasilitas bangunan yang dapat mengantisipasi adanya gangguan keamanan. Optimalisasi di antaranya dengan merancang struktur gedung yang kuat dan aman. Selain itu juga merancang keberadaan KM/WC dibuat terpisah, ada pagar, penempatan lokasi sekolah yang aman dari sebisngan, serta sekolah yang bersih sehat.



PROGRES TAKOLA TAHUN 2016-2017

Patut disyukuri, Takola SD pada tahun kedua dilaksanakan mendapat pengakuan dari pemerintah. Takola SD dipresentasikan menteri keuangan kepada Presiden Joko Widodo. Sistem tata kelola seperti Takola SD itu yang diinginkan pemerintah.

Berbagai penguatan telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SD kepada 611 SMK Jurusan Teknik Bangunan untuk meningkatkan kompetensi SMK, yakni melalui bimbingan teknis takola, perencanaan dan pengawasan pekerjaan. Bimtek juga memberikan tambahan wawasan mengenai berbagai peraturan dan kaidah teknis sebagai dasar pekerjaan fisik pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi, atau renovasi gedung SD.

Pada tahun 2016 lalu, rintisan peningkatan tata kelola yang lebih masif sudah dilakukan

dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota dan sekolah untuk menjangkau seluruh SD hingga wilayah 3T dan garis depan. Bantuan pemerintah pada peningkatan akses dan mutu bangunan SD menggunakan dana APBN pada Direktorat Pembinaan SD dilaksanakan dengan konsep swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat sekaligus untuk membangun tingkat kepedulian masyarakat terhadap sekolah.

Kegiatan ini memotivasi sekolah dan masyarakat untuk ikut aktif merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan pemeliharaan bangunan untuk dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) maupun Rencana Kerja Sekolah (RKS). Berikut adalah progres yang dicapai Direktorat PSD melalui sistem manajemen Takola SD.



REHABILITASI RUANG KELAS

Rehabilitasi ruang kelas hingga akhir tahun 2016 dilaksanakan di 1.508 SD dengan 4.477 ruang kelas rusak berat. Seluruh unsur yang terlibat telah melaksanakan pekerjaan secara akuntabel, transparan dan amanah dengan penguatan paradigma kejujuran.

Kriteria sekolah dasar yang layak menerima bantuan adalah yang memiliki ruang kelas dalam kondisi rusak berat dengan prosentase tingkat kerusakan di atas 45% hingga 65%.

Laporan mencatat, pihak sekolah dasar menginformasikan bahwa Tim Teknis dari SMK Teknik Bangunan memberikan nuansa positif dan membantu dalam mewujudkan hasil yang cukup berkualitas dengan tampilan yang artistik dan inovatif. Sentuhan fasad bangunan menggunakan beberapa ornamen material

lokal, permainan warna yang harmonis dan berkearifan lokal.

REVITALISASI SEKOLAH DASAR

Salah satu kebijakan Kemdikbud terkait dengan peningkatan akses adalah melalui revitalisasi sekolah dasar dengan cara melakukan perbaikan, penggantian, atau penambahan ruang kelas, sehingga dapat memberikan bantuan dalam peningkatan kualitas dan kapasitas sekolah dasar.

Hingga akhir 2016 lalu, pembangunan, rehabilitasi, atau revitalisasi yang sudah dilaksanakan harus memenuhi syarat teknis, yakni kuat, kokoh, aman dan nyaman. Selain itu juga unggul dalam aspek keindahan dan nuansa pendekatan abad ke-21.



RUANG KELAS BARU

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) diberlakukan pada sekolah dasar yang jumlah rombongan belajar (rombel) lebih besar dari jumlah ruang kelas yang tersedia. Sesuai dengan Dapodik, dan dilanjutkan validasi dan verifikasi yang dilakukan tim teknis dari SMK, kebutuhan RKB dalam rangka pemenuhan akses sekolah dasar ini cukup besar.

PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka,

tetapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu siswa dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar.

Pada pelaksanaan pembangunan perpustakaan sekolah dasar, dengan adanya bantuan teknis dari SMK, dihasilkan beberapa tampilan fasade yang cukup bervariasi dan inovatif. Sentuhan warna yang harmonis dan penambahan ornamen-ornamen memperkuat penampilan perpustakaan sehingga diharapkan dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan semangat membaca, belajar dan bersosialisasi sekaligus membangun jiwa yang tangguh.



SANITASI SEKOLAH

Anggaran tahun 2016 untuk sanitasi sekolah adalah Rp80.000.000 per pekerjaan. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan KM/WC dengan capaian sasaran sejumlah 353 SD. Dengan adanya program sanitasi ini sangat diharapkan dapat meningkatkan terwujudnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah dasar.

Hasil perencanaan dan pembangunan KM/WC dengan bantuan Tim Teknis dari SMK Jurusan Teknik Bangunan memberikan dinamika tampilan yang sangat artistik serta capaian hasil yang sangat menarik. Umumnya bangunan yang diwujudkan mempunyai konsep atau tema, sehingga penyajiannya lebih terintegrasi dalam konsep, konteks, serta dalam pengawasan dan pengendalian yang kooperatif.

4

**PROGRAM
SANITASI
SEKOLAH**



Sanitasi Sekolah: Memenuhi Standar Sarana Prasarana, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, serta Manajemen Sanitasi

Siswi SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, tak perlu waswas dan malu ketika sedang mendapat menstruasi di sekolah. Di sana sudah ada toilet jujur, jamban khusus buat anak perempuan yang menyediakan pembalut. Siswa yang memerlukannya tinggal mengambil dan membayar sesuai harga yang tertera.

SD Muhammadiyah 1 Surakarta sudah menjalankan program Sekolah Sehat pada tahun 2014. Tahun 2016 lalu, SD Muhammadiyah 1 Surakarta menjalankan program Sekolah Aman dan Menyenangkan yang diresmikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Sekolah Sehat yang digaungkan SD Muhammadiyah 1 Surakarta sudah didukung keberadaan sarana prasarana sanitasi yang bersih, terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan, plus keberadaan kantin sehat.

Keberadaan toilet terpisah bagi siswa putri, apalagi yang menyediakan pembalut, masih menjadi barang langka. Data Pokok

Pendidikan (Dapodik) 2016 mencatat baru 65 persen sekolah di Indonesia yang memiliki jamban terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan. Sayangnya, sarana prasarana sanitasi sekolah yang kondisi baik hanya ada 22 persen. Atau, hanya satu dari empat sekolah yang memiliki sanitasi layak.

Menjadi Pekerjaan Rumah tak ringan bagi sekolah, dan tentunya pemerintah kabupaten/kota sebagai penanggung jawab, untuk membenahi sanitasi sekolah, termasuk toilet khusus siswa perempuan yang menyediakan pembalut. Dampak ketiadaan toilet khusus siswi yang bersih ternyata besar sekali. Menurut riset Unicef pada tahun 2015, rasio anak perempuan yang memilih tidak masuk sekolah ketika menstruasi adalah 1:7. Artinya, ada satu orang anak perempuan di antara tujuh siswi yang sedang menstruasi memilih absen. Salah satu penyebabnya karena jamban sekolah yang tidak memadai dan belum menyediakan jamban khusus siswa perempuan.



Foto: Dok. SD Muhammadiyah 1 Solo

Direktorat PSD turut serta mendukung program Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM), khususnya di sekolah dasar. Maret 2017 lalu, Direktorat PSD menjadi pembicara pada Lokakarya Pertukaran Pembelajaran Manajemen Kebersihan Menstruasi. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, didukung Plan Internasional Indonesia dan Unicef.

"Kegiatan MKM merupakan tindak lanjut dari program Sanitasi Sekolah. Anak perempuan memerlukan sanitasi yang baik dalam hal ini jamban terpisah dilengkapi oleh cermin, tempat sampah, dan gantungan baju sebagai tempat berganti pembalut ketika mengalami menstruasi selama mengikut proses belajar di sekolah," kata Drs. Agung Triwahyunto, M.Pd., Kepala Seksi Kelembagaan, Subdirektorat

Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Direktorat PSD, yang hadir mewakili Direktur PSD pada kegiatan itu. Sebagai tindak lanjut, Dit. PSD juga berpartisipasi kembali pada Lokakarya Strategi Komunikasi MKM pada April 2017.

Manajemen Kebersihan Menstruasi juga bagian dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Praktik PHBS lain yang diharapkan sudah dibiasakan di sekolah meliputi cuci tangan memakai sabun secara rutin dan waktu-waktu tertentu (sebelum makan, setelah buang air besar, setelah bermain), minum air yang telah diolah (dimasak), menggunakan jamban untuk buang air besar dan kecil, membuang sampah pada tempatnya, dan menggosok gigi.



BUKAN SEBATAS SARANA PRASARANA SANITASI

PHBS sendiri hanya satu komponen dari bagian sanitasi. Namun selama ini banyak kalangan berpikir bahwa urusan sanitasi tak jauh-jauh dari toilet dan air bersih saja. Penilaian itu tentunya kurang tepat. “Komponen sanitasi itu setidaknya ada tiga, yakni sarana sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta manajemen sanitasi sekolah,” kata Wowon Widaryat, menambahkan.

Jamban atau toilet sekolah hanya merupakan komponen sarana sanitasi, yang didukung akses bersih yang tersedia sepanjang waktu. Sanitasi yang baik juga mensyaratkan adanya sistem pembuangan air limbah yang baik pula.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/

MI, SMP/MTs, dan SMA/MA memuat ketentuan bahwa bangunan sekolah yang memenuhi persyaratan kesehatan, di antaranya, memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan, meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.

Peraturan tersebut juga mengatur rasio ideal 1 unit jamban untuk siswa. Contohnya, rasio ideal untuk siswa SD adalah 1: 60 (siswa laki-laki) dan 1: 50 (siswa perempuan). Untuk siswa SMP, rasionya 1:40 (siswa laki-laki) dan 1:30 (siswa perempuan).

Rasio jamban sekolah secara nasional masih belum menggembirakan. Rasionya masih 1:90. Bahkan di sejumlah provinsi, keberadaan satu unit jamban sekolah rasionya untuk 150 siswa. Kondisi jauh dari ideal itu juga ada di sekolah-sekolah di Provinsi DKI Jakarta, dan Jawa Barat, tetangga dekat Jakarta.



Yang juga termasuk sarana sanitasi adalah keberadaan sumber air yang bersih di lingkungan sekolah, sarana untuk mencuci tangan dengan sabun, dan tempat pembuangan sampah.

Komponen kedua, yakni Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), merupakan kegiatan cuci tangan menggunakan sabun secara rutin dalam kondisi ketika tangan kotor. Misalnya sebelum dan sesudah makan, setelah buang air, dan setelah bermain. PHBS juga menyangkut kebiasaan warga sekolah dalam membuang sampah pada tempatnya, meminum air yang bersih dan matang, kebersihan menstruasi, menggunakan jamban untuk buang air besar dan kecil, dan menggosok gigi.

Komponen ketiga, yakni manajemen sanitasi sekolah, mengatur soal pembiayaan operasional sanitasi sekolah dan kegiatan PHBS yang harus dimasukkan dalam Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS). Manajemen sanitasi sekolah juga diharapkan mampu mendorong partisipasi komite sekolah.

Direktorat Pembinaan SD telah menyusun strategi pengembangan kelembagaan sanitasi sekolah, yakni meliputi pengembangan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pembiayaan, peningkatan kapasitas, dan monitoring evaluasi.

Pengembangan kebijakan meliputi sejumlah kegiatan, yakni: a) mengembangkan sanitasi sekolah menjadi bagian dari standar

pelayanan minimal bidang Pendidikan; b) mengembangkan sanitasi sekolah menjadi bagian dari sistem akreditasi sekolah; c) mengembangkan sanitasi sebagai bagian dari pendidikan karakter; d) merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan sanitasi sekolah yang terintegrasi dalam Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Kegiatan koordinasi yang akan dilakukan meliputi: a) meningkatkan sinergitas Tim Pembina UKS di setiap jenjang dan Tim Pelaksana UKS di setiap sekolah; b) melakukan pertemuan koordinasi lintas secara terjadwal dengan melibatkan semua pihak terkait; c) melaksanakan kegiatan pertukaran pengalaman antar sekolah dalam mengembangkan program sanitasi

Perencanaan sanitasi sekolah berkaitan dengan kegiatan meliputi: a) mendorong sanitasi sekolah menjadi bagian dari Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) melalui Tim pembina UKS; b) mengutamakan pendekatan partisipatif dan terpadu dalam penyusunan rencana sanitasi sekolah; c) memanfaatkan data dapodik sebagai referensi penyusunan dokumen perencanaan sanitasi sekolah.

Strategi pembiayaan sanitasi sekolah juga menjadi penting, yakni meliputi: a) mendorong pembiayaan sanitasi sekolah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b) memastikan biaya operasional dan pemeliharaan serta kegiatan PHBS tercantum dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); d) mencari sumber pembiayaan dari non-pemerintah: CSR, BUMN, LSM dan sebagainya; e) mengoptimalkan partisipasi komite sekolah

Strategi peningkatan kapasitas berkaitan dengan sejumlah kegiatan meliputi: a) peningkatan kapasitas tim pelaksana UKS sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan Program Sanitasi Sekolah; b) peningkatan kapasitas Tim Pembina UKS dalam mengembangkan perencanaan strategi sanitasi sekolah; c) pengembangan sanitasi sekolah melalui Sekolah Dasar Rujukan di tiap kabupaten/kota.

Monitoring dan evaluasi menjadi kegiatan penting pula, menyangkut kegiatan meliputi: a) memastikan menggunakan Dapodik untuk memonitor perkembangan indikator *Sustainable Development Goals* (SDG) yang terkait dengan sanitasi sekolah; b) memperkuat verifikasi data yang diinput dalam Dapodik; dan c) mengembangkan sistem evaluasi atau rating sanitasi sekolah yang menyesuaikan sistem Strata UKS.

Strategi pengembangan kelembagaan sanitasi sekolah yang dilaksanakan tahun 2016 ini menjadi titik awal dari Peta Pengembangan Sanitasi Sekolah dalam Kerangka UKS. Direktorat Pembinaan SD telah menyusun target jangka pendek (tahun 2019), jangka menengah (2024) dan target jangka panjang (2030).

"Yang ditargetkan untuk jangka pendek meliputi disepakatinya konsep sanitasi sekolah dalam kerangka UKS dan telah disahkan roadmap sanitasi sekolah yang kemudian dijadikan rujukan pengembangan sanitasi sekolah," kata Wowon.



Visi Program Sanitasi Sekolah adalah "Terwujudnya sanitasi sekolah yang berkualitas di akhir tahun 2030". Misi yang hendak dicapai meliputi: a) meningkatkan sarana dan prasarana; b) meningkatkan perilaku hidup sehat; c) meningkatkan manajemen sanitasi sekolah; dan d) meningkatkan lingkungan yang kondusif.

Wowon berharap kelak pada tahun 2019, 100% kabupaten/kota di Indonesia memiliki rencana strategi pengembangan sanitasi sekolah, dan Tim Pembina UKS.

Indikator yang harus tercapai pada jangka pendek ke depan adalah persentase sekolah dengan kondisi jamban sekolah yang baik mencapai 50%, persentase sekolah dengan jamban terpisah sudah 70%, rasio jamban murid dan guru laki-laki 1:80, dan rasio jamban murid dan guru perempuan mencapai 1:40.

Tahun 2016, Direktorat PSD memberikan bantuan pembangunan KM/WC sekolah kepada 353 sekolah. Tahun 2017, bantuan pembangunan KM/WC diberikan kepada

..... sekolah. Anggaran untuk sanitasi yang dikucurkan sebesar Rp80.000.000/sekolah penerima bantuan.

Paket bantuan pembangunan sanitasi sekolah itu tentunya masih jauh untuk menjangkau seluruh SD di negeri ini yang berjumlah tak kurang dari 148.300 sekolah. Namun setidaknya, melihat hasil sanitasi SD yang mendapat bantuan dari Dit. PSD, pemerintah kabupaten/kota akan tergerak untuk melanjutkan program sanitasi SD.

Perencanaan dan pembangunan KM/WC di sekolah dasar, kini melibatkan Tim Teknis dari SMK Jurusan Teknik Bangunan. Tak kurang dari 611 SMK menjadi bagian dari tim teknis tata kelola sekolah dasar. Hasilnya memang luar biasa: tampilan bangunan yang sangat artistik, dan capaian hasil yang sangat menarik. "Umumnya bangunan yang diwujudkan mempunyai konsep atau tema, sehingga penyajiannya lebih terintegrasi dalam konsep, konteks, serta dalam pengawasan dan pengendalian yang kooperatif," kata Agung.



MENJADI TUAN RUMAH WINS-ILE

Kemendikbud menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Pertukaran Pembelajaran Internasional Sanitasi Sekolah atau *Water, Sanitation, and Hygiene in Schools International Learning Exchange* (WinS-ILE) 2016, pada 14-18 November 2016. Acara yang dibuka Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad ini diikuti 150 peserta dari 16 negara.

Kegiatan tahunan kali kelima ini didukung oleh Unicef (*United Nations Children's Fund*), Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk anak-anak, dan GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*), perusahaan milik Pemerintah Jerman yang fokus pada pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumberdaya.

Peserta yang hadir adalah perwakilan organisasi internasional Unicef, Unesco, GIZ dan SEAMEO RECFON, perwakilan dari negara-negara, di antaranya, Filipina, Vanuato, Laos, Sri Lanka, Bangladesh, Kamboja, Afghanistan, Solomon, Myanmar, Bhutan, China, Papua

Nugini, Korea Selatan, Fiji, dan Pakistan. Peserta dari dalam negeri, di antaranya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Bappenas, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta UKS dari 34 provinsi dan kabupaten/kota.

Cikal bakal WinS berawal dari Program WASH (*Water, Sanitation, and Hygiene*) yang digagas Unicef untuk membantu penanganan sanitasi setelah bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. WASH Unicef kemudian dilanjutkan sampai sekarang dengan memperluas cakupan layanan ke daerah-daerah di luar Aceh. Pada 2009, bertepatan pada penyelenggaraan Konferensi Sanitasi Nasional II (2009), pemerintah mendeklarasikan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Sejak 2012, *WASH in School* (WinS) menjadi bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Pada 2015 lalu, WinS dikembangkan di empat kabupaten, yakni Barru, Biak, Alor dan Sumba Barat Daya.

ns-ILE

nitiation, and Hygiene) in Schools
ning Exchange
nber 2016



Aksi WinS yang disosialisasikan selama ini adalah meningkatkan kepedulian sekolah pada sanitasi dan penyehatan lingkungan sekolah, memobilisasi sumber daya untuk mengamankan kesehatan siswa, sekarang dan untuk generasi mendatang. Selain itu WinS juga melibatkan pemangku kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung program WinS; mewujudkan Program WinS yang menghasilkan lingkungan sekolah yang sehat; memantau program WinS untuk menjamin akuntabilitas dan mengevaluasi kemajuan; serta memberikan bukti pelaksanaan WinS yang memberikan dasar bagi para pemangku kepentingan pendidikan untuk mengalokasikan dana.

Program WinS juga mendukung program kesehatan sekolah yang sudah ada yakni Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). UKS dirintis pada tahun 1956 dan hingga kini tetap dilaksanakan di sekolah-sekolah. Program UKS melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama.

Kepala Perwakilan Unicef Indonesia, Gunilla Olsson mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah memperhatikan pentingnya lingkungan belajar yang sehat untuk anak-anak. "Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah mengawasi apakah semua anak Indonesia mendapatkan akses lingkungan belajar yang bersih dan aman, termasuk air, sanitasi, serta perilaku hidup bersih dan sehat," kata Olsson.

Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad, mengimbau sekolah-sekolah untuk menerapkan praktik baik dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. "Anak-anak harus diajari menjaga lingkungan sekolah yang sehat," katanya.

Hamid meminta sekolah kembali mengaktifkan tugas piket kebersihan, termasuk piket membersihkan toilet sekolah. Sekolah juga diimbau menyediakan tempat mencuci tangan bagi siswa yang lokasinya berada di luar toilet, dan mudah diakses siswa. Siswa juga harus diajarkan untuk sadar kebersihan dan kesehatan, dimulai dari hal yang kecil, misalnya mencuci tangan dengan baik dan benar.



Foto: Dipo Handoko

Penyediaan akses air yang bersih dan aman, dan fasilitas jamban atau toilet yang layak serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah merupakan bagian dari hak anak yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Selain itu, anak-anak juga berpotensi menjadi agen perubahan di lingkungannya, apabila di sekolah dibiasakan hidup bersih dan sehat.

"Kalau ini bisa dilatih dan dibiasakan di sekolah, maka akan punya dampak terhadap anak-anak, dan akhirnya berdampak terhadap masyarakat," tutur Hamid.

Sekolah-sekolah di beberapa daerah di Indonesia juga sudah memiliki unit kesehatan sekolah (UKS) yang sudah berjalan dengan baik. Ia berharap, sekolah-sekolah tersebut dapat menyebarkan praktik baik UKS, dan praktik baik lainnya dalam menjaga kebersihan sekolah kepada sekolah-sekolah lain di daerahnya.

Namun, ia juga tidak menampik ada beberapa masalah yang masih dihadapi sekolah-sekolah di Indonesia dalam

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa masalah tersebut antara lain masih terdapat sekolah dasar (SD) yang belum memiliki jamban atau toilet, terutama sekolah-sekolah inpres.

Hamid menargetkan, dalam tiga tahun ke depan, sekolah-sekolah tersebut harus sudah memiliki jamban atau toilet. Ia mengatakan, pembangunan fasilitas kebersihan tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain itu, tutur Hamid, sekolah-sekolah yang sudah memiliki jamban pun belum semuanya mendapatkan akses air yang bersih. "Ada sekolah yang sudah punya jamban, tapi kotor, tidak terurus dengan baik, saluran airnya juga tidak berjalan," katanya. Untuk mengatasi hal itu, Kemendikbud sudah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun sumur-sumur di sekolah



◀ Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM.,



MEMBANGUN KESADARAN BUKAN SEMATA FISIK

Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM., menyambut baik program sanitasi sekolah yang digalakkan Direktorat Pembinaan SD. Saat ini peta jalan (*road map*) pembangunan sanitasi secara nasional masih terpusat pada pembangunan di sektor rumah tangga. Bappenas memang berupaya menjadikan sanitasi sebagai suatu aspek yang harus dikaji di tingkat daerah.

Peta jalan sanitasi nasional yang dirancang Bappenas tidak mengabaikan sanitasi sekolah. Oleh karena itu, Bappenas mendorong pembangunan sanitasi sekolah dengan melibatkan Kemendikbud. "Ada Pokja AMPL atau Air Minum Penyehatan Lingkungan

yang membahas tentang sanitasi dan sampah. Kemdikbud ada di dalam Pokja AMPL," tutur wanita yang biasa disapa Virgi ini.

Bappenas mewajibkan daerah memiliki program Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), yang di dalamnya harus terdapat aspek sanitasi sekolah. Program SSK ini mengharuskan pemerintah kabupaten/kota memiliki pemetaan sanitasi sekolah yang jelas. Tujuannya untuk mempermudah mereka dalam mengetahui kondisi sanitasi sesuai dengan data yang dimiliki. Namun, terdapat beberapa kasus dalam SSK masih memiliki kualitas perencanaan yang jelek. "Mungkin dikarenakan data yang mereka miliki kurang lengkap," katanya.

Program SSK saat ini memang masih memprioritaskan sanitasi rumah tangga, belum menysasar ke sekolah-sekolah. Oleh

karena itu, Bappenas berharap bantuan pemerintah melalui Kemdikbud, seperti Dana Alokasi Khusus, Bantuan Operasional Sekolah, dan bantuan pemerintah lain, dapat menyasar pembangunan sanitasi untuk sekolah. "Bappenas terus berupaya melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sanitasi, baik ke Kemendikbud ataupun pemerintah daerah," kata Virgi.

Artinya, dalam rehabilitasi sekolah, tidak hanya fokus pada prasarana ruang kelas namun juga sanitasi. Dalam perencanaan pembangunan sekolah, Kemendikbud dapat berkolaborasi dengan berbagai pendanaan. "Jadi terintegrasi, kalau ada dana APBN, Dana Alokasi Khusus, dan dana lainnya seperti dari dana Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat, Kemendikbud, serta dana masyarakat. Sehingga tidak tumpang tindih dan tidak akan ada yang bolong," ujar Virgi menambahkan.

Pada tahun 2016, baru Kabupaten Alor, Barru, Biak, Sorong Selatan, dan Takalar yang memasukan pembangunan sanitasi sekolah dalam program SSK, walaupun hanya sebatas sekolah rintisan. "Kebanyakannya di daerah Indonesia timur. Kami dibantu Unicef yang kebanyakan melakukan riset di Indonesia timur," ujarnya. "Program ke depan, akan ada lima kabupaten/kota lagi yang memasukan sanitasi sekolah dalam program SSK, sehingga akan ada sepuluh uji coba perbaikan sanitasi sekolah yang terintegrasi dengan SKK."

Virgi juga menyoroti keberadaan sistem pembuangan limbah secara komunal atau kawasan yang mestinya terintegrasi dengan sekolah-sekolah. Saat ini memang baru 12 kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah dari kloset ataupun jamban yang dikelola dalam skala pusat atau kota. "Saat ini 80 persen masyarakat Indonesia masih memakai *septic tank*, dan jarang yang terhubung pada

instalasi pengolahan limbah skala besar," katanya. "Sekarang akses sanitasi kita sudah 70 persen untuk rumah tangga. Istilahnya hanya tinggal kerak-keraknya saja yang susah, seperti di pelosok yang memang agak sulit kita jangkau."

Sanitasi SD di wilayah 3T, termasuk SD Inpres, menurut Virgi, sangat sulit untuk menciptakan sistem pembuangan limbah sanitasi secara komunal. Sekolah bisa memiliki sistem pengelolaan limbah sendiri, atau dapat melakukan kerja sama dengan Kementerian PU-PR yang sudah melakukan pembangunan jaringan pembuangan limbah sanitasi secara komunal di beberapa daerah.

Bappenas lebih mengutamakan membangun kesadaran masyarakat dibanding membangun fisik. Kampanye PBHS merupakan cara yang sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tahu cara menggunakan, menjaga, dan memelihara sarana sanitasi. Masyarakat sendiri, termasuk warga sekolah harus dapat menjaga dengan baik sarana prasarana sanitasi agar tidak rusak atau terbengkalai.

"Tahapannya harus seperti itu. Tidak bisa kita membangun fisik jika masih belum ada perubahan perilaku. Selama sepuluh tahun terakhir, dengan pendekatan ini berhasil menaikkan akses sanitasi. Pada tahun 2006, akses sanitasi masih kurang dari 40 persen, dan sekarang udah 70 persen terjangkau layanan sanitasi," ujarnya.

Virgi juga menyinggung kondisi sanitasi sekolah yang buruk menjadi salah satu sebab siswa putus sekolah, khususnya bagi murid perempuan. "Karena merasa tidak nyaman, terutama jika sudah masa menstruasi, siswi putri memilih tidak masuk sekolah. Higienitas siswa perempuan itu berbeda dengan siswa laki-laki. Ketika merasa tidak nyaman seperti itu, bisa saja mereka tidak masuk atau berhenti bersekolah," ujarnya.

INFRASTRUKTUR FISIK HANYA MENDUKUNG

Ir. Rina Agustin Indriani, MURP, Sekretaris Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) juga mengapresiasi program Sanitasi Sekolah yang melibatkan SMK dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Namun tentunya Direktorat PSD tidak bisa seterusnya memberikan bantuan fisik pembangunan sanitasi sekolah.

Seperti halnya Kementerian PU-PR yang memiliki program pembangunan infrastruktur sanitasi perkotaan. "Program pembangunan fisik itu sifatnya mendukung. Yang akan berperan selanjutnya adalah pemerintah kabupaten/kota," kata Rina, yang didampingi Harsono, Kasubdit Pengelolaan Air Limbah, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.

Agar program berhasil, KemenPU-PR pun harus bersinergi dengan banyak pihak. Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat, berawal dari usulan ke Kementerian Keuangan untuk pendanaannya. "Kami mendapat DAK untuk sanitasi permukiman sebesar Rp1,2 triliun setahun. Begitu juga Kemendikbud bisa mengusulkan atau meminta ke Kementerian Keuangan, bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, misalnya dengan mewajibkan dalam APBD, ada anggaran wajib untuk sanitasi sekolah," kata Rina. "Selain itu, bisa juga mewajibkan dalam DAK Pendidikan untuk keperluan membangun sarana prasarana sanitasi, termasuk membangun sarana prasarana air bersih."

Dalam pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan sudah dibentuk pula pokja sanitasi di daerah. Anggota Pokja Sanitasi di daerah adalah semua SKPD, termasuk dinas pendidikan. Kalau ada rapat-rapat Pokja AMPL di pusat, seharusnya mengundang juga Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, SMK,



khususnya Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

KemenPU-PR siap bersinergi dengan Kemendikbud dalam mendukung program sanitasi sekolah. Misalnya dalam pembangunan standar toilet, KemenPU-PR dapat memberi bantuan bimbingan teknis. Program sanitasi sekolah juga bisa bersinergi dengan program-program di KemenPU-PR.

"Misalnya di kota-kota yang sudah menjadi partner program sanitasi PU. Kami sudah bangun infrastruktur sanitasi, maka sekolah bisa ikut masuk dalam program ini. Mumpung Pemerintah Kota/Kabupaten tersebut sudah peduli pada sanitasi," katanya.

Sekolah juga bisa terkoneksi dengan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sistem



komunal yang dibangun KemenPU-PR. Sebuah IPAL komunal bisa melayani 50-100 KK. Toilet sekolah dan sistem pembuangan limbah sekolah bisa menyambung ke IPAL kota. Begitu juga dengan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang digulirkan KemenPU-PR di desa-desa. Sekolah-sekolah di desa bisa terkoneksi dengan Pamsimas. "Kemendikbud akan lebih enak geraknya di kota-kota yang sudah dipicu program sanitasi kami," kata Rina.

Sekolah-sekolah yang berdekatan sebenarnya bisa pula membangun IPAL sistem komunal. Sekolah bisa menghitung berapa kebutuhan pengolahan limbah setiap harinya. "Rasio kebutuhan toilet sudah ada. Jangan sampai anak mengantri panjang saat ke toilet," katanya.

Rina juga mencermati bahwa, urusan sanitasi juga bukan semata membangun infrastruktur fisik. Sebab butuh perubahan wawasan dan perilaku masyarakat terhadap sanitasi. Sebelum memicu akan sanitasi, KemenPU-PR melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pertama, dengan mengundang masyarakat dalam diskusi tentang sanitasi. Kementerian Kesehatan juga diikutsertakan dalam membuka wawasan masyarakat untuk menyadari kebutuhan sanitasi dan PHBS. Kedua, masyarakat juga dilibatkan dalam perencanaan infrastruktur sanitasi. Ketiga, masyarakat ikut dalam pelaksanaan konstruksi.

"Tentunya bukan mengikutsertakan mereka menjadi pekerja. Namun bagi masyarakat yang lahan rumahnya dilewati pipa atau bagian IPAL warga masyarakat harus tahu dan memahami," katanya. Keempat, masyarakat juga harus diajak ikut memelihara infrastruktur sanitasi.

Pekerjaan mengubah perilaku masyarakat, menurut Rina, justru tak mudah. Ketika di rumah masyarakat sudah memahami tentang sanitasi dan PHBS, anak-anak ketika berada di sekolah mestinya juga mendapat layanan toilet dan sanitasi yang memadai, bersih dan higienis. "Anak mestinya sejak kecil harus punya kesan bagus terhadap toilet. Karena hingga tua kelak dia akan terus berhubungan dengan toilet. Anak juga harus diajari untuk memelihara toilet. Apakah di rumah, di sekolah, di rumah orang, atau di fasilitas umum, anak juga harus bertanggung jawab, bijak menggunakan toilet," katanya.

BUTUH ROADMAP SANITASI SEKOLAH

Kepedulian pemerintah terhadap sanitasi sejatinya sudah sangat diapresiasi oleh Aidan Cronin, Ph.D, Kepala Program *Water, Sanitation, and Hygiene*, Unicef Indonesia.



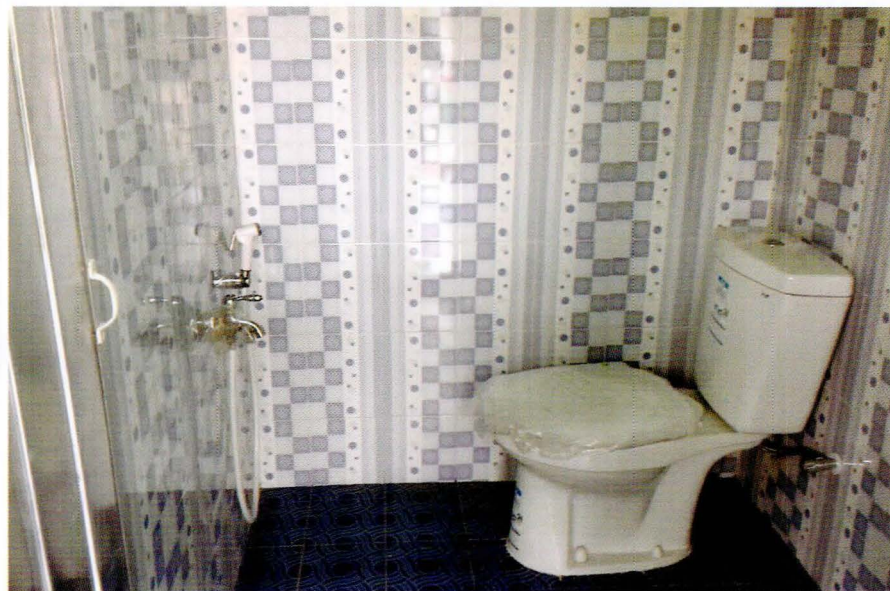
Indonesia dinilai sudah menjadi negara yang mampu untuk membangun infrastruktur sanitasi. Keberadaan dana bantuan pemerintah untuk sekolah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, adalah salah satu terobosan bagus untuk pendanaan sekolah, yang tak dimiliki negara lain.

"Indonesia juga sudah ada memiliki standar sarana prasarana sekolah, di dalamnya sudah ada sanitasi. Dapodik, yang diolah Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menampilkan data sanitasi sekolah, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota sudah mengetahui rasio sanitasi sekolah cukup tidak. Tinggal mendorong kabupaten/kota mengatasi yang masuk kurang," kata Aidan.

Unicef berharap Kemendikbud juga memiliki peta jalan (*road map*) sanitasi seluruh sekolah. Harapannya pada tahun 2030, semua

sekolah sudah memiliki sanitasi yang baik. "Setidaknya ada tiga hal pokok, yakni pertama semua siswa dapat menikmati sanitasi. Jamban harus terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan, sesuai standar rasio dan jamban berfungsi dengan baik. Kedua, adalah akses sekolah terhadap air bersih. Ketiga, adanya sarana mencuci tangan dengan sabun di semua sekolah," kata Aidan.

Menurut Aidan, sudah waktunya Kemendikbud mengubah paradigma dan pendekatan tentang sanitasi sekolah. Begitu juga sekolah harus mengubah mindset tentang sanitasi. Pertama, sanitasi tidak hanya mencakup kebutuhan infrastruktur fisik sanitasi. Kedua, harus menggalakkan promosi tentang kesehatan. Ketiga, memastikan sekolah memiliki dana operasional dan pemeliharaan sanitasi.



"Saat ini Kemendikbud masih fokus pada infrastruktur fisik. Untuk mengubah paradigma, Kemendikbud tidak sendirian. Kemendikbud harus membuka tangan karena banyak yang mau membantu. Ada kementerian PU, Bappenas, bahkan masyarakat juga punya kapasitas untuk mendukung. Ada pula dana desa. Ada pula Komite Sekolah yang bisa dioptimalkan untuk turut memastikan ada komponen perawatan sanitasi," kata Aidan.

Unicef berharap semua sekolah punya rasa kepemilikan terhadap sanitasi. Persoalannya bukan semata penyediaan sanitasi. "Kemendikbud bisa menyediakan ribuan sanitasi, namun bila dua bulan rusak, maka perlu rasa kepemilikan agar program bisa berkelanjutan," katanya. Unicef telah berupaya menyentuh siswa sebagai agen perubahan. Perubahan perilaku anak akan mampu mentransmisi kepada orangtua mereka. Dampaknya ke masyarakat akan lebih luas.

Unicef menilai persoalan sanitasi sekolah semestinya lebih mudah daripada persoalan sanitasi masyarakat. Sebab entitas sekolah lebih jelas, tidak seperti halnya masyarakat di permukiman. "Tinggal kapasitas pemerintah pusat untuk menyelesaikannya. Sanitasi sekolah bukan tanggung jawab pemerintah pusat sendiri, namun bisa mengajak pemerintah daerah, dan komponen lain untuk menyelesaikannya," kata Aidan.

SANITASI SEKOLAH BAGIAN DARI PROGRAM SANITASI KOTA

Kota Banda Aceh, bersama 9 kabupaten/kota lainnya berhasil meraih penghargaan Sanipura Award 2016. Sanipura Award diberikan kepada daerah yang dinilai sukses dalam memberikan inovasi berkelanjutan dalam penanganan sanitasi. Penghargaan

KONFERENSI CITY SANITATION SUMMIT



◀ Walikota Bandung
Ridwan Kamil S.T M.U.D.

diberikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono, pada rangkaian kegiatan Konferensi City Sanitation Summit XVI, di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, 24 November 2016.

Kabupaten/Kota lainnya peraih Sanipura Award 2016 adalah Kota Bogor, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sleman, Kota Makassar, Kota Balikpapan, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ngawi, dan Kota Surabaya. Dalam sambutannya, Puan menegaskan bahwa sanitasi harus mencapai target universal. Target tersebut adalah kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan dasar air minum dan sanitasi bagi seluruh warga negara.

“Seratus persen air minum, nol persen permukiman kumuh dan 100 persen sanitasi di tahun 2019. Untuk itu perlu dukungan dan usaha semua pihak sehingga cita-cita untuk menyejahterakan seluruh masyarakat dapat tercapai,” kata Puan di hadapan peserta konferensi yang diikuti 55 bupati dan wali kota dari 467 anggota Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) serta kalangan pegiat air minum dan sanitasi.

Menjadi tantangan sangat berat untuk mewujudkan akses universal sanitasi pada akhir tahun 2019. Pasalnya, hingga 2016 ini akses sanitasi baru mencapai kira-kira 66%. Tren peningkatan akses sanitasi hanya mencapai 1% per tahun. Dibutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak untuk mencapai target akses universal sanitasi.

Data mencatat sekira 95 juta penduduk atau 37% belum memiliki akses terhadap air minum layak dan sekira 120 juta penduduk atau 47% belum memiliki sanitasi layak. Permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, juga pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Gerakan hidup sehat ini telah didukung 20 kementerian dan lembaga yang bersinergi. Harapannya bukan hanya sanitasinya saja juga air bersihnya juga mengalir karena kebutuhan air selayaknya sanitasi merupakan kebutuhan dasar dan pola hidup yang sehat,” kata Puan.

Konferensi City Sanitation Summit (CSS) merupakan puncak pertemuan tahunan Akkopsi untuk mendukung pencapaian program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yakni mewujudkan 100% akses sanitasi di Indonesia pada tahun 2019. Akkopsi menjadi forum pertukaran pengalaman berbagai kabupaten/kota yang peduli dan giat dalam pembangunan sanitasi, membangun kemitraan antar para anggota, mendorong peningkatan upaya advokasi, promosi dan kampanye pembangunan sanitasi di Indonesia dan mensosialisasikan kesadaran tentang pentingnya perencanaan strategis dalam optimalisasi investasi di penyediaan layanan sektor sanitasi.

Dalam konferensi tersebut diisi dengan dua sesi diskusi panel yang menghadirkan pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan beberapa kepala daerah dengan tema “*Pembelajaran (Sharing Knowledge & Experiences) Kepala Daerah*”.

Panel dimulai penyampaian materi mengenai kemampuan pelaksanaan fungsi daerah dan kemampuan daerah memobilisasi sumber-sumber pendanaan. Harapannya,

setiap kabupaten/kota dapat mendukung percepatan pencapaian target universal akses sanitasi dan air minum Indonesia 2019. Mereka dapat mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber dana yang tersedia di kabupaten/kota.

Walikota Bandung Ridwan Kamil berbagi pengalaman dengan keberhasilan Kota Bandung meningkatkan kesadaran sanitasi warganya. “Pertama saya secara perlahan berusaha mengubah perilaku pola dan kesadaran hidup sehat warga dengan menggunakan contoh. Kedua, dengan mendekati ulama untuk menyampaikan tema-tema dakwah tentang kebersihan. Ketiga, berinvestasi sanitasi baik melalui dana pemerintah maupun non APBD,” kata Kang Emil, sapaan akrabnya.

Ridwan juga berharap para mahasiswa yang juga hadir pada konferensi dapat berperan serta. “Pertama tidak mungkin perubahan akan datang lebih cepat jika mengandalkan walikota atau pemimpin saja, namun harus bahu membahu bersama. Kedua, jadilah pemuda yang pencari solusi, maka tolonglah kami para walikota, bupati, bersama-sama membangun Indonesia,” katanya.

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mendapat kehormatan pula tampil dalam diskusi panel. Pejabat yang mewakili Direktur Pembinaan SD adalah Agung Tri Wahyunto M.Pd, Kepala Seksi Kelembagaan, Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2016 juga mencatat bahwa hanya 65 persen sekolah di Indonesia yang memiliki jamban terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan. Fasilitas sanitasi sekolah yang dilaporkan dalam kondisi baik hanya ada 22 persen. Atau, hanya satu dari empat sekolah yang memiliki sanitasi sekolah layak.

Di sekolah dasar, tak sedikit jumlahnya yang tidak memiliki jaringan air bersih, dan sanitasi yang tidak memadai, sudah rusak sehingga

siswa enggan menggunakannya. Kondisinya berbeda jauh dengan toilet kepala sekolah dan guru yang relatif lebih bersih, layak, dan terkunci.

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar kian gencar melaksanakan Program Sanitasi Sekolah. Ada 360 paket bantuan pembangunan sanitasi sekolah senilai Rp 80 juta/paket yang diberikan di tahun anggaran 2016, yang akan dilanjutkan dengan penyaluran sejumlah 316 paket untuk tahun 2017. Dibandingkan dengan jumlah SD yang tidak kurang dari 148.000 sekolah, paket bantuan pembangunan sanitasi sekolah itu masih jauh untuk menjangkau seluruh SD di negeri ini. Sifat bantuan ini stimulan yang diharapkan akan dapat mendorong kabupaten/kota untuk lebih peduli dengan program sanitasi sekolah.

Program Sanitasi Sekolah meliputi pembangunan jaringan air bersih, toilet, tempat mencuci tangan, dan saluran drainase, yang baik untuk menumbuhkembangkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik. Artinya, entri tentang "sanitasi sekolah" bukan semata pada toilet atau jamban, yang selama ini menjadi kerangka berpikir kebanyakan orang, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, bersih dan sehat menjadi bagian karakter peserta didik.

Laporan Unicef pada pelaksanaan Program *Water, Sanitation, and Hygiene in School* (WinS) menunjukkan bahwa Program Sanitasi Sekolah dapat mempengaruhi orangtua siswa untuk memiliki jamban di rumah karena terpicu pendidikan higienis yang diajarkan guru di sekolah. Kampanye dan advokasi

perubahan perilaku higiene siswa sekolah dapat dijadikan pintu masuk bagi perubahan perilaku bagi masyarakat pada umumnya.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah siswa, sejatinya memungkinkan peruntukannya untuk pemeliharaan sanitasi sekolah dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), yang juga menjadi salah satu sarpras yang wajib dipenuhi pada Permendiknas Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah. Program UKS melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Selama ini kita mengenal Trias UKS, yang meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sehat.

Sejak tahun 2012, dalam forum yang digelar Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Program Sanitasi Sekolah sebenarnya sudah disepakati sebagai bagian dari Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Urusan pendidikan dasar sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Bupati/Walikota selaku ketua Pembina UKS di kabupaten/kota memiliki peluang dan peran yang besar untuk untuk membangun sanitasi sekolah yang layak, bersih dan sehat sebagai bagian dari program sanitasi kota.

Konferensi juga merangkum berbagai terobosan yang telah dilakukan dalam pembangunan sanitasi. Di antaranya terobosan dengan pendekatan penggunaan dana infaq, sedekah, dan wakaf bagi pembangunan sanitasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa infaq, sedekah dan wakaf dapat juga dimanfaatkan untuk pembangunan sanitasi,



terutama untuk masyarakat tidak mampu. Terobosan lainnya, mencanangkan gerakan mikro kredit untuk pembangunan sanitasi oleh masyarakat tidak mampu.

Dari sisi kesehatan, sanitasi telah dinyatakan sebagai bentuk konkret gerakan preventif kesehatan. Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai pendanaan sanitasi yang dapat menggunakan dana preventif kesehatan. Selain itu, juga telah dihasilkan kebijakan keluarga sehat, yang dengan jelas menyebutkan sanitasi menjadi salah satu kriterianya. Kebijakan ini masih juga diikuti dengan kebijakan pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pembangunan air minum dan sanitasi. Selain itu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan non-fisik dapat pula dimanfaatkan untuk upaya pemecuan sanitasi di daerah.

Dari sisi penyediaan infrastruktur, Kementerian PU-PR berkomitmen dalam pembangunan Tempat Pembuangan Akhir

(TPA) karena banyak kabupaten/kota yang belum mempunyai TPA yang memenuhi persyaratan. Selain itu Kementerian PU-PR juga berkomitmen membangun instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) untuk mendukung pembangunan akses air limbah di kabupaten/kota.

Konferensi juga menghasilkan Deklarasi Banda Aceh 2016 yang berisi tentang tekad kepala daerah anggota Akkopsi untuk mencapai *universal access* sanitasi di kabupaten/kota masing-masing. Seluruh anggota Akkopsi diharapkan memiliki komitmen menjalankan 6 butir deklarasi di daerah masing-masing dengan penuh disiplin dan kesadaran tinggi sebagai pengejawantahan layanan dasar yang sudah menjadi kewajiban kabupaten/kota kepada seluruh masyarakatnya.

Praktik sanitasi sekolah yang berhasil belum sepenuhnya menggembirakan. Namun, setidaknya, ada sejumlah kabupaten/kota yang sudah peduli pada sanitasi sekolah. Di

antaranya, Kabupaten Tangerang, Banten yang dipandang berhasil menerapkan sanitasi di sekolah. Praktik baik sanitasi sekolah itu dipelajari bersama dalam sebuah forum pembelajaran bagi kepala daerah bertajuk Advocacy Horizontal Learning (AHL) yang diselenggarakan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi).

Kegiatan yang diselenggarakan Akkopsi dan Unicef ini dilaksanakan di Hotel Atria, Tangerang, 14 Nivember lalu. AHL diadakan untuk memperkenalkan roadmap/peta jalan sanitasi sekolah kepada seluruh peserta.

"Selain itu, Kabupaten Tangerang dapat memberikan pembelajaran pelaksanaan sanitasi sekolah yang baik. Daerah-daerah lain dapat melakukan sharing atau berbagi pembelajaran terhadap pelaksanaan sanitasi sekolah di masing-masing daerah," kata Capt. H. Josrizal Zain, SE, MM, Direktur Esksekutif Akkopsi. AHL juga untuk menjaring komitmen terhadap sanitasi sekolah dari kepala-kepada daerah anggota Akkopsi.

Selain Kabupaten Tangerang, program sanitasi sekolah yang sudah mendapat perhatian pemerintah kabupaten, di antaranya adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Luwu Utara, dan Kota Bandung. AHL juga mendorong adanya komitmen bersama atau deklarasi antarkepala daerah terhadap sanitasi sekolah.

Direktorat Pembinaan SD dan UNICEF telah merampungkan peta jalan (road map) sanitasi sekolah yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam melakukan kegiatan sanitasi di sekolah. "Selain itu, sebagai komitmen dukungan terhadap capaian universal akses di tahun 2019, sanitasi sekolah seyogyanya tidak dapat dipisahkan dalam strategi sanitasi kabupaten/kota," kata Pak Yos, sapaan akrab Josrizal.

Program Water Sanitation Hygiene (WaSH) UNICEF berhasil menyusun panduan strategi sanitasi sekolah yang komprehensif. Panduan tersebut bertujuan untuk memandu kabupaten/kota menyiapkan dokumen perencanaan strategis sanitasi sekolah. Sebagai piloting sanitasi sekolah telah terpilih daerah-daerah meliputi: Kabupaten Flores Timur, Kota Samarinda, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Garut.

AHL merupakan kegiatan advokasi rutin yang diadakan Akkopsi kepada kepala daerah sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dan pengetahuan antarpelaku kunci agar dapat saling menginspirasi. Pada AHL 2017 didukung UNICEF mengangkat tema sanitasi sekolah dengan mengangkat pengalaman dan praktik baik (*best practice*) Kabupaten Tangerang dalam mengawal sanitasi sekolah. ●

5

**PROGAS:
MENINGKATKAN
GIZI SISWA
SEKOLAH DASAR**



Meningkatkan Gizi Anak Sekolah Dasar



Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, intelektualitas dan produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya menyusun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



Hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang menetapkan pembangunan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemenuhan gizi, perilaku hidup bersih dan sehat dapat dicapai melalui pendidikan gizi, perbaikan konsumsi pangan dan pendidikan karakter.

Wowon Widaryat, M.Si, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, mengatakan, bahwa pada tahun 1997-2000 telah dilaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS). "Tetapi program ini tidak berlanjut di seluruh daerah sebagaimana yang diharapkan, hanya beberapa daerah yang melaksanakan program PMT-AS secara mandiri. Pada tahun 2010 dan 2011 program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah berubah menjadi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dalam bentuk kudapan yang dilaksanakan di 27 kabupaten pada 27 provinsi," katanya.



Wowon Widaryat, M.Si.,
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Foto: Mukti Ali

Wowon menambahkan, hasil kajian program PMT-AS mengungkapkan bahwa: 1) makanan yang disajikan berupa kudapan (*snack*) yang sarat akan karbohidrat, tetapi masih kurang komponen sayur dan buah (sebagai sumber vitamin mineral), 2) Makanan tambahan diberikan setelah jam 9 pagi untuk melengkapi sarapan, namun pelaksanaannya menjadi pengganti sarapan, 3) belum melibatkan kantin sekolah sehingga dana operasional lebih besar (perlu pengadaan peralatan masak bagi Tim Penggerak PKK atau Komite Sekolah sebagai pengelola makanan).

Laporan Riskesdas menunjukkan masih tingginya persentase anak usia 5-12 tahun yang kurus, pendek (*stunting*), gemuk dan anemia yaitumasing-masing 11,2%, 30,7%, 18,8% dan 26,4% (Riskesdas 2013). Meskipun persentaseanak sekolah dasar yang pendek di Indonesia menurun dari 35,8% (Riskesdas

2010) menjadi 30,7% (Riskesdas 2013), namun persentase tersebut masih tergolong sangat tinggi dan merupakan masalah gizi masyarakat.Hasil review terhadap berbagai penelitian bidang gizi dan kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa pada anak-anak usia 4-12 tahun mengalami defisit asupan energi sebesar 35% dan defisit asupan protein sebesar 20% dari AKG. Selain itu 20% anak-anak memiliki kebiasaan makan kurang dari 3 kali sehari dan 20% anak-anak berangkat ke sekolah tidak sarapan (2012). Selanjutnya sebesar 89.3% penduduk diatas usia 10 tahun tidak cukup makan sayur dan buah dan hanya 47.2% yang melakukan cuci tangan dengan benar sebelum makan (Riskesdas 2013).

Penelitian lain menunjukkan bahwa persentase kebiasaan tidak sarapan pada anak-anak bervariasi antara 17% terjadi di Jakarta hingga 59% terjadi di Yogyakarta



Foto: Mukti Ali

(Hardinsyah & Aries 2012). Selanjutnya sebanyak 90.2% anak usia sekolah mengonsumsi sarapan dengan mutu gizi yang rendah (Perdana dan Hardinsyah 2013). Sementara itu, telah terbukti bahwa sarapan memiliki berbagai manfaat diantaranya adalah 1) meningkatkan fokus atau konsentrasi belajar; 2) meningkatkan ketahanan fisik dan daya tahan tubuh; 3) meningkatkan status gizi dan kesehatan; 4) mengurangi risiko kegemukan; 5) mencegah jajan sembarang; dan 6) melatih disiplin dan kebersamaan.

Dengan mempertimbangkan besarnya manfaat sarapan bagi anak didik maka diperlukan suatu Program Pembinaan Gizi Anak Sekolah yang lebih komprehensif yang menggabungkan pemberian sarapan sehat serta pendidikan karakter dan giziseimbang agar sarapan sehat menjadi suatu kebiasaan bagi siswa sebelum mengikuti kegiatan belajar

di sekolah dalam rangka mewujudkan siswa sehat berprestasi sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini didukung Permenkes No. 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang yang menyatakan mengenai pentingnya sarapan yang tertuang dalam Pesan ke-6 dari 10 Pesan Gizi Seimbang.

"Guna menjawab berbagai permasalahan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2016 meluncurkan sebuah Program Gizi Anak Sekolah (Progas). Pengertian Program Gizi Anak Sekolah adalah program perbaikan gizi anak sekolah melalui pendidikan gizi, peningkatan asupan gizi, pendidikan karakter, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta kemampuan belajar dalam upaya membentuk insan Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, tangguh dan berdaya saing," jelas Wowon.



Foto-foto: Rauhanda Riyantama

LOKASI SASARAN PROGAS

Pada awal diluncurkan tahun 2016, PROGAS menasar empat kabupaten yang menjadi program percontohan nasional. Empat kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, ketiganya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Serta di Provinsi Banten, tepatnya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Sesuai dengan Peta Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan dan Peta Penduduk yang Hidup dibawah Garis Kemiskinan di wilayah Indonesia yang bersumber dari hasil kajian Dewan Ketahanan Pangan dan WFP Tahun

2015, peringkat kerentanan No.1 adalah wilayah Papua dan peringkat kerentanan No.2 adalah wilayah NTT antara lain Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. "Pada rintisan pelaksanaan PROGAS ini, NTT merupakan wilayah pertama yang menjadi sasaran mengingat sebelumnya beberapa wilayah di Papua dan NTT telah mendapat bantuan sejenis berupa PMT-AS dari WFP dan saat ini WFP masih melakukan keberlanjutan program pemberian sarapan di Papua. Dengan demikian untuk melakukan keberlanjutan di NTT, Pemerintah menilai perlu untuk melaksanakan PROGAS di wilayah tersebut," tegas Wowon.

Berdasarkan data lainnya, Wowon menambahkan, pilihan sasaran tersebut diperkuat dengan dengan hasil kajian statistik taun 2015 bahwa jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur hingga Maret 2015, 1.159,84 ribu orang (22,61 persen) atau meningkat 168 ribu orang dibandingkan pada September 2014 hanya berjumlah 991,88 ribu orang atau 19.60 persen dari total penduduk.

Selain hal itu, di daerah perkotaan, indeks harga pada sub-kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya mengalami kenaikan sebesar 18,12 persen Tentunya dengan demikian angka kemiskinan di daerah perdesaan dan perkotaan di wilayah NTT



Drs. Bambang Hadi Waluya, M.Pd.,
Kasubdit Sarana dan Prasarana

Foto: Mukti Ali

merambat naik dan hal ini dinilai penting untuk memberikan bantuan PROGAS kepada anak-anak Sekolah Dasar di ke 3 wilayah NTT tersebut.

Pada tahun 2017 atau tahun kedua, PROGAS melebarkan jangkauan menjadi 11 kabupaten rawan pangan. Kesebelas kabupaten tersebut berada di Provinsi Banten, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Jika tahun 2016 menasar 38.448 siswa, tahun 2017 meningkat menjadi 100.000 siswa. "Tahun 2018, program ini akan menjadi program pemerintah di tingkat kepresidenan. Dengan demikian, jangkauan kabupaten penerima serta siswa yang menjadi sasaran akan menjadi lebih luas dan lebih banyak lagi," jelas Drs. Bambang Hadi Waluya, M.Pd, Kasubdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

TUJUAN PROGAS

Tujuan umunya adalah untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, asupan

gizi serta kemampuan belajar dalam upaya membentuk karakter insan Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, tangguh dan berdaya saing.

Terdapat pula beberapa tujuan khusus, yakni, untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik Sekolah Dasar melalui penyediaan konsumsi pangan dengan prinsip gizi seimbang, meningkatkan ketahanan jasmani peserta didik Sekolah Dasar, meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik gizi seimbang peserta didik Sekolah Dasar, serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat peserta didik Sekolah Dasar. "Tujuan khusus lainnya, adalah untuk meningkatnya kehadiran dan minat belajar peserta didik sekolah dasar dalam kegiatan pembelajaran, meningkatkan kecintaan peserta didik Sekolah Dasar terhadap pangan lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan menyediakan pangan lokal," lanjut Bambang.

Pada tahun 2017 atau tahun kedua, PROGAS melebarkan jangkauan menjadi 11 kabupaten. Kesebelas kabupaten tersebut berada di Provinsi Banten, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Jika tahun 2016 menyasar 38.448 siswa, tahun 2017 meningkat menjadi 100.000 siswa. "Tahun 2018, program ini akan menjadi program pemerintah di tingkat kepresidenan. Dengan demikian, jangkauan kabupaten penerima serta siswa yang menjadi sasaran akan menjadi lebih luas dan lebih banyak lagi," lanjut Bambang HW.

PELAKSANAAN PROGAS

Bantuan PROGAS dilaksanakan dengan rencana penyediaan sarapan minimal 3x setiap minggu, dengan jumlah HMA (Hari Makan Anak) minimal sebanyak 108 kali dalam satu tahun ajaran. Hasil yang diharapkan di
a n t a r a n y a
adalah:

- Meningkatkan asupan gizi peserta didik Sekolah Dasar melalui penyediaan konsumsi pangan dengan prinsip gizi seimbang;
- Meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik gizi seimbang peserta didik Sekolah Dasar;
- Meningkatnya ketahanan fisik peserta didik sekolah dasar dalam mengikuti kegiatan pembelajaran;
- Meningkatkan ketahanan jasmani peserta didik Sekolah Dasar;
- Meningkatkan kecintaan peserta didik Sekolah Dasar terhadap pangan lokal;
- Meningkatnya jumlah peserta didik yang menyukai makanan lokal, yang bersumber dari bahan pangan lokal untuk mewujudkan gerakan aku cinta makanan Indonesia;
- Meningkatnya perilaku hidup bersih dan kebiasaan makan yang sehat;
- Meningkatnya kehadiran dan minat belajar peserta didik sekolah dasar dalam kegiatan pembelajaran;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan keanekaragaman pangan lokal sebagai bahan baku kudapan PROGAS;



- Meningkatnya penggunaan pangan lokal yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat.

KEGIATAN UTAMA PROGAS

PROGAS terdiri dari tiga rangkaian kegiatan utama, yaitu pendidikan gizi, penyediaan asupan gizi, dan pendidikan karakter yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Gizi

Pendidikan gizi diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik Sekolah Dasar agar mampu menerapkan empat pilar Gizi Seimbang, yaitu:

- Setiap hari mengonsumsi aneka ragam pangan yang cukup, baik jenis jumlah maupun mutu, sehingga dapat memenuhi zat gizi sesuai kebutuhan tubuh
- Berperilaku hidup bersih sehingga terbebas dari penyakit infeksi dan penyakit kecacangan
- Beraktivitas fisik dan olah raga yang cukup sehingga peserta didik lebih sehat dan bugar
- Memantau berat badan pada awal dan akhir semester yang akan dijadikan dasar pemantauan status gizi.
- Pendidikan gizi kepada peserta didik dilakukan dengan cara:

- Pendidikan gizi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pemberian sarapan (15-30 menit)
- Materi pendidikan gizi diintegrasikan dengan mata ajaran yang terkait
- Memasukkan pesan-pesan terkait pendidikan gizi dapat melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler (pramuka, olahraga, seni, dokter kecil, inspektur cilik).
- Menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam bentuk cetak dan elektronik, seperti: poster, leaflet, *games*, lagu, *jingle*, video, dan lain-lain.

b. Peningkatan Asupan Gizi

Peningkatan asupan gizi diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik Sekolah Dasar melalui penyediaan sarapan yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Contoh bahan pangan yang dapat digunakan sebagai menu sarapan meliputi berbagai bahan pangan lokal, dan bahan pangan harus segar dan bebas dari cemaran.

Komposisi bahan pangan terdiri dari :

- Pangan sumber karbohidrat, mencakup padi-padian yang terdiri dari beras, jagung dan sorgum. Umbi-umbian terdiri dari ubi kayu/singkong, ubi jalar, talas, kentang, ganyong, garut dan lain-lain, bahan pokok olahan yang terdiri dari nasi jagung, bahun jagung, dan lain-

lain. Bahan tepung-tepungan terdiri dari tepung jagung, tepung beras, tepung singkong, tepung ubi jalar dan lain-lain, serta bahan sumber karbohidrat lain seperti labu kuning, pisang, sukun, sagu dan lain-lain.

- Pangan sumber protein hewani dan nabati. Yang termasuk hewani di antaranya ada telur, ikan, unggas, daging, susu. Sedangkan yang masuk nabati meliputi kacang nasi, kacang merah, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, tahu, tempe, dan lain-lain.
- Pangan sumber vitamin dan mineral. Beberapa bahan pangan yang kaya mineral di antaranya yang termasuk sayuran, sawi, kol, tomat, daun kelor, daun dan bunga pepaya, daun ubi, kangkung, bayam, kacang panjang, buncis, terong, mentimun, dan sayuran lainnya. Ada juga berupa buah-buahan, meliputi pisang, jeruk, pepaya, jambu biji, semangka, mangga, alpukat, srikaya, salak dan lain-lain.
- Untuk tidak lupa, memenuhi dengan kecukupan air yang memenuhi persyaratan air minum.

Contoh tersebut dapat dimodifikasi oleh Sekolah Penerima Bantuan atas



bimbingan Tim Pembina Desa/Kelurahan menggunakan makanan yang berbasis lokal.

c. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam PROGAS bertujuan menanamkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat pada peserta didik dan warga sekolah dalam upaya mendukung terwujudnya karakter Insan Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, tangguh dan berdaya saing. Secara khusus, pendidikan karakter diberikan kepada peserta didik Sekolah



Dasar dalam rangka menanamkan budaya kejujuran (tidak mengambil hak orang lain), menanamkan budaya mencintai tanah air (mencintai produk lokal, menghargai petani, peternak dan nelayan), serta menanamkan budaya disiplin (tidak terlambat, antri, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan).

"Selain itu, juga untuk menanamkan budaya bersyukur atau berdoa sebelum dan sesudah makan, menerima dan menyukai makanan yang disajikan), mengasah kepemimpinan bisa dilaksanakan saat memimpin doa, dan lain sebagainya, dan mengasah kepekaan, toleransi dan empati misalnya tidak berebut makanan, membantu teman dan guru. Juga untuk mengasah rasa tanggung jawab misalnya menghabiskan porsi



makanan yang diterima, menanamkan budaya kerja sama bisa dicontohkan saat membantu pembagian makanan dan merapikan kembali peralatan makan, juga untuk menanamkan kebersamaan misalnya melalui makan bersama), serta meningkatkan budaya tenggang rasa misalnya berbagi dengan temannya," terang Bambang HW.

Materi pendidikan karakter, lanjut Bambang HW, yang akan diberikan selama PROGAS diantaranya, pentingnya mencintai produk lokal dan membiasakan memilih makanan lokal/

tradisional Indonesia, pembiasaan budaya berdoa, tertib dan disiplin, pembiasaan menghabiskan makanan yang diambil dan merapikan peralatan makan, serta pembekalan warga sekitar sekolah (penjual jajanan dan makanan di sekitar sekolah). " Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dengan sabun dan air mengalir, membantu guru membagikan alat makan/makanan, mengantri untuk mendapatkan makanan, berdoa bersama sebelum dan setelah makan, makan bersama, membantu merapikan kembali alat makan, mendengarkan lagu, pemutaran video, cerita, dongeng, dan tanya jawab selama sarapan, sikat gigi bersama sangat disarankan dan dicantumkan pada materi PHBS atau Program Hidup Bersih dan Sehat," jelas Bambang HW.





Drs. Agung Tri Wahyunto, M.Pd.,
Kasi Kelembagaan, Subdit Sarpras

Foto: Mukti Ali

PROGAS MELIBATKAN BANYAK PIHAK

Pelaksanaan PROGAS melibatkan banyak pihak, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga sekolah yang menjadi pelaku utama program ini. Masing-masing tingkatan itu tentu saja memiliki tugas dan wewenang yang berbeda.

Di tingkat pusat, Tim Koordinasi Pusat PROGAS berperan menetapkan kebijakan program, melakukan sosialisasi, melakukan rapat koordinasi, menetapkan sasaran kabupaten, kecamatan, dan sekolah yang akan menerima bantuan. Tim Koordinasi PROGAS Pusat juga membuat perjanjian kerjasama dengan sekolah yang akan menerima bantuan, menyalurkan dana, melakukan bimbingan teknis, dan melakukan monitoring serta supervisi.

Di tingkat provinsi, tugas Tim Koordinasi PROGAS bertugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta melakukan sosialisasi kepada Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayahnya. "Di tingkat kabupaten/kota, Tim koordinasi PROGAS disusun dengan melibatkan unsur Sekretaris Daerah, Bappeda, Badan Ketahanan Pangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, dan Tim Penggerak PKK," ujar Drs. Agung Tri Wahyunto, M.Pd, Kasi Kelembagaan, Subdit Sarpras, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota ini, masih kata Agung, berwenang membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak; melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PROGAS; melaksanakan program serupa dalam rangka keberlanjutan dan perluasan program di wilayah kabupaten, membuat surat pengantar penarikan dana dengan melampirkan rencana penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban; menyetujui laporan penggunaan dana, dan melakukan monitoring dan supervisi bersama dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.



Foto: Mukti Ali

Di tingkat kecamatan, Tim Koordinasi PROGAS terdiri dari Camat, UPTD Pendidikan, Pengawas Sekolah, Tenaga Gizi dari Puskesmas, serta tim penggerak PKK. Tim ini berfungsi untuk mndayagunakan musrenbang kecamatan sebagai forum koordinasi program; melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PROGAS secara rutin. Tim akan dibekali pengetahuan dengan diikutkan pada bintek yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Dasar.

Sementara itu, di tingkat desa/kelurahan, lurah/kepala desa bertugas membentuk tim PROGAS tingkat kelurahan/desa. Tim ini bertugas melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kepala sekolah; melakukan penyuluhan tentang PROGAS; mendorong partisipasi masyarakat; dan memantau pelaksanaan PROGAS. Tim tingkat kelurahan/desa ini juga akan dibekali pengetahuan dengan diikutkan pada bintek yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Dasar.

TANGGUNG JAWAB SEKOLAH

Dalam struktur organisasi pelaksana PROGAS di tingkat sekolah, kepala sekolah menjadi ketua dan sekaligus penanggung jawab program. Kepala sekolah bertanggung jawab membuat surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) dengan PPK di Direktorat Pembinaan SD. Kepala Sekolah juga harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), dan, tentu saja, kepala sekolah wajib mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SD. "Kepala sekolah juga wajib menerbitkan SK Tim Pelaksana PROGAS yang beranggotakan sejumlah guru. Kepala sekolah pula yang wajib melaporkan dana kepada Direktorat Pembinaan SD dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta menyusun rencana kerja pelaksanaan Progras (RKPP) sebagai bahan usulan pencairan dana," Agung menegaskan.

Setelah itu, lanjut Agung, kepala sekolah wajib membentuk tiga kelompok masak yang masing-masing terdiri dari 6-7 orang per kelompok, menentukan tempat memasak, membuat dan memodifikasi menu sarapan bersama dengan tim penggerak PKK dan petugas gizi Puskesmas, membuat laporan mingguan, dan membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan kepada Direktorat Pembinaan SD setiap bulan.

Para guru yang terlibat dalam tim pelaksana di tingkat sekolah pun punya peran yang sangat penting. Mereka harus memastikan bahwa bahan sarapan yang digunakan benar-benar bahan lokal dan aman untuk dikonsumsi. Mereka juga bertanggung jawab melakukan pembelian dengan kelompok tani.

Kelompok masak yang ditunjuk bertanggung jawab mendata bahan yang akan dibeli, memastikan bahan yang akan dimasak telah sesuai dengan kriteria, mengatur uang belanja dan melaporkan penggunaan dana kepada guru, memasak pada pukul 06-09 untuk memastikan agar anak-anak dapat memperoleh menu sarapan pada jam istirahat pertama. "Kelompok masak juga harus menerapkan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) pada saat penyiapan bahan, memasak, makan, pembersihan, dan penyimpanan alat masak. Mereka juga harus memasukkan bahan vitamin tambahan pada masakan yang akan mereka sajikan," kata Agung. "PROGAS juga membuka kemungkinan keterlibatan masyarakat, baik dengan menyumbangkan bahan makanan maupun dengan pengumpulan uang. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini, diharapkan program pemberian sarapan bagi anak-anak SD akan memberikan manfaat yang optimal," Agung menambahkan.

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

Di lapangan PROGAS juga menjadi magnet yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar sekolah berada. Memenuhi kebutuhan makanan pokok, seperti beras, umbi-umbian bisa dilakukan dengan membeli hasil panen masyarakat sekitar sekolah. Tidak perlu jauh-jauh ke pasar. Demikian juga dalam memenuhi kebutuhan sayur-sayuran bisa diperoleh dari usaha pertanian masyarakat yang memanfaatkan lahan sekitar rumah. Termasuk memenuhi kebutuhan buah, seperti pisang, jeruk, dan lain sebagainya, serta memenuhi kebutuhan protein hewani bisa memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat peternak di sekitar sekolah. Misalnya kelompok masyarakat nelayan, dan lain sebagainya.

Beberapa fenomena terjadi di beberapa daerah pelaksana PROGAS, menunjukkan, geliat peternakan dengan beternak ayam, dan hewan lain mulai bermunculan. Pedagang sayuran juga tak perlu repot dan jauh-jauh memasarkan hasil panen sayurannya ke pasar. Demikian juga kebutuhan buah, seperti pisang banyak diperoleh dari hasil tanaman pisang masyarakat sekitar sekolah.

STUDI AWAL DAMPAK PROGAS

Sebesar 30,5% peserta didik mengalami anemia. Kabupaten Jayapura memiliki prevalensi anemia terbesar, yaitu 40,1%. Status gizi berdasarkan tinggi badan terhadap umur (TB/U) menunjukkan bahwa 27,5% siswa *stunting* pendek, 14,4% *stunting* sedang, dan 5,3% *stunting* berat. *Stunting* adalah masalah

kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Status gizi berdasarkan Indeks Massa Tubuh terhadap Umur (IMT/U) menunjukkan bahwa prevalensi peserta didik kurus adalah 18,1%, dengan prevalensi tertinggi di Kabupaten Manggarai Barat (33,5%). Berdasarkan IMT/U, sebanyak 14,3% peserta didik di Kabupaten Jayapura mengalami berat badan berlebih.

Itulah sebagian simpulan dari *Studi Awal (baseline) Pengukuran Dampak Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS) terhadap Pengetahuan Gizi, Praktik Gizi Seimbang, Status Gizi, Kebugaran, serta Kehadiran Siswa Sekolah Dasar* yang disusun Southeast Asian Ministers of Education Organization- Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO-Recfon).

Tim yang terjun ke lapangan terdiri dari staf SEAMEO Refcon dan Politeknik Kesehatan Kupang. Proposal survei dikembangkan oleh SEAMEO Recfon, dengan masukan dari World Food Program (WFP) dan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor. Penyiapan lapangan dan tim di daerah dilakukan oleh WFP. Petugas lapangan (enumerator) untuk pengumpulan data adalah mahasiswa atau alumni Politeknik Kesehatan setempat. Staf dari Puskesmas setempat membantu pelaksanaan pengukuran hemoglobin dan tes kebugaran subyek. Pelatihan terhadap enumerator dilakukan oleh pengawas lapangan sebelum pengumpulan data dilakukan. Di tiap provinsi, satu orang staf Kemdikbud bertanggung jawab terhadap pengurusan administrasi dan keuangan studi.





Studi menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah dasar yang mengalami masalah gizi. Survei nasional terbaru menunjukkan bahwa 11,2% anak usia 5-12 tahun termasuk dalam kategori kurus, 30,7% pendek (stunting), 18,8% gemuk dan 26,4% anemia (Riskesdas 2013). "Masih tingginya masalah gizi salah satunya berhubungan dengan praktik gizi anak yang belum baik," kata Agus Haryanto, Ph.D., *Acting Director* SEAMEO RECFON yang hadir pada pencahangan PROGAS di Maluku Tenggara.

Survei Konsumsi Makanan Individu Indonesia tahun 2014 memperlihatkan bahwa 29,7% dan 40,1% anak usia 5-12 tahun memiliki asupan energi yang sangat kurang (<70% Angka Kecukupan Energi) dan kurang (70-<100% Angka Kecukupan Energi). Asupan protein juga masih menjadi masalah di mana 29,3% anak dalam rentang umur yang sama memiliki asupan protein yang sangat kurang

(<80% Angka Kecukupan Protein), dan 16,1% anak memiliki asupan protein yang kurang (80-<100% Angka Kecukupan Protein).

Selain asupan energi dan protein, asupan zat gizi mikro juga perlu mendapat perhatian. Analisa sampel Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa kecukupan asupan zat gizi mikro pada anak usia 7-12 tahun yaitu vitamin A 48,6%, vitamin B1 88,5%, vitamin C 32,7%, kalsium 45,3%, dan seng 65,2% (Pertiwi, Hardinsyah dan Ekawidnyani, 2014).

Peraturan Menteri Kesehatan No 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang secara khusus menekankan pentingnya sarapan ke dalam salah satu pesan khusus gizi seimbang untuk anak sekolah. Sarapan memiliki peran yang penting sebagai sumber energi untuk belajar dan melakukan kegiatan lainnya. Energi yang cukup akan membantu siswa berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan di sekolah dengan lebih baik.



Agus Haryanto, Ph.D.,
Acting Director SEAMEO RECFON

Sayangnya, masih banyak anak usia sekolah di Indonesia yang belum memiliki kebiasaan sarapan yang baik. Hasil kajian terhadap data sarapan Riskesdas tahun 2010 menunjukkan 44,6% anak usia sekolah dasar mengonsumsi sarapan dengan kualitas rendah, yaitu dengan asupan energi sarapan kurang dari 15% kebutuhan harian. Sebanyak 35,4% anak mengonsumsi sarapan dengan kontribusi protein <15%. Kontribusi <15% juga ditemukan pada 67,8% anak (untuk vitamin A), 85,0% anak (untuk besi), 89,4% anak (untuk kalsium) dan 90,3% (untuk serat).

“Dengan mempertimbangkan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak sekolah khususnya manfaat sarapan, maka diperlukan suatu program gizi anak sekolah yang komprehensif yang menggabungkan pemberian sarapan sehat serta pendidikan karakter dan gizi seimbang agar sarapan sehat menjadi suatu kebiasaan bagi siswa sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah dalam rangka mewujudkan siswa sehat berprestasi sebagai generasi penerus bangsa,” kata Agus menjelaskan.

Studi awal dari SEAMEO-Recfon berupaya untuk mengukur pengetahuan dan praktik gizi seimbang (termasuk perilaku hidup bersih dan sehat) peserta didik sebelum dan sesudah program dilakukan; mengukur pengetahuan dan kebiasaan sarapan peserta didik sebelum dan sesudah program dilakukan; mengukur ketahanan fisik peserta didik sebelum dan sesudah program dilakukan; mengukur kemampuan konsentrasi peserta didik sebelum dan sesudah program dilakukan. “Selain itu juga untuk mengukur kehadiran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah sebelum dan sesudah program dilakukan,” kata Agus Haryanto.

Subjek studi adalah semua siswa kelas 4 di sekolah yang terpilih menjadi area studi. Kriteria inklusi subjek yaitu siswa secara umum sehat, hadir pada saat pengumpulan data dilakukan, serta bersedia menjadi subyek studi dengan persetujuan tertulis dari orangtua/wali siswa. Studi dilaksanakan di Kabupaten Sorong (Provinsi Papua Barat), Kabupaten Jayapura (Provinsi Papua), Kabupaten Manggarai Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Kabupaten Maluku Tenggara (Provinsi Maluku).

HASIL STUDI AWAL

Studi awal ini juga menyimpulkan tentang pengetahuan gizi anak, di mana hanya setengah peserta didik (52,6%) yang mampu menjawab lebih dari 80% pertanyaan tentang gizi dengan benar. Proporsi tertinggi peserta didik yang menjawab dengan benar adalah peserta didik di Kabupaten Jayapura (78%), dan terendah adalah peserta didik di Manggarai Barat (27,4%). Peserta didik perempuan memiliki pengetahuan yang lebih baik dari peserta didik laki-laki.

“Pengetahuan yang paling perlu ditingkatkan adalah anggapan bahwa frekuensi makan tiga kali sehari menyebabkan kegemukan, sarapan dengan teh manis saja sudah cukup, serta mencuci tangan dengan air saja sudah cukup,” kata Agus Haryanto.

Mengenai kebiasaan makan dan sarapan, sebanyak 22,1% peserta didik makan kurang dari 3 kali sehari, dan 44,4% peserta didik tidak memiliki kebiasaan sarapan setiap hari, khususnya di Kabupaten Sorong. Menu sarapan peserta didik bervariasi, yaitu nasi, lauk, sayur (22,6%), nasi dan lauk (20,8%), nasi dan sayur (17,6%), roti/biskuit/kue (17,6%), dan lainnya, seperti gorengan, mi, teh manis saja (18,8%).

Menu sarapan berbeda secara bermakna berdasarkan kabupaten, yaitu roti/biskuit/kue di Kabupaten Sorong (62,5%), nasi+sayur di Kabupaten Manggarai Barat (47,0%), nasi+lauk di Kabupaten Jayapura (33,6%) dan Kabupaten Sorong (29,5%). Berdasarkan kelompok makanannya, sarapan peserta didik hari kemarin adalah makanan sumber karbohidrat (88,6%), protein hewani (47%), protein nabati (4,5%), sayur (38,7%) dan buah (5,6%).

Mayoritas peserta didik (80,4%) membawa uang saku ke sekolah. Jajan di kantin sekolah dilakukan oleh lebih dari 90% peserta didik di

Kabupaten Jayapura, dan 75% peserta didik di Kabupaten Sorong. Hanya 36,3% peserta didik yang membawa bekal dari rumah (10,4% membawa bekal hampir setiap hari), terutama di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Jenis jajanan yang dibeli peserta didik saat di sekolah adalah roti/biskuit (48,2%), minuman kemasan (15,4%), makanan berat seperti nasi goreng, somay, gado-gado, bakso, soto ayam (12,5%), keripik/makanan ringan (9,8%), gorengan (6,2%). Mayoritas peserta didik (77,8%) memilih air putih sebagai jenis air minum utama; 10,9% memilih teh manis; 6,9% memilih minuman kemasan; dan 4,5% memilih minuman lainnya seperti susu, kopi dan minuman berenergi. Hanya 26% peserta didik yang selalu membawa air putih dari rumah setiap hari, terutama di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Jayapura.

Sejumlah hasil studi awal dapat disarikan sebagai berikut.

a. Hasil Studi Morbiditas

- Hampir sepertiga peserta didik (30,7%) peserta didik mengalami pilek, 30,1% menderita batuk, 15,7% mengalami demam, dan 5,3% diare dalam 2 minggu terakhir, terutama di Kabupaten Sorong.
- Sebanyak 56,3% peserta didik minum obat cacing (terutama di Kabupaten Maluku Tenggara, >80%), mayoritas (65,6%) mengonsumsinya dalam 1 tahun terakhir
- Hampir setengah peserta didik (46,5%) mengonsumsi suplemen dalam 1 minggu terakhir, terutama di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sorong. Suplemen yang dikonsumsi adalah suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menambah nafsu makan dan daya konsentrasi.

b. Hasil Studi Kebersihan Diri

- Kebiasaan mandi $\geq 2x$ /hari diterapkan oleh 85% peserta didik, dan sikat gigi $\geq 2x$ /hari dilakukan oleh 81% peserta didik. Hasil pengamatan menunjukkan 57,6% peserta didik memiliki kuku jari tangan yang kotor, dan 33,9% memiliki rambut kotor.
- Sekitar 30% peserta didik tidak mencuci tangan setelah buang air kecil, setelah bermain dan setelah memegang hewan.
- Praktik kebersihan diri terburuk adalah pada peserta didik di Kabupaten Manggarai Barat.

c. Hasil Studi Budi Pekerti

- Praktik terkait budi pekerti masih belum dilaksanakan dengan baik, terutama di Kabupaten Manggarai Barat.
- Secara umum, hanya 53,7% peserta didik yang hampir setiap hari berdoa sebelum belajar, 46% berdoa sebelum makan, 34,4% berbaris saat akan masuk ke kelas, dan 19,6% menyisakan makanan.

d. Hasil Studi Kenyamanan Dan Kondisi Belajar

- Sebanyak 74,5% peserta didik merasa nyaman belajar di sekolah. Namun, di Kabupaten Manggarai Barat, hanya 57,4% peserta didik yang merasa nyaman di sekolah.
- Sebanyak 45,4% peserta didik tidak pernah bertanya dan 29,3% peserta didik tidak pernah menjawab pertanyaan guru saat belajar di kelas selama 1 minggu terakhir, terutama di Kabupaten Maluku Tenggara.
- Mayoritas peserta didik (71,6%) pernah merasa lapar saat belajar di sekolah

(12,7% hampir setiap hari, 58,6% kadang-kadang).

- Merasa mengantuk saat pelajaran di kelas dialami oleh 7,3% peserta didik (hampir setiap hari) dan 45,3% peserta didik (kadang-kadang).

e. Hasil Studi Monitoring Berat dan Tinggi Badan Peserta Didik

- Hanya 64,9% peserta didik yang pernah ditimbang berat dan tinggi badannya di sekolah, terutama di SD swasta.
- Berdasarkan kabupaten, monitoring paling banyak dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara dan paling rendah di Kabupaten Manggarai Barat.

f. Hasil Studi Kehadiran Siswa

- Median jumlah hari peserta didik tidak hadir pada kegiatan belajar di sekolah selama 1 semester terakhir adalah 3 hari (artinya $\leq 50\%$ peserta didik absen selama 3 hari), dan 1 hari adalah karena alasan sakit. Absensi peserta didik tertinggi adalah di Kabupaten Sorong.

g. Hasil Studi Aktivitas Fisik Dan Kebugaran

- Dalam 1 minggu terakhir, sekitar 60% peserta didik melakukan olahraga.
- Sebanyak 85% peserta didik mampu menyelesaikan tes kebugaran sesuai waktu (3 menit). Median Physical Efficiency Index (PEI) adalah 63,8 (56,4-77,6)
- Nilai PEI yang lebih tinggi (kebugaran yang lebih baik) didapatkan pada peserta didik di Kabupaten Jayapura, usia di atas 10 tahun, laki-laki, dan SD Swasta. Peserta didik yang kurus, atau stunting memiliki kebugaran yang lebih rendah.

h. Hasil Studi Respons Terhadap Kegiatan dan Menu PROGAS

- Pihak sekolah (para guru dan yayasan), komite sekolah dan orangtua menyambut baik dan sangat antusias dengan rencana kegiatan PROGAS. Orangtua sudah menyampaikan ke peserta didik, dan peserta didik sangat antusias.
- Respons positif guru salah satunya karena peserta didik-peserta didik yang biasanya membeli jajanan yang kurang sehat, sekarang bisa sarapan sehat dari kegiatan PROGAS.
- Pihak sekolah secara umum berkomitmen untuk melaksanakan PROGAS secara bertanggung jawab, salah satunya dengan menetapkan beberapa kriteria utama bagi anggota kelompok masak.
- Pihak sekolah memiliki beberapa kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan pangan untuk membuat menu PROGAS terkait kemungkinan kesulitan mencari bahan makanan tertentu (lokasi pasar jauh, harus tersedia dalam jumlah banyak, harga kemungkinan akan naik karena semua sekolah peserta PROGAS se-kabupaten akan mencari bahan makanan yang sama). Kekhawatiran ini muncul karena, menurut informasi yang diterima responden saat mengikuti Bimtek, menu yang sudah ditetapkan tersebut tidak boleh diganti.
- Penerimaan peserta didik terhadap menu PROGAS (menurut perkiraan guru/kepala sekolah) adalah baik (untuk bihun goreng, ayam goreng, dan nasi goreng) karena sudah terbiasa. Sedangkan penerimaan peserta didik agak meragukan untuk bubur umbi (karena biasanya berbagai umbi tersebut tidak dicampur saat dimasak), dan ikan kuah (karena peserta didik lebih terbiasa dengan ikan yang digoreng). Namun, guru dan kepala sekolah akan tetap mencoba memberikan ke peserta didik. *(Sumber: Disarikan dari Studi Awal (Baseline) Pengukuran Dampak Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS) terhadap Pengetahuan Gizi, Praktik Gizi Seimbang, Status Gizi, Kebugaran, serta Kehadiran Siswa Sekolah Dasar-Seameo Recfon (2017).*







KEMAJUAN PROGAS 2016-2017

Program Gizi Anak Sekolah (Progas) gaungnya semakin mendunia. Sejak digulirkan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (Dit. PSD) pada April 2016 silam, sudah banyak kemajuan berarti di daerah-daerah sebagai ujicoba Progas. Dalam survei cepat yang dilakukan World Food Program (WFP) dampak pelaksanaan Progas 2016-2017 menyatakan Progas mempengaruhi perilaku positif seputar praktik kesehatan, gizi, kebersihan, kebiasaan sarapan, makan sayuran dan buah-buahan, yang kemudian meningkatkan tingkat kehadiran siswa, karena berkurangnya prevalensi penyakit.

"Progas juga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat termasuk petani, orangtua, kelompok memasak di sekolah, dan petani lokal yang memasok makanan ke sekolah. Progas juga membangun karakter dengan

mengajarkan prinsip-prinsip antri, berdoa sebelum dan sesudah makan, menghormati teman sebaya dan guru, membuang sampah di tempat sampah, serta sikap tidak membuang-buang makanan," kata Nikendarti Gandini, Programme Policy Officer WFP. Selain itu, Progas juga mendorong terbinanya hubungan baik antara orangtua dan guru. Para guru juga didorong untuk lebih memberikan perhatian perkembangan siswa di sekolah.

Progas juga sudah diangkat dalam pembahasan di forum regional dan global. Dalam semester terakhir ini, Progas dibahas pada Forum Regional School Feeding Lingkup Asia Tenggara di Siem Reap Kamboja (11-13 Juli), Global Child Nutrition Forum di Montreal Canada (17-21 September 2017), dan yang terakhir pada forum di Myanmar, 26-28 November 2017. Hadir pada forum-forum tersebut Drs. Agung Tri Wahyunto, MPd (Kasi Kelembagaan, Dit. PSD, mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Nikendarti Gandini (perwakilan dari WFP).

Progas mendapat banyak dukungan di lembaga-lembaga pemerintah, seperti Kantor Staf Presiden, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Luar Negeri. Progas dipandang sebagai salah satu program tepat untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di bidang gizi dan pangan sesuai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Germas merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Agustus 2017. Progas mencerminkan program dengan pendekatan gizi sensitif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan perubahan perilaku gizi, kesehatan dan kebersihan bagi para peserta didik SD.

KAJIAN PROGAS DAN DUKUNGAN SWASTA

Hingga akhir 2017 ini, Progas sudah dikuatkan dalam pembahasan dan penguatan kerangka kebijakan Progas melalui MoU antara Dit. PSD dengan bupati-bupati di 11 Kabupaten sasaran. Di antaranya membahas anggaran berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun Kabupaten/Kota.

Studi dilakukan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (Dit. PSD) bekerja sama dengan WFP dan SEAMEO Recfon, yakni dalam bentuk Baseline Progas 2017 di 24 sekolah sampel di 4 kabupaten dari 4 propinsi sasaran. Temuan utama di Kabupaten Manggarai Barat, Maluku Tenggara, Sorong dan Jayapura, menyatakan bahwa tingkat prevalensi anemia rata-rata anak sekolah penerima Progas mencapai 30,5%, yakni lebih tinggi dari 26,4% tingkat anemia anak usia sekolah di tingkat nasional (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas, 2013).

Dit. PSD menggandeng WFP juga telah melakukan kajian Progas mengenai lima hal, yakni kerangka kebijakan, kapasitas pendanaan, kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, desain dan implementasi, serta partisipasi masyarakat. Kajian tersebut dirangkum dalam System Approach for Better Education Result School Feeding (SABER-SF) dan penyusunan peta jalan Progas di lima kabupaten sasaran, yakni Kabupaten Jayapura, Sorong, Maluku Tenggara, Tangerang, dan Kabupaten Belu.

SABER meliputi sejumlah kegiatan, yakni: diskusi terpumpun (FGD) dengan peserta perwakilan dari dinas terkait; wawancara informan kunci dari dinas terkait, dan kunjungan ke sekolah sasaran Progas; workshop analisis data SABER dan penyusunan draf peta jalan Progas; dan presentasi hasil kajian SABER SF dan roadmap untuk kelanjutan Progas.

Progas mendapat sambutan baik dari kalangan swasta. Cargill Indonesia, produsen pakan ternak yang sudah meluaskan pada beragam produk pertanian, makanan, energi dan jasa, sejak akhir 2016 lalu memberikan dukungan pelaksanaan Progas. Perusahaan yang berkantor pusat di Minneapolis, Amerika Serikat ini melalui WFP memberikan bantuan teknis dan penguatan peningkatan kapasitas pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Progas, baik di tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu mereka melaksanakan replikasi Progas di 4 SD di sekitar wilayah operasional Cargill, di luar kabupaten sasaran Progas, yaitu di SDN Citawa Serang, Banten, SDN Ngerong, Pasuruan, SDN Gunungsari 2 Pasuruan, dan SDK Manleten, Belu, NTT. Kegiatan ini memiliki sasaran 671 siswa SD.

KEGIATAN PENDUKUNG PROGAS 2017

Kegiatan pendukung Progas sudah banyak dilakukan di sekolah-sekolah sasaran. Tujuan utama adalah memperkuat efektivitas pelaksanaan dari ke-3 komponen Progas di lapangan. WFP bekerjasama dengan SEAMEO RECFON telah melakukan pelatihan kepada guru-guru pada kurun September-November 2017.

Pelatihan dengan materi Modul Pendidikan Gizi Anak Sekolah SD ini dilaksanakan di Sorong, Jayapura, Maluku Tenggara dan Tangerang, dengan peserta sebanyak 344 (212 guru perempuan dan 132 guru laki-laki). "Guru-guru dibekali bagaimana memberikan edukasi gizi yang baik dan efektif bagi murid-muridnya, bagaimana memantau berat dan tinggi badan murid-murid serta bagaimana mengukur BMI (Body Mass Index)," kata Nikendarti.



Guru juga dilatih cara menggunakan alat ukur tinggi badan dan mengukur berat badan yang benar. Antusiasme guru juga terlihat saat diadakan sesi role play dan berbagai games/ permainan kesehatan gizi yang beracuan pada buku Gizi dan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dasar yang diterbitkan SEAMEO RECFON dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelatihan kebun sekolah dan kolam ikan juga dilaksanakan di 11 kabupaten sasaran. Kali ini kerjasama menggandeng Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan setempat. Di setiap kabupaten, Dinas Pendidikan setempat memilih 5 sampel sekolah yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pelatihan. Para petugas penyuluh lapangan (PPL) memberikan materi mempersiapkan kebun sekolah, pembibitan dan penanaman untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Selain pemberian teori, kegiatan praktek di area sekolah juga diadakan dan dibimbing langsung oleh PPL. Selama ini untuk proses persiapan kebun bukanlah hal yang baru bagi kepala sekolah, guru serta orang tua murid, namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal mereka banyak mendapatkan ilmu dan tips dari pengetahuan yang diberikan oleh PPL. Keterlibatan masyarakat dan siswa untuk menyiapkan kebun sekolah membuat suasana menjadi lebih hidup dan menyenangkan serta mempunyai aspek positif, terutama pada siswa yang bisa terlibat langsung untuk merawat kebun dan mempelajari pertumbuhan tanaman dari pembenihan sampai menghasilkan, serta siswa juga bisa menikmati hasilnya bersama-sama. Sikap gotong royong, rasa memiliki dan kebersamaan juga merupakan dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan kebun sekolah.



Kegiatan lain adalah Pelatihan Petani Lokal Pemasok Progas dengan peserta 61 petani lokal di Kabupaten Sorong, Manokwari Selatan, TTS dan Belu. Pengetahuan yang didapat dari tenaga PPL sangat dirasakan berguna oleh petani. Mereka bertambah wawasan mengenai pemanfaatan lahan, cara dan jarak tanam, serta penggunaan pupuk organik untuk mendapatkan hasil maksimal.

RENCANA DAN STRATEGI PERLUASAN PROGAS 2018

Tahun 2018, pemilihan lokasi dan perluasan Progas diprioritaskan di kabupaten/kota yang perlu intervensi gizi sesuai himbauan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Prioritas Progas mendatang di lakukan di 100 kabupaten/kota untuk anak kerdil (stunting) yang tersebar di 34 provinsi. Pemilihan 100 Kabupaten/Kota untuk anak stunting ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Studi TNP2K memperhatikan tingkat prevalensi stunting dan jumlah balita stunting menurut hasil Riskesdas 2013 dan tingkat prevalensi kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menurut Survei Sosial Ekonomi

Nasional/Susenas 2016. "Pada tahun 2018 Progas akan diperluas mengikuti himbauan KSP yang mencakup 19 provinsi dan 39 kabupaten, 27 di antaranya termasuk 100 Kabupaten/Kota prioritas stunting," kata Agung.

Keputusan ini telah mempertimbangkan hal-hal positif tentang manfaat dan dampak Progas yang dirasakan stakeholders sehingga untuk tahun 2018 Dit. PSD tetap berkomitmen memperluas cakupan wilayah di 14 provinsi dan 28 kabupaten baru. Progas di 11 kabupaten rawan pangan di 5 provinsi yang memasuki tahun kedua tetap dilanjutkan, terutama di sekolah-sekolah yang baru menjalankan Progas sejak 2017.

Hal ini sejalan dengan komitmen awal Dit. PSD bahwa melalui Progas, pemerintah pusat bermaksud memberikan contoh dan stimulan kepada sekolah-sekolah dan pemerintah daerah. "Khususnya tentang bentuk intervensi gizi anak sekolah yang komprehensif untuk meningkatkan kebiasaan makan sarapan yang sehat dan mengubah perilaku gizi, serta perilaku hidup bersih, dan sehat bagi peserta didik untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang disiplin, tangguh dan berkarakter," kata Agung menambahkan.



WAWANCARA 1. SURYAN WIDATI MUHADJIR: PROGAS TAK LEPAS DARI PENDIDIKAN KARAKTER

Pencanangan Program Gizi Anak Sekolah Tahun 2017 yang dilaksanakan di SD Nasional Kristen (Naskat) Mathias 3, Langgur, di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, 26 Mei 2017, menjadi sangat istimewa. Pasalnya, ada para ibu pejabat hadir jauh-jauh dari Jakarta terbang ke bumi kepingan surga yang jatuh di Kepulauan Kei. Para ibu itu adalah Ibu Suzana Ramadhani Masduki (istri Teten Masduki, Kepala Staf Presiden), Ibu Suryan Widati Muhadjir (istri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), Ibu Ida Raudha Hamid (istri Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad), dan Ibu Dewi Riyantini Widaryat (istri Direktur Pembinaan SD Wowon Widaryat).

Wida Muhadjir mengapresiasi terselenggaranya Progas yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. Ia senang tapi sekaligus terharu. "Saya sangat senang melihat sekolah ini menjadi tempat yang menyenangkan,

menjadi rumah kedua bagi siswa-siswa. Saya juga sangat bahagia dan bangga bertemu dengan Ibu-Ibu yang telah memasak untuk anak-anak. Makanan bergizi dimasak dengan cinta. Penghargaan besar kepada para ibu," katanya saat memberi sambutan pencanangan Progas di Maluku Tenggara. Namun, ia juga terharu karena secara fisik mereka yang tinggal di Maluku Tenggara masih kurang.

Wida berharap akan banyak orangtua yang nantinya sadar akan pentingnya sarapan buat anak-anak mereka. Sekolah berperan besar untuk menggandeng orangtua agar selalu menyediakan sarapan pagi sehat dan bergizi. Terbukti dampak dari Progas yang sudah dilaksanakan tahun 2016 lalu, sangat positif pada siswa, yakni meningkatnya tingkat kehadiran siswa di sekolah, kemampuan konsentrasi belajar meningkat, serta berat badan meningkat.

Staf redaksi Majalah *Sekolah Dasar*, Didik Haryadi, mendapat kesempatan berbincang dengan Ibu Wida tentang program gizi anak sekolah ini. Berikut petikannya.



► **Bagaimana pendapat dan kesan Ibu setelah mengikuti penganangan Progas di Maluku Tenggara tempo hari?**

- Senang dan terharu. Karena secara fisik mereka yang tinggal di sana masih kurang. Misalnya, berat badan dan tinggi badan jika dibandingkan usianya. Karena itu berkaitan erat dengan semangat belajar. Dengan progas diharapkan ada perbaikan. Dan ibu kepala sekolah di tempat penganangan program gizi anak sekolah itu pintar, karena dalam dua minggu dia berhasil menaikkan berat badan siswa-siswanya.

► **Apakah program gizi anak sekolah ini juga bisa menjadi program OASE Kabinet Kerja?**

- Dari OASE sendiri belum ada program itu. Namun, ibu-ibu OASE punya program sejenis seperti penataan Desa Kohod sebagai percontohan Desa Sejahtera. (Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang menata ulang Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang semula desa tertinggal sebagai percontohan Desa Sejahtera.)

► **Apakah sarapan pagi bagi siswa bisa menjadi gerakan nasional, mungkin bisa digerakkan melalui Dharma Wanita di lingkungan Kemendikbud?**

- Ibu-ibu Dharma Wanita juga belum terlibat. Itu merupakan program dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. Dan program itu sangat bagus.

► **Di perkotaan, masih banyak siswa yang tidak sarapan pagi. Sebagian besar siswa mendapat uang saku untuk sarapan saat jam istirahat pertama. Bagaimana pandangan Ibu tentang kebiasaan seperti ini? Bagaimana peran keluarga untuk membiasakan wajib sarapan bagi siswa?**

- Hal itu, menurut saya, salah satu dari salah pengasuhan. Kemendikbud melalui pendidikan karakter menekankan bagaimana pentingnya pengasuhan dari orang tua. Karena itu perlu penyadaran kepada orang tua akan pentingnya sarapan buat anak-anak mereka. Tentunya ini melibatkan sekolah. Karena yang bisa dikendalikan sekolah adalah orang tua. Sedangkan sekolah tidak bisa mengendalikan para pedagang di sekitar sekolah.

► **Bagaimana dengan sarapan untuk anak-anak Ibu sehari-hari?**

- Saya selalu menyediakan sarapan bagi anak-anak saya. Saya menekankan untuk mereka makanan yang *fresh* (segar). Karena menurut saya, semakin segar makanan, semakin bagus.

► **Apa menu favorit sarapan putra-putra Ibu?**

- Untuk Zidan (Mukhamad Royan Azidan), makanan favoritnya yang berkuah. Seno (Senoshaumi Hably), menyukai sayuran rebus. Sedangkan Tio (Harbanyo Ken Najjar) menyukai yang berbumbu, sambal juga mau dia.

► **Anak-anak sekarang semakin susah makan/doyan sayur-sayuran, bagaimana Ibu membiasakan anak menyukai sayur?**

- Alhamdulillah, anak-anak saya suka sayuran. Saya kira itu karena persoalan kebiasaan. Misalnya, kebiasaan sejak taman kanak-kanak. Jika sejak TK makanan yang diberikan hanya lauk tanpa sayur, ya lama-lama mereka tidak menyukai sayur. Juga anak-anak harus diajak ngobrol. Misalnya, kita yakinkan bahwa sayur itu enak lho.

► **Output Progas juga dikaitkan dengan pembentukan karakter anak. Bagaimana Ibu melihat hal tersebut?**

- Memang semua itu tidak terlepas dari pendidikan karakter. Misalnya, membiasakan berdoa sebelum makan. Makan harus dihabiskan. Kemudian mencuci piring. Jadi semua itu tidak lepas dari pendidikan karakter. Untuk di Maluku Tenggara, misalnya, orang tua dilibatkan dalam menyediakan sarapan para siswa. Sehingga, mereka itu sebenarnya sarapan masakan orang tua mereka. Dan, Progas ini juga membuat anak-anak bersemangat ke sekolah. Karena guru-guru mengajaknya bukan ayo sekolah, tetapi ayo makan. Siswa-siswi menjadi antusias.



WAWANCARA 2 SURYAN WIDATI MUHADJIR: ANAK LABUAN BAJO HARUS SEHAT DAN PINTAR

Mengunjungi pelaksanaan Program Gizi Anak Sekolah (Progas) di SDK Longgo, Kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT menyimpan kesan tersendiri dalam diri Suryan Widati Muhadjir, S.E., M.SA., Ak., CA, istri Mendikbud Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP. Saat menginjakkan kaki di halaman sekolah, keharuan sudah terasa. Ia beserta rombongan di sambut barisan siswa yang memanjang dari ujung halaman sembari menyanyi. Tak sampai disitu, keharuan dan kebanggaan juga muncul kala menjumpai ibu-ibu di dapur yang tengah memasak. Selepas dari kunjungan di Manggarai Barat, Majalah Sekolah Dasar berkesempatan berbincang dengan Wida Muhadjir di kantor Kemendikbud. Selengkapnya, berikut ini kutipannya.

► Bagaimana kesan Ibu melihat pelaksanaan Progas di Labuan Bajo beberapa waktu lalu?

- Saya merasa sangat terharu sekaligus bangga. Satu sisi kita melihat keindahan Labuan Bajo membuat serbuan turis asing luar biasa. Kalau kita tidak turun tangan membantu mengelola anak-anak di sana untuk lebih cerdas, sangat disayangkan. Itulah kewajiban kita, dan saya harapkan nanti program kita ini bisa diteruskan. Ini kan hanya stimulus dari pemerintah pusat untuk daerah. Program ini kita juga banyak dibantu oleh pihak-pihak meningkatkan gizi anak sekolah SD di sana. Bagaimanapun anak yang cerdas adalah anak yang sehat. Mereka bisa belajar dengan baik jika perutnya kenyang.

► **Apakah ibu yakin program stimulan ini mampu memunculkan kemandirian orangtua di Labuan Bajo dalam menyiapkan makanan sehat dan bergizi, serta memunculkan karakter baik pada diri anak?**

- Saya optimistis program stimulan ini akan memunculkan kemandirian dari orang tua untuk menyiapkan sarapan bagi anak-anaknya dan tentunya bukan hanya sekedar sarapan, tetapi sarapan yang penuh cinta dan sehat. Saat makan menjadi kebiasaan dan dengan kebiasaan makan yang baik, maka tujuan kita untuk sehat juga dapat bonus, yakni penguatan karakter. Penguatan karakter didapat dari pembiasaan yang baik sebelum makan harus cuci tangan dan berdoa. Saat anak-anak itu makan bersama, maka rasanya juga pasti lebih senang dan lebih lahap. Jika di rumah mungkin susah makan sayur, makan buah tidak mau, tapi ketika bersama teman-teman, ia melihat temannya makan sayur dan buah, maka dia akan ikut mencoba. Hal itu karena pengaruh sekolah itu sangat kuat terhadap anak.

► **Target besar dari program adalah pemberdayaan masyarakat yang arahnya bukan hanya masyarakat sekolah, tetapi masyarakat umum mulai petani, peternak, nelayan, pedagang dan lain sebagainya. Bagaimana ibu melihat hal ini di Labuan Bajo?**

- Betul sekali, menurut saya inilah tujuan besarnya. Apalagi melibatkan banyak pihak, saya yakin pasti akan semakin berdaya. Tingkat kepeduliannya juga akan semakin besar. Satu yang ingin saya pesankan bahwa ini adalah program yang sangat baik sekali dan mungkin kita harus lebih luas lagi dalam menyebarkan informasi ini dan harus memasifkan program ini kepada masyarakat. Kalau tidak salah ada seratus daerah yang menjadi sasaran, mungkin tahun depan bisa diperluas lagi. Jika kita lihat di lapangan, banyak anak-anak sangat membutuhkan ini, ibu-ibu dari anak-anak sekolah juga butuh sentuhan program ini. Kepala sekolah serta guru, bahkan pemuka agama juga merasa senang terlibat. Dan tidak hanya itu, petani lokal, peternak, nelayan mulai bergairah dan mereka pun merasa memiliki tanggung jawab untuk membuat anak-anak Labuan Bajo sehat dan pintar. Karena merekalah nanti yang akan menjadi penerus kita.

► **Sepertinya Progas ini juga membuat anak rajin bersekolah, apa benar begitu?**

- Kemarin saya melihat sendiri, dampak program ini luar biasa, program ini juga membuat anak-anak jadi bersemangat pergi ke sekolah. Ibu-ibu PKK, karena merasa dilibatkan, mereka menyajikan masakan itu dengan rasa cinta. Hal tersebut yang membuat saya kemarin merinding, karena semua elemen masyarakat itu bergerak serta aktif dalam menyuksekan program ini. Ada tokoh adat, tokoh agama, bahkan alumni guru juga hadir. Bahkan petani pun mengatakan bahwa tidak perlu lagi jauh-jauh memasarkan produk.



► **Apakah Ibu melihat bahwa kampanye makanan sehat dan bergizi ini efektif dari sekolah?**

- Saya menyadari bahwa intervensi untuk makanan sehat itu paling efektif di sekolah karena pengalaman pribadi anak-anak saya yang masih kecil dan suka makan sayur dan buah itu karena kita selaras antara kebiasaan di rumah dan disekolah. Jadi, keikutsertaan guru dalam program ini memang harus lebih giat mengintervensi makanan sehat dan bergizi. Dan saya lihat kemarin, guru-gurunya sudah cukup berhasil menanamkan hal itu. Tetapi, banyak guru-guru di perkotaan yang ternyata masih muda-muda dan cenderung lebih senang mengonsumsi makanan cepat saji (*Junkfood*).

► **Rencananya program ini akan menjadi program nasional tahun depan, bagaimana pendapat Ibu?**

- Tentu saja saya merasa sangat bangga dan selamat kepada Pak Wowon serta jajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. Karena memang program ini sangat bagus sekali sehingga sangat perlu kita masifkan. Semoga program ini terus berjalan dari tahun ke tahun sehingga kita tidak mengabaikan pentingnya gizi anak.



TESTIMONI IDA RAUDAH HAMID: PROGAS JUGA MENAMBAH PENGETAHUAN GIZI dan PHBS

Ida Raudah Hamid, istri Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, menyambut baik pencanangan Progas yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. Progas dinilai program yang bagus sebagai perbaikan program di masa lalu, yakni Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS) pada tahun 1997-2000. "Kami harapkan Progas harus didukung oleh seluruh stakeholder sekolah, bukan hanya di pusat namun juga di daerah," kata Ida Raudah yang juga menjabat Ketua Pendidikan Dharma Wanita Persatuan Pusat.

Ketika mengunjungi langsung pelaksanaan di lapangan, Ida Raudah menyaksikan betapa kesiapan sarapan sehat dan bergizi banyak didukung oleh para ibu, yang tak lain adalah orangtua siswa. "Saya salut atas partisipasi para ibu, yang juga orangtua siswa, yang secara bergiliran, dalam satu kelompok bertugas menyiapkan sarapan bukan hanya buat anak-anak mereka, namun juga anak-anak dari orangtua lainnya. Dari berbelanja bahan makanan, mengolaknya, dan memasaknya," kata Ida Raudah.

Progas, menurut Ida Raudah, bukan semata memberikan sarapan kepada para siswa. "Baik anak, juga para ibu yang memasak menjadi bertambah pengetahuannya tentang diversifikasi makanan bergizi seimbang non-beras, menggunakan bahan-bahan pangan lokal setempat. Ibu-ibu dan anak-anak juga dibiasakan dengan mengonsumsi buah dan sayur," katanya.

Selain itu, sisi positif lain dari Progas adalah adanya pendidikan gizi dan dikembangkannya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). "Para ibu, juga semua pihak yang terlibat bertambah pengetahuan tentang kandungan gizi seimbang dalam makanan, khususnya sarapan pagi. Pengetahuan gizi ini ditularkan dari petugas gizi puskesmas kepada kelompok masak para ibu, guru, dan juga para siswa," kata Ida Raudah.

Ida Raudah juga menyaksikan di tiga sekolah dasar yang dikunjunginya dalam pencanangan Progas di Maluku Tenggara, sudah menyediakan fasilitas cuci tangan, dari air bersih dan juga sabun. "Ada pembiasaan mencuci tangan sebelum makan yang dipraktekkan setiap pagi di sekolah," katanya.



**WAWANCARA- Dr. JAMES MODOUW,
STAF AHLI MENDIKBUD BIDANG HUBUNGAN
PUSAT DAN DAERAH: PROGRAS BUKANLAH
SINTERKLAS**

Pelaksanaan Progas yang dipusatkan di SDK Longgo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, beberapa waktu lalu, tak luput dari perhatian James Modouw. Apa saja penilaiannya terhadap Progas, berikut petikan wawancara dengan Staf Ahli Mendikbud Bidang Hubungan Pusat dan Daerah ini.

► **Sejak kapan Bapak mulai memantau program-program seperti Progas ini?**

- Untuk saya, pengalaman pelaksanaan program ini sudah pernah saya laksanakan sejak tahun 2010. Namanya masih PMTAS atau Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah. Pertama kali kita kerjakan dengan WFP di Indonesia yang mulai dilaksanakan pertama di Lombok. Kemudian yang kedua dilaksanakan di Papua, saat itu saya sedang menjabat sebagai Kepala Dinas, lalu saya temani mereka dan kami buat program tersebut di kota Jayapura.

Setelah itu lalu pindah ke Kabupaten Jayapura. Lalu saya pindah ke Jakarta dan program kami mulai lagi dengan nama Progas dilaksanakan di tiga Kabupaten .

► **Dari semua tempat pelaksanaan Progas, bagaimana respon masyarakatnya?**

- Dari semua tempat tersebut, masyarakat merasa sangat senang dengan adanya program ini dan ibu-ibu PKK di lapangan juga mendapatkan *support* untuk program mereka. Hanya saja, kita harus pelan-pelan mendorong bahwa program ini hanyalah program yang selanjutnya harus bisa memberdayakan serta mendorong masyarakat untuk secara mandiri menjalankan program ini.

► **Bagaimana menurut Bapak masyarakat di sekitar SDK Longgo terhadap pelaksanaan Progas?**

- Setelah saya melihat acara di sekolah, kesan saya adalah pertama saya lihat ada kesadaran masyarakat untuk

bekerja sama untuk memenuhi gizi anak sekolah sebagai satu aspek yang mendorong prestasi anak belajar di sekolah. Selama ini banyak orang berpikir bahwa kondisi mengurus anak seperti biasa saja, tanpa memedulikan asupan gizi yang benar, kesadaran ini masih sangat lemah. Ini yang harus terus menerus dikawal.

•

► **Pengalaman Bapak melihat pendidikan di daerah 3T cukup sering, bagaimana kesadaran masyarakatnya tentang penyiapan sarapan bergizi bagi anaknya di daerah yang Bapak lihat?**

- Kesadarannya memang masih rendah, karena belum melihat pentingnya pendidikan. Ini harus kita bangkitkan, tetapi harus pelan-pelan. Tetapi saya menemukan di SD Kristen Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Di SD itu, tanpa adanya program seperti ini sudah bekerja sendiri. Pihak sekolah memberi himbauan saja kepada orang tua untuk dapat selalu memberikan makan pagi pada anaknya di rumah serta membawa bekal makan untuk jam 10. Ketika saya tiba di sekolah, anak-anak ini pun sudah siap menaruh semua bekalnya di meja untuk dimakan dan ternyata sudah diberikan juga kesadaran untuk selalu mencuci tangannya sebelum makan. Hanya saja, ada kurangnya, saya lihat seharusnya di depan kelas terdapat tempat mencuci tangan bagi para siswa. Itu yang belum ada.

► **Ada beberapa sekolah yang terpilih mendapatkan Progas, apa yang harus dilakukan sekolah itu jika program ini sudah selesai?**

- Sekolah-sekolah yang menjadi model pelaksanaan program harusnya menjadi sekolah inti yang nantinya akan melakukan imbas kepada sekolah-sekolah lain. Jadi mungkin strategi itu yang harus dikembangkan lagi ke depan. Karena jika masyarakat sudah mengetahui tentang program ini dan tanpa dana dari pemerintah, sesungguhnya mereka bisa membuat sendiri, kita jangan mengajak mereka menjadi ketergantungan. Untuk melihat perkembangan kemandirian dari mereka, setelah satu tahun kita harus melakukan evaluasi. Sekiranya masih belum mampu, maka tahun kedua sudah harus mampu. Hal tersebut pun sangat tergantung dari daerahnya sendiri. Jika daerah berpikir bahwa itu sangat menguntungkan, maka akan mendapat hasil yang sangat signifikan.



► **Bapak yakin, sekolah-sekolah yang mendapat Progas khususnya di Manggarai Barat nanti akan bisa menjadi sekolah inti yang akan mengimbaskan kebiasaan baik itu kepada sekolah lain?**

- Melihat potensi yang ada di Manggarai Barat ini saya merasa yakin akan mampu memberikan asupan gizi untuk anak-anaknya. Pertama memang karena budaya masyarakat yang notabenenya adalah masyarakat yang sangat peduli terhadap anak-anaknya, pendidikannya, lalu terhadap kemajuan masyarakat. Itu merupakan satu modal social yang sudah ada di sana. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga sudah menunjang. Tinggal memberikan mereka pemahaman yang sebenarnya selain pengetahuan anak sekolah. Satu hal lagi, anak belajar untuk mendapatkan energi sampai siang hari itu ditentukan oleh asupan gizi pada waktu jam 10 itu. Jika anak tidak makan dengan baik di rumah, maka daya tangkapnya juga akan rendah dan ketika asupan kalori yang mereka dapat dari sarapan di rumah sudah mulai habis pada jam 9-10, maka seharusnya ditambahkan lagi dengan tambahan kalori. Untuk tambahan kalori

tersebut yang sering diupayakan orang tua dengan memberikan jajan kepada anaknya. Tetapi sebetulnya untuk lebih menghemat dan lebih hienis adalah membawa makanan tambahan atau bekal dari rumah sendiri.

► **Jika Progas dari Pemerintah Pusat telah selesai, ada harapan muncul kemandirian dari orangtua menyiapkan bekal makanan ke sekolah. Apakah kemandirian itu, masih perlu didorong lagi melalui alokasi dana dari pemerintah daerah?**

- Kemandirian yang kita harapkan nanti adalah bukan dari daerah yang menyuplai ke sekolah, tetapi kemandirian tersebut kita harapkan muncul pada orang tua dari masing masing anak itu sendiri. Jika dari daerah, tentunya tidak sanggup karena melihat APBD yang tidak seberapa. Dan jika dari orang tua, tentunya sangat mampu karena makan itu sudah biasa, dan sering ada makanan berlebih di rumah. Artinya, stimulus ini memang harus di biasakan kepada orang tua bukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini adalah yang



mengawal. Bagi orang tua yang kondisi ekonominya kurang, di situ juga sudah ada Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar sebagai penunjang. Sesungguhnya jika administrasi kependudukannya bagus, kemudian pemerintah juga mengelola semua tunjangan-tunjangan sosial ini dengan bagus, maka yang tidak mampu pun bisa menerima manfaat dan dapat menyiapkan sarapan anaknya dengan baik.

► **Progas sangat erat dengan pendidikan karakter. Mungkin sangat berkaitan juga dengan pendidikan ramah anak. Bagaimana menurut Bapak tentang hal ini?**

- Di mana-mana mulai terdengar Kota Ramah Anak. Kota Ramah Anak ini tentunya semua orang tu harus peduli dengan menyiapkan sarapan serta bekal bagi anaknya untuk pergi ke sekolah. Ramah Anak juga muncul dari semua masyarakat yang menjaga tingkah lakunya di depan anak ataupun di mana saja karena anak-anak itu mencontoh dari mereka. Apalagi dengan adanya

pendidikan karakter yang polanya adalah teladan yang membuat semua orang harus menjaga tingkah lakunya untuk dapat memberikan teladan kepada anak-anak. Pemerintah sudah menangkap pemahaman tentang pentingnya gizi dengan bagus. Hanya saja sikap ketergantungan dari proyek ini masih kelihatan dan belum melihat kepada pemberdayaan masyarakat.

► **Saran Bapak kepada daerah yang menerima Progas ini kira-kira apa?**

- Saran saya kepada pemerintah daerah janganlah menganggap program ini seperti program membagi-bagi uang, hal tersebut akan membuat masyarakat menjadi manja dan tak berdaya. Ini bukanlah Sinterklas yang hadir saat tertentu membagi-bagi hadiah. Untuk mengawal program ini harusnya dari dinas kabupaten dapat mengawasi sekaligus memberikan laporan perkembangannya. Karena yang kita takutkan adalah mereka terlihat bagus saat kita lihat, namun akan kembali seperti awal saat kita tinggalkan.



Foto: Dok. Agung Tri Wahyunto

PROGAS DI FORUM DUNIA

Kota kecil Siem Reap, yang merupakan ibu kota Provinsi Siem Reap, Kamboja, boleh tak populer namanya di Indonesia. Namun Siem Reap, dalam satu dekade ini, menjelma menjadi kota tujuan wisata yang dikunjungi wisatawan manca menyamai Jakarta, hingga 2 juta per tahun. Pada 11-14 Juli lalu, Siem Reap menjadi tuan rumah kegiatan South East

Asian Regional Meeting on School Feeding, atau pertemuan yang membahas pemberian makanan di sekolah tingkat Asia Tenggara.

Pertemuan itu digagas Program Pangan (World Food Program/WFP), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tahun lalu, WFP mengulirkan program bantuan pangan di seluruh dunia, yang menjangkau



Foto: Dok. Agung Tri Wahyunto

lebih dari 16 juta anak dunia. Hadir pada forum regional itu para ahli dari enam negara, yakni Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Timor-Leste, dan Kamboja sebagai tuan rumah. Indonesia diwakili oleh Drs. Agung Tri Wahyunto, M.Pd. (mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Nikendarti Gandini, Ph.D (WFP Indonesia).

"Setelah kami berbicara di forum Asia Tenggara ini, paginya kami diundang Pemerintah Kamboja, untuk tampil pada pertemuan dengan pejabat-pejabat Kamboja memaparkan Program Gizi Anak Sekolah," kata Agung. Agung dan Niken juga mewakili Indonesia pada pertemuan dunia Global Child Nutrition Forum yang diadakan di Montreal, Kanada, 17-21 September lalu.

PROGRAM MAKANAN SEKOLAH DI KAMBOJA

Pertemuan dibuka Dr. Hang Chuon Naron, Menteri Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kamboja. "Kami menganggap program Pemberian Makan Sekolah sebagai program penting yang mendorong akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas bagi anak-

anak di masyarakat miskin dan memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang atas. Program ini telah membantu mencapai tujuan pendidikan nasional Kamboja dan pembangunan berkelanjutan nasional," kata Hang Chuon Naron.

Sarapan bergizi untuk siswa mendorong anak-anak bersekolah dan dapat memperbaiki pembelajaran dan kesehatan. Di Kamboja, Program Pemberian Makan Sekolah WFP mencakup makanan dan beasiswa sekolah (uang tunai atau makanan yang diberikan sebagai transfer bersyarat kepada anak-anak dengan kehadiran paling sedikit 80 persen) dan mendukung akses universal terhadap pendidikan dasar dan mendorong peningkatan kehadiran dan retensi. Program ini telah dilaksanakan di Kamboja sejak tahun 1999.

Program makanan sekolah di Kamboja menyediakan sarapan bergizi setiap hari untuk 300.000 anak PAUD dan sekolah dasar, atau menjangkau 1.260 sekolah dasar di sembilan provinsi. Pemerintah Kamboja juga menggelontorkan beasiswa kepada siswa kelas IV – VI dari keluarga pinggiran.

Pada hari kedua, 12 Juli, para peserta diajak mengunjungi sekolah di Siem Reap, yang menyelenggarakan program makanan sekolah. WFP memberi andil besar menggulirkan program makanan sekolah di Kamboja. Makanan disediakan oleh donor asing, terutama Amerika Serikat. Kemitraan WFP dan Pemerintah Kamboja telah berjalan beberapa tahun terakhir. Arahnya adalah program makanan tambah selanjutnya dikelola masyarakat, dengan memanfaatkan bahan makanan lokal sebagai bahan utama.

The Home Grown School Feeding Program (HGSF) digulirkan Kamboja dengan mengajar petani dan pemasok lokal menjual hasil panen mereka ke sekolah terdekat. HGSF telah menjaring petani dan pemasok lokal yang mau mengirim bahan makanan ke 84 sekolah di tahun ajaran 2016-17 lalu. Program ini dilaksanakan di empat provinsi dan melayani 17.200 anak. Model HGSF menciptakan peluang bisnis bagi petani kecil setempat karena mereka menyediakan produk segar untuk makanan sekolah. Model HGSF menghubungkan makanan sekolah dengan pembangunan pertanian, sehingga meningkatkan pendidikan dan gizi sambil juga mengkatalisis pertumbuhan ekonomi lokal.

Pertemuan diakhiri dengan pernyataan dari semua peserta untuk berjanji terus bekerja sama memperkuat program makanan sekolah di negara masing-masing. Pada hari terakhir, WFP Kamboja dan Kementerian Pendidikan Kamboja mengadakan pertemuan tambahan dengan para peserta dari Kantor Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Kementerian Pertanian, Dewan Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Kementerian Perencanaan, Kementerian Urusan Perindustrian Urusan, Kementerian

Kesehatan, dan delegasi dari kantor Gubernur Provinsi Siem Reap membahas kolaborasi antarsektor dan menentukan strategi berkelanjutan untuk program pemberian makan di sekolah.

Pada Forum Global Nutrisi Anak Ke-19 di Montreal, Kanada, 17-21 September, Agung Triwahyunto dan Nikendarti, hadir bersama 250 partisipan dari 59 negara. Peserta yang hadir, sebagian besar, atau sekitar 60%, adalah wanita, termasuk seorang Ibu Negara Niger, dan Deputy Perdana Menteri Swaziland, 5 orang menteri, dan 2 wakil menteri, serta anggota parlemen dari Uni Afrika.

Forum berupaya melakukan pendekatan dan upaya multi sektoral oleh pemerintah, LSM, mitra pembangunan, badan PBB, masyarakat sipil, akademisi, peneliti, sektor swasta, media dan organisasi lain. Forum memuji Uni Afrika karena telah meluncurkan klaster makanan sekolah di bawah Continental Education Strategy for Africa (CESA) dan pentingnya jaringan global dan regional seperti Jaringan Pan-Afrika untuk Pemberian Makanan dan Gizi Sekolah, Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), Latin America School Feeding, Asia Selatan dan Asia Tenggara, serta dan jaringan Global Scaling Up Nutrition.

"Forum menyatakan agar program pemberian makanan sekolah harus diintegrasikan dalam agenda pembangunan nasional di semua negara. Selain itu, juga terintegrasi dalam kerangka hukum nasional, kebijakan, dan program seperti pendidikan, keamanan pangan dan gizi, perlindungan sosial, kesehatan, nutrisi, dan pertanian," kata Agung. "Anggaran nasional hendaknya memasukkan program makanan sekolah dan pemberian nutrisi untuk anak dan remaja sebagai prioritas." ●

6

**GELIAT PROGAS
DI DAERAH
SASARAN**



Sarapan Bergizi untuk Anak Sekolah

Program PROGAS diluncurkan secara paralel pada tanggal 27-30 April 2016 di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Belu. Program dilaksanakan serentak di NTT setelah libur lebaran. Wowon menjelaskan, rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran 142 sekolah dasar dan sasaran peserta didik sebanyak 36.551 anak. Sedangkan peserta yang diundang mengikuti bimbingan teknis berjumlah 728 anak. Dengan rincian, 263 anak untuk 51 sekolah dasar di Kabupaten Kupang, 285 orang untuk 57 sekolah dasar di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan 180 anak untuk 34 sekolah dasar di Kabupaten Belu.

Peserta yang mengikuti bimtek terdiri atas lima orang dari masing-masing sekolah, yaitu kepala sekolah, satu guru, dan tiga orang anggota tim masak. Serta mengundang satu orang pembina dari Unit Pelaksana Dinas Pendidikan tingkat kecamatan dan satu orang pembina kesehatan tingkat kecamatan.

Wowon Widaryat, M.Si, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar mengatakan, peluncuran PROGAS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi peserta didik melalui pemberian gizi dan peningkatan asupan gizi melalui sarapan sehat. "Dan tentunya menumbuhkan budi pekerti agar

peserta didik mempunyai perilaku/budaya hidup bersih dan sehat. Untuk membentuk karakter insan Indonesia yang tangguh dan berdaya saing tinggi," katanya.

Selain itu, program ini berhubungan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mampu berdaya saing. Ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas SDM dengan pendekatan konsep partisipasi masyarakat. "Selain melibatkan unsur sekolah, kami kami juga mengajak tim kesehatan daerah sebagai komponen masyarakat yang ahli di bidang penyuluhan dan bimbingan kesehatan. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi semua masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan terkait peningkatan gizi dan pembudayaan hidup bersih," tegas Wowon.

Wowon menegaskan, tanggung jawab pengelola dan tim pelaksana PROGAS amatlah besar. Namun, tanggung jawab itu jangan dipandang sebagai beban melainkan merupakan penghormatan dari Kementerian. Tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan sebagai percontohan awal. Mereka dilibatkan pada proses perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi PROGAS di masing-masing sekolah.

BERASAL DARI BAHAN LOKAL

Pada kesempatan yang sama, Wowon menjelaskan bahwa ada sejumlah ketentuan yang mesti dipahami dalam pelaksanaan PROGAS. Sarapan haruslah berasal dari bahan lokal dan bebas dari cemaran. Makanan juga harus mengandung karbohidrat, protein hewani/nabati, serta vitamin dan mineral. Air minum yang dikonsumsi juga memenuhi persyaratan air yang sehat.

Menu sarapan juga harus mampu memenuhi seperempat hingga sepertiga kebutuhan gizi harian anak. Paling tidak mengandung 400-500 kalori dengan protein 10-12 gram. Makanan harus disajikan dalam bentuk menu lengkap khas daerah yang bersangkutan. "Dengan menggunakan bahan pangan lokal, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Pasti ada yang bertani, beternak, atau pun budidaya ikan," kata Wowon.

Banyak manfaat yang didapat jika menggunakan bahan pangan lokal. Di samping mengandung gizi cukup tinggi lantaran masih segar. Juga mudah didapat dan harganya pun lebih murah. Selain itu, makanan tersebut biasa dikonsumsi masyarakat sehingga pola makannya tidak berubah. Lebih pentingnya lagi, anak-anak dididik untuk mengenal produk lokal agar tumbuh rasa mencintai dan mengenalkan cita rasa tradisional.

Menurut Wowon, sarapan diberikan sebanyak 96 kali dalam setahun. Dan sekali makan senilai Rp 12.000. Dengan demikian, pola menu pun disusun minimal tiga variasi. Untuk menjamin kandungan gizi, menu tersebut harus mendapat persetujuan dari instansi kesehatan atau perguruan tinggi kesehatan di daerah tersebut. "Jika 96 kali makan dalam setahun, maka 96 dibagi 48 minggu. Hasilnya seminggu dua kali makan. Tinggal diatur, apakah hari senin dan rabu atau senin dan kamis. Karena ini ditentukan dengan jumlah siswanya," jelasnya.





Wowon berharap, melalui bimbingan teknis ini menjadi arena saling tukar informasi dalam membuat menu-menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Oleh sebab itu, Kementerian bekerjasama dengan narasumber dari pakar gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), Seameo, Refcon, dan Kementerian Kesehatan, serta tim PROGAS Direktorat Pembinaan SD.

BERPADU PROGRAM 3 K

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Drs. Hendrikus Paut, M.Pd. menyampaikan, PROGAS bersinergi dengan program daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya. "Program ini

kami beri nama 3 K (Kebun Lestari, Koperasi, dan Kantin Sehat). Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah gizi anak sekolah yang dicanangkan oleh Bapak Bupati," katanya.

Melalui program ini, kebutuhan makanan tambahan bagi anak diharapkan bisa tersedia di lingkungan sekolah. Utamanya dengan memanfaatkan potensi lahan yang cukup luas. "Dan ini sudah mulai terasa manfaatnya. Tahap awal untuk tingkat SD per kecamatan sudah dibentuk sekolah model. Selanjutnya akan diadopsi oleh sekolah-sekolah lain. Jumlah SD di Kabupaten Kupang mencapai lebih dari 300 sekolah. Kami berharap ke depannya program ini bisa terlaksana di setiap sekolah," jelas Hendrik.



Foto: Mukti Ali

Hendrik mengatakan, hal ini tentu membawa angin segar bagi masyarakat. Karena kondisi ekonomi dan tingkat sosial kemasyarakatan yang sangat terbatas. Tanpa diduga tahun 2016, pemerintah Kabupaten Kupang didukung dengan kegiatan pemberian makanan/sarapan sehat bagi anak sekolah. "Kurang lebih, anak-anak akan diberi makanan sebanyak 96 kali. Sekali makan seharga 12.000. Jika dihitung-hitung nilainya sangat besar, sekitar 10 miliar. Ini suatu angka yang cukup besar bagi Kabupaten Kupang. Walaupun baru mencapai tiga kecamatan dari 28 kecamatan yang ada. Paling tidak sudah memberikan suatu dukungan di dalam

mengatasi persoalan pendidikan di daerah ini, khususnya pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah," ungkapnya.

Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke sekolah-sekolah di kecamatan lain, Hendrik menemukan hasil yang sangat luar biasa. Di lingkungan sekolah sudah ditanami dengan pisang, ubi, dan lain-lain. Fakta tersebut sangat sinkron terkait kebijakan pemerintah tentang Program 3 K. Hal ini seiring dengan yang diluncurkan Kemdibud yakni pemberian makanan tambahan/ sarapan pagi.

Khususnya bagi bapak/ibu kepala sekolah, Hendrik memiliki harapan besar agar mampu



melaksanakan program ini dengan baik. Mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggung jawabannya. Jadi harus dibentuk tim tersendiri untuk menangani program makanan tambahan ini. “Jika sekali makan 12.000, maka 96 kali dibagi 12.000, kemudian dibagi lagi dengan satu tahun (48 minggu). Berarti rata-rata satu minggu itu dua kali makan. Tinggal diatur, apakah hari seni dan hari rabu atau hari senin dan kamis,” ungkapny.

Karena ini juga ditentukan dengan jumlah siswanya. Apabila satu sekolah jumlah siswanya 553 orang, maka bisa dipastikan sekali makan membutuhkan jumlah uang cukup besar. “Jadi mari kita bergandeng tangan melaksanakan program ini dengan baik. Agar segala yang kita cita-citakan dapat berjalan dengan lancar,” tandas Hendrik.

PENELITIAN DAMPAK PROGAS

Untuk mengevaluasi dampak PROGAS terhadap terhadap tingkat kehadiran, ketahanan fisik, kualitas konsumsi dan status gizi anak sekolah, Direktorat Pembinaan sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud bekerja sama dengan *World Food Programme* (WFP), Institut Pertanian Bogor (IPB) serta didukung partner IPB yaitu tim dari Tokyo University, Jepang yang sudah berpengalaman dalam penelitian sejenis ini.

Penelitian ini akan mengevaluasi dampak PROGAS terhadap kehadiran siswa, ketahanan fisik, kualitas konsumsi dan status gizi anak sekolah. Penelitian yang diketuai Dr. Rimbawan dari IPB ini menggunakan kuasi eksperimen dengan subjek anak sekolah. Penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima sarapan dari PROGAS kelompok intervensi) dan kelompok kontrol.

Bentuk intervensi yang diberikan adalah penyediaan sarapan minimal 3 x seminggu, dengan 96 Hari Makan Anak (HMA) , atau maksimal 5 x sarapan dalam seminggu (tergantung kesanggupan masing masing sekolah Penerima PROGAS) dapat berselang atau berurutan setiap hari.

Penelitian ini dilaksanakan di 3 kabupaten di Provinsi NTT yaitu kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Belu. Produk intervensi yang diberikan kepada siswa berupa makanan sarapan yang disiapkan oleh orang tua dan makanan sarapan yang disiapkan dan diolah oleh sekolah dengan menu yang yang dikembangkan Tim PROGAS Kemendikbud.

Pengambilan data penelitian ini dilakukan dua kali, yaitu sebelum pelaksanaan PROGAS dan setelah selesai Progras. Pengambilan data awal meliputi: a) data dan informasi mengenai sekolah yang terlibat PROGAS; b) data dan informasi mengenai praktek konsumsi pangan dan kebersihan serta status gizi anak sekolah yang terlibat dalam PROGAS; c) data dan informasi mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan gizi; mengumpulkan informasi tentang siswa terhadap makanan lokal.

Hasil penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan PROGAS dapat memberikan dampak kepada siswa dalam meningkatkan kualitas asupan gizi, pengetahuan dan sikap serta perilaku hidup bersih dan sehat, tingkat kehadiran disekolah dan minat belajar. Selanjut dari hasil penelitian ini juga akan dapat menjadi bahan masukan bagi Kemendikbud dalam merumuskan kebijakan PROGAS di masa yang akan datang.





Foto: Rauhanda Riyantama

PROGAS DI KABUPATEN KUPANG: MERAMU MAKANAN SEDERHANA TAPI BERGIZI

Sebagai langkah awal peluncuran Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. SD GMT Manuputi di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ditunjuk sebagai contoh awal pelaksanaan PROGAS. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 28 April 2016.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Pusat dengan Daerah Dr. James Modouw menyampaikan bahwa pelaksanaan program pemberian makanan bergizi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga prestasi belajar. Berdasarkan berbagai sumber, Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah



Foto: Rauhanda Riyantama

yang memiliki kerawanan pangan cukup tinggi. "Jika anak-anak ini tidak makan pagi, otomatis energi tidak maksimal. Dampaknya ketika diajak berpikir untuk proses menyerap ilmu akan sangat kurang. Jadi makan pagi ini sangat penting, khususnya bagi pertumbuhan anak-anak sekolah dasar," jelasnya.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing maka harus menyiapkan SDM sejak dini, salah satunya di sekolah dasar. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang baik antara orangtua, guru, dan pemerintah daerah. "Pertama, kita harus bersama-sama untuk mendorong kesiapan orangtua supaya selalu menyediakan sarapan pagi bagi anak.

Ini program yang tidak boleh dilepaskan dari pendidikan," kata James.

Kedua, guru dan kepala sekolah menyediakan kantin sehat dan bergizi untuk anak-anak. Jangan sampai makanan anak-anak terlalu banyak minyak atau kadaluarsa sehingga mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Ketiga, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahu-membahu memberikan penyaluran atau penyadaran dan juga penyediaan fasilitas untuk mendorong anak-anak memperoleh gizi yang baik di tingkat sekolah.

MEMBENTUK KARAKTER SISWA

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Pengembangan, dan Kerjasama Fakultas Ekologi Manusia IPB Prof. Dr. Ahmad Sulaeman menuturkan, *concern* pemerintah pusat adalah memastikan makanan yang dikonsumsi anak tidak menyebabkan penyakit. "Beberapa waktu lalu pernah ada kasus di salah satu sekolah di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Siswanya banyak yang sakit perut (mencret). Saya sampai diutus ke sana untuk menyelidiki. Ternyata bukan karena makanan tambahan yang diberikan sekolah, melainkan jajanan yang dibeli di luar kompleks sekolah," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi kasus tersebut, saat ini sedang melatih guru dan orangtua siswa terkait Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS). Termasuk bagaimana menyiapkan makanan yang sehat dan aman. Kalau pun setelah dijaga masih terjadi keracunan, mereka juga dilatih bagaimana menangani agar orangtua tidak panik. Dan juga tidak membuat kapok anak-anak makan di sekolah. "Jadi yang diajari bukan hanya masalah bikinnya, tetapi juga menanggulangi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tandas Ahmad Sulaeman.

Ahmad Sulaeman mengatakan, ada tiga komponen yang diajarkan pada PROGAS. Pertama adalah pendidikan gizi. Tujuannya agar anak-anak mengenal bagaimana makanan yang sehat dan bergizi tinggi.

"Nantinya ketika mereka sedang di luar rumah, bisa mengenali makanan yang sehat seperti apa. Tidak jajan sembarangan," jelasnya.

Kedua adalah peningkatan asupan gizi melalui sarapan sehat. Jadi sarapan sehat itu penting bagi tumbuh kembang anak. Jika sejak dini sudah disuguhkan dengan makanan yang bergizi, ketika tumbuh dewasa mereka akan memiliki fisik yang sehat dan pikiran yang kuat.

Dan yang ketiga, pendidikan budi pekerti atau karakter. Hal ini bertujuan agar anak-anak tidak hanya mengandalkan bapak-ibu guru ketika menyajikan makanan di sekolah, mereka bisa mandiri. "Misalnya empat orang bertugas, ada yang menyajikan bubur, menyajikan pisang, memberikan telur, dan sebagainya. Dan untuk yang tidak mendapat giliran bertugas, dia mengantri makanan untuk mereka," jelas Ahmad Sulaeman.

Selain itu, kata Ahmad Sulaeman, pembiasaan lain yang dibudidayakan adalah cuci tangan. Sebelum mulai makan, anak-anak diwajibkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, ketua kelas memimpin doa untuk makan. "Sehabis makan juga dibiasakan cuci tangan dan dilanjutkan membereskan piringnya masing-masing," katanya.



Foto: Rauhanda Riyantama



Mauputi Yacob Asfes, S.Pd.,
Kepala SD GMIT
Foto: Rauhandha Riyantama

SEDERHANA, NAMUN BERGIZI

Sementara itu, Kepala SD GMIT Mauputi Yacob Asfes, S.Pd. mengatakan makanan yang diberikan kepada siswa tidak perlu mewah-mewah. Sederhana tetapi bergizi, itu yang jauh lebih penting. "Yang terpenting bagi anak-anak itu kandungan gizinya, bukan model makanan yang disajikan. Semoga dengan diluncurkannya program ini, kualitas SDM di NTT semakin meningkat," harapnya.

Menurut Yacob, mengurus pendidikan tidak bisa hanya diselesaikan di dalam kelas antara guru dan murid. Ada faktor-faktor pendidikan yang sifatnya internal, yaitu proses belajar mengajar. Tetapi pendidikan juga menyangkut proses eksternal, yaitu asupan gizi, kesehatan, faktor transportasi dari rumah ke sekolah, keamanan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dinas pendidikan dan guru-guru selalu konsentrasi pada faktor internalnya. Sedangkan pemerintah daerah mendukung dari faktor eksternalnya.

Yacob berharap, program gizi ini ke depannya bukan lagi menjadi beban pemerintah pusat. Tetapi juga harus melibatkan masyarakat/publik. Di mana masyarakat ikut memberikan kontribusinya melalui pangan lokal. "Intinya, kita harus mengingatkan kepada guru, orangtua, dan pemerintah, bahwa makan itu penting sebelum belajar. Itu sebabnya pagi ini kita mencanangkan itu," tandasnya.



PROGAS DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN: SUKA CITA MENYAMBUUT GIZI SEIMBANG

Tak hanya di Kabupaten Kupang, peluncuran Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS) berlanjut ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada tanggal 29 April 2016. Seremoninya tak kalah meriah. Kali ini diselenggarakan di Hotel Bahagia Dua, Jalan Gajah Mada No. 55, Soe. Sebelum dimulai acara, warga sekitar mempersembahkan tarian perang khas Suku Abui sebagai tanda penghormatan selamat datang.



Dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Salmun Tabun menyambut suka cita peluncuran program gizi anak di daerahnya. Mengingat TTS termasuk daerah cukup luas, terdapat 32 kecamatan sehingga persoalan-persoalan yang ada cukup kompleks. "Dengan berbagai keterbatasan pemerintah daerah, maka kami masih membutuhkan bantuan pemerintah pusat. Salah satunya terkait pengembangan SDM," katanya.

Meskipun yang hadir di sini merupakan empat kecamatan yang dipilih. Hal ini tetap menjadi semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Menurut data, wilayah TTS termasuk kurang gizi. Pemberian makanan tambahan sebelumnya pernah dilaksanakan. Namun, kali ini lebih spesial lagi karena ditambah dengan program gizi seimbang. "Yang pasti ini sudah dilakukan penelitian. Jadi tidak sekedar sarapan pagi, tetapi sarapan pagi yang bergizi. Nanti tim masak dari masing-masing sekolah

akan dilatih bagaimana menyajikan makanan yang sehat dan bergizi," jelas Salmun.

Salmun mengatakan, jika segala aktifitas dimulai dengan sarapan pagi maka pikiran menjadi segar. Lebih lagi ini dimaksudkan untuk anak-anak sekolah. Bisa dipastikan mereka akan dengan sangat mudah menerima materi pelajaran yang disampaikan. Berbeda lagi jika berangkat sekolah tidak didahului sarapan. Pasti anak-anak akan lemas dan susah konsentrasi dalam belajar.

SEMANGAT SEBARLUASKAN PROGRAM GIZI

Memang TTS kondang dikenal sebagai daerah kering. Bahkan sudah dua bulan ini tidak turun hujan. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri terhadap program pemberian makanan bergizi yang harus menggunakan produk lokal. "Oleh karena itu, program eksternal ini harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh meskipun banyak

hak yang menghambat. Tujuannya agar anak-anak kita, generasi penerus kita menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa," tegas Salmun.

Seperti yang sudah diketahui bersama, di TT hanya ditunjuk empat kecamatan saja. Untuk itu, sekolah yang ditunjuk agar selalu membuka pintu lebar-lebar bagi sekolah lain yang ingin belajar menyajikan makan bergizi. "Program ini harus kita sebarkan ke seantero Nusa Tenggara Timur. Agar hidup kita semakin sejahtera, salah satu yang harus diperbaiki adalah bidang pendidikan. Jika anak-anaknya pintar maka akan tahun yang seharusnya diperbuat untuk negeri mereka," tandas Salmun.

Salmun menjelaskan, tidak semua sekolah di TTS memiliki kualitas yang sama baik. Ada banyak laporan, karena kekurangan ruang kelas siswa sekolah dibagi menjadi dua gelombang, yakni pagi dan siang. Tentunya ini kurang efektif bagi pembelajaran siswa. Memang ini suatu kendala yang harus segera dituntaskan. Agar kelak generasi-generasi selanjutnya menerima pendidikan yang jauh lebih baik.

PENGARUH ASUPAN GIZI TERHADAP PRESTASI ANAK

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Pusat dengan Daerah Dr. James Modouw mengatakan, terdapat data statistik dari kementerian yang menunjukkan bahwa faktor asupan gizi dan pola asuh anak berpengaruh terhadap hasil prestasi anak. Dari hasil Ujian Nasional menunjukkan tingkat integritas yang disumbangkan kabupaten-kabupaten di NTT indeksnya sangat tinggi. Tetapi hasil belajar/prestasi yang dicapai mendapatkan nilai terendah nasional.

"Artinya, kejujuran di NTT sudah sangat bagus. Mereka tidak mau contek-contekan atau praktik kecurangan lainnya. Tetapi





Dr. James Modouw,
Staf Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Pusat dengan Daerah

Foto: Mukti Ali

yang harus dibenahi sekarang ini adalah soal prestasinya,” ungkap James. Alasan ini mendorong untuk melakukan intervensi, khususnya di bidang pendidikan. Salah satu upayanya adalah memberikan makanan bergizi bagi anak.

James menuturkan, pendidikan prosesnya buka hanya dipengaruhi oleh interaksi antara guru dan murid saja. Tetapi banyak faktor lain yang mendukung, misalnya perlu alat tulis, alat permainan edukatif, serta sarana dan prasarana sekolah lainnya. Dan yang tak bisa ditinggalkan adalah peran orangtua atau masyarakat sekitar terhadap pendidikan anak-anaknya.

Faktor pendidikan ini sangat kompleks. Dewasa ini hubungan antara orangtua dengan anak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Dukungan itu bukan hanya sekedar perhatian,

tetapi lebih pada praktik riil. Salah satunya terhadap gizi anak. “Setelah gizi tercukupi, ada faktor eksternal. Antara lain, keamanan akses anak-anak untuk sampai ke sekolah juga harus diperhatikan. Mulai dari transportasinya hingga perlengkapan yang dibawa ke sekolah,” kata James.

Terdapat fenomena yang muncul terkait struktur penduduk di NTT. Anak-anak usia sekolah jumlahnya lebih besar dibandingkan orang-orang dewasa. Ternyata banyak orang dewasa yang merantau keluar daerahnya, kemudian menitipkan anak-anaknya kepada keluarganya. Hal seperti itu bisa membuat asupan gizi terhadap anak berkurang. “Sesungguhnya ketersediaan makanan banyak. Tetapi cara memberikan dan waktu memberikan ini yang sering tidak paham. Kapan memberikan makanan yang tepat untuk anak di sekolah,” pungkas James.



Foto: Rauhanda Riyantama



PROGAS DI KABUPATEN BELU: SARAPAN BERGIZI BERBAHAN JAGUNG, PISANG, DAN UBI

Peluncuran Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS) di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30 April 2016. Acara tersebut berlangsung di SD Inpres Tulamalee, Atambua. Perhelatan kali ini hanya dihadiri oleh guru dan tim masak yang sudah ditunjuk. Kebetulan saat itu bertepatan hari sabtu, pertanda siswa libur sekolah.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Pusat dengan Daerah Dr. James Modouw menjelaskan, upaya pemberian makanan tambahan sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2000, 2006, dan 2011. Akan tetapi berhenti begitu saja dengan berbagai alasan. "Kini, di tahun 2016 kita mencoba menghidupkan kembali dengan memberikan makanan tambahan bergizi bagi anak sekolah," katanya.



Program makanan tambahan bagi anak kali ini diselenggarakan lewat sekolah. Dengan harapan dapat berjalan secara berkelanjutan. Ketika bapak/ibu guru bertemu dengan orangtua supaya menyebarkan praktik ini. Tidak mungkin yang memberikan makanan ini bapak/ibu guru terus menerus di sekolah.

James berharap, program ini selama satu tahun dibiayai oleh pemerintah pusat. Setelah itu pemerintah daerah supaya bisa mengambil alih dan terus dilanjutkan. "Kita sudah punya pengalaman baik dengan WFP di beberapa daerah lain. Bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat untuk menyediakan makanan lokal, entah jagung, ubi, dan lain sebagainya. Yang dilihat jangan mewahnya makanan, tetapi kandungan gizi yang ada di makanan tersebut," katanya.



Foto: Rauhanda Riyantama

PERLU PEMAHAMAN ORANGTUA

Selain itu, orangtua juga harus disosialisasikan bahwa anak itu ketika belajar pagi membutuhkan makan. Kalau tidak makan, apa saja pelajaran hanya akan masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Mereka tidak memiliki daya tangkap yang baik karena tidak memiliki energi untuk berpikir dan menyerap pelajaran. Dan makanan itu adalah obatnya untuk menyerap ilmu.

Terkadang orangtua hanya memberikan makanan tanpa mempertimbangkan waktunya. Waktu makan pagi dikasihkan siang, waktu makan siang dikasihkan malam. Hal ini akan sia-sia. Sekali pun dia makan banyak sama sekali dia tidak bisa menyerap ilmunya. Oleh sebab itu, orangtua harus diberi tahu bahwa yang terpenting anak harus makan pagi meskipun sedikit. "Kalau tidak sempat makan di rumah, orangtua bisa menyiapkan bekal untuk makan di sekolah. Utamanya ketika jam sembilan ke atas, anak masih bisa terus makan. Supaya otaknya memiliki kekuatan untuk berpikir," ujar James.

James berharap program ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun seterusnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, bahwa pendidikan anak usia dini tanggung jawabnya di tangan desa. "Tentunya kita memiliki anggaran desa yang berasal dari pemerintah pusat. Anak-anak di kelas awal, satu sampai tiga diharapkan dapat dukungan gizi yang bagus lewat program-program dari desa. Dengan demikian program ini bisa berlanjut," tandasnya.



Modesta Batetemo, S.Pd.

Foto: Rauhanda Riyantama

PENTINGNYA SARAPAN PAGI

Sementara itu, Kepala Inpres Tulamala, Atambua Ibu Modesta Batetemo, S.Pd., mengungkapkan kegembiraannya karena sekolah yang ia pimpin ditunjuk sebagai sekolah model program gizi di Kabupaten Belu. Rerata anak-anak yang sekolah di sini berasal dari keluarga dengan perekonomian rendah. Dampak untuk anak-anak pun tidak pernah.

"Kadang ketika upacara bendera di hari senin banyak anak-anak yang pingsan. Jika ditanya, pasti jawab tidak sarapan pagi. Jadi ini program betul-betul mengatasi permasalahan yang kami alami selama ini. Dalu tahun 2011 ada PMT-AS, tetapi hanya berupa snack. Namun kali ini berupa sarapan pagi. Kami sangat senang," ungkap Modesta.

Menurut Modesta, sarapan pagi sangat penting bagi kelangsungan proses KBM. Jika anak-anak belajar dalam kondisi kenyang, mereka bisa menyerap materi yang

disampaikan guru dengan sempurna. "Banyak data menyebutkan bahwa indeks integritas di daerah kami sangat bagus, akan tetapi nilainya sangat rendah. Salah satu penyebabnya anak-anak tidak pernah sarapan sebelum berangkat sekolah," katanya.

Menu-menu yang disajikan nantinya akan beragam pada setiap harinya. Tujuannya agar anak-anak tidak mudah bosan. Dan yang terpenting mengandalkan produk lokal, sebagai wujud meningkatkan taraf ekonomi warga sekitar. Banyak menu yang bisa disajikan, antara lain pisang rebus, jagung rebus, atau ubi rebus.

Rencananya pemberian sarapan ini dilaksanakan ketika istirahat pertama, yaitu pukul sembilan pagi. Dalam sebulan anak-anak akan mendapatkan jatah makan sebanyak 12 kali. Jadi setiap minggunya mendapat jatah tiga kali makan. Mengingat nilai sekali makan sebesar 12.000 rupiah, maka tim masak harus betul-betul menyiapkan dengan baik. "Untuk itu mereka mengikuti bimbingan teknis. Mereka belajar menyajikan makanan bergizi dengan takaran yang seimbang," terang Modesta yang sudah menjadi kepala sekolah sejak tahun 2008 itu.

Modesta mengatakan, untuk memenuhi kandungan gizi rencananya akan menyajikan dari unsur nabati dan hewani. Misalnya mie bihun dengan ayam goreng. Menu penutupnya disajikan jagung boseng, yaitu jagung yang sudah ditumbuk sehingga keluar isinya saja. Kemudian dicampur kacang tanah, kacang pali, dan sambal tomat.



**PROGAS DI KABUPATEN TANGERANG:
BERSAMA OASE KABINET KERJA
TINGKATKAN GIZI ANAK**

Program gizi anak sekolah yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ini juga bersinergis dengan program kerja Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja (KK) untuk mewujudkan Kohod sebagai Kampung Sejahtera, yang menjadi bagian nawacita kabinet kerja Jokowi-Yusuf Kalla. Melalui program gizi anak

sekolah dapat meningkatkan gizi peserta didik melalui pendidikan gizi, peningkatan asupan gizi, penumbuhan budi pekerti, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, serta peningkatan kemampuan belajar dalam membentuk Insan Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Tangguh dan Berdaya Saing.







Foto: Jilan/Kemendikbud

Di Desa Kohod, yang terletak di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, rangkaian kegiatan PROGAS dilaksanakan sejak tanggal 27 hingga 30 Mei 2016, dengan sasaran 4 sekolah dasar dan sasaran peserta didik sebanyak 1.820 orang. Desa Kohod dipilih karena secara administratif terletak berdekatan dengan Kota Jakarta, akan tetapi kehidupan masyarakatnya termasuk kategori kurang sejahtera.

Bagi OASE KK, Desa Kohod merupakan salah satu sasaran kinerja nyata program OASE KK untuk mewujudkan "Kampung Sejahtera" dengan tema "Menuju Desa Kohod Sejahtera Bersama OASE Cinta". Dengan program gizi anak sekolah ini, diharapkan dapat mewujudkan Desa Kohod Sejahtera Bersama OASE Cinta.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Wowon Widadyat, rombongan OASE KK yang dipimpin oleh Ibu Fery Farhati Anies Baswedan, Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Bupati

Tangerang, serta berbagai tamu undangan. Sebenarnya Gubernur Banten pun masuk dalam daftar undangan, namun beliau tak dapat hadir dikarenakan harus menjalankan tugas lainnya.

Dalam laporannya, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Wowon Widadyat menyampaikan bahwa tujuan program gizi anak sekolah mendukung dan sesuai dengan program aksi OASE KK dalam bidang pendidikan karakter, bidang peningkatan kualitas keluarga, dan bidang pemberdayaan sosial budaya.

Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja memiliki tiga bidang yaitu pendidikan karakter, peningkatan kualitas keluarga, dan sosial budaya demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Ketiga bidang tersebut merupakan penjabaran dari Visi OASE yaitu mewujudkan Indonesia Berkarakter, Damai dan Sejahtera. Sedangkan misi OASE adalah Menjalankan Pendidikan Karakter, Berupaya meningkatkan



Foto: Jilan/Kemendikbud

kualitas keluarga, dan Melakukan kegiatan pemberdayaan sosial budaya. Sedangkan program kerja OASE adalah mendukung program yang bertemakan revolusi mental, mengubah pola pikir dan memberdayakan masyarakat agar dapat hidup mandiri, produktif, kreatif, dan berkarakter.

Dalam sambutannya, Ketua OASE KK yang diwakili oleh Ibu Fery Farhati Anies Baswedan menyampaikan beberapa program aksi yang telah dan akan dilaksanakan oleh OASE KK. Salah satunya adalah bidang peningkatan kualitas keluarga, yang pada intinya sesuai dan mendukung Program Gizi Anak Sekolah sebagai program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harapannya dengan berbagai sentuhan program kerja OASE KK dapat meningkatkan kesehatan, pendidikan, pembangunan mental, dan karakter masyarakat Kohod.

Di akhir sambutannya, ibu Fery Farhati Anies Baswedan mengajak untuk secara bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangun pendidikan

Indonesia. "Saya percaya kita akan mampu mencapai hasil yang lebih baik di waktu yang akan datang," katanya.

Beberapa rangkaian acara pencaanangan PROGAS antara lain pemberian sarapan bagi siswa-siswi SDN Kohod III oleh Rombongan OASE KK bersama para pejabat di lingkungan Ditjen Dikdasmen beserta pejabat Pemkab Tangerang. Menu sarapan yang disajikan adalah hasil karya tim masak SDN Kohod III dengan beberapa menu yang sesuai dengan kearifan lokal di Desa Kohod. Selain itu juga diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Penerima Bantuan (SPPB) antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan empat Kepala Sekolah Dasar (SDN KOHOD I, II, III, DAN IV) penerima bantuan Program Gizi Anak Sekolah dan Bantuan Sarana dan Prasarana.

BIMTEK PELAKSANA PROGAS

Selain pencaanangan PROGAS di SDN Kohod III, Direktorat Pembinaan Sekolah

Dasar juga mengadakan Bimbingan Teknis Pelaksana PROGAS, yang dilaksanakan di lokasi yang sama. Kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan untuk menyamakan persepsi peserta dalam pelaksanaan Program Gizi Anak Sekolah Tahun Anggaran 2016, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam melaksanakan Program Gizi Anak Sekolah Tahun Anggaran 2016 di masing-masing sekolah, dan mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Program Gizi Anak Sekolah Tahun Anggaran 2016.

Peserta yang diundang untuk mengikuti bimbingan teknis terdiri dari lima orang dari masing-masing sekolah terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru sebagai tim pengelola PROGAS di masing-masing sekolah, 1 orang Pembina dari Unit Pelaksana Dinas Pendidikan Tingkat Kecamatan, dan 1 orang Pembina Kesehatan Tingkat Kecamatan. Sedangkan beberapa narasumber yang mengisi acara bimtek ini antara lain para pakar gizi dari perguruan tinggi dan instansi terkait seperti WFP, Dinas Kesehatan, BPOM, serta Tim PROGAS Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

Paranarasumber tersebut menyampaikan beberapa materi yang meliputi kebijakan umum Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2016 dalam pelaksanaan Program Gizi Anak Sekolah Tahun 2016, mekanisme pelaksanaan Program Gizi Anak Sekolah Tahun 2016, petunjuk teknis Program Gizi Anak Sekolah Tahun 2016, serta memberikan modul pelaksanaan Program Gizi Anak Sekolah Tahun 2016 yang terdiri dari: (a) Kebutuhan gizi anak sekolah, (b) Pendidikan gizi seimbang, (c) Penumbuhan budi pekerti, (d) Penyajian, pengolahan, dan penyajian makanan untuk sarapan, (e) Penjaminan keamanan pangan, (f)

Pencegahan dan penanggulangan keracunan pangan, dan (g) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PROGAS. Selain itu, juga diadakan praktek perencanaan dan perhitungan gizi anak sekolah dan praktek pengolahan dan penyajian makanan untuk sarapan.

Drs. Agung Tri Wahyunto, M.Pd, Kepala Seksi Kelembagaan Subdirektorat Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar berharap bimbingan teknis ini dapat menjadi arena saling tukar informasi dalam membuat perencanaan, uji coba menu-menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi peserta didik. "Galilah informasi sebanyak-banyaknya dari nara sumber dan beberapa modul yang telah disiapkan sebagai bahan diskusi dan acuan pelaksanaan program gizi anak sekolah," katanya, dalam sambutan pembukaannya.

Agung juga mengatakan bahwa kegiatan PROGAS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi belajar peserta didik melalui pemberian pendidikan gizi, peningkatan asupan gizi melalui sarapan sehat dan penumbuhan budi pekerti agar peserta didik mempunyai perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat, membentuk karakter Insan Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh jajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyampaikan terima kasih atas dukungan OASE KK dalam berbagai program Kemdikbud, serta mengajak para duta OASE KK untuk terus membantu dan mendukung peningkatan mutu dan akses pendidikan dasar dan menengah baik dalam pendidikan karakter, meningkatkan kualitas peserta didik melalui pembinaan keluarga, dan pemberdayaan sosial budaya di sekolah.



PROGAS DI KABUPATEN TANGERANG: SARAPAN CINTA DI KAMPUNG SEJAHTERA

Tak biasanya kesibukan di Kampung Pintu Air, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang ini begitu terasa di sepanjang sudut kampung yang letaknya sekitar 20 km dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Jalan kampung sudah beraspal. Gang kecil yang hanya cukup dilewati sepeda motor berpapasan pun sudah berpaving conblok. Rapi, sepanjang kiri kanan jalan juga bersih. Gapura cantik bertuliskan Kohod, Kampung Sejahtera, disertai logo OASE, Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja berdiri gagah.

Pagi itu, 2 Agustus 2017, menjadi hari istimewa bagi warga Desa Kohod, khususnya

Kampung Pintu Air, karena kehadiran tamu istimewa. Tak lain adalah Ibu Negara Iriana Joko Widodo, didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla. Sebelumnya, tanggal 19 Juli 2017, Kohod sudah kedatangan tamu istimewa lain, yakni Ibu Suryan Widati Muhadjir (isteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy) dan Ibu Ida Raudah Hamid (isteri Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad). Hadir juga mendampingi Bu Menteri adalah Dra. Poppy Dewi Puspitawati, M.A. (waktu itu menjabat Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar), Dra. Garti Sri Utami, M.Ed. (waktu itu menjabat Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan



Foto: Dipo Handoko

Pendidikan Dasar dan Menengah), serta Drs. Wowon Widaryat, M.Si, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar yang didampingi sejumlah pejabat Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (Dit. PSD).

Desa Kohod, sebelumnya merupakan desa miskin di Kabupaten Tangerang. Sekitar 60 persen dari 8.000 jiwa penduduk desa hidup dari bertani dan mencari ikan. Beberapa masalah sudah dibenahi, yakni perbaikan infrastruktur, kesehatan, pengelolaan sanitasi, pendidikan, dan partisipasi warga terhadap desa tertinggal ini.

Iriana Jokowi yang mengenakan blus putih lengan 7/8 dipadu syal merah motif kotak-kotak itu blusukan masuk ke gang-gang kampung. Di antaranya mengunjungi Pos

Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu (Posyandu), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Lestari, kebun bibit, dan pelayanan IVA Test untuk pemeriksaan dini kanker bagi ibu. Iriana dan Mufidah juga berkenan mengunjungi stan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain menyapa sejumlah anak, Ibu Iriana dan Ibu Mufidah berkenan memberikan suapan sarapan cinta bagi dua siswa, mewakili teman-temannya.

Dit. PSD menjadi salah satu institusi yang berpartisipasi pada program Kampung Sejahtera dengan tema "Desa Kohod Sejahtera Bersama OASE Cinta" ini. Pada tahun 2016, Direktorat PSD telah melaksanakan program



Foto: Dipo Handoko

intervensi di empat Sekolah Dasar (SD), yakni SDN Kohod I SDN Kohod II, SDN Kohod III, dan SDN Kohod IV. Program berupa pembangunan fisik sekolah dan pemberian sarapan melalui Program Gizi Anak Sekolah (Progas) kepada peserta didik di empat sekolah tersebut.

Secara lebih rinci, program fisik berupa rehabilitasi SDN Kohod I, pembangunan ruang kelas baru (RKB) berupa 4 ruangan di SDN Kohod II dan SDN Kohod III dan 3 ruangan di SDN Kohod IV. Tahun 2017, bantuan fisik yang sudah dianggarkan adalah pembangunan RKB bertingkat 2 ruangan dan 7 paket sanitasi di SDN Kohod I. Sementara untuk SDN Kohod III, bantuan fisik untuk 3 RKB dan kantin.

"Kini kondisi sarana prasarana pembelajaran di empat sekolah sudah jauh lebih bagus. Tempatnya nyaman, bersih, sehat, dan aman. Progas menjadikan kualitas kesehatan siswa meningkat, sehingga mereka mampu belajar lebih lama, tingkat kehadiran di sekolah meningkat, pengetahuan gizi meningkat, dan meningkatkan perilaku

hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter," kata Wowon Widaryat.

SARAPAN CINTA DARI BU MENTERI

Rabu pagi, 19 Juli 2017, beberapa ibu terlihat sibuk menyiapkan lauk dan nasi di sebuah tenda kecil di halaman SDN Kohod III, Kabupaten Tangerang. Ada yang memasukkan lauk ke dalam wadah. Ada pula yang memasukkan buah-buahan ke dalam keranjang kecil. Sedangkan sisanya mulai mengangkat peralatan makan, tempat nasi dan keranjang berisi buah ke tiap kelas.

Terlihat juga siswa-siswa berdatangan, berbaris rapi di depan tempat cuci tangan di depan kelas. Satu persatu mereka bergantian mencuci tangan menggunakan sabun hingga bersih. Selanjutnya, mereka masuk kelas dan mengantri mendapatkan sarapan. Menu pagi itu adalah ayam goreng dan bihun, ditambah buah jeruk dan salak.



Kesibukan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Progas. Kunjungan Ibu Suryan Widati dan rombongan, menyaksikan langsung penyiapan sarapan yang dimasak warga, yang juga para ibu siswa SDN Kohod III. Tahun 2017, Progas di SDN Kohod III dilaksanakan selama 120 hari atau 5 hari seminggu dalam enam bulan. Anggaran dari Direktorat PSD, setiap siswa mendapatkan jatah sebesar Rp 15 ribu untuk sarapan. "Namun tidak semua untuk pangan, karena ada juga untuk transportasi dan intensif bagi orangtua yang telah membantu. Kisarannya sekitar 4 ribu," kata Jumadi, S.Pd., Kepala SDN Kohod III.

SDN Kohod III memiliki 472 siswa. Ibu-ibu membentuk 3 kelompok memasak, yang terdiri dari 15 orang. Setiap hari tiap kelompok bergantian berbelanja dan memasak. Sekolah belum memiliki ruangan untuk memasak. "Untuk sementara proses memasak dilaksanakan di rumah saya, yang berada di belakang sekolah," kata Jumadi.

MENU BERBEDA

Koordinator kelompok memasak, Siti Asura, S.Pd., mengatakan, "Agar tidak bosan setiap hari, menu saya selalu berbeda. Di antaranya ada bubur manis, bihun dan ayam goreng. Lain hari ada nasi kuning, nasi jagung dan ikan kuning. "Sore kami biasanya mulai berbelanja ke pasar terdekat. Kalau bahan-bahan belanjaan kurang kami harus berbelanja ke pasar di pusat Kabupaten Tangerang. Kami memasak mulai pukul 4.30. Sebelum jam tujuh sudah siap," tutur Yoyoh, sapaan akrab guru SDN Kohod III ini.

Bahan pokok untuk sarapan memang tidak bisa didapat dari hasil petani dan nelayan setempat. Pasalnya, kata Yoyoh, petani di Kohod rata-rata menanam padi. "Jarang ada yang menanam bahan pangan lain. Itu pun hasil panen mereka selalu langsung dijual ke tengkulak," ujar Yoyoh.

Dari tahap pengolahan hingga memasak. Yoyoh dan para ibu sudah mendapatkan pelatihan gizi. Mereka juga menjaga keberhasilan bahan makanan, saat mengolah



dan memasak. Para ibu menggunakan penutup kepala, sarung tangan, dan celemek. Karena air sumur di Kohod tidak layak dikonsumsi, para ibu menggunakan air isi ulang untuk kebutuhan memasak dan membersihkan bahan-bahan makanan. Tak kurang 7 sampai 8 galon per hari kebutuhan untuk memasak.

Sementara di SDN Kohod IV, masakan disediakan untuk 321 anak. Tim yang dibentuk hanya dua kelompok memasak, beranggotakan masing-masing 5 orang. Selama lima hari dalam sepekan, mereka memasak di salah satu ruangan di sekolah. "Dengan adanya Progas, kami sangat terbantu dalam memenuhi gizi anak-anak Kohod yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Alhamdulillah, dengan adanya Progas, asupan gizi anak meningkat," kata Mulyani, S.Pd, guru SDN Kohod IV. Setelah Progas berjalan, tingkat kehadiran siswa meningkat. "Bahkan siswa yang tadinya malas untuk berangkat ke sekolah sekarang jadi lebih rajin," katanya.

Selain itu, Progas juga menumbuhkan budaya positif kepada anak. Di antaranya, pembiasaan mengantre dan mencuci tangan, sudah dibawa anak ke rumah. Mulyani berharap kebiasaan hidup bersih dan sehat ini nantinya dapat berimbas lingkungan masing-masing.

Tak hanya siswa, orang tua pun merasakan dampak positif dari Progas. Mona, orang tua siswa yang turut menjadi tim memasak, sangat senang terlibat pelaksanaan Progas. Karena selain anaknya mendapatkan gizi yang baik, ia juga mendapatkan insentif dari sekolah. "Kebiasaan anak di sekolah pun sudah mulai terbawa ke rumah. Anak-anak mulai mau ikut membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah," ujar Mona.

MENGUBAH PERILAKU

Dalam kesempatan berbeda, ketika menjadi narasumber program Semangat



Foto: Dipo Handoko

Pagi Indonesia di TVRI, Wowon Widaryat menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, terjadi perubahan yang sangat signifikan semenjak program ini berjalan pada tahun 2015. Program yang menasar di wilayah-wilayah pinggiran yang jauh dan rawan kekurangan gizi ini juga mulai mengubah perilaku anak.

"Jumlah siswa yang masuk kelas meningkat. Anak pun tidak mudah sakit karena mendapatkan asupan makanan yang tepat, sehingga kekebalan tubuhnya meningkat," kata Wowon. "Bahkan untuk wilayah sasaran di daerah Indonesia timur, perubahannya cukup besar dengan adanya program ini," kata Wowon.

Wowon berharap, tak hanya gizi anak saja yang tercukupi, tetapi kebiasaan siswa dan

guru pun dapat berubah menjadi lebih baik. Khususnya kebiasaan hidup sehat dan bersih juga meningkat. "Karena tujuan paling penting dilaksanakannya Progas adalah meningkatkan kemampuan belajar siswa, dalam upaya membentuk karakter insan Indonesia yang cerdas, produktif, tangguh dan berdaya saing," Wowon menambahkan.

Dampak lain pelaksanaan Progas adalah, berkurangnya pengeluaran keluarga siswa karena tidak lagi memberikan jajan kepada anak, sehingga bisa dialihkan untuk budaya anak menabung. Peran serta masyarakat, khususnya orangtua siswa juga meningkat untuk peduli pada hidup sehat dengan menyediakan bahan pangan bergizi bagi putera puteri mereka.



Foto: Dipo Handoko

PROGAS DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA: SARAPAN CINTA PEMBENTUK KARAKTER ANAK

Hari itu, Jumat, 26 Mei silam, suasana SD Nasional Katholik (Naskat) Mathias 3, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, lain dari biasanya. Pagi buta, kesibukan sudah tampak di sebuah ruangan yang disulap menjadi dapur. Ada yang mengiris sayur dan menyiapkan bumbu. Ada ibu yang sedang menggoreng ayam. Ada pula yang tengah menyiapkan piranti makan berupa piring dan gelas.

Kesibukan empat orang ibu itu tengah menyiapkan sarapan bagi siswa-siswa. Mereka

tak lain para orangtua siswa SD Naskat Mathias 3. "Kami senang menyiapkan sarapan bagi anak-anak," kata salah seorang ibu. Harum masakan bergizi itu sudah mengundang selera anak-anak yang masih sibuk dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Hari itu, menu yang dimasak adalah sup dengan lauk ayam goreng, plus sepotong semangka. Sarapan sehat itu selalu mengandung sayuran, lauk daging atau ikan, dan buah-buahan.



Foto: Dipo Handoko

Sebelum sarapan bersama itu, anak-anak dibiasakan mencuci tangan dengan sabun. Mereka kemudian antri menunggu giliran mendapat sarapan yang disiapkan satu persatu oleh para ibu. Semua anak menikmati sarapan bergizi itu dengan lahap. Usai menikmati makan pagi, anak-anak juga dibiasakan membantu meringankan pekerjaan kelompok ibu-ibu yang bertugas memasak. Anak-anak mengumpulkan sisa-sisa makanan dan kulit buah di tempat sampah. Mereka juga membantu mencuci piring.

Hari itu menjadi lebih istimewa karena SD Naskat Mathias 3 menjadi tuan rumah kegiatan Pencanangan Program Gizi Anak Sekolah (Progas). Peresmian kegiatan Progas 2017 dilakukan oleh Ibu Suzana Ramadhani Masduki (istri Teten Masduki, Kepala Staf Presiden) dan Ibu Suryan Widati Muhadjir (istri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy). Mendampingi Ibu Suzana dan Ibu Wida, hadir pula Ibu Ida Raudha Hamid (istri Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad), dan Dewi Riyantini Widaryat (istri Direktur Pembinaan SD Wowon Widaryat).

Rombongan pejabat yang hadir adalah Dr. James Modouw, M.MT (Staf Ahli Mendikbud Bidang Hubungan Pusat dan Daerah), dan Drs. Wowon Widaryat, M.Si (Direktur Pembinaan

Guru SD), dan Agus Haryanto, Ph.D (Seameo-Recfon Regional Center Pangan dan Nutrisi). Hadir pula pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dit. PSD, yakni Muklish, ST (Kasubdit Program dan Evaluasi), Bambang Hadi Waluyo, S.Pd., M.Pd (Kasubdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana), Dr. Juandanihsyah, MA (Kasubdit Kurikulum), dan Agung Tri Wahyunto, M.Pd. (Kasi Kelembagaan).

Suzana Ramadhani Masduki mengawali sambutannya mengungkapkan kekaguman dengan keindahan alam Maluku Tenggara. Tak menyangka telah menempuh perjalanan jauh dari Jakarta "Saya bangga mendapat kehormatan dapat turut mencanangkan Program Gizi Anak Sekolah," katanya.

Suzana Ramadhani mengajak para orangtua untuk memulai dari rumah memberikan sarapan pagi bagi anak-anak mereka. "Semua yang terlibat dalam ruang publik, baik di sekolah, di kantor dapat menjadikan kebiasaan yang baik ini. Saya berharap pengetahuan mengenai gizi, dapat diwujudkan dengan pemberian sarapan, dan



Suzana Ramadhani Masduki
Foto: Dipo Handoko



Suryan Widati Muhadjir

Foto: Dipo Handoko

asupan gizi buat anak-anak. Saya berharap Bapak Bupati agar menjalankan Program ini secara kontinu. Harapannya anak-anak Maluku Tenggara dapat bersaing dengan anak-anak di kota-kota lain. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, sehat, kuat, yang kelak mampu membangun daerah mereka menjadi luar biasa,” kata Ibu Suzana Ramadhani.

Ibu Wida Muhadjir dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa bahagia menyaksikan anak-anak yang secara fisik dan intelektual tercukupi gizi makanannya. Wida Muhadjir mengapresiasi terselenggaranya Progas, dan mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang turut terlibat dalam Progas untuk mewujudkan anak-anak bergizi baik. “Saya sangat senang melihat sekolah ini menjadi tempat yang menyenangkan, menjadi rumah kedua bagi siswa-siswa. Saya juga sangat bahagia dan bangga bertemu dengan Ibu-Ibu yang telah memasak untuk anak-anak. Makanan bergizi dimasak dengan cinta. Penghargaan besar kepada para ibu,” katanya.

Anthea Webb, Direktur Program Pangan Dunia (*World Food Program/WFP*) untuk Indonesia juga merasa terhormat mewakili WFP yang berada di bawah PBB ikut diundang pada pencaanangan Progas. “Pemerintah Indonesia telah menunjukkan, menempatkan,

mengedepankan, para nelayan, petani, dan anak-anak sebagai yang utama. Dengan pemberian gizi di sekolah, anak-anak bisa menjadi pintar, kuat dan berhasil mewujudkan apa yang cita-citakan. Indonesia, khususnya Maluku Tenggara, telah menjadikan contoh di dunia, sebagai negara yang berhasil memberikan gizi di pelosok-pelosok yang menjadi target sasaran,” katanya.

KEBANGGAAN MALUKU TENGGARA

Drs. Yunus Serang, M.Si, Wakil Bupati Maluku Tenggara yang membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Mendikbud yang telah mempercayakan kepada Maluku Tenggara, Surga Tersembunyi Anugerah Pesona Indonesia 2016, sebagai tuan rumah pelaksana pencaanangan Progas. “Kami berharap Progas mampu menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi unggul, demi terciptanya generasi Indonesia yang sehat, cerdas intelektual, cerdas emosi, cerdas spiritual, dan cerdas sosialnya,” katanya.

Tradisi dan adat istiadat Suku Kei di Maluku Tenggara mengajarkan menghormati tamu yang berniat baik untuk bersama membangun tanah Kei. “Kami terbuka dengan perbedaan ke dalam hati orang Kei semua. Kami Suku Kei adalah saudara dari Bapak Ibu semua. Jangan lihat kami dari warna kulit yang gelap dan wajah sanger, tetapi sesungguhnya, kami orang Kei adalah pribadi-pribadi yang bersahaja dan bersahabat dengan semua orang tanpa sekat apa pun,” ujar Serang.



"Kehormatan ini memberikan semangat kami untuk memperhatikan gizi peserta didik, sehingga tercipta generasi bangsa yang sehat dan cerdas," kata Yunus menambahkan. Output dari Progas diharapkan memberi tambahan energi dan semangat bangsa dalam menghadapi persaingan global. Bupati Maluku Tenggara mengharapkan Kemdikbud terus memperhatikan percepatan pendidikan di daerah 3T untuk mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

"Kami menyampaikan undangan kepada Bapak Teten Masduki dan Bapak Mendikbud Muhadjir Effendy meluangkan waktu, menikmati pesona alam di daerah Kepingan Surga di Bumi Pertiwi. Pada bulan Oktober nanti ada ajang Pesona Meti Kei.

Kami berharap semua yang berkunjung ke sini menjadi duta wisata Maluku Tenggara. Ceritakanlah keindahan dan keramahan kami," kata Yunus.

MENJANGKAU 100.000 SISWA

Progas dilaksanakan Direktorat Pembinaan SD (Dit. PSD) sejak tahun 2016. Pada tahun 2016, sasaran peserta didik yang disentuh Progas sebanyak 38.457 siswa di 146 SD di Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekolah sasaran berada di Kabupaten Tangerang, Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Belu.

Tahun 2017 ini, Progas dilaksanakan di 563 SD di Provinsi Banten, NTT, Maluku, Papua, dan



Papua Barat. Sasaran Progas diharapkan menjangkau hampir 100.000 siswa. Siswa sasaran berada di sekolah-sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Manokwari Selatan, Keerom, dan Kabupaten Jayapura.

Wowon Widaryat menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah memberi dukungan penyelenggaraan Progas. Dukungan itu di antaranya datang dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Seameo-Reconf, Institut Pertanian Bogor, Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia, dan *World Food Program*. "Terima kasih juga kepada Dharma Wanita Kemendikbud yang secara terus menerus telah mendukung dan mengawal Progas, telah memastikan dan mengawasi dari penyiapan hingga penyajian sarapan bagi anak-anak," kata Pak Direktur.

Progas digagas Dit. PSD dilaksanakan di daerah yang mendapat dukungan pemerintah daerah untuk melaksanakan Progas secara berkesinambungan. "Kami buat nota kesepahaman, MoU, dengan pemerintah daerah agar nanti melanjutkan Progas dengan APBD," ujar Wowon.

Daerah sasaran progas merupakan daerah kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), atau daerah yang masuk Prioritas 1 dan Prioritas 2 pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan Program Pangan Dunia (*World Food Programme*) di bawah PBB. "Intervensi gizi kepada siswa di sekolah dibutuhkan sebab banyak anak usia 6-12 tahun, yang merupakan anak usia sekolah dasar, yang status gizinya kurang. Mereka berindikasi mengalami defisit asupan gizi, protein dan memiliki kebiasaan makan kurang dari tiga kali sehari," katanya.



Progas bukan semata memberikan sarapan pagi yang sehat dan bergizi. Namun juga memberikan pembinaan gizi yang komprehensif. Pendidikan gizi itu disebarluaskan kepada siswa, guru, dan orangtua siswa. Kandungan gizi menu sarapan harus memenuhi seperempat sampai sepertiga kebutuhan gizi peserta didik, atau paling tidak mengandung energi 400-500 Kal dan protein 10-12 gram.

“Yang tak kalah penting, pembiasaan karakter untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat sejak kecil sebagai bagian dari program Penguatan Pendidikan Karakter,” ujarnya. Sebelum pencanangan Progas, Dit. PSD telah menggelar Bimbingan Teknis Progas Sekolah Dasar di Hotel Kimson, Langgur, Maret lalu. Bimtek Progas diikuti 92 kepala SD di Maluku Tenggara.

Dampak Progas pada siswa di daerah sasaran Progas tahun 2016 lalu, memberikan hasil positif bagi siswa. Sejumlah hal positif itu adalah tingkat kehadiran siswa di sekolah meningkat, kemampuan konsentrasi belajar meningkat, serta berat badan siswa juga meningkat. Siswa juga menyukai produk pangan lokal. Selain itu juga tumbuh partisipasi masyarakat, khususnya orangtua siswa, dalam memanfaatkan dan menyediakan pangan lokal untuk menyediakan sarapan bagi siswa.

“Progas juga merupakan upaya Direktorat PSD untuk memenuhi amanah Nawacita Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla. Salah satu programnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi belajar peserta didik, mewujudkan masyarakat Indonesia yang mampu berdaya saing, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan manusia seutuhnya,” kata Wowon.

**PROGAS DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT:
SIAPKAN ANAK SAMBUT
MASA DEPAN GEMILANG**

Pagi yang cukup cerah, langit bersih membiru dengan sedikit awan berserakan. Angin semilir meniup dari pantai yang berbatasan langsung dengan Hotel Jayakarta tempat menginap rombongan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Saat itu, Sabtu 16 September, rombongan berada di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari luar hotel, musim kemarau sangat terasa, udara pagi nan kering mengusik permukaan kulit, tanah terlihat begitu tandus dan berdebu. Tanaman pun banyak yang mengering hingga berwarna kecoklatan. Saat melangkah ke belakang,

dengan mudah mendapati pemandangan pantai yang begitu indah. Laut biru disertai riak ombak kecil menyapa daratan. Nun jauh di sana, terlihat deretan gugusan kepulauan, salah satunya adalah Pulau Komodo, pulau yang dihuni Komodo, hewan purba yang hanya ada di Indonesia.

Pukul 7.30 waktu setempat, rombongan Kemendikbud sudah bersiap meluncur meninggalkan hotel. Mereka menuju sebuah Sekolah Dasar (SD) untuk melihat langsung pemberian makanan sehat bagian dari Program Gizi Anak Sehat (Progasa).





Rombongan yang terdiri dari Suryan Widati Muhadjir, S.E., M.SA., Ak., CA (istri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Ida Raudah Hamid (istri Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah), Dwi Ryantini Widaryat (istri Direktur Pembinaan Sekolah Dasar) beserta suami yakni Drs. Wowon Widaryat, M.Si (Direktur Pembinaan Sekolah Dasar), Dr. James Modouw, Staf Mendikbud Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, serta beberapa pejabat terkait dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (Direktorat PSD).

DIPUSATKAN DI SDK LONGGO

SD yang menjadi pusat pelaksanaan Progas saat itu adalah SD Khatolik Longgo, berada di Dusun Dalong, Kelurahan Watu Ngelek Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT.

SD itu merupakan salah satu dari 84 SD di Kabupaten Manggarai Barat yang menerima bantuan Progas tahun 2017 ini. Sementara jumlah SD keseluruhan di Manggarai Barat katanya ada 500 lebih.

Kurang lebih 20 menit perjalanan setelah menempuh jarak kurang lebih 15 km dengan menyusuri pemukiman, sawah dan gunung barulah sampai di SDK Longgo. Sekolah swasta yang beroperasi sejak tahun 1970 ini memiliki lahan empat hektar. Area sekolah yang cukup luas itu, di bagian belakang dan samping sekolah dijadikan kebun sekolah dengan ditanami berbagai tanaman. Ada juga lapangan sepak bola membentang di samping sekolah.

Wajah sekolah ini tidak tampak dari pinggir jalan, lantaran di bagian depan berdiri sebuah



Foto: Mukti Ali

gereja. Bagi siswa Khatolik cukup mudah untuk beribadah, tinggal berjalan beberapa langkah saja sudah sampai di gereja. Sebagian besar siswanya memang beragama Khatolik, hanya beberapa siswa saja yang muslim. SDK Longgo yang memiliki 14 guru dan 6 orang di antaranya berstatus PNS ini membimbing siswa sebanyak 160 anak. Mereka dibagi menjadi 8 rombongan belajar (rombel). Dua kelas yang dipecah menjadi dua rombel, adalah kelas IV dan kelas V.

Bangunan sekolah ini sudah permanen. Sayangnya nyaris tak ada poster yang nampang di bagian depan atau dinding ruang kelas umumnya sebuah SD. Poster-poster itu biasanya berisi anjuran, larangan, dan nasehat serta petuah-petuah bermakna yang membangkitkan semangat belajar siswa. Begitupun di dalam kelas, nyaris mulus tanpa gambar dan poster. Tetapi syukurlah, foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih terpampang di bagian depan tiap ruang kelas.

Meja kursi untuk belajar di tiap ruang kelas juga sudah banyak yang tak layak pakai. Lemari guru pun terlihat banyak yang rusak. Buku-buku di dalamnya juga terlihat kurang terawat dengan baik. Tetapi, seluruh siswa di sekolah ini terlihat cukup ceria dan penuh semangat belajar, angka bolos sekolah dan putus sekolah semakin berkurang dan hampir tak ada. Konon, salah satunya lantaran adanya Progas ini.

DISAMBUT AYAM JAGO DAN AIR KENDI

Hari itu, Sabtu pagi, siswa SDK Longgo semuanya berada di sekolah dengan seragam putih merah lengkap dengan topinya. Sebagian siswa berbaris di sepanjang lorong masuk halaman sekolah dengan memegang lidi/stik yang diujungnya dipasang kertas warna merah menyerupai bendera. Sebagian lainnya bersiap di kelas dengan beragam kesibukan. Ada yang menyiapkan meja di luar ruang kelas untuk menaruh sebuah galon air. Galon itu berkran di bagian bawahnya, di dekat galon ada sebuah sabun cuci tangan. Rupanya peralatan itu untuk cuci tangan sebelum



Foto: Mukti Ali

dan sesudah mereka makan. Sebagian siswa lainnya membersihkan bagian dalam ruang kelas, ada yang menyapu ada yang menata meja dan kursi. Beberapa siswa dengan dandanan penari khas Mabur berdiri paling ujung pintu masuk halaman sekolah. Mereka bersiap menyambut Bu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta rombongan dengan tarian selamat datang.

Pada deretan bangunan sekolah sisi kanan depan, ada dua ruang kelas kondisinya masih sangat meprihatinkan. Dindingnya terbuat dari seng dan papan kayu, ventilasinya sangat jauh dari kata layak. Masuk di dalam ruangan

ini terasa gelap dan pengap. Satu ruangan di antaranya disulap menjadi dapur umum sejak adanya Progas. Pagi itu, di dapur berkumpul para ibu wali murid sekitar 20 orang. Mereka sibuk memasak, ada yang merajang sayuran, ada yang menggoreng bahan masakan, ada pula yang mengaduk nasi, serta ada yang menyiapkan bumbu-bumbu.

Sembari memasak mereka terlihat ngobrol tentang makanan sehat bagi anak-anaknya. Sesekali mereka tampak bercanda dengan tertawa lebar. Saat itu, mereka sedang menyiapkan sarapan bagi siswa SDK Longgo dengan menu nasi goreng, sayur bercampur

ikan kuning dengan pelengkap buah pisang. Nasih gurih, sama dengan nasih uduk di Jakarta. Hanya saja nasi gurih di Mabar dikasih campuran kacang tanah yang digoreng.

Di bagian lain, terlihat tenda beratap terpal warna biru dan *orange* berdiri di bagian ujung halaman sekolah. Ada juga *banner* yang mengiasi tenda dengan bertuliskan SARAPAN CINTA Membentuk Karakter Siswa yang Cermerlang Menyongsong Masa Depan Gemilang. Di tempat itulah acara resmi kunjungan Bu Menteri dilangsungkan. Pejabat yang hadir selain rombongan Kemendikbud, hadir pula Bupati Mabar, Drs. Agustinus Ch. Dula didampingi istri sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Mabar, Wyes Dula. Pejabat daerah lain terlihat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Mabar, Magol Marten, S.Pd., Sekretaris Dinas PKO, Drs. Tobias Napang, Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mabar, Ir. Puji Astuti, Kepala Desa Watu Nggelek, serta 84 kepala sekolah se-Mabar penerima Program Progas.

Begitu rombongan tiba, para siswa yang bertugas menari dengan pakaian merah muda berumbai lengkap dengan rok panjang berbahan tenun serta hiasan kepala khas NTT mulai menggerakkan tubuhnya. Iringan musik sederhana terdengar. Di bagian depan berbaris empat orang sesepuh desa menyambut rombongan. Setelah prosesi

pengalungan shal kepada tamu perempuan, mereka memakaikan kopyah kepada tamu lelaki. Kemudian, sang ketua adat menyambut rombongan dengan bahasa Manggar, disertai penyerahan kendi berisi air dan ayam jago kepada Drs. Wowon Widaryat, M.Si.

Rombongan tampak terkesima dan terharu dengan prosesi penyambutan yang begitu sakral. Di sisi lain, pemandangan anak-anak SD yang menampakkan keceriaan menambah semangat para tamu undangan. "Terus terang kami sangat terharu dengan penyambutan tadi. Terimakasih untuk semuanya, Bapak Bupati beserta Ibu, dan jajarannya, kepala sekolah dan para guru yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Saya lihat anak-anak juga sangat ceria hari ini," ujar Wida Muhadjir, sapaan akrab istri Mendikbud mengawali arahnya.

MAKANAN LOKAL JAUH LEBIH SEHAT DAN BERGIZI

Wida Muhadjir selanjutnya menyampaikan, bahwa Progas di Mabar ini sepertinya cukup berhasil. Ia berharap, kehadirannya bersama rombongan mampu membangkitkan semangat khususnya untuk anak-anak didik dan para guru. Diharapkan pula semangat juga tumbuh pada orangtua murid dan masyarakat, karena Progas merupakan program yang melibatkan banyak pihak. "Komitmen pemerintah untuk meningkatkan

mutu pendidikan, khususnya bagi anak-anak didik tidak pernah main-main. Kesehatan menjadi penting untuk diperhatikan. Untuk bisa menjadi anak yang pintar berawal dari tubuh yang sehat, dan saya lihat anak-anak di sini sehat semuanya," katanya disambut tepuk tangan yang hadir.

Setelah melihat kondisi anak dan lingkungan sekolah, Wida Muhadjir lantas berujar, bahwa masa sekolahnya dulu juga tidak jauh berbeda dengan lingkungan sekolah di SDK Longgo tersebut. "Saya jadi ingat masa lalu, sekolah saya dulu juga seperti ini. Bersekolah dan bermain seperti anak-anak di sini. Kebetulan ibu saya seorang guru. Kita semua sama, anak-anak harus diantarkan membangun masa depan gemilang, siapa tahu nanti ada yang bisa menjadi menteri, menjadi bupati, dan lain sebagainya," katanya memberi semangat.

Seperti halnya Presiden Joko Widodo, lanjut Wida Muhadjir. "Kita tahu bapak Presiden kita itu orang yang sangat sederhana, juga berasal dari keluarga sederhana. Waktu masih sekolah dulu, Beliau punya prinsip, kalau temannya belajar satu jam, maka

Pak Jokowi akan belajar lebih dari satu jam. Kalau temannya belajar dua jam, maka Pak Jokowi akan belajar lebih dari dua jam. Saya harap anak-anak di sini juga begitu, bangunlah harapan yang tinggi, jangan mudah menyerah dan putus asa. Anak-anak harus sehat, harus pintar semua," katanya yang lagi-lagi disambut gemuruh tepuk tangan.

Wida Muhadjir juga berharap kepada para orang tua, guru dan kepala sekolah agar lebih memperhatikan anak-anaknya yang sedang sekolah. "Berikanlah mereka bekal untuk sekolah, bekal itu tidak harus mahal dan repot menyiapkannya. Banyak bahan makanan lokal yang sehat dan bergizi yang bisa diolah untuk anak-anak. Untuk makanan di sekolah, melalui Progas ini kita juga menggandeng para orangtua agar mereka mengetahui ilmu tentang gizi, ilmu makanan yang sehat," jelasnya. "Tadi saya sudah minum minuman dari kelapa muda yang dicampur gula merah, juga ada kue berbahan umbi-umbian, lezat sekali. Saya kira makanan seperti itu sangat baik dan sehat, karena tidak bercampur bahan-bahan kimia," Wida Muhadjir menambahkan.

Di penghujung arahannya, Wida Muhadjir berpesan kepada para kepala sekolah yang hadir. "Kepada bapak ibu saya titipkan, tolong anak-anak ini dikelola dengan baik. Ini amanat dari kami karena masa depan mereka jauh



lebih penting. Manggarai Barat ini dikaruniai keindahan alam yang luar biasa. Siapkanlah masa depan mereka dengan sebaik-baiknya, siapkanlah mereka menjadi generasi yang tangguh, menjadi pemilik potensi alam ini," pungkasnya.

PROGRAM STIMULAN YANG HARUS BERKELANJUTAN

Dalam menyampaikan sambutan, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Drs. Wowon Widaryat, M.Si mengatakan, bahwa Progas adalah program stimulan yang harus berkelanjutan. Hal ini untuk menjamin anak-anak tumbuh dengan sehat. Ada dua program prioritas pemerintah dalam hal ini, yakni menangani anak yang gagal gizi dan program gizi anak sekolah. "Selain itu, di dalam Progas ini ada tiga hal penting yang bisa di dapatkan, pertama pendidikan tentang gizi, jadi bukan sekedar sarapan sehat tetapi harus bergizi, makanya dilibatkan pula Puskesmas, PKK yang memahami tentang gizi. Kedua, asupan gizi yang seimbang, anak-anak harus sarapan pagi yang bergizi dan seimbang. Dan ketiga adalah berkaitan dengan pendidikan karakter.

Progas ini juga membiasakan karakter anak, bagaimana sebelum dan sesudah makan harus cuci tangan, kemudian membersihkan tempat makan masing-masing, membaca doa sebelum makan dan lain sebagainya," jelas Wowon.

Sebagai bantuan yang bersifat stimulan, lanjut Wowon, daerah tidak bisa hanya menunggu guyuran bantuan pemerintah. Setelah distimulus pemerintah pusat, pemerintah daerah harus segera mengambil kebijakan untuk melakukan kelanjutannya secara mandiri. Yang paling baik, ketika kemandirian asupan makanan bergizi itu sudah tertanam pada diri orangtua murid. "Kelanjutan inilah yang harus dilakukan pemerintah daerah. Menanamkan kebiasaan orangtua murid agar memberi makanan yang sehat dan bergizi bagi anaknya. Mengolah makanan yang bergizi tidak harus mahal dan susah. Pemerintah daerah bisa memberdayakan petani, peternak, nelayan. Kami juga menggandeng ibu-ibu karena mereka lebih paham tentang makanan dan makanan yang sehat dan bergizi," terang Wowon.

Saat sebelum acara dimulai, staf Subdit Sarana dan Prasarana, Drs. Hendi Sudarman, MM., menyampaikan



arahan dan dialog santai dengan para kepala sekolah penerima Progas. Dalam arahannya, Hendi mengatakan bahwa Progas ini untuk memastikan bahwa gizi anak tercukupi setiap harinya selama bersekolah. "Menu yang diberikan harus bervariasi, Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan Puskesmas apakah menu tersebut sudah tercukupi gizinya. Jangan sampai menu yang diberikan tiap hari sama. Dan Bapak Ibu harus memantau anak-anak menu yang diberikan itu apakah lahap di makan atau tidak, jika anak tidak suka jangan dipaksakan. Makanya dalam program ini kami sarankan bisa mengolah makanan dari bahan lokal, itu saya kira akan disukai anak-anak," katanya.

OPTIMALKAN DANA SESUAI KETENTUAN

Sementara itu, Bupati Mabar Drs. Agustinus Ch Dula dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada pemerintah khususnya Kemendikbud. "Kehadiran bapak ibu ini perlu kita sambut dengan senang karena datang membawa Program Progas, dulu namanya Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah atau PMTAS. Semuanya tujuannya sama memberikan makanan sehat, tetapi ada yang berbeda dari Progas ini. Tidak sekedar memberi asupan makan, tetapi juga memberi

tambahan ilmu tentang makanan sehat dan bergizi kepada orangtua murid, kepada anak-anak juga diberi pengetahuan cara makan yang benar harus cuci tangan dulu sebelum dan sesudah makan, harus berdoa dulu. Progas ini melibatkan banyak pihak, ada PKK, Puskesmas dan lain sebagainya sehingga mampu mendorong ekonomi daerah. Sekali lagi kami sangat berterimakasih," kata lelaki yang biasa disapa Dula itu.

Besar anggaran untuk Progas yang berikan kepada sekolah-sekolah di Mabar total 26 miliar rupiah. "Kita harus bersyukur mendapat program dengan anggaran yang cukup besar. 26 miliar rupiah saya rasa cukup bikin masyarakat Manggarai Barat gemetar. Karenanya, manfaatkanlah keuangan sebaik-baiknya, gunakanlah sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Lihatlah reaksi anak-anak kita ini, menunjukkan kegembiraan, mereka senang dan bersyukur bisa sekolah. Bapak ibu guru dan kepala sekolah harus memastikan ujung dari Progas ini adalah hasil belajar mereka harus lebih baik," kata Dula.

Dula juga meminta para guru, kepala sekolah, dan sekaligus orangtua murid untuk bekerjasama mengoptimalkan program pemerintah tersebut. "Pemerintah dan kita semua menginginkan anak-anak kita sehat



(Kiri) Drs. Agustinus Ch Dula,
Bupati Manggarai Barat

(Kanan) Drs. Hendi Sudarman, MM.,
Staf Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

FOTO: Mukti Ali



jasmani dan rohani sejak dini, agar mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk itu, petakan mana anak yang kurang semangat, mana yang rumahnya jauh, mana yang kelihatan kurus, kepada mereka berikan perhatian lebih dan berikanlah makan yang banyak dan bergizi,” ujar Dula.

Bupati juga mengingat ritual masyarakat Mabar ketika anaknya sudah usia kelas IV. Saat kelas IV, orangtua anak mengadakan pesta besar-besaran. Mereka rela menyimpan uangnya rapat-rapat untuk hajatan tersebut.

Kebutuhan pendidikan bahkan terkalahkan. Pesta itu juga menunjukkan status ekonomi orangtua, bahkan mereka rela berhutang demi Sambut Baru. “Setelah Sambut Baru, seolah tuntas sudah tanggungjawab orangtua, anak berhenti sekolah tidak dilarang. Saya kira ini pemahan yang keliru. Tetapi saat ini masyarakat sudah banyak yang memahami pentingnya pendidikan, Sambut Baru itu program orangtua, anak-anak ya tetap meneruskan sekolah. Apalagi dengan adanya Progas ini anak-anak lebih bersemangat datang ke sekolah,” katanya.



(Kiri) Salah satu wakil orangtua murid dan (Kanan) Tobias Napang, Sekretaris Dinas PKO Manggarai Barat

FOTO: Mukti Ali

ANAK JADI RAJIN KE SEKOLAH

Salah satu wakil wali murid saat menyampaikan kesan terhadap Progas, mengatakan bahwa Progas telah memberi banyak ilmu kepada orangtua murid dan mengatakan siswa untuk lebih semangat belajar. "Sejak progas berjalan, anak-anak Labuan Bajo khususnya sekolah yang mendapat Progas, semakin giat sekolah. Kehadiran di sekolah 100 persen hadir. Anak-anak lebih mengetahui bagaimana cara makan yang sehat. Berat badannya terlihat juga meningkat, walaupun tidak banyak. Orangtua murid juga demikian, selain mendapat insentif juga mengetahui ilmu tentang makanan yang sehat dan bergizi. Banyak makanan-makanan lokal yang selama ini kurang diperhatikan, kini menjadi lebih diperhatikan. Dampak bagi

petani lokal, sekarang tidak bingung ke mana memasarkan hasil panen, cukup di sekolah. Barang-barang jualan terutama sayur, buah, kacang-kacangan, kelapa, makin laris. Kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya program ini," ujar lelaki itu.

Sedangkan sekretaris dinas pendidikan dan olahraga (PKO) Manggarai Barat, Tobias Napang mengatakan dalam memaksimalkan dana progas untuk belanja sehari-hari, telah dibentuk tim di tiap sekolah. "Tim ini selanjutnya menyusun menu sehari-hari, menu itu selain kreativitas orangtua juga berkat usulan, masukan dari tim PKK dan puskesmas. Dampak terbesar dari program ini, anak-anak lebih rajin sekolah, tidak ada yang terlihat lesu, semuanya sehat," katanya.

PROGAS DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT: MERAJUT MIMPI ANAK-ANAK LABUAN BAJO

Samar-samar asap mengepul dari balik genting di salah satu ruangan di SDK Longgo. Rupanya, ruangan itu adalah dapur masak yang aktif sejak kehadiran Program Progas awal tahun 2017 lalu. Di situlah ibu-ibu wali murid yang tergabung dalam kelompok masak melakukan aktifitas tiap pagi. Saat kunjungan Kemendikbud berlangsung, tak kurang 30 ibu-ibu ramai di dapur menyiapkan makan untuk murid-murid sekolah itu. Tampaknya seluruh anggota kelompok sengaja didatangkan. Tak ada yang diam, semuanya melakukan tugas yang telah dibagi koordinator.

Tak lama kemudian, tiga wanita cantik memasuki ruangan tersebut. Mereka adalah Wida Muhadjir, Ida Hamid, serta Dwi Ryantini Widaryat. Dengan ramah ketiga istri pejabat Kemendikbud itu langsung bersalaman dan menyapa ibu-ibu yang tengah asik memasak. "Selamat pagi ibu-ibu, masak apa hari ini?" sapa Wida Muhadjir.

Para ibu kompak serentak menjawab, dan saling bersahutan. "Masak nasi gurih bu," jawab seorang ibu yang tengah mengaduk nasi. "Ini kami memasak sayur sawi, campur kol dan tomat serta ikan kuning bu," sahut ibu lain dengan menunjukkan sayuran yang tengah di masak. "Kami buat es kelapa muda campur gula merah. Ada pisang goreng dan kue ubi untuk para tamu," sahut ibu lainnya kental dengan logat Manggarai Barat.

Obrolan singkat terus berlanjut, ibu-ibu itu terlihat sangat senang dan bangga bisa bertemu langsung, berbicara, berjabat tangan serta berfoto bersama dengan istri pejabat saat itu. Wida Muhadjir sangat terharu menyaksikan kebersamaan para wali murid di dapur masak hari itu. Sangat kompak dan penuh kebersamaan. "Terimakasih ibu-ibu sudah meluangkan waktu menyiapkan makanan untuk anak-anak. Harus diingat ya, makanan untuk anak-anak harus bergizi dan seimbang, jangan lupa makanan lokal dan sayuran," ujarnya dengan lembut memberi usulan.



KEBERANIAN MENJADI POTENSI BESAR

Saat jam 9.00, makanan sudah matang dan disajikan di tiap ruang kelas. Wida Muhadjir beserta rombongan Kemendikbud yang didampingi Bupati serta istri dan pejabat terkait mengunjungi tiap ruang kelas. Di ruang kelas paling ujung, terlihat seorang guru tengah mengambilkan makan kepada anak-anak yang mengantri.

Beberapa saat kemudian, dengan lembut dan lihai, Wida Muhadjir meminta waktu menggantikan guru tersebut. Dengan ramah Bu Menteri mengambilkan makan lengkap dengan pisang disertai beberapa nasehat. Tak lupa ia juga menanyakan nama, kelas dan cita-cita. Saat si anak mengucapkan cita-cita, sontak Wida Muhadjir dan pejabat yang mendampingi tersenyum sembari angkat jempol dan berkata hebat. Tak lama berselang pejabat lain bergantian mengambilkan sepiring makan seperti yang dilakukan Wida Muhadjir. Mereka juga melakukan hal yang sama, menyampaikan nasehat dan anjuran makan yang banyak dan harus habis.

Karena jam makan sudah tiba, untuk mempercepat waktu, rombongan berpecah memasuki tiap kelas. Di tangan ibu-ibu ini membawa beberapa bingkisan kecil, rupanya hadiah yang akan dibagi ke beberapa siswa. Terlihat Ida Hamid begitu semangat mengikuti kunjungan ini, ia memasuki kelas dan langsung menyapa siswa. Ia memberikan kuis dengan beberapa pertanyaan. Ia sedikit kaget, lantaran anak-anak cukup berani menjawab pertanyaan, walaupun jawaban itu ada sebagian yang belum tepat. Pertanyaan-pertanyaan itu seputar tokoh nasional, hingga menghafal Pancasila. Bagi yang berani menjawab, Ida Hamid langsung memberikan bingkisan kecil itu. Anak-anak tampak sangat senang.

Ketika hendak mau makan, terlebih dahulu anak-anak berdoa. Ida Hamid yang ada di kelas itu, lantas mengikutinya. Salah satu siswa ditunjuk memimpin doa menjalankan dengan sangat hikmat. "Saya lihat anak-anak di sini cukup berani, meskipun beberapa jawaban kurang tepat. Tetapi keberanian ini modal bagi mereka untuk bisa tumbuh lebih baik. Ini yang

harus diolah dan dikawal oleh para guru dan menjadi perhatian orangtua, jangan sampai keberanian ini terlantarkan dan tak terarah," kata Ida Hamid. Ida juga mengapresiasi jalannya doa yang berlangsung sangat hikmat. "Anak-anak terlihat rajin beribadah, cara berdoanya juga sangat khusus," lanjutnya.

Perhatian Ida tak luput pada fisik anak-anak. Ia menilai anak-anak badannya cukup sehat. Tak ada yang terlihat kurus, perut buncit, dan lesu. "Saya kira anak-anak di sini sama dengan anak-anak yang terlihat di daerah maju, fisiknya cukup kuat. Tetapi apakah gizi dalam tubuhnya sudah tercukupi, ini yang harus diperhatikan, karena gizi menunjang kecerdasan mereka. Dampak Progas saya kira harus bisa diserap oleh ibu-ibu wali murid, jangan sampai Progas berhenti berhenti pula perhatian mereka terhadap asupan gizi anak-anaknya, harus terus dan berkelanjutan," ujar Ida.

MANFAAT PROGAS BAGI KAUM IBU

Sejak adanya Progas, SDK Longgo memang menjadi ramai ibu-ibu wali murid yang memasak. Dalam seminggu, kegiatan memasak berlangsung empat hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kerja mereka terbagi menjadi tiga kelompok yang terdiri dari 8 orang. Kecuali saat kunjungan Kemendikbud, sekitar 20 lebih para ibu berkumpul saling membantu memasak. "Beginilah kalau para ibu berkumpul, meskipun sibuk memasak mereka sangat ramai. Ibu-ibu sangat senang dengan adanya Progas, karena mereka bisa berbagi

cerita tentang anaknya saat dirumah, berbagi pengalaman tentang membuatkan makan yang sehat untuk anaknya," ujar Fransisca Daho, Koordinator masak dari sekolah yang sekaligus guru kelas IV di SDK Longgo.

Tiap kelompok, lanjut Fransisca, memiliki koordinator sendiri. Mereka dibagi memasak tiap hari yang sudah terjadwal. Belanja bahan memasak dilakukan sore hari sebelumnya. Dan selepas magrib, sebagian yang dekat sekolah sudah mulai bekerja menyiapkan bahan yang akan di masak, biasanya berlangsung sampai jam 10 malam. Kemudian dilanjutkan esok hari jam 5 pagi, saat itulah anggota kelompok memulai aktifitas memasak.

Selama empat hari terdapat menu berbeda yang disiapkan. Jika Senin, menunya nasi goreng, sayur kol, sawi dan tomat bercampur ikan kuning yang disuwir-suwir, serta buah. Hari Selasa, ada ubi dan jagung serta buah, hari Rabu disiapkan bihun, sayuran buncis, wortel serta buah. Sedangkan hari Kamis disiapkan kolak pisang dan ubi serta buah. Untuk buah, bervariasi yang diberikan, kadang pisang, kadang semangka, kadang melon. "Anak-anak di sini memang lebih suka makan nasi, kami mencoba jagung dan umbi-umbian awalnya kurang suka, tetapi sekarang sudah mulai suka. Begitupun dengan bihun awalnya kurang suka. Untuk buah tergantung di pasar yang tersedia apa, kalau pisang sebagian besar dari wali murid. Menu makanan kadang juga divariasi yang penting keuangan mencukupi, kadang diberikan nasi putih, sayur sop bercampur sedikit daging serta buah," terang Fransisca.



Fransisca Dahoh,
Koordinator masak dan guru kelas IV
di SDK Longgo

FOTO: Mukti Ali



Aprianti Dahoh,
Koordinator masak kelompok 1
dan ibu wali murid

FOTO: Mukti Ali



Theresia,
ibu wali murid SDK Longgo

FOTO: Mukti Ali

Hal yang membanggakan dari Progas ini, lanjut Fransisca, anak-anak lebih rajin ke sekolah dan terlihat jauh lebih bersih dan rapi dibanding sebelumnya. Pengetahuan para ibu tentang ilmu gizi dan makanan sehat perlahan juga lebih meningkat. "Untuk pengetahuan makanan sehat dan bergizi kami banyak dibantu oleh tim Puskesmas dan PKK, mereka rutin memantau menu yang kami siapkan, sering kali juga memberi masukan-masukan. Ibu Bupati yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK kadang datang mengunjungi ibu-ibu memasak tanpa pemberitahuan, beliau memang sangat aktif dan peduli terhadap kesehatan dan gizi anak. Banyak nasehat-nasehat yang beliau berikan, dan kami para orangtua sangat senang," kata Fransisca.

Lain fransisca lain pula dengan Marlis, ibu wali murid yang anaknya bernama Aprianti Dahoh dan kelas IV ini menjadi koordnator memasak kelompok 1. Ia merasa sangat senang dan bangga menjadi tim memasak di sekolah. Ia juga merasa bertambah pengetahuannya tentang makanan yang sehat untuk anaknya. "Terkadang saya dikasih tahu anak, mana makanan yang sehat dan tidak sehat. Kebetulan dia ingin menjadi dokter. Kita jadi suka membicarakan makanan yang sehat dan bergizi," katanya.

Demikian juga dengan Theresia, ibu dari Enderika Hepi murid kelas VI. Meskipun harus bekerja keras dan capek, tetapi rasa capek itu

hilang karena berkumpul bersama ibu-ibu. "Ini sudah pekerjaan ibu-ibu, memang capek ya, tetapi saya senang karena banyak teman dan semuanya menyiapkan untuk anak-anak kita sendiri," ujar Theresia.

Theresia mengininkan anaknya kelak menjadi seorang Bidan. Perempuan yang awalnya tidak tahu kelak anaknya menjadi apa, sejak Progas bergulir ia mulai menatap masa depan anaknya. "Kalau melihat orang-orang Puskesmas ke sini rasanya senang dan bangga menjadi seperti mereka. Saya jadi suka melihat Bidan atau apa yang bekerja di rumah sakit atau Puskesmas. Kebetulan anak saya juga ingin menjadi Bidan," terang Theresia.

MIMPI DAN HARAPAN ANAK LABUAN BAJO

Sementara itu, Agustinus Aba atau yang biasa di panggil Gusti Aba mengatakan bahwa potensi anak-anak di SDK Longgo dan Manggarai Barat umumnya sama dengan anak-anak dari daerah yang lebih maju. "Anak-anak di SD ini sudah mulai tumbuh, potensinya mulai kelihatan dan bermacam-macam. Saya kadang merasa iba dan kasihan, karena berada di daerah yang jauh dari akses pendidikan, juga karena kehidupan orangtuanya yang pas-pasan, kebanyakan menjadi petani. Tetapi saya gembira, anak-anak masih semangat sekolah dengan berjuta cita-cita. Ada yang



Agustinus Aba biasa di panggil Gusti Aba,
Kepala SDK Longgo

FOTO: Mukti Ali

ingin menjadi pemain sepak bola, ada yang ingin menjadi polisi, dokter, guru dan lain sebagainya. Ditambah lagi adanya Progas saya kira makin menjadi magnet untuk anak-anak," ujar Gusti.

Meskipun harus naik turun gunung, lanjut Gusti, anak-anak tetap semangat dan tak pernah lelah untuk mengais ilmu. Angka bolos sekolah, *drop out* semakin tidak ada, angka kelulusan juga lulus semua. "Saya kira ini bagian dari dampak Progas. Anak-anak juga lebih disiplin, bisa menjaga kebersihan walaupun masih seperti ini. Mau makan dan sesudahnya sudah cuci tangan dengan bersih, di kelas ada yang memimpin doa, dan itu menjadi rutin dilakukan. Kebiasaan ini akan sangat baik untuk mereka kelak," lanjut Gusti.

Sebagai kepala sekolah yang baru menjabat beberapa bulan lau, Gusti merasa masih harus belajar banyak. Apalagi dengan adanya Progas, ia ingin memastikan guru,

orangtua murid, dan masyarakat yang terlibat bisa menjalin kerjasama yang semakin baik agar Progas benar-benar berhasil maksimal. Ia juga berharap, kultur yang terbangun dari Progas ini terus berkelanjutan, terutama bagi orangtua dalam memberikan makanan sehat dan bergizi.

Saat menjelang makan, anak-anak SDK Longgo tengah sibuk mencuci tangan dengan sabun secara bergantian. Di sudut lain, ada Lucas Fernando. Siswa kelas V yang sedang asik ngobrol dengan kawan-kawannya menunggu antrian cuci tangan. Lucas yang rumah tinggalnya berjarak sekitar 2 kilo meter ini ke sekolah berjalan kaki bersama kawan-kawannya. Tiap hari Lucas sampai di

sekolah jam setengah 7 pagi, padahal sekolah masuk jam 7.30 pagi waktu setempat. Ia suka membaca buku bergambar dan bercita-cita ingin menjadi seorang polisi. "Karena polisi itu bekerja untuk rakyat dan bisa menjaga keamanan," kata Lucas.

Sepulang sekolah biasanya Lucas bermain dengan kawan-kawannya. Sekolah ini belum menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter dengan mengharuskan siswa belajar hingga jam 4 sore dan berlangsung selama lima hari. Tetapi sekolah masih melangsungkan pembelajaran 6 hari dan pulang siang sekitar pukul 13 untuk kelas III, IV, V, dan VI. Tetapi berbagai pembiasaan dasar terutama berjabat tangan dengan guru dan tamu, bersih-bersih, cuci tangan, berdoa sudah diterapkan di sekolah ini.

Lain Lucas lain juga Rainaldo Gonziano atau yang biasa disapa Gonzi. Siswa yang juga kelas V ini bercita-cita menjadi seorang guru. "Guru itu pintar, bersih dan sabar. Tetapi saya tidak suka guru yang galak," katanya. Selama sekolah Gonzi juga tidak pernah diantar orangtuanya, ia berangkat bersama kawan-kawannya. Meskipun naik turun gunung sejauh 2 kilo meter ia tak pernah takut.

Ada juga siswa perempuan yang belum tau cita-citanya. Saat disapa ia tersenyum malu-malu, dia adalah Yohana Ririn atau yang biasa

disapa Ririn. Tiap hari Ririn bersekolah diantar ayahnya dengan sepeda motor. Jam 7 pagi sudah berada di sekolah, ia tidak pernah telat, dan tidak pernah bolos. Saat ditanya ingin menjadi apa, dengan polos ia ingin naik kelas. Sontak saja kawan-kawan di sampingnya tertawa dan memberi masukan berbagai macam pekerjaan, dan Ririn tersipu malu.

Siswa kelas II lain yang kami temui adalah Leonardus Lote, lelaki yang suka memakai topi terbalik ini ingin menjadi Dokter Umum. Sedangkan Felisia Elsa Marsella yang suka membaca sangat ingin menjadi guru. Ia rupanya terinspirasi dari para guru yang tiap hari mengajarnya. Ada juga siswa yang kelas lebih tinggi, dia adalah Sardi, yang ingin menjadi polisi, tubuhnya yang lumayan tinggi dan tegap itu katanya cocok menjadi polisi. Ia sangat suka olahraga sepakbola dan membantu orangtuanya bekerja di sawah. Sedangkan Elsi yang bertubuh kecil dan bersuara lantang ini dengan percaya diri ingin menjadi suster.

Hamparan cita-cita dan harapan anak-anak Labuan Bajo terungkap saat itu, terbingkai indah yang akan terus terasa hingga saatnya telah tiba nanti. Sangat diharapkan, anak-anak ini tumbuh menjadi generasi yang jauh lebih sehat berkarakter untuk masa depan yang lebih cerah.

(Kiri ke Kanan) Lucas Fernando, Rainaldo Gonziano, Yohana Ririn, Felisia Elsa Marsella, Sardi, Leonardus Lote





**WAWANCARA DRS. AGUSTINUS CH. DULA, BUPATI MANGGARAI BARAT:
DENGAN PROGAS, SAMBUT BARU TIAP HARI**

Pada pelaksanaan Progas di Manggarai Barat pada 17 September beberapa waktu lalu, kegiatan pemberian sarapan sehat dan bergizi dilaksanakan di SDK Longgo, Labuan Bajo. Hadir langsung pada saat itu, Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus C. Dula yang didampingi istri. Dulla, demikian Pak Bupati ini akrab di sapa terlihat sangat gembira dengan anak-anak SDK Longgo yang begitu ceria, dan sehat semuanya. Ia juga menyampaikan beberapa pesan bermakna kepada para siswa, serta kepada para kepala sekolah penerima Progas yang hadir. Keesokan harinya, Majalah Sekolah Dasar berkesempatan mewawancarai Pak Bupati di kantornya, dengan ramah beliau menyambut kehadiran kami. Dan untuk mengetahui hasil wawancara, berikut ini petikannya.

Bagaimana tanggapan Bapak atas ditunjukkan Kabupaten Manggarai Barat menjadi salah satu kabupaten penerima bantuan Progas ini?

Saya sangat berterima kasih dengan adanya Progas dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Manggarai Barat ini. Kabupaten ini harus diakui memang masih tertinggal dalam ekonomi maupun pendidikan. Untuk sekolah penerima Progas kalau tidak salah ada 84 sekolah dari 500 lebih sekolah dasar. Tentunya dengan adanya dana-dana dari PROGAS ini, ada kebanggaan tersendiri bagi kami untuk meningkatkan kualitas anak dengan menambah gizi yang lebih baik sehingga dengan demikian, mereka bisa sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti pendidikan dan dapat menyerap pelajaran yang disampaikan guru dengan baik. Kami juga berharap dengan adanya program ini maka output atau keluaran dari sekolah di samping pintar pendidikan, juga kuat mental dan spiritual, sehingga bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi.



Kemarin Bapak menyampaikan masih banyak sekolah-sekolah lain yang lebih parah dan layak menerima, ada berapa sekolah lagi kira-kira. Lantas mengapa sekolah-sekolah ini tidak diusulkan menjadi prioritas penerima saat itu?

Kalau jumlah tentu masih banyak saya kurang hafal. Mungkin saja karena ini merupakan langkah pertama, maka di mana sekolah ditemukan itu ditentukan, dan itu yang diberi. Tetapi untuk tahun-tahun berikutnya, kami sangat berharap agar Progas ini dapat dilanjutkan, dan kami akan lebih selektif memilih sekolahnya. Mungkin yang letaknya cukup jauh dari kota dan transportasi sulit. Kemudian juga ada data-data keluarga miskin, karena jujur saya mengatakan bahwa Manggarai Barat ini potensi ekonomi lahan subur dan berbagai tanaman dapat hidup, tetapi persoalan adalah ada tidak kepemilikan lahan, mungkin ada orang tuanya mungkin tidak punya lahan serta rumah.

Untuk dana pengelolaan Progas ini turun langsung ke sekolah penerima. Bagaimana Bapak melihat keterlaksanaannya, apakah sudah optimal sesuai petunjuk dan apakah ada pengawasan di lapangan?

Dalam pelaksanaan Progas, sudah dilaksanakan sesuai petunjuk dengan melibatkan banyak pihak, terutama dengan PKK, Puskesmas serta dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Yang lebih penting di sini, kepala sekolah harus berani mengambil kebijakan atau solusi dalam rangka mengoptimalkan dana yang diterimanya. Untuk memantau telah dibentuk Pokja yang terdiri unsur-unsur tersebut. Dan PKK ini jujur saya akui sangat aktif mengunjungi sekolah, memantau serta memberi masukan-masukan kepada ibu-ibu di sana.

Apakah Bapak yakin, nantinya Progas ini bisa benar-benar berdampak positif bagi masyarakat khususnya di sekitar sekolah?

Kemarin kita sudah mendengar sendiri bahwa ada kepala sekolah yang menerima bantuan itu ada dampak positif, seperti contoh masyarakat sekitar sekolah menjadi rajin menanam sayur, rajin menanam buah-buahan dan mungkin juga rajin ke kios. Jadi segala kebutuhan-kebutuhan memasak ini tidak perlu jauh-jauh ke pasar cukup berputar saja disitu. Hal tersebut tentunya sangat menjanjikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat apabila sekolah-sekolah ini mendapatkan dana-dana Progas.

Selain itu, ada kepala sekolah di Gorontalo yang juga wilayah di Manggarai Barat menyampaikan inovasi yang membuat saya tertarik. Karena di sekolah sudah ada makan, maka dia menarik uang jajan siswanya. Uang jajan ini dimasukkan tabungan, bahkan sudah ada yang mencapai ratusan ribu. Ini sangat luar biasa. Dan orangtua pun mestinya juga demikian, jangan biasakan memberi anak uang jajan karena mereka sudah makan di sekolah.

Sekarang zaman sudah berubah, harus saya bandingkan dulu dan sekarang. Kalau dulu anak makan sangat seadanya, jauh dengan sekarang. Apalagi sudah ada bantuan pemerintah melalui Progas ini tentu makanan lebih terjamin kesehatan dan gizinya. Sehingga kami harap masyarakat secara mandiri juga bisa berubah menjadi lebih baik. Dan ke depan saya yakin ada multiplayer effect dapat dirasakan masyarakat sehingga mereka bisa bangkit dan jauh lebih berdaya.

Bapak juga menyampaikan ada tradisi Sambut Baru di Manggrai Barat. Adakah kaitannya dengan Progas ini?

Di Flores dengan masyarakat mayoritas beragama Katolik ini ada satu tahapan hidup keagamaan yang jika berkaitan dengan SD itu adalah saat anak menginjak kelas IV SD. Saat itu dilangsungkan acara Sambut Baru. Acara ini hajatan besar-besaran dan dilakukan tiap keluarga yang punya anak kelas IV. Sekalipun ekonominya pas-pasan tetapi untuk Sambut Baru mereka rela mengeluarkan uang cukup besar, bahkan sampai pinjam, atau hasil tabungan, mereka gengsi jika hajatannya biasa-biasa saja. Tetapi, setelah Sambut Baru ini, anak-anak dibiarkan masa depannya, mau sekolah atau tidak, tidak masalah karena sudah Sambut Baru.



Tetapi itu masih kental bagi sebagian masyarakat yang memegang adat daerah. Bagi yang sudah lebih maju, Sambut Baru dilaksanakan, sekolah tetap lanjut. Budaya ini yang menurut saya kurang baik. Kami sudah sosialisasi ke masyarakat, apa sih susahnya sekolah kan sudah ada bantuan pemerintah memberikan makan yang sehat dan begizi pula. Sehingga kemarin saya singging, dengan Progas ini anak-anak menjadi rajin ke sekolah karena setiap hari ada pesta, ada makan-makan di sekolah, seperti Sambut Baru.

Adakah pesan kepada pemerintah pusat, yang mungkin belum tersampaikan Pak?

Kepada Bapak Presiden dan Ibu kami haturkan rasa terimakasih terdalam atas perhatiannya kepada Manggarai Barat, juga kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemarin Ibu Menteri sudah berkenan mengunjungi Manggarai Barat serta berinteraksi langsung dengan anak-anak sekolah. Kami harapkan tidak bosan datang ke Manggarai Barat, Manggarai Barat punya Labuan Bajo salah satu obyek wisata yang cukup indah.

7

**PROGRAM
PENGUATAN
PENDIDIKAN
KARAKTER**





Revolusi Mental Lewat Penguatan Pendidikan Karakter



Awalnya adalah Nawa Cita atau Nawacita, racikan kata bahasa Sanskerta yang berarti Sembilan Agenda Prioritas. Nawa berarti sembilan, dan cita bermakna harapan, agenda, keinginan, cita-cita, atau agenda prioritas. Dalam konteks perpolitikan Indonesia istilah Nawacita menisbah pada visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, berisi agenda pemerintahan pasangan itu. Visi-misi tersebut berisi sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang

berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dengan pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumberdaya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN SENI DAN BUDAYA

Hotel Atria, Serpong
11 s.d 14 Juli 2017



Kepribadian dan kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Berangkat dari Trisakti, pemerintah meretas jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, ekonomi, kepribadian dan kebudayaan. Maka pemerintah menetapkan Sembilan prioritas yang disebut Nawacita. Berikut inti dari sembilan program tersebut yang disarikan dari situs www.kpu.go.id:

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas

aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

- Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.



Foto: Dok. Dit. Pembinaan SD

- Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
- Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Salah satu agenda Nawacita yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah poin nomor 8 yakni, revolusi karakter bangsa atau lazim disebut revolusi mental. Pembahasan hangat tentang revolusi mental berlangsung sejak masa kampanye Pemilu Presiden 2014, bahkan sempat menjadi *trending topic* di jejaring sosial.

Jokowi yang saat itu masih calon presiden menjelaskan arti dari revolusi mental yang dia gagas adalah menggalakkan pembangunan karakter untuk mempertegas kepribadian dan jadi diri bangsa sesuai dengan amanat Trisakti Soekarno. Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Jokowi, sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup Indonesia.

KARAKTER SEBAGAI POROS PENDIDIKAN



Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram, terarah dan tepat sasaran oleh negara dapat membantu membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia. Melalui penataan kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti: sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, dan semangat bela negara dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional (UAN), dan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek

muatan lokal (daerah), dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman hakiki terhadap kebinekaan yang Tunggal Ika.

Untuk pendidikan dasar, pembobotan dilakukan dengan menekankan 70% substansinya harus berisi tentang budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik. Menginisiasi UU Wajib belajar tanpa dipungut biaya. Program ini untuk mencapai tingkat partisipasi 100% untuk SD, dan 90% untuk SLTP.

Menjadi tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan program yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK itu. Perlu kerja keras untuk membentuk karakter bangsa yang mencerminkan dan mempertegas kepribadian dan jadi diri

bangsa. Juga membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup Indonesia.

PENDIDIKAN KARAKTER SEJAK DINI

Dalam pelbagai kesempatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan bahwa program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan satu dari tiga program strategis yang diamanatkan Presiden RI Joko Widodo. Dua program strategis lainnya adalah penguatan pendidikan vokasi dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Buku *Panduan Peningkatan Kapasitas Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Komite Sekolah*, menjelaskan bahwa program PPK memang merupakan implementasi dari salah satu butir Nawacita Presiden Jokowi, yakni memperkuat pendidikan karakter bangsa. Presiden Jokowi kemudian meluncurkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang diterapkan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam dunia pendidikan.

Lembaga pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki struktur, sistem dan perangkat yang tersebar di seluruh Indonesia dari daerah sampai pusat. Melalui sistem pendidikan, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) diharapkan terjadi secara masif, kontekstual, dan efektif. Program PPK diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan membuat peserta didik senang di sekolah sebagai rumah kedua. Moto dari program PPK adalah "Senang Belajar di Rumah Kedua".

Tujuan program Penguatan Pendidikan Karakter adalah menanamkan nilai-nilai

pembentukan karakter bangsa ke secara masif dan efektif melalui lembaga pendidikan. Dengan prioritas nilai-nilai tertentu yang akan menjadi fokus pembelajaran, pemahaman, pengertian, dan praktik, sehingga pendidikan karakter bangsa sungguh dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas.

Penguatan Pendidikan Karakter dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dilanjutkan dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Gerakan PPK pada usia dini dan jenjang pendidikan dasar ini akan diintegrasikan dengan prioritas nilai dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sehingga terjadi perubahan yang masif dan serentak di seluruh Indonesia.

Dalam rangka revitalisasi Penguatan Pendidikan Karakter tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bertajuk Peningkatan Kapasitas Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah terkait Program Penguatan Pendidikan Karakter. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar, prinsip implementasi, dan strategi penguatan pendidikan karakter di sekolah.

Sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai adalah: memberikan pemahaman tentang pentingnya penguatan pendidikan karakter, memberikan pemahaman tentang pelaksana dan pemangku kepentingan penguatan pendidikan karakter. Memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip penguatan pendidikan karakter, nilai-nilai utama penguatan pendidikan karakter, prinsip implementasi penguatan pendidikan karakter. Memberikan pemahaman tentang strategi penguatan pendidikan karakter,



Foto: Dok. Dit. Pembinaan SD

bentuk-bentuk alternatif kegiatan penguatan pendidikan karakter, Sistem Evaluasi dan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter. Dan menyusun rencana tindak lanjut implementasi pendidikan karakter di sekolah.

Adapun hasil yang diharapkan ada dua. Pertama, peserta memahami konsep dasar, prinsip implementasi, dan strategi penguatan pendidikan karakter. Kedua, peserta mampu merancang dan mengembangkan Program Pendidikan Karakter di sekolahnya masing-masing.

"Ini juga mohon persetujuan dari Pak Presiden sudah bertemu pertama beliau sudah sangat mengapresiasi bahkan memberikan contoh-contoh. Kemudian Pak Wapres sudah menyetujui, kami tinggal menyusun lebih lanjut," katanya. Program ini untuk menempatkan pendidikan karakter yang menjadi fokus program Nawacita lebih memiliki tempat di sekolah.

PERSENTASE PENDIDIKAN KARAKTER MASING-MASING LEVEL

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan program PPK merupakan wujud nyata pengejawantahan Nawacita Pemerintah Jokowi-JK terkait Pendidikan, yang menitikberatkan perlunya pendidikan budi pekerti dan karakter. Dimana 70 persen konten karakter, dan 30 persen konten pengetahuan untuk siswa tingkat Sekolah Dasar (SD). Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 60 persen konten karakter, dan 40 persen konten pengetahuan.

"Ada 18 butir nilai, mulai dari religius, toleransi, kerja keras, kreatif, demokratis, cinta tanah air, dan masih banyak lagi sesuai yang ada di Nawacita," katanya. Muhaadjir menegaskan, siswa tidak perlu khawatir dengan sistem baru ini. Meski harus pulang lebih lama, yakni pukul 17.00 WIB siswa tidak akan sepenuhnya belajar di kelas. Karena itu akan membuat jenuh, dan boleh jadi siswa merasa tertekan.

"Proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Jadi tidak sepenuhnya ada di dalam kelas," katanya. Karena tidak ada siswa yang kuat belajar di dalam kelas sejak pagi hingga sore. Sekolah bisa memanfaatkan waktu belajar di luar kelas untuk diisi dengan berbagai kegiatan yang bisa menggali minat siswa. "Yang mau meningkatkan kemampuan mengaji, panggil aja ustadz. Yang bahasa Inggris juga begitu, panggil mentor bahasa Inggris," katanya.

"Dalam kurikulum sudah ada unsur-unsur pendidikan karakter. Sesuai dengan platform Presiden Jokowi yang memberikan penekanan pendidikan karakter. Kemudian kami kuatkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kokurikuler. Memang konsekuensinya menuntut waktu yang lebih banyak dibandingkan selama ini," katanya.

Platform Presiden menyebut porsi pendidikan karakter di SD itu 70%, SMP 60%, dan SMA/SMK 20%. Pembentukan karakter pada level SMA/SMK itu sebetulnya menyiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja bersamaan dengan persiapan studi lanjut. Sementara itu SD dan SMP mencakup banyak hal, mulai dari karakter personal, sosial, religius, nasionalisme, dan seterusnya. Ini yang perlu ditanamkan sejak dini.

Kurikulum itu sebetulnya bukan segala-galanya. Ada namanya kurikulum *planning, development, design*, macam-macam. Kurikulum itu bukan sesuatu yang terpenggal-penggal. Ada Kurikulum 2006 kemudian diganti 2013, bukan begitu. Pada dasarnya kurikulum itu berkelanjutan. Kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 sebetulnya tidak beda-beda amat, bukan suatu pergantian yang luar biasa.

Foto: Dok. Dit. Pembinaan SD







Foto: Budi SD Kemala BPN



Foto: Dok. SD Widiatmika Jimbaran

18 NILAI BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA

- **Religius**

Sikap dan perilaku yang patuh dalam beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, toleran kepada penganut agama lain, dan mampu hidup dengan rukun. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Praktik di sekolah antara lain, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Memberikan kesempatan kepada siswa menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya.

- **Jujur**

Perilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Apa yang diniatkan hati, diucapkan lisan atau mulut, dan dilaksanakan dalam perbuatan memang itulah yang sesungguhnya terjadi dan sebenarnya. Sekolah perlu menyediakan tempat melaporkan penemuan barang. Mengumumkan barang temuan atau hilang. Melaporkan keuangan kelas secara berkala dengan transparans. Melarang keras tindakan menyontek dan menjiplak.



- **Toleransi**

Suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindari terjadinya diskriminasi sekalipun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sikap toleransi menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yg berbeda dari dirinya. Memberikan pelayanan yg sama thd seluruh warga kelas tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan status ekonomi. Memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Bekerja dalam kelompok yang berbeda.

- **Disiplin**

Sikap yang selalu tepat janji, sehingga orang lain memercayainya, karena modal utama adalah memperoleh kepercayaan

dari orang lain. Disiplin berasal dari bahasa latin *discere* yang berarti belajar. Tindakan disiplin menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Membiasakan hadir tepat waktu. Membiasakan mematuhi aturan. Menggunakan pakaian praktik sesuai dg program studi keahliannya (SMK). Penyimpanan dan pengeluaran alat dan bahan (sesuai program keahlian).

- **Kerja Keras**

Kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Menciptakan suasana kompetisi yg sehat. Menciptakan kondisi etos kerja, pantang menyerah, dan daya tahan belajar. Menciptakan suasana belajar yg memacu daya tahan kerja. Memiliki pajangan tentang slogan atau motto tentang giat bekerja dan belajar.







Foto: Arita WA

• Kreatif

Suatu proses pemikiran yang membantu mencetuskan berbagai gagasan baru yang merupakan salah satu sifat manusia yang dibentuk dari proses pengalaman sehingga menyebabkan orang tersebut bisa terus memperbaiki dan mengembangkan dirinya. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Menciptakan situasi belajar yang bisa menumbuhkan daya pikir dan bertindak kreatif. Pemberian tugas yang menantang munculnya karya karya baru baik yang autentik maupun modifikasi.

• Mandiri

Perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, mampu menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Menciptakan suasana kelas yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja mandiri.

• Demokratis

Sikap yang didasari prinsip-prinsip demokrasi dimana berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Mengambil keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah dan mufakat. Pemilihan ketua dan kepengurusan kelas secara terbuka. Seluruh produk kebijakan melalui musyawarah dan mudakat. Mengimplementasikan model model pembelajaran yg dialogis dan interaktif.

- **Rasa Ingin Tahu**

Suatu emosi yang berkaitan dengan perilaku ingin tahu seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Menciptakan suasana kelas yang mengundang rasa ingin tahu. Eksplorasi lingkungan secara terprogram. Tersedia media komunikasi atau informasi (media cetak atau media elektronik).

- **Semangat Kebangsaan**

Suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi kepada bangsa dan negara. Pengertian ini sejalan dengan makna semangat kebangsaan yang identik dengan konsep nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi wajib diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Bekerjasama dengan teman sekelas yang berbeda suku, etnis, status sosial-ekonomi. Mendiskusikan hari-hari besar nasional. Memutar lagu-lagu kebangsaan.

- **Cinta Tanah Air**

Rela berkorban untuk tanah air dan membela dari segala macam ancaman dan gangguan yang datang dari bangsa manapun. Menumbuhkan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Memajang foto presiden dan wakil presiden, bendera negara, lambang negara, peta Indonesia, gambar kehidupan masyarakat Indonesia. Menggunakan produk buatan dalam negeri.

- **Menghargai Prestasi**

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. Nilai ini perlu kita terapkan dalam kehidupan akademik, karena dengan menghargai prestasi kita dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain agar dapat maju dan berkembang. Apabila kita melihat teman kita mendapatkan prestasi, kita sebaiknya memberi selamat dan berusaha untuk bisa seperti dirinya.



- **Bersahabat**

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain. Pengaturan kelas yang memudahkan terjadinya interaksi peserta didik. Pembelajaran yang dialogis. Guru mendengarkan keluhan-keluhan peserta didik. Dalam berkomunikasi, guru tidak menjaga jarak dengan peserta didik

- **Cinta Damai**

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Menciptakan suasana kelas yang damai. Membiasakan perilaku warga sekolah yang anti kekerasan. Pembelajaran yang tidak bias gender. Kekerabatan di kelas yang penuh kasih sayang.

- **Gemar Membaca**

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Daftar buku atau tulisan yang dibaca peserta didik. Wajib membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Saling tukar bacaan. Pembelajaran yang memotivasi anak menggunakan referensi.

- **Peduli Lingkungan**

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Memelihara lingkungan kelas. Tersedia tempat pembuangan sampah di dalam kelas. Membiasakan hemat energy.





Foto: Ari Subhan Hariri

• Peduli Sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Berempati kepada sesama teman kelas. Menyantuni anak yatim. Membangun kerukunan antar siswa.

• Tanggung Jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan tugas piket secara teratur. Berperan aktif dalam kegiatan sekolah.

Program ini juga dapat membantu guru untuk mendapatkan durasi jam mengajar sebanyak 24 jam/minggu. Ini merupakan salah satu syarat untuk lolos proses sertifikasi guru. "Guru yang mencari tambahan jam belajar di sekolah nanti akan mendapatkan tambahan jam itu dari program ini," tambahnya.

Kalau pada akhirnya diterapkan, dalam sepekan sekolah akan libur dua hari, yakni Sabtu dan Minggu. Sehingga, ini akan memberikan kesempatan bagi siswa bisa berkumpul lebih lama dengan keluarga. "Peran orangtua juga tetap penting. Di hari Sabtu dapat menjadi waktu keluarga. Dengan begitu, komunikasi antara orangtua dan anak tetap terjaga dan ikatan emosional juga tetap terjaga," katanya.



PONDASI PEMBANGUNAN BANGSA ABAD 21

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) memang cukup penting untuk diterapkan di sekolah karena pembangunan SDM merupakan pondasi pembangunan bangsa abad 21. Abad digital menuntut keterampilan siswa yang meliputi kualitas karakter, literasi dasar, dan kompetensi 4C (*Critical Thinking and Problem Solving, Creativity, Communication Skills, Ability to Work Collaboratively*) untuk mewujudkan ketangguhan bersaing Generasi Emas 2045. Selain itu siswa harus memiliki akhlak yang baik karena pendidikan itu harus komplit meliputi kecerdasan etika (moral), estetika (olah rasa), dan kinestetika (olah tubuh). Kondisi saat ini generasi muda Indonesia mengalami degradasi moral, etika, dan budi pekerti.

Sesuai arahan Presiden, Mendikbud mengatakan Kemendikbud akan memastikan pentingnya memperkuat pendidikan karakter peserta didik menjadi rujukan dalam menentukan sistem belajar mengajar di

sekolah. Pendidikan karakter akan menjadi titik berat dalam Program Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Kemendikbud telah mengkaji program tersebut melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) yang melibatkan sejumlah pakar. Pakar yang bakal diundang dari berbagai bidang keahlian, semisal pendidikan, psikologi, serta pelaku sekolah yang sudah menerapkan sistem tersebut.

Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D mengatakan, Ditjen Dikdasmen juga melakukan kajian berbasis literatur untuk menerapkan PPK. Selain itu, pihaknya juga akan mengkaji kesiapan anggaran dan sumber daya manusia, termasuk guru pengasuh untuk tingkat SD. "Apa saja yang menjadi persyaratan seperti juga penyiapan sarana prasarannya, penyiapan nutrisi seperti makan siang. Ini akan berimplikasi pada anggaran. Nah, apakah anggaran dari orangtua, sekolah, atau dari Kemendikbud, inilah opsi-opsi yang mesti dimatangkan bersama Bapak Menteri," katanya.

Sementara itu, Arie Budhiman, Staf Ahli Mendikbud bidang Pembangunan Karakter mengatakan, struktur kurikulum yang digunakan dalam Program Penguatan Pendidikan Karakter adalah aktivitas penguatan karakter yang bersifat Intra-kurikuler, Ko-kurikuler, dan Ekstra-kurikuler. Sedangkan prinsip penerapannya dilaksanakan melalui integrasi dalam mata pelajaran, dalam muatan lokal (Ko-kurikuler) yang ditetapkan satuan pendidikan/daerah dengan berbasis budaya lokal, serta fokus pada kegiatan pengembangan diri.

Untuk kegiatan pengembangan diri, hal ini dapat dilakukan melalui pembiasaan dan pembudayaan melalui kegiatan pengondisian, kegiatan rutin, kegiatan spontanitas, keteladanan, serta kegiatan terprogram. Jenis kegiatan yang dilakukan antara lain Pramuka, PMR, UKS, olah raga, seni, OSIS, permainan kreatif anak, dan lain sebagainya. Dapat pula melalui bimbingan konseling, yakni dengan memberikan layanan bagi peserta didik untuk menumbuhkan karakter.

Sedangkan bagi sekolah, Program Penguatan Pendidikan Karakter ini adalah kesempatan untuk dapat meningkatkan peran guru dan tendik, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan keterlibatan orang tua dan publik. Harapannya, kompetensi guru semakin meningkat, sekolah aman dan menyenangkan, serta partisipasi aktif dari orang tua dan publik.

Di sisi lain, Mendikbud juga menuturkan, lingkungan sekolah harus memiliki

suasana yang menyenangkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran formal sampai dengan setengah hari, selanjutnya dapat diisi dengan ekstrakurikuler. "Usai belajar setengah hari hendaknya para peserta didik tidak langsung pulang ke rumah, namun dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan, dan membentuk karakter, kepribadian, serta mengembangkan potensi mereka," katanya.

Menurutnya, adanya kegiatan seperti itu peserta didik dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan kontraproduktif, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan lain sebagainya. Muhadjir menjelaskan, penerapan Program Penguatan Pendidikan Karakter juga dapat membantu orangtua dalam membimbing anak tanpa mengurangi hak anak. Para orangtua, setelah pulang kerja dapat menjemput anak di sekolah. Orangtua dapat merasa aman, karena anak-anak mereka tetap berada di bawah bimbingan guru selama mereka di tempat kerja.

"Peran orangtua juga tetap penting. Di hari Sabtu dapat menjadi waktu keluarga, dengan begitu komunikasi antara orangtua dan anak tetap terjaga, dan ikatan emosional juga tetap terjaga," katanya.

Arie Budhiman,
Staf Ahli Mendikbud
bidang Pembangunan Karakter

Foto: Mukti Ali





PENDAPAT AHLI TENTANG PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Dalam menerapkan Program Penguatan Pendidikan Karakter Kemendikbud mengundang masukan dari berbagai pihak. Seto Mulyadi atau Kak Seto sebagai Ketua Dewan Pembina Komnas Anak turut mengemukakan pendapatnya. "Saya mendukung rencana tersebut selama tidak memasung hak anak, seperti hak bermain, hak beristirahat, dan hak berekreasi. Sebab, pada prinsipnya, sekolah harus ramah anak demi yang terbaik buat mereka," katanya. Kak Seto wanti-wanti Program PPK yang tidak tepat pelaksanaannya maka akan membuat anak didik stres karena pengemasannya yang tidak ramah anak.

Menurut pakar pendidikan A. Munir, konsep PPK bukan persoalan penambahan materi dan waktu belajar mata pelajaran, melainkan proses pendampingan guru kepada anak di sekolah. Dengan durasi yang lebih lama di sekolah, para guru bisa mendampingi mereka beribadah, makan siang, bermain, dan aktivitas lainnya sebagaimana kegiatan yang mereka lakukan di rumah. Tentu saja semua aktivitas itu diarahkan pada nilai-nilai pendidikan. "Belajar sambil bermain" atau "belajar dengan berbuat dan melakukan".

Dia menilai penerapan PPK di Indonesia belum efisien jika kebijakan tersebut diterapkan di semua wilayah pendidikan di Indonesia. Karena fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia yang memadai belum merata. Bahkan cenderung masih tertinggal. Karena itu penerapan PPK harus ditunjang sarana dan prasarana yang baik dan bagus, dan juga tenaga pengajar yang bermutu, agar tercapai mutu pendidikan yang optimal, seperti tujuan konsep PPK itu sendiri.

Pengamat pendidikan Arief Rachman setuju atas gagasan PPK. Gagasan itu dianggap membawa sejumlah nilai positif, dengan catatan manajemen harus baik dengan indikator keberhasilan yang jelas. Nilai-nilai positif itu antara lain siswa betah di sekolah karena merasa mendapat pelajaran bermutu, guru memiliki banyak waktu untuk melakukan observasi perilaku, spiritual, intelektual, emosional, jasmani, dan sosial siswa. Fasilitas juga tidak mubazir.

"Selain itu, anak juga punya banyak waktu untuk bergaul dengan teman sebaya. Perlu diketahui, kepribadian anak itu muncul bukan hanya dari pelajaran sekolah, tetapi juga dari pergaulan sosial mereka," tegasnya. Jumlah guru yang mengajar di beberapa tempat sekaligus, pasti akan berkurang. Hal ini



dianggap penting karena guru yang mengajar di lebih dari satu sekolah tidak akan maksimal menjadi pengajar yang diharapkan peserta didik.

Indikator keberhasilan PPK antara lain anak menjadi semakin dekat dengan Tuhan, kepribadian anak menjadi lebih matang. Anak akan memiliki optimisme dan daya juang yang tinggi, semakin senang belajar, dan rasa nasionalisme bertambah. Juga memiliki kepedulian tinggi terhadap situasi global, bukan hanya untuk Indonesia atau Jakarta.

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Warsono juga sependapat dengan PPK. Ia mengatakan, lingkungan berpengaruh besar terhadap perilaku dan karakter anak. PPK sebenarnya bisa dipakai untuk mengatasi pengaruh lingkungan yang kurang baik itu. "Kalau lingkungan masyarakatnya kurang mendukung, mendingan anak dilokalisir di dalam rumah atau sekolah, agar pengaruh lingkungan ini dapat dieliminir," katanya.

Ia mengatakan, PPK juga harus mempertimbangkan waktu anak berkumpul dan bersosialisasi dengan keluarganya.



Foto: Arita WA

itu ada dua sekolah, yaitu sekolah formal dan sekolah kehidupan,” katanya. Sekolah formal jelas dilakukan di sekolah, namun untuk sekolah kehidupan bisa dilakukan di sekolah dengan pelajaran kehidupan, sehingga bukan pelajaran yang seperti ada pada kurikulum. “Mata pelajarannya adalah pelajaran kehidupan,” katanya.

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI RUH PENDIDIKAN

Penguatan Pendidikan Karakter untuk menyiapkan Generasi Emas 2045 yang memiliki kecakapan abad 21, dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh pendidikan di Indonesia, berdampingan dengan intelektualitas. PPK berperan dalam pembentukan generasi muda yang tangguh, cerdas dan berkarakter.

Sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, PPK menguatkan lima nilai utama karakter pada siswa pendidikan dasar, yakni Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong royong dan Integritas. Karakter yang kuat membentuk individu menjadi pelaku perubahan bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya.

Kerja sama antara sekolah, keluarga dan masyarakat menjadi kunci penerapan penguatan pendidikan karakter. Sebagai program prioritas pendidikan dan kebudayaan, Gerakan PPK berfokus pada struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional, yaitu: program, kurikulum dan kegiatan yang berbasis pada kelas, budaya sekolah, dan masyarakat.

Jika sudah diterapkan PPK, maka jangan membebani siswa dengan beban-beban sekolah tugas di rumah. “Tidak boleh lagi ada PR, ini juga bisa membebani anak ketika di rumah. Kalau di rumah bisa berinteraksi dengan orang tua. Keluarga itu kan pendidikan karakter dan tidak bisa digantikan siapapun juga,” tandasnya.

Menurut Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Prof. Zainudin Maliki mengatakan bahwa PPK bisa menjadi solusi pada permasalahan pendidikan di Indonesia. “Menurut saya sekolah



Foto: Nur Diansyah

Model PPK tidak mengharuskan siswa untuk terus menerus belajar di kelas. Namun mendorong agar siswa dapat menumbuhkan kembangkan karakter positifnya melalui berbagai kegiatan ko-kurikuler, ekstrakurikuler dalam pembinaan guru. Perlu dipahami, bahwa pendidikan karakter sudah dilaksanakan di seluruh persekolahan. Namun, perlu dilakukan upaya terobosan agar pendidikan karakter ini bisa dilaksanakan secara konsisten oleh sekolah dan memberikan dampak yang nyata.

Di tahun 2016 sebanyak 542 sekolah (SD dan SMP) telah tergabung menjadi sekolah percontohan penerapan program Penguatan Pendidikan Karakter. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah yang telah menerapkan berbagai praktik baik pendidikan karakter sehingga diharapkan mampu menjadi contoh/teladan dan menularkan "virus kebaikan" dalam penerapan PPK di sekitarnya.

Sekolah-sekolah yang dipilih juga ditentukan berdasarkan keterwakilan provinsi, kondisi geografis, maupun status sekolah negeri dan swasta.

Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran di kelas dan mampu mengelola manajemen kelas. Kepala Sekolah dapat mendesain budaya sekolah yang menjadi ciri khas dan keunggulan sekolah tersebut. Lalu, Sekolah mampu mendesain pelibatan publik guna meningkatkan peran orang tua dan masyarakat.

Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian anak. Selain di rumah, pendidikan karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial. Pada hakekatnya, pendidikan memiliki tujuan untuk membantu manusia menjadi cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik. Dalam rangka mempersiapkan



Foto: Dok. SD Widiatmika Jimbaran

Generasi Emas 2045, pemerintah menguatkan karakter generasi muda agar memiliki keunggulan dalam persaingan global abad 21. Selain lima nilai utama karakter, melalui PPK, pemerintah mendorong peningkatan literasi dasar, kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi generasi muda.

Penguatan Pendidikan Karakter akan dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Program PPK diharapkan dapat mendorong kualitas pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki hak yang sama untuk menerapkan program yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental di bidang pendidikan ini.

Implementasi program Penguatan Pendidikan Karakter akan dilaksanakan secara bertahap. Di tahun 2017, Kemendikbud

menargetkan sebanyak 1.626 sekolah akan menjadi target rintisan PPK, yang akan memberikan dampak pada sekitar 9.830 sekolah di sekitarnya. Hingga tahun 2020, target implementasi penuh PPK diharapkan dapat terwujud. Tentu, implementasi PPK menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan sekolah. Diharapkan, keberhasilan satuan pendidikan yang menjalankan PPK dapat menjadi teladan/inspirasi bagi seluruh satuan pendidikan lainnya.

UJI COBA PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pemerintah mengujicobakan Penguatan Pendidikan Karakter pada 500 sekolah. Program yang pernah mengundang pro dan kontra itu ditujukan untuk penguatan karakter. Hal itu sesuai dengan program revolusi mental



Foto: Mukti Ali

pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan bangsa yang berkarakter, Indonesia akan kokoh ketika bersaing dengan bangsa lain. Presiden mengatakan, tujuan program Penguatan Pendidikan Karakter itu untuk memperkuat karakter dan menambahkan nilai keindonesian pada diri siswa.

"Sudah disampaikan akan ada *full day school* (Penguatan Pendidikan Karakter), akan kita coba di beberapa provinsi, untuk apa? Untuk menambahkan nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai itu. Tanpa itu keindonesian kita akan hilang, karakter dan identitas kita akan hilang," kata Jokowi di Balai Pertemuan Pondok Modern Gontor, Mlarak, Ponorogo, Jawa Timur.

"Saat ini sudah ada 500 sekolah yang akan menjadi percontohan penerapan program Penguatan Pendidikan Karakter. Saat ini masih dalam tahap persiapannya," kata Mendikbud.

Jumlah 500 sekolah itu, katanya, berasal dari berbagai jenjang sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat (SLTA).

Disebutkan Muhadjir, sekolah-sekolah yang akan menjadi percontohan tersebut adalah sekolah di Jakarta. Selain 500 sekolah itu, lanjutnya, juga terdapat sekolah lain yang berinisiatif mengajukan diri untuk ikut menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter dengan dukungan pemerintahan kabupaten/kota. "Semoga penerapan program tersebut dapat berjalan dengan baik, dan apa tujuan yang terkandung di dalamnya bisa tercapai," jelasnya.

Ia menjelaskan, Penguatan Pendidikan Karakter bukan berarti peserta didik belajar sehari-hari di sekolah. Namun sistem yang memastikan bahwa peserta didik bisa mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman

pendidikan karakter, salah satunya kegiatan ekstrakurikuler. Mengingat pendidikan karakter adalah prioritas utama dalam tujuan pendidikan oleh pemerintah saat ini. Hal itu merujuk pada visi Presiden Joko Widodo, yaitu melakukan "Revolusi Mental".

"Jadi melalui Penguatan Pendidikan Karakter, setelah belajar setengah hari peserta didik tidak langsung pulang, namun dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan, dan membentuk karakter, kepribadian, serta mengembangkan potensi," katanya. Dalam perwujudan pendidikan karakter itu, pihak kementerian telah memberikan acuan bahwa dalam kegiatan pembelajaran di tiap-tiap sekolah, sebagian besar porsi harus diisi dengan pendidikan karakter.

Untuk tingkatan Sekolah Dasar (SD) pendidikan karakter ditentukan sebesar 70 persen, SLTP sebesar 60 persen, dan SLTA sebesar 30 persen yang difokuskan pada pendidikan karakter untuk memasuki dunia kerja. Muhadjir memaparkan ada empat poin yang menjadi inti dalam pendidikan karakter itu yaitu karakter tentang keagamaan, karakter tentang personal peserta didik, karakter sosial, serta karakter nasionalisme.

Kemendikbud telah memilih 500 lebih sekolah di seluruh Indonesia sebagai percontohan program Penguatan Pendidikan Karakter. "Tepatnya ada 542 sekolah yang sudah jadi percontohan. Program percontohan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) itu di tahap awal bentuknya pelatihan terhadap kepala sekolah dari sekolah terpilih," kata Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pembangunan Karakter, Arie Budiman.

Sekolah tersebut tersebar di 34 provinsi. Mereka terpilih dengan berbagai pertimbangan antara lain berdasarkan, sekolah menerapkan kurikulum 2013 (K13). Selain sekolah pilihan, sekolah yang berfikir maju secara sukarela menawarkan diri untuk menjadi sekolah percontohan. Eloknya, sekolah yang dipilih tidak hanya yang berlokasi di perkotaan. Justru, sekolah yang ada di daerah terpencil yang menjadi perhatian khusus atau prioritas.

"Ada beberapa modul pelatihan yang kami berikan kepada kepala sekolah. Salah satunya adalah bagaimana mereka dapat menciptakan situasi sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa," katanya. Pada pelaksanaan program PPK nantinya siswa diberikan penambahan jam sekolah. Pelajaran formal dilakukan selama setengah hari dan sisanya diisi oleh kegiatan yang mendukung pengembangan karakter. Bisa melalui ekstrakurikuler atau kokurikuler.



Foto: Mukti Ali

“Untuk mata pelajarannya tidak ada yang baru. Hanya setiap mata pelajaran yang ada di sekolah harus diperkuat dengan praktik-praktik pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini sifatnya *build-in* di dalam setiap mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler,” katanya.

Sekolah juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti museum, balai-balai budaya, kantor pemerintah, dan LSM. Bisa dengan berkolaborasi mengadakan kunjungan untuk *study tour* atau mendatangkan pihak-pihak tersebut untuk berbagi pengetahuan di sekolah. Setelah 542 sekolah menjadi percontohan di akhir 2016, tahun ini Kemendikbud menargetkan 9.800 sekolah menjadi percontohan program Penguatan Pendidikan Karakter.

DAMPAK POSITIF PPK DI SEKOLAH

Begitu pemerintah mengujicoba Penguatan Pendidikan Karakter, sejumlah sekolah antusias menjajalnya. Tidak hanya di kota-kota besar, namun hingga pelosok Nusantara meminatinya.

Di Gorontalo, misalnya, setelah melakukan uji coba di SMP Negeri 1 dan SDN 30 Kota Gorontalo, akhirnya pembelajaran lima hari sekolah resmi diterapkan sejak Senin, 23 Januari 2017. Abram Badu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, mengatakan penerapan pendidikan karakter bagi siswa ini sangat bermanfaat. Siswa bisa mengembangkan berbagai aspek kehidupan di sekolah, seperti peningkatan pengetahuan dan tingkat religius.

“Penerapan sistem ini sudah melalui proses yang panjang, analisis yang mendalam serta pertimbangan yang cukup matang. Salah



Foto: Mukti Ali

satu pertimbangannya yaitu tingginya minat siswa dan orang tua saat uji coba dilakukan di dua sekolah,” katanya. Hasil evaluasi uji coba, dampaknya sangat positif bagi siswa, khususnya peningkatan kesadaran siswa dalam mengikuti seluruh program yang ada di sekolah. Juga meningkatkan kepedulian orang tua memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Para siswa wajib berada di sekolah pukul 7.30, di mana efektif belajar baru dimulai pada pukul 8.00 hingga pukul 16.00.

Di Kabupaten Bengkalis, Riau, Penguatan Pendidikan Karakter juga diujicoba pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada sekolah di dua kecamatan yang menjadi pilot project. Yaitu sekolah di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Siakkecil. Edi sakura, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bengkalis mengatakan ujicoba itu untuk mengetahui reaksi dan dampak di lapangan terhadap program tersebut.

Staf khusus Mendikbud bidang komunikasi publik, Nasrullah di sela Focus Groups Discussion Penguatan Media dalam Menyosialisasikan Kebijakan Mendikbud di Malang, Jawa Timur, mengatakan bahwa pada tahun ini pagu sekolah yang ditargetkan bisa menerapkan sistem Penguatan Pendidikan Karakter hanya 1.200 hingga 1.500 sekolah. Namun, ternyata sekolah sangat meminati Penguatan Pendidikan Karakter. Sehingga yang mendaftar dan siap menerapkannya mencapai 5.000 hingga 10.000 sekolah, baik negeri maupun swasta.

Hal ini menimbulkan konsekuensi diterapkan Penguatan Pendidikan Karakter tersebut harus ada penambahan fasilitas di lingkup sekolah. Penambahan fasilitas umum di sekolah tersebut menggunakan dana hibah untuk penguatan karakter. Namun demikian, kucuran dana tersebut tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan masih diverifikasi.

Pada awal penerapan Penguatan Pendidikan Karakter tahun lalu, lanjutnya, sekolah-sekolah yang menjadi percontohan sebanyak 542 sekolah tersebut mendapatkan dana hibah murni. Targetnya tahun 2019, seluruh sekolah negeri maupun swasta sudah menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter yang telah terbukti membawa dampak positif untuk pembangunan karakter siswa.

PENGUATAN KARAKTER MELALUI LIMA HARI SEKOLAH

Untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi, diperlukan penguatan karakter bagi peserta didik melalui restorasi pendidikan karakter di sekolah. Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah mengatur jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kebijakan ini, menurut Mendikbud, merupakan implementasi dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Bagi guru, hari sekolah dipergunakan untuk melaksanakan beban kerja guru, di antaranya merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; membimbing dan melatih Peserta Didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

"Lima hari kerja ini implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2017 yang mengatur salah satunya tentang beban kerja guru khususnya yang ASN," terang Mendikbud. Ditambahkannya, revisi aturan melalui Peraturan Pemerintah yang baru tersebut sebagai upaya pemerintah untuk membantu guru mengubah paradigma dalam menjalankan peran dan fungsinya. Guru diharapkan tidak terjebak pada menjalankan rutinitas dan metode yang tidak mengembangkan





Foto: Mukti Ali

cara belajar siswa aktif. Diyakininya, hakikat pendidikan adalah mampu memberikan seluas-luanya kesempatan bagi siswa untuk dapat mengembangkan dirinya.

Penerapan hari sekolah baru bagi peserta didik akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dijelaskan Mendikbud, kegiatan kokurikuler meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter peserta didik.

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler termasuk kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah-bakat/olah-minat, dan keagamaan. Tujuannya untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

"Kita akan gunakan prinsip kurikulum berbasis luas. Semua sumber-sumber belajar baik di dalam ataupun di luar sekolah akan dioptimalkan untuk kepentingan belajar. Sekolah akan menjadi lebih luwes, fleksibel, dan menggembirakan," terang Mendikbud.





Foto: Mukti Ali

Ditambahkan Mendikbud, kearifan lokal, keanekaragaman yang ada pada masing-masing daerah akan menjadi sumber-sumber belajar yang akan menjadikan sekolah tidak seragam, berwarna-warni. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengungkapkan bahwa penerapan PPK dengan delapan jam belajar dan lima hari sekolah ini sifatnya tidak tunggal. "Selain mandiri, sekolah juga didorong untuk bekerja sama dengan lembaga lain seperti diniyah atau lembaga pendidikan keagamaan, sanggar seni, gelanggang olahraga," ujar Dirjen Hamid.

Pelaksanaan hari sekolah akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah masing-masing. Saat ini, menurut Dirjen Dikdasmen sudah terdapat Sembilan kabupaten/kota yang mengajukan diri untuk melaksanakan program penguatan karakter dengan pola lima hari sekolah. "Saat ini terdapat Kota Malang, Kabupaten Siak, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bantaeng. Ada juga enam Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sedang menyiapkan diri untuk melaksanakan program tersebut," urainya.

Penerapan lima hari sekolah bukan untuk menggantikan peran orangtua sebagai pendidik utama dan pertama anak-anak. "Sabtu dan Minggu akan menjadi hari keluarga. Waktu berkualitas yang bisa digunakan untuk rekreasi dan membangun kedekatan antara anak dan orangtua," terang guru besar Universitas Negeri Malang tersebut.



Foto: Mukti Ali

MENERAPKAN PPK DI SEKOLAH DASAR

Praktik PPK secara rutin mulai menjadi kebiasaan di sekolah. Penerapan pendidikan karakter tersebut tidak sekadar untuk memenuhi tuntutan silabus, tetapi juga dipraktikkan dengan prinsip memberikan keteladanan. Selain itu menjadikannya sebagai tatanan nilai yang melibatkan semua elemen masyarakat dalam membangun kemitraan jejaring pendidikan. Khususnya guru, keluarga, dan lingkungan.

Aktivitas PPK yang bagus bisa ditengok di SD Negeri 03 Menteng, Jakarta Pusat, yakni sapa guru dan karyawan sekolah kepada siswa di pagi hari, mengadakan apel pagi untuk menginformasikan kegiatan sekolah, menyanyikan lagu wajib nasional, berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Selanjutnya mengadakan upacara sebagai upaya menanamkan semangat kebangsaan, melaksanakan kegiatan keagamaan, Juga pembiasaan senam bersama, peduli sosial, kegiatan pramuka, kegiatan bersih lingkungan sekolah, gerakan gemar membaca, outing class, perayaan hari nasional.

Lebih menarik lagi acara pentas seni dan budaya, kegiatan dokter cilik melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan pameran pendidikan yang dilakukan setahun sekali, program ekstrakurikuler Karakte dan Taekwondo, Menari, Bridge Club Indonesia Jepang, Kerjasama dengan Pemerintah Venezuela dengan mengadakan Spanish club, English club, dan mengadakan klub Matematika.

PPK juga diselenggarakan di SD Negeri 12 Pagi, Rawamangun, Jakarta Timur. Penerapan PPK dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya pembelajaran intrakurikuler proses pembelajaran tidak hanya dilakukankan di dalam kelas, tetapi juga belajar di luar kelas dengan pemanfaatan fasilitas belajar yang beragam, penampilan gelar seni dan kreativitas secara periodik. Kegiatan Ekstrakurikuler yang diterapkan yakni Taekwondo, Klub Sains, Tari, Pramuka, Keagamaan, Melukis, Teater, Futsal, Basket.

Di SDN 20 Pekanbaru, Riau, sore hari sehabis belajar, anak-anak melaksanakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Sehabis



makan dan shalat dzuhur, sekitar pukul 13.00 WIB, maka anak-anak bergegas keluar menuju lapangan dengan riang gembira.

Di bawah pohon rindang, anak-anak berlatih menari bersama guru pembimbing. Mereka memperagakan tari Sapu. Beberapa siswi memegang sapu lidi dan memperagakan tarian dengan lincah yang mengisahkan tentang pentingnya menjaga lingkungan agar selalu bersih. Musik berkumandang melalui speaker mengiringi para penari yang membuat mereka makin bersemangat.

Di sebelahny, anak-anak berlatih ping-pong menggunakan meja tenis meja yang masih baru. Sementara di lapangan lain, anak-anak berlatih bulu tangkis dengan semangat meski terpapar sinar matahari. Anak-anak penggemar sepakbola juga sedang berlatih

mengumpan, menggocek, dan menyundul bola bak pemain profesional.

Di ujung halaman lain, beberapa anak sedang menghapal dialog berbahasa Inggris. Mereka adalah siswa yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler English Club. Rupanya mereka sedang mempersiapkan pementasan drama dalam bahasa Inggris. Di sebelahny, anak-anak sedang berlatih melukis, lengkap dengan kain kanvas, kuas dan cat.

Sebagian lagi, anak-anak Pramuka sedang belajar tali-temali menggunakan dua tongkat. Mereka sedang membuat tandu darurat menggunakan tongkat dan tali. Semua anak-anak terlihat antusias dengan wajah gembira melaksanakan tugas masing-masing.



Di depan perpustakaan, beberapa siswa sedang membaca Al Quran di bawah pohon sambil duduk melingkar bersama seorang guru sebagai pembimbing. Sebagian lagi, anak-anak juga berlatih membaca Kitab Suci Al Quran di mushola yang berada di belakang sekolah.

Berbagai cabang bela diri juga diminati. Sebagian anak-anak sedang berlatih karate, taekwondo dan silat. Mereka berlatih bersama guru yang sengaja didatangkan dari luar sekolah mengingat belum ada guru yang menguasai bela diri.

Selain di halaman sekolah, sebagian kegiatan ekstrakurikuler juga berlangsung di kelas. Antara lain para pemusik marching

band sedang memainkan pianika dan alat musik lainnya di dalam kelas. Bersama tim penabuh drum mereka juga berlatih bersama di halaman sekolah memperagakan berbagai aksi yang menarik.

Begitulah suasana kemeriahan di sekolah setiap hari di SDN 20 Pekanbaru, selepas belajar di kelas. Orang tua yang akan menjemput anak ikut menonton aksi para siswa dari pinggir lapangan. Tampaklah keharmonisan terjalin antara anak-anak, guru dan orang tua setiap hari di sekolah tersebut.

Kepala Sekolah SDN 20 Pekanbaru, Hasnah menyatakan pada awalnya pelaksanaan PPK memang tidak langsung mulus. Program Lima Hari Sekolah (LHS) yang dilaksanakan 1

Agustus 2017, semula mendapat tantangan dari sebagian orang tua dan madrasah. Pasalnya, saat itu muncul keberatan dari para guru madrasah yang merasa siswa akan tidak mengikuti kegiatan mengaji. "Sekitar 20 persen siswa mengikuti Madrasah Diniyah Awaliyah di sore hari," kata Hasnah.

Jika para siswa seharian di sekolah, maka mereka khawatir madrasah akan tutup. Namun setelah ada pengertian bersama, akhirnya ada kesepakatan yakni siswa akan pulang jam 14.00 WIB agar mereka memiliki waktu untuk mengikuti kegiatan di madrasah. "Kami membuat komitmen bersama dengan madrasah, sehingga meskipun siswa bersekolah selama lima hari, namun mereka tetap bisa masuk madrasah pada sore hari."

Untuk melaksanakan PPK, Hasnah membuat 33 kegiatan ekstrakurikuler yakni pramuka, dokter kecil, majalah dinding (jurnalistik), drumband, pencak silat, PBB, atletik, voley, badminton, tenis meja, karate, catur, sepakbola, takraw, rebana, pantomim, seni suara, seni rupa, seni lukis, puisi, syair, pantun, seni tari, bina musika, drama, dongeng, pidato/ dai cilik, seni Al Quran, Tahfiz, Polisi Cilik, English Club, dan MIPA.

Dia juga mengerahkan seluruh guru agar bersedia membina kegiatan ekstrakurikuler. "Pada awalnya, beberapa guru juga merasa keberatan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang begitu banyak. Ada yang diminta melatih salah satu kegiatan ekstrakurikuler keberatan karena guru itu merasa tidak memiliki bakat. Tapi saya perintahkan agar mereka mau

berlatih dulu sebelum membimbing siswa," kata Hasnah. Meskipun demikian, Hasnah tidak memaksakan guru jika memang mereka tidak mampu. Misalnya untuk ekstrakurikuler karate, silat, dan tekwondo, pihak sekolah mengundang pelatih dari luar.

Pendidikan karakter adalah sekolah kehidupan dimana guru SD dituntut memiliki kelebihan dalam ruang berkreasi, karena pola belajar mengajar di SD berdasarkan Kurikulum 2013 adalah tematik. Bagi sekolah di daerah, guru bisa saja membawa siswa ke lingkungan alam seperti hutan. Di sana siswa bisa ditugaskan untuk mempelajari jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang terdapat di hutan.

Kegiatan-kegiatan yang diciptakan guru dalam melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menjadi salah satu tugas guru yang bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka untuk memenuhi beban kerja guru.

MENJADIKAN SEKOLAH SEBAGAI RUMAH KEDUA

Setidaknya terdapat empat Permendikbud lain yang harus diketahui para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam menyambut tahun ajaran baru agar dapat mewujudkan sekolah sebagai rumah kedua. Pertama, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, di dalamnya diatur mengenai ketentuan penggalangan dana oleh sekolah melalui komite sekolah. Semangat gotong royong menjadi dasar pembentukan komite sekolah yang melibatkan berbagai



unsur di masyarakat. Komite diperbolehkan menggalang dana untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan atau pengembangan sarana prasarana yang bermuara pada terwujudnya pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan. Penggalangan dana tersebut harus berbentuk bantuan dan/atau sumbangan pendidikan, bukan pungutan.

Kedua, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi Siswa Baru. Salah satu tujuan diterbitkannya permendikbud itu adalah untuk menghapus dengan tegas masa orientasi siswa (MOS) yang kerap diwarnai tindakan perpeloncoan. Ketiga, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Keempat, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Melalui permendikbud itu diharapkan sekolah bisa menjadi taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan, serta menjadi tempat yang dapat menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 mengatur kegiatan wajib dan kegiatan pilihan dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai dan karakter positif. Kelima, terdapat pula Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. ●

8

**PROGRAM
INDONESIA
PINTAR**





Memperluas Akses Pendidikan dan Mengembangkan Literasi Keuangan



"Siapa di sini yang bisa silat? Ayo maju," ujar Presiden Joko Widodo kepada ribuan anak penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di ASA Sport Center, Cilegon, Banten, pada Kamis siang, 5 Oktober 2017 lalu. Sesaat tampak tak ada satu pun siswa penerima KIP yang menunjuk tangan. Presiden pun mengulangi pertanyaannya. Tak lama, dari tempat duduk siswa SD, seorang siswa mengangkat tangan. "Ya, sini maju," tutur Presiden.

Siswa tersebut lalu maju dan naik ke panggung menghampiri Presiden Jokowi. Nova Zumi Zola, namanya. Siswa kelas 6 SD itu tampak percaya diri berdiri berdampingan dengan orang nomor satu di Indonesia. Presiden lalu meminta Nova untuk memperagakan jurus silat yang dikuasainya. "Coba peragakan pencak silat di sini. Tapi jangan satu jurus loh ya. Dua puluh jurus," ujar Presiden. Permintaan Presiden tersebut mengundang tawa orang-orang yang hadir.





Foto: Dok. slemankab.id

Nova lalu menyanggupinya. Ia mulai mengambil kuda-kuda, membuka kakinya, dan mengangkat tangannya, memulai gerakan pembuka untuk peragaan silatnya. Dengan lihai, tangan-tangannya bergerak, memperagakan berbagai jurus silat. Ia pun tampak memberikan tenaga pada tangannya di setiap gerakan sehingga terlihat ada kekuatan di gerakan-gerakan silatnya. Ribuan orang yang memadati ASA Sport Center Cilegon pun bertepuk tangan melihat keterampilannya bersilat. "Sampai saya bilang berhenti jangan berhenti dulu. Ya, terus. Wah, pintar banget ini," puji Presiden Jokowi melihat gaya Nova memperagakan silat.

Setelah menyuruh Nova berhenti, presiden lalu kembali berdialog dengannya. "Tadi jurus apa?", tanya presiden. "Jurus Macan dari Kemayoran," jawab Nova. "Betul jurus Macan dari Kemayoran? Nggak keliatan macannya

kok tadi," tutur Presiden bercanda. Ia lalu mengucapkan terima kasih dan menyuruh Nova turun dari panggung.

Saat berjalan kembali menuju tempat duduknya, Nova terlihat ragu-ragu dan menengok ke belakang melihat ke arah Presiden. "Nov, sini, kamu tidak usah nengok-nengok gitu. Tegas gitu loh. Jangan nengok-nengok. Pak, saya sudah silat, saya minta sepeda. *Gitu loh*. Sudah lari. Diambil itu sepedanya," kata Presiden Jokowi. Nova pun bersemangat berlari menghampiri hadiah dari kepala negara itu.

Nova adalah salah satu siswa penerima KIP di Kota Cilegon, Banten. Hari itu, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-72 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Cilegon. Salah satu agendanya adalah Penyerahan Kartu



Foto: Dok. Liputan6

Indonesia Pintar (KIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Sebanyak 1.170 siswa penerima KIP di Kota Cilegon menghadiri acara penyerahan KIP tersebut. Mereka terdiri dari 685 siswa SD, 238 siswa SMP, 53 siswa SMA, 149 siswa SMK, 10 warga belajar Paket B, dan 35 warga belajar Paket C. Penyerahan KIP dilakukan secara simbolis oleh Mendikbud Muhadjir Effendy kepada enam orang, yaitu Ibnu Maulana Madjid dari SDN Cilegon 01, Yesi Oktafia Yuanita Pratiwi dari SMPN 7 Cilegon, Muhammad Raihan Fadli Adibuwono dari SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon, Nur Azizah dari SMKS YP 17 Cilegon, Hengki Tornado dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Teratai untuk Program Paket B, dan Habiatul Hidayatullah dari PKBM Melati Cibeber untuk Program Paket C.

KIP MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN

PIP digulirkan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai salah satu program prioritas pendidikan dalam mendukung Nawa Cita, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pada 3 November 2014, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

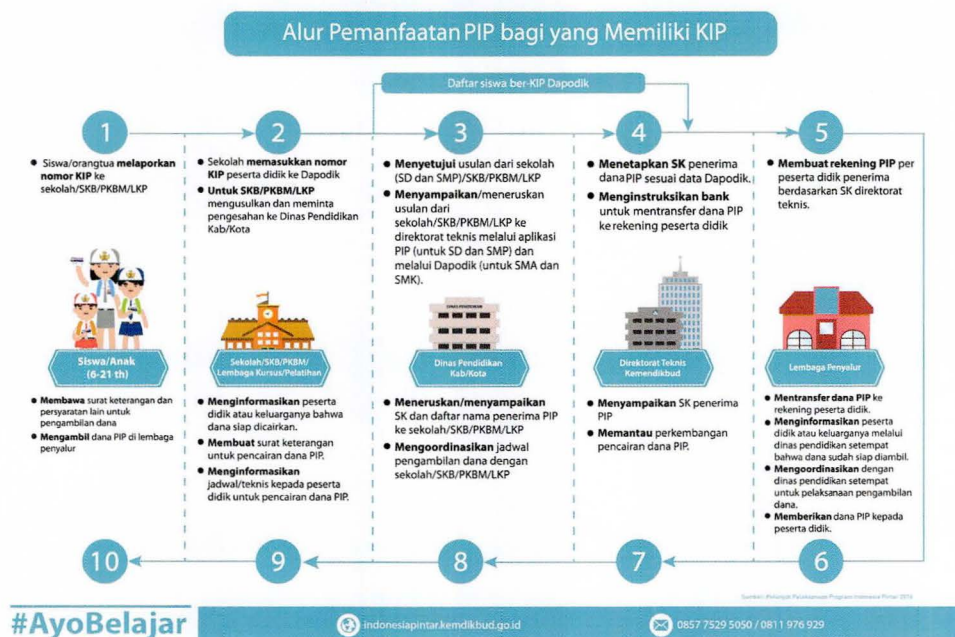
Inpres tersebut ditujukan, di antaranya kepada, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Agama, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

Kepada para pejabat tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Khusus kepada Menko PMK, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat; penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut dengan melibatkan menteri terkait, para gubernur, para bupati/walikota, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi program-program itu pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK

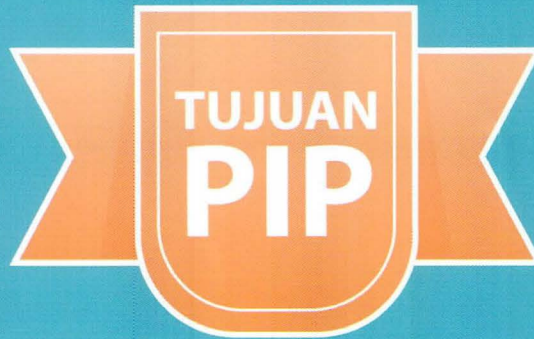


• Alur yang punya KIP



• Alur yang tidak punya KIP





Program ini bertujuan untuk



Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Meringankan biaya personal pendidikan

Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2016

PIP menjadi program nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN tersebut ditegaskan bahwa tujuan PIP adalah, *pertama*, meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. *Kedua*, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan dengan menekan angka putus sekolah, dan mengajak kembali anak-anak putus sekolah untuk meneruskan pendidikannya. *Ketiga*, mengurangi kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin. *Keempat*, meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

PIP dilaksanakan dengan membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk menyalurkan bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan. Penerima PIP terbagi beberapa kelompok. *Pertama*, peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH). *Kedua*, peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). *Ketiga*, peserta didik yang berstatus yatim/piatu/yatim/piatu dari sekolah atau panti asuhan. *Keempat*, peserta didik yang terkena dampak bencana alam. *Kelima*, peserta didik inklusi, korban musibah, pemutusan hubungan kerja (PHK), daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan (LAPAS), dan memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal

serumah. *Keenam*, peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya. *Ketujuh*, peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13. Dan, kedelapan, peserta didik SMK Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Kemaritiman.

Pemerintah mencatat terdapat 4,1 juta anak tidak sekolah (ATS). Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan telah menindaklanjuti data itu dengan membantu memberikan KIP kepada 31.141 ATS untuk mendapatkan layanan kesetaraan Paket A, B dan C. Selain itu, sebanyak 111.923 anak putus sekolah telah dikembalikan ke sekolah, dan dari jumlah itu sebanyak 16.170 anak telah mendapatkan KIP.

PIP yang dilaksanakan melalui KIP itu merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sebelumnya dilaksanakan sejak akhir 2014. KIP sendiri diberikan sebagai penanda atau sebagai identitas untuk menjamin dan memastikan agar ia mendapat bantuan Program Indonesia Pintar. Syaratnya ia sudah harus terdaftar ke lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus dan Lembaga Pendidikan Non Formal lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Karena itu, untuk mendapat KIP, mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai siswa di lembaga-lembaga pendidikan tadi.

PRIORITAS PENERIMA PIP

1 Peserta didik dari keluarga pemegang **KIP/KKS/KPS**;

2 Peserta didik dari keluarga peserta **Program Keluarga Harapan (PKH)**;

3 Peserta didik yang berstatus **yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan**;

4 Peserta didik yang terkena dampak **bencana alam**;

5 Peserta didik yang pernah **drop out**;



#AyoBelajar

6 Peserta didik dari **keluarga miskin/rentan miskin** yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya, seperti:

- Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
- SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman serumah;

7 Peserta pada lembaga khusus atau satuan **pendidikan nonformal** lainnya.



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2016.



indonesiapintar.kemdikbud.go.id



0857 7529 5050 / 0811 976 929

PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN KARTU INDONESIA PINTAR

APA FUNGSI LEMBAGA PENDIDIKAN UNTUK PENERIMA KIP?



Lembaga pendidikan formal dan nonformal akan melayani peserta didik/orangtua untuk mendaftarkan KIP ke Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik) sebelum 30 September 2016 supaya KIP dapat digunakan.



Bagi yang belum menerima KIP namun masuk ke dalam kategori penerima KIP, lembaga pendidikan formal dan nonformal akan mendaftarkan nama calon penerima ke dalam usulan penerima manfaat PIP di Dapodik.

LANGKAH APA SAJA YANG DILAKUKAN lembaga pendidikan dalam membantu **aktivasi KIP?**



1

Mendata dan menginformasikan penerima KIP untuk membawa KIP ke sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), tempat Kursus dan pelatihan serta Balai Latihan Kerja (BLK)



2

Memasukkan data penerima KIP ke dalam Dapodik



3

Lembaga pendidikan formal dan nonformal melayani penerima non-KIP dengan kriteria sebagai berikut:

- Anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- Anak dari keluarga penerima KKS yang tidak menerima KIP
- Anak yatim piatu dari Panti Asuhan/Panti Sosial
- Anak berusia 6 - 21 tahun yang tidak bersekolah
- Anak dari keluarga tidak mampu yang rentan putus sekolah

Untuk diseleksi dan diusulkan ke dalam penerima manfaat KIP di Dapodik



4

Khusus untuk SKB/PKBM/BLK agar segera mengusulkan penerima KIP atau usulan nama penerima manfaat PIP langsung ke Dinas Pendidikan.

MARI BEKERJA SAMA DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA PINTAR!



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Unit Pengaduan Program Indonesia Pintar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



pengaduanpip.kemdikbud.go.id



085775295050

Format SMS:

KIP# Provinsi# Kabupaten/Kota
Kecamatan#Nama Sekolah#Isi Pesan



indonesiapintar.kemdikbud.go.id



Kemdikbud_RI



@Kemdikbud_RI

#Ayobelajar



#AYOBELAJAR!

MARI DORONG DAN DUKUNG TERUS PUTRA-PUTRI KITA
UNTUK TERUS BELAJAR DAN SEMAKIN BERPRESTASI.

APA TUGAS YANG PERLU DIINGAT OLEH DINAS PENDIDIKAN
DALAM MEMBANTU PROSES AKTIVASI KIP ?

1



Berkoordinasi dengan
sekolah/SKB/PKBM/BLK
untuk menjaring penerima KIP
tepat sasaran dan tepat waktu.

Mendorong kepala sekolah
atau operator agar
memasukkan data penerima
KIP ke dalam Dapodik.



2

3



Mengusulkan nama peserta
didik penerima KIP dan
SKB/PKBM/BLK, ke direktorat
terkait.

UNIT PENGADUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

 pengaduanpip.kemdikbud.go.id

 0857 7529 5050 / 0811 976 929

Dengan format: KIP#Provinsi#Kabupaten/Kota#Kecamatan#NamaSekolah#Isi Pesan



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



indonesiapintar.kemdikbud.go.id



@Kemdikbud_RI



Kemdikbud.RI



Foto: Dok. soleh-metalonline.id

Program Indonesia Pintar ini diselenggarakan oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag), agar seluruh anak usia sekolah tidak ada yang tidak bersekolah. Dengan PIP melalui KIP, anak-anak yang sebelumnya terkendala biaya karena orangtuanya tidak mampu, diharapkan bisa tetap bersekolah atau melanjutkan sekolahnya.

Untuk melaksanakan PIP, Kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar. PIP berupa bantuan dana yang ditujukan kepada anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan. Para siswa yang mendapatkan bantuan menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas.

PIP diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia mendapat pendidikan dalam kerangka Wajib Belajar 12 Tahun, tanpa

terkecuali, baik anak-anak di perkotaan hingga yang berada di pelosok daerah terpencil. Anak usia sekolah diharap dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Selain itu, PIP juga untuk membantu anak-anak usia sekolah yang putus sekolah, atau tidak bersekolah agar mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada daerah-daerah yang belum menuntaskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Target penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 20,3 juta anak, yang terdiri dari 17,9 juta anak di bawah tanggung jawab Kemendikbud, dan sisanya 2,4 juta anak berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Pemerintah menggunakan Basis Data Terpadu terbaru yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penerimaan data ini dimulai pada tanggal 10 Februari 2016.



Foto: Dok. Kemdikbud go.id

Bersamaan dengan proses percetakan dan pengiriman KIP, Kemendikbud menyiapkan proses Surat Keputusan (SK) penerima dana KIP. Pada awal 2016 lalu, SK difokuskan kepada siswa tingkat akhir agar mereka masih bisa menerima dana KIP sebelum tahun ajaran berakhir. Pemerintah berharap siswa tingkat akhir yang mendapat bantuan tersebut bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Setelah itu, di tahun ajaran baru, semua siswa yang masuk kategori penerima KIP sudah bisa mencairkan dana KIP 2016.

KIP bertujuan upaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan anak usia sekolah. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*). Mengembalikan siswa yang putus sekolah atau melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat satuan pendidikan menengah.

Program ini juga untuk mengurangi perbedaan angka partisipasi sekolah antar-kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Hal ini karena Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi tingkat partisipasinya dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu.

Terjadinya kesenjangan tersebut, salah satunya disebabkan karena tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung atau tak langsung. Biaya langsung, seperti iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis. Sedangkan biaya tak langsung, seperti biaya transportasi, kursus, uang saku, dan biaya lain-lain yang harus ditanggung oleh peserta didik. Rendahnya angka partisipasi kelompok ekonomi tidak mampu untuk sekolah menyebabkan angka siswa tidak melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap APK.

Penyaluran PIP melibatkan Kemendikbud dengan Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). "Tiap-tiap siswa yang menerima bantuan harus sudah terverifikasi oleh Kemendikbud, Kemensos, dan TNP2K," kata Mendikbud.

Untuk memacu target penyaluran KIP, Kemendikbud mengajak 107 bupati memperbaiki pendidikan di wilayah masing-masing. "Ini penting karena semua elemen, mulai pendidikan usia dini, kuncinya pada pemimpin daerah. Maka komitmen daerah harus kita perkuat," kata Mendikbud.

Komitmen tinggi pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi seluruh rakyat setidaknya tampak terlihat kala Presiden Jokowi gencar membagikan KIP secara simbolik pada sejumlah kegiatan. Saat membuka acara Rembuk Nasional (Rembuknas) Pendidikan dan Kebudayaan 2017, yang digelar Kemendikbud di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, 26 Januari 2017, Presiden membagikan KIP kepada siswa Panti Asuhan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Kala itu tercatat siswa yatim piatu yang menerima KIP mencapai 2.844 orang yang berasal dari 309 sekolah di Jabodetabek. Mereka terdiri dari 909 siswa Sekolah Dasar, 992 siswa Sekolah Menengah Pertama, 223 siswa Sekolah Menengah Atas, 628 siswa Sekolah Menengah Kejuruan, dua siswa Sekolah Luar Biasa dan 90 siswa Kejar Paket.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada sepuluh siswa sebagai perwakilan teman-temannya. Mereka adalah Siti Saiyah dan Fahrul Roji dari SD Negeri Tangerang 19, Ali Ridwan Adeputra

dan Junah dari SMP Negeri 1 Tangerang Selatan, Siti Sarifah dan Galeh Prasetyo dari SMASI Islam Asy Syifa, Jujun Gustiawan dan Maulida Fitri R dari SMK Insan Mulia, Maryamul Lutfiyah dan Muhammad Aji Wahyudin dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Miftahul Jannah serta Muhammad Lutfi dan Evrista dari SLB Negeri 7 Jakarta.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pemberian KIP kepada 2.844 siswa yatim piatu di wilayah Jabodetabek ini merupakan bagian dari upaya menyediakan layanan pendidikan dan kebudayaan yang merata, berkeadilan dan berkualitas. Anak yatim piatu dan panti asuhan penerima KIP ditargetkan sebanyak 736.848 orang. Tahun 2016 lalu, KIP yang tersalurkan diterima 158.933 anak yatim piatu. Tahun 2017, anak yatim piatu penerima KIP mencapai



Manfaat Program Indonesia Pintar

SD/MI/Paket A

Rp225.000,-/Semester
(Rp450.000,-/Tahun)

SMP/MTs/Paket B

Rp375.000,-/Semester
(Rp750.000,-/Tahun)

SMA/SMK/MA/Paket C/Kursus & Pelatihan

Rp500.000,-/Semester
(Rp1.000.000,-/Tahun)



896.781 orang. "Pembagian KIP bagi anak yatim ini merupakan permintaan langsung dari Bapak Presiden, yang intinya meminta agar kartu yang bertujuan membantu anak tidak mampu bersekolah itu juga dibagikan khusus kepada anak yatim piatu," kata Mendikbud.

MEMPERCEPAT DISTRIBUSI KIP

Percepatan distribusi KIP dilaksanakan Kemdikbud dengan mendeklarasikan pembentukan Satuan Tugas Indonesia Pintar (SIP) di Kota Bogor, pada tanggal 20 Agustus 2017. Deklarasi yang digelar di Taman Ekspresi

Kota Bogor itu selain dihadiri Walikota Kota Bogor Bima Arya, juga seluruh kepala sekolah dan lurah se-Kota Bogor.

Satgas dibentuk untuk mendorong percepatan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih bermasalah. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad mengatakan, awalnya terdapat sekitar 20,4 juta anak kurang mampu yang menjadi sasaran pemegang KIP berdasarkan data dari Kementerian Sosial.

Kemdikbud lalu memilah kembali angka tersebut. Akhirnya mendapatkan angka 17,9

juta anak kurang mampu di Indonesia yang menjadi sasaran sebagai pemegang KIP. Dari jumlah itu, 97 persen sudah didistribusikan di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Namun, rupanya 10 persen di antaranya bermasalah.

"Sepuluh persen KIP hanya diantar sampai di kantor kelurahan. Alasannya karena tidak ada biaya operasional untuk mendistribusikan dan ada masalah pada data penerima KIP," ujar Hamid, seperti dikutip dari Siaran Pers Kemdikbud. Selain itu, ada pula persoalan bahwa ada penerima KIP yang sudah menikah, sudah lulus sekolah, menerima dua kartu, hingga temuan penerima KIP sudah meninggal dunia.

"Sehingga kehadiran Satgas ini adalah mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang ada sekaligus juga memfasilitasi anak-anak yang dianggap berhak untuk menerima KIP tapi belum mendapatkannya," ujar Hamid. Selain mengawasi distribusi KIP agar tepat sasaran, lanjut Hamid, Satgas juga bertugas menggiatkan gerakan sekolah ramah anak dan penguatan pendidikan karakter di sekolah.

Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar Yanti Yulianti mengatakan, peserta didik yang memenuhi syarat menerima KIP namun belum menerimanya bisa mengisi formulir yang disediakan di posko pengaduan pemerintah setempat. "Saya harap deklarasi SIP ini bisa membantu mendampingi anak-anak yang selama ini belum bersekolah tetapi siap bersekolah untuk mendapatkan hak pendidikan," ujar Yanti.

"Satgas Indonesia Pintar akan menerima seluruh pengaduan hal-hal terkait pendidikan. Tugas Satgas tidak hanya menerima pengaduan tapi juga mengadvokasi," kata Yanti. "Nanti kita akan kawal. Bukan hanya siswa yang sudah bersekolah. Namun, bagi anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang harusnya sekolah tapi tahun ini tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya juga akan diadvokasi agar mendapat KIP."

Deklarasi di antaranya berisi menggiatkan semangat gotong royong dalam program pendidikan melalui percepatan penyerapan KIP, menggiatkan sekolah ramah anak dan menguatkan pendidikan karakter berbasis keluarga, sekolah dan masyarakat.

"Salah satu kegiatan yang mendukung Kartu Indonesia Pintar adalah pendistribusiannya. Masalah yang terjadi di lapangan adalah kartu yang tidak tepat sasaran. Untuk itu agar tepat sasaran





satgas-satgas akan mendeteksi kembali anak-anak yang berhak menerimanya,” kata R. Alpha Amirrachman, Ph.D, staf khusus Mendikbud Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan. Alpha mengatakan bahwa dibentuknya satgas juga untuk mendampingi warga miskin dalam mendapatkan kartu dan menggunakannya sesuai dengan ketentuannya.

PERCEPATAN PENCAIRAN DANA

Pagi itu, dalam kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Ke-72 RI, suasana SD Negeri Sukamaju, Purwakarta, tampak meriah. Di sana-sini banyak atribut merah putih. Di dalam kelas pun ada banyak hiasan merah putih, yang melambangkan Sang Saka Merah Putih, bendera NKRI. Ada banyak tamu memenuhi dua ruang kelas yang dijadikan satu sebagai tempat pertemuan. Sebagian lagu duduk di sepanjang selasar kelas.

Mereka adalah ora orangtua siswa, bukan hanya orangtua siswa SDN Sukamaju, namun juga beberapa SD dalam satu gugus. Mereka tengah mengikuti Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pencairan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar 2017. Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dengan mengundang Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai mitra Kemendikbud dalam pencairan KIP untuk siswa SD. Hadir juga para kepala SD di Purwakarta.

Percepatan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) dibagi dua gelombang yakni, gelombang pertama di 34 kabupaten/kota pada 8-11 Agustus 2017 dan gelombang kedua dilaksanakan di 32 kabupaten/kota pada tanggal 14-17 Agustus 2017. “Kami mendorong agar segera dicairkan sehingga mereka dapat menggunakan manfaat dana PIP untuk keperluan sekolah,” kata Direktur Pembinaan SD Wowon Widaryat.



Tahun 2017 ini, PIP dialokasikan bagi 17.927.308 siswa dari seluruh jenjang SD hingga SMA/SMK. Siswa SD penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 10.360.614 anak. Berturut-turut penerima KIP untuk jenjang SMP sebanyak 4.369.968 anak, 1.367.599 siswa SMA, dan 1.829.167 siswa SMK. Bantuan PIP untuk siswa SD/Paket A sebanyak Rp450 ribu, untuk siswa SMP/Paket B sebesar Rp750 ribu, dan siswa SMA/Paket C sebanyak Rp1 juta.

Menurut Direktur Wowon, pendistribusian KIP semakin meluas. Bukan hanya untuk siswa miskin. Presiden Jokowi menginstruksikan anak yatim piatu juga berhak mendapat KIP. Kemendikbud menggunakan basis data pokok pendidikan (Dapodik) per Desember 2016. Dalam data tersebut, terdapat 896 ribu anak yatim dan yatim-piatu bakal mendapatkan KIP. Anak yatim dan yatim-piatu penerima KIP adalah yang berada di panti asuhan dan di luar panti asuhan yang berasal dari golongan tidak mampu.

Memasuki tahun ajaran 2017/2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah berupaya agar distribusi atau penyaluran KIP dipercepat, terutama untuk mengantisipasi kebutuhan siswa menyambut tahun ajaran baru. "Jadi, ini momentumnya agar pas manakala anak-anak masuk sekolah membutuhkan buku, sepatu, dan seragam sekolah," kata Muhadjir.



Keberhasilan PIP menjadi sangat penting karena merupakan salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program PIP bertujuan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah 7-18 tahun. Melalui PIP, pemerintah ingin memastikan setiap anak dapat menempuh pendidikan pada jenjang dasar hingga menengah.

Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan, KIP bukan hanya menjamin semua anak usia sekolah mendapat pendidikan dengan baik, melainkan juga sebagai program jangka panjang pemerintah guna mempersiapkan generasi masa depan yang berdaya saing global. Pada tahun 2045, tepat perayaan 100 tahun kemerdekaan RI, Indonesia akan

mendapatkan bonus demografi dengan memiliki populasi usia produktif terbesar se-Asia Tenggara.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk membuka secara luas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui KIP, anak yang tumbuh dalam keluarga kurang mampu tetap dijamin dapat mengecap jenjang pendidikan formal hingga tingkat menengah.

MENGEMBANGKAN LITERASI KEUANGAN

Percepatan pencairan KIP juga ditandai dengan perubahan sistem pencairan. Mulai tahun 2017, KIP bertransformasi ke dalam bentuk non-tunai. KIP baru atau disebut KIP Plus merupakan bentuk pengembangan penyaluran dana pendidikan secara non tunai seperti kartu ATM. KIP Plus dapat digunakan juga untuk berbelanja keperluan belajar di *merchant* yang ditunjuk oleh bank atau di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Pemerintah mengintegrasikan berbagai bantuan sosial (*bansos*) secara non tunai, seperti Kartu

Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Beras Sejahtera (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam satu kartu, yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Tahun-tahun sebelumnya, bantuan uang melalui KIP sebatas dalam bentuk uang virtual. Artinya, dana PIP dari pemerintah meski sudah ditransfer ke bank penerima, masih terdapat keterlambatan proses pencariannya oleh sekolah. Kini, semua penerima KIP memiliki nomor rekening tabungan Simpanan Pelajar (Simpel). Simpel digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan bank umum dan bank syariah.

Mulai tahun ajaran baru 2017/2018, pemberian KIP sudah dengan ATM dari Tabungan Simpel atau Simpanan Pelajar. KIP melalui Simpel ini tidak serta merta langsung cair. Harus ada proses aktivasi, yang perlu

dipahami kepala sekolah, dan orangtua siswa. "Di Purwakarta ini pencairan KIP sudah cepat, sebelum kegiatan sosialisasi ini. Sekarang sudah proses aktivasi, sehingga sudah bisa dicairkan, bisa melalui kartu ATM," kata Wowon Widaryat. Usai sosialisasi, Direktur Wowon Widaryat menyempatkan diri mengunjungi kegiatan sosialisasi di SD Negeri Sukamaju, Purwakarta.

Kehadiran KIP melalui tabungan Simple, kata Wowon, juga merupakan bagian dari amanah Kurikulum 2013 (K13). "Sebagaimana diamanahkan oleh K13, selain program penguatan karakter, dan juga literasi sekolah, kini juga perlu literasi keuangan. Jadi literasi bukan hanya baca tulis, namun siswa juga memahami pengelolaan keuangan. Simpel merupakan bagian dari sosialisasi literasi keuangan," kata Direktur PSD yang berasal dari Kota Cimahi, Jawa Barat ini.





"Dalam kunjungan kerja ke Karawang, ada yang uang KIP-nya langsung dihabiskan, hanya disisakan Rp 10.000. Kami berharap, uang bantuan diambil sesuai kebutuhan. Misalnya hari ini butuh untuk beli seragam, ya cukup diambil untuk beli seragam. Jangan sampai, yang seharusnya untuk beli seragam, malah untuk beli beras," kata Wowon.

Wowon juga berpesan kepada para kepala sekolah yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut agar akses pendidikan dapat menjangkau seluruh anak usia sekolah. "Misalnya ada anak usia 12 tahun yang putus sekolah, maka ajaklah mereka bersekolah dengan dibiayai PIP," katanya.

Purwanto, S.Pd., M.Pd., Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, menambahkan bahwa Purwakarta menerima kuota bantuan PIP sebanyak 10.662 siswa. Permasalahan sebelumnya yang mencuat adalah kuota tersebut belum terserap semua. Sehingga muncul pertanyaan, apakah memang sudah tidak membutuhkan atau masih ada masyarakat yang membutuhkan namun tidak masuk ke dalam daftar penerima PIP.

"Saya sendiri yakin, sekolah melakukan pendataan sudah akurat. Kalau ada siswa yang tidak menggunakan sepatu, maka sekolah akan langsung tahu. Ada siswa mereka yang tidak mampu beli sepatu, sehingga bisa didaftarkan sebagai penerima PIP," kata Purwanto.

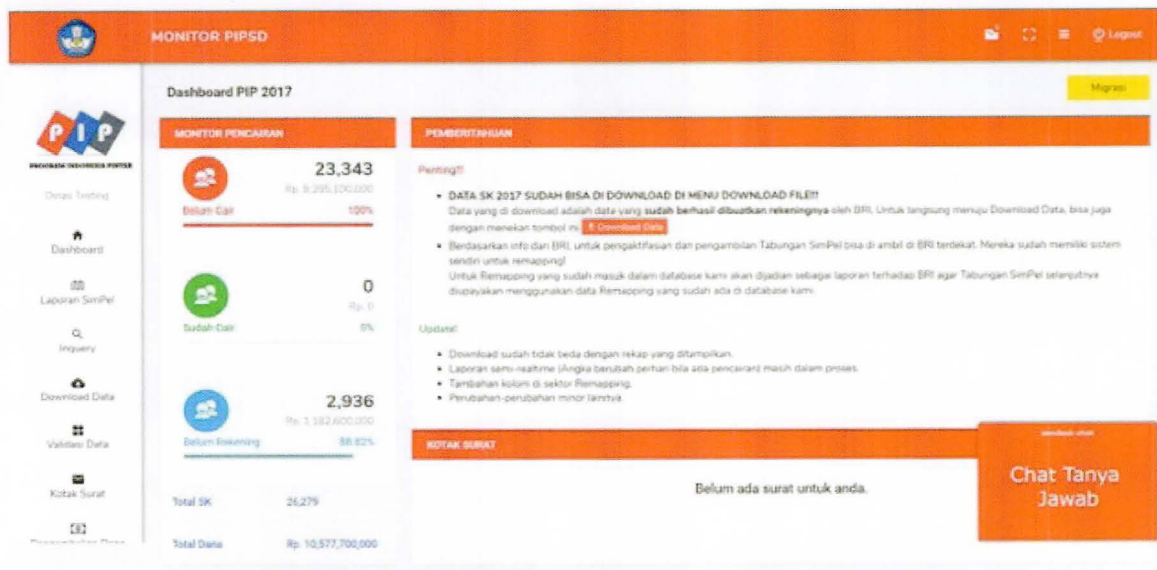


TABLE PENCAIRAN KECAMATAN PIP 2017

Kecamatan	Jumlah SK	Jumlah Re	Sudah Cair	Belum Cair	%
Kec. Bangi	633	619	0	619	0%
Kec. Bej	525	525	0	525	0%
Kec. Gempol	486	486	0	486	0%
Kec. Gondang Wilatan	1,365	1,365	0	1,365	0%
Kec. Grati	2,153	2,153	0	2,153	0%
Kec. Kajiyan	1,687	49	0	49	0%
Kec. Klaton	2,072	2,072	0	2,072	0%
Kec. Lekok	2,671	2,671	0	2,671	0%
Kec. Lumbang	874	874	0	874	0%
Kec. Ngudung	1,069	1,069	0	1,069	0%

Showing 1 to 10 of 24 entries

TABLE PENCAIRAN TAHAP PIP 2017

Tahap	Jumlah SK	Jumlah Re	Sudah Cair	Belum Cair	%
1	25	25	0	25	0%
2	513	513	0	513	0%
3	25,503	22,567	0	22,567	0%
4	221	221	0	221	0%
5	17	17	0	17	0%

Showing 1 to 5 of 5 entries

2017 © Kementerian Pendidikan dan Budaya Direktorat Peserta Didik SD.

PENYALURAN SUDAH 100%

Direktorat PSD terus menggenjot percepatan penyaluran KIP. Sepanjang November 2017, percepatan pencairan dana PIP dilakukan serentak dalam tiga gelombang. Sebanyak 51 kabupaten/kota dilaksanakan pada 7-10 November, 51 kabupaten/kota pada tanggal 14-17 November, dan 50 kabupaten/kota dilaksanakan pada 19-22 November 2017.

Percepatan PIP juga diiringi perubahan skema penjangkaran penerima PIP. Pada tahun 2016, skema penjangkaran dilakukan Direktorat

dengan melakukan pengolahan data layak SK berdasarkan Basis Data Terpadu (Kementerian Sosial). Entri data terakhir dilakukan pada tanggal 20 per bulan, yang kemudian dilanjutkan pembuatan SK penerima PIP per tanggal 1.

Skema penjangkaran PIP 2017, dimulai dari tahapan yang dilakukan operator sekolah, meliputi: a) verifikasi entry KIP (nama siswa dan orangtua di kartu cetak dan Dapodik harus wajar); b) melakukan update data KIP dengan kartu fisik; c) melakukan update usulan PIP



MONITOR PIPSD

Logout



Laporan SimPel

Show: 10 entries

Search:

Kecamatan	Jumlah Anak	Jumlah Sekolah	Sudah Masuk
Kec. Bangli	236	27	3
Kec. Bepi	67	19	0
Kec. Gempol	92	22	0
Kec. Gondang Wetan	363	16	0
Kec. Grit	296	27	0
Kec. Kapanen	36	5	0
Kec. Klaten	3	2	0
Kec. Lelak	52	11	0
Kec. Lumbang	199	15	4
Kec. Pegung	770	28	0

Showing 1 to 10 of 23 entries

Previous 1 2 3 Next

2015 © MoE



MONITOR PIPSD

Logout



Verifikasi Layak KIP

KIP Double

Show: 10 entries

Search:

Nama Sekolah	Layak PIP	Tidak Layak PIP	Total Data
SD AL-IRSYAD BANGEL	31	0	31
SD MUHAMMADIYAH BANGEL	19	0	19
SD NAHOLATUL ULAMA BANGEL	108	0	108
SD NEGERI BENDOMUNGAL I	20	0	20
SD NEGERI BENDOMUNGAL II	8	0	8
SD NEGERI DERMO I	91	0	91
SD NEGERI DERMO II	73	0	73
SD NEGERI GEMRENG II	112	0	112
SD NEGERI KALANAYAR I	25	0	25
SD NEGERI KALANAYAR II	8	0	8

Showing 1 to 10 of 28 entries

Previous 1 2 3 Next

2015 © MoE

(layak PIP) dilengkapi keterangannya ; d) melakukan update penghasilan orangtua dan pekerjaan orangtua/ status yatim piatu.

Tahap selanjutannya adalah verifikasi dan validasi PIP di Kabupaten/kota. Di sini akan terverifikasi pemegang KIP (kartu), KIP ganda, dan entry KIP. Data PIP yang dipakai adalah Data Popok KIP, dan Data Format Usulan Sekolah (FUS) layak PIP.

Metode percepatan di setiap kabupaten/ kota menetapkan empat gugus sekolah dasar untuk melakukan pencairan dana PIP. Pencairan dilakukan di masing-masing SD inti oleh unit bank penyalur terdekat. "Peserta didik penerima PIP secepatnya segera menerima dananya dengan proses pencairan melalui bank yang ditunjuk untuk SD, yakni Bank BRI. Kita mendorong agar segera dicairkan sehingga mereka dapat menggunakan manfaat dana PIP untuk keperluan sekolah," ujar Wowon Widaryat.

Percepatan pencairan dana PIP tahun 2017 ini juga sudah didukung aplikasi manajemen PIP. Aplikasi Manajemen Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan sebuah aplikasi untuk mengetahui secara langsung informasi detail dari nama-nama setiap satuan pendidikan penerima dana bantuan dari pemerintah bagi

siswa yang kurang mampu. Aplikasi tersebut tidak bisa diakses secara sembarangan, hanya operator sekolah yang dapat masuk dan melihat dengan username dan password seperti ketika masuk pada Aplikasi Dapodik.

Pada Aplikasi Manajemen PIP terdapat menu-menu/fitur yang mempunyai fungsi. Misalnya pada menu Dashboard berisikan beberapa hal, meliputi: rekap dana dan siswa yang sudah mencairkan, belum mencairkan, dan belum tersedia rekening; kumpulan informasi terkait PIP; tabel detail pencairan yang sedang berjalan; dan tanya-jawab live dengan admin PIP SD yang sedang Online.

Kemudian ada menu Laporan simPel, yang berisikan rekap jumlah anak dan sekolah serta jumlah yang sudah melaporkan pengaktifan rekening; tabel detail sekolah berisikan rekap jumlah siswa sekolah, serta untuk menginput di unit kerja mana sekolah tersebut melakukan aktivasi rekening.

Ada lagi menu Inquiry, yang menampilkan inquiry status pencairan PIP dengan cara memasukkan nomor virtual. Menu Download Data, fungsinya untuk mengunduh data migrasi, mengunduh SK per-kecamatan, dan mengunduh SK per-Tahap.



Menu Validasi Data berisikan rekap siswa layak dan tidak layak PIP per-kecamatan serta melakukan verifikasi layak PIP. Menu Validasi Data juga untuk melihat rekap siswa layak dan tidak layak PIP per-sekolah serta melakukan verifikasi layak PIP; melihat detail siswa layak dan tidak layak, serta mengubah status layak PIP dengan cara menekan tombol yang ada di kolom aksi.

Menu Pengembalian Dana, untuk mengembalikan dana ke kas negara dengan cara meng-input nomor virtual account. Setelah itu, akan muncul nama siswa yang akan dikembalikan dananya dengan memasukkan alasannya dahulu kemudian klik tombol kirim.

Hingga akhir November 2017, realisasi PIP sekolah dasar sudah disalurkan 100% kepada 10.360.614 penerima KIP. Realisasi penerima KIP 2017 sepanjang tahun ini meliputi sejumlah tahapan. Di antaranya, tahap penjangkaran penerima dari panti asuhan, siswa yatim/piatu/yatim piatu, siswa Paket A, data layak PIP usulan sekolah, dan siswa kelas 1 baru berdasarkan usulan sekolah. ●

9

**INOVASI
TATA KELOLA
BOS**



Lomba Tata Kelola BOS SD
Tingkat Nasional
Tahun 2016
"Kembalikan Budi Pekerti"

Lomba Tata Kelola BOS SD
Tingkat Nasional
Tahun 2016
"Kembalikan Budi Pekerti"

Inovasi Tata Kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah

Berangkat dari pelosok desa, persisnya di tengah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, tak membuat Suraji Suryo Susanto, S.Pd. berkecil hati. Kepala SD Negeri 017 Sungai Sirih ini, didampingi M. Juroto, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengusung berkas sekardus besar ketika berlaga pada Lomba Tata Kelola BOS Sekolah Dasar Tingkat Nasional Tahun 2016, di Jakarta, Agustus 2016.

Suraji pun bangga sekolah di desa bisa masuk peringkat tiga Lomba Tata Kelola BOS Nasional. Juara 1 dan Juara 2 diraih masing-masing oleh SDN 02 Hegarsari, Banjar, Jawa Barat, dan SDN Semanan 04 Pagi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. SDN 017 Sungai Sirih memang berada di pelosok perkebunan kelapa sawit. Perjalanan menuju sekolah pun harus melalui jalanan menanjak dan menuruni jalanan yang sebagian besar sudah rusak, dihiasi lubang di sana-sini. "Meski ada keterbatasan, tapi itu tidak membuat kami patah semangat dalam mengukir prestasi," ujar Suraji.

SDN 015 Sungai Sirih memang boleh berbangga. Perjalanan mereka hingga ke tingkat nasional tidaklah mudah. Mereka harus menjadi yang terbaik di tingkat Kabupaten Kuansing. Pada seleksi lomba di tingkat Provinsi Riau, SDN 015 Sungai Sirih juga jawaranya. Mereka berangkat ke Jakarta bersama SDN 018 Sorek Satu, Pelalawan (Juara 2 Tata Kelola BOS Provinsi Riau) dan SDN 012 Sungai Sagu, Indragiri Hulu (Juara 3 Tata Kelola BOS Provinsi Riau).

Mereka yang mengikuti seleksi Lomba Tata Kelola BOS SD Tingkat Nasional bukan hanya juara 1 di level provinsi, namun juga juara 2 dan 3. Lomba tahun 2016, diikuti 102 sekolah, yang merupakan perwakilan tiga terbaik dari 34 provinsi.

Peserta menjalani dua tahap penilaian. Tahap I, tim penilai BOS dari Kemdikbud langsung melakukan kunjungan verifikasi/visitasi ke sekolah calon peserta lomba tata kelola BOS nasional, pada bulan April-Mei 2016. Hanya 50 peserta terbaik yang berhak mengikuti penilaian lomba tata kelola BOS SD

LOMBA TATA KELOLA BOS SD TINGKAT NASIONAL 2016



Foto: Arien TW

tahap II dilaksanakan di Jakarta pada bulan Juli-Agustus 2016. Ada enam sekolah terbaik yang dinyatakan sebagai Juara 1, 2, 3 serta Juara Harapan 1, 2 dan 3.

Tahun 2015, peraih Juara 1, 2, dan 3 Lomba Tata Kelola BOS adalah sekolah dari luar Pulau Jawa. Ketika itu yang meraih Juara 1 adalah SD Negeri 04 Birugo, Bukittinggi, Sumatera Barat, kemudian SDN 2 Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Juara 2), dan SDN 82 Kota Gorontalo, Gorontalo, (Juara 3).

DARI JPS PENDIDIKAN HINGGA BOS

Lomba Tata Kelola BOS diadakan setidaknya bertujuan mendorong kinerja pengelolaan program BOS di sekolah menjadi lebih baik. Selain itu juga sekaligus mencari model contoh sekolah yang mengelola dana

BOS secara transparan dan akuntabel, serta memotivasi sekolah lain untuk mengelola dana BOS lebih baik. Lomba Tata Kelola BOS baru diadakan kali pertama tahun 2014 silam.

Menilik sejarah lahirnya BOS, patutlah bersyukur kehadiran BOS sejak tahun 2005 sudah banyak memberikan perubahan besar pada peningkatan mutu sekolah-sekolah di Tanah Air. Cikal bakal lahirnya BOS tak lepas dari program Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan yang diluncurkan pemerintah untuk menanggulangi dampak krisis moneter berkepanjangan pada akhir 1997 silam, yang berlanjut hingga menjadi krisis ekonomi. Pendidikan tak luput terkena dampak krisis ekonomi.

Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*/ JPS) dirancang IMF bersama pemerintah karena krisis sudah menghancurkan kondisi



Foto: Arien TW

sosial ekonomi Indonesia. Indikatornya terlihat pada melonjaknya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dalam waktu relatif singkat. Data Bappenas 1998, menunjukkan penduduk miskin mencapai 80 juta orang, yang berarti mengalami peningkatan 11,9% dari tahun 1997 yang “hanya” 22,4 juta orang. BPS (1999) mencatat angka pengangguran pada tahun 1999 sebanyak 6,37 juta orang.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,9 triliun, yang berasal dari dana pinjaman luar negeri, yang disalurkan melalui IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan sumber lain. Sasarannya adalah masyarakat miskin, pekerja terkena PHK, masyarakat rawan gizi, dan siswa miskin. JPS Pendidikan dimaksudkan untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi pada program pendidikan. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun menjadi program paling krusial diamankan, lantaran menyangkut

nasib jutaan siswa miskin di SD dan SMP yang membutuhkan bantuan agar mereka tetap menuntaskan pendidikan minimal di SMP.

JPS Pendidikan diterjemahkan Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) menjadi program pemberian beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) ke sekolah-sekolah. Pada awal 1998, bantuan beasiswa baru diberikan kepada 100.000 siswa, kemudian meningkat menjadi 4,1 juta siswa SD dan SMP. Jumlah itu sekitar 6% dari siswa SD dan 12% dari siswa SMP.

JPS Pendidikan berupa beasiswa, besarnya Rp120.000 untuk siswa SD, Rp240.000 (SMP), dan Rp300.000 (SMA) per tahun. Sedangkan dalam bentuk DBO sekolah menjangkau 60% sekolah, terutama SD dan SMP. Tak kurang 132.000 sekolah miskin, baik negeri maupun swasta, mendapat kucuran DBO.



Foto: Dok. Dit. PSD

JPS Pendidikan berlangsung selama lima tahun, yakni kurun tahun 1998-2003. Tak kurang dari Rp5 triliun anggaran sudah tersedot untuk beasiswa dan DBO. Dana sebesar itu, separuhnya berasal dari bantuan Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia. Sisanya merupakan uang dari APBN.

JPS Pendidikan terbilang monumental. Bank Dunia memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden Bank Dunia James Wolfensohn kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, waktu itu, Indra Djati Sidi pada 19 Februari 2000. JPS pendidikan satu-satunya yang mendapat penghargaan dari Bank Dunia. Bahkan di dunia, dari ratusan bantuan serupa JPS Pendidikan di negara-negara lain, Bank Dunia hanya memberikan penghargaan kepada tiga negara, di antaranya Indonesia.

Pola penyaluran dana JPS Pendidikan itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya *blockgrant* pendidikan. Program tersebut menjadi ajang uji coba awal pelaksanaan mekanisme bantuan langsung tersebut. Konsep pemberian bantuan langsung ini, sebenarnya sudah dilaksanakan Direktorat Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen, ketika itu, dalam memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta melalui program imbal swadaya.

JPS Pendidikan juga turut mendorong lahirnya Komite Sekolah dan Komite Kabupaten, yang dalam perjalanannya bersalin nama menjadi Dewan Pendidikan. Komite Sekolah akhirnya disahkan keberadaannya pada 2 April 2002 pada masa Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar. Komite Sekolah dan Komite Pendidikan dibentuk untuk menjamin uang yang



Foto: Dok. Dit. PSD

dikucurkan ke sekolah dan siswa, baik berupa beasiswa dan DBO, dapat tepat guna dan tepat sasaran. Dalam perjalanannya kelak kehadiran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, menjadi wujud nyata partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kenaikan harga minyak dunia sepanjang kurun tahun 2003-2005 mendorong pemerintah mengeluarkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Dana pengurangan subsidi BBM itu dialokasikan ke empat program besar yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, yakni pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan bantuan langsung tunai.

Pada tahun 2003, PKPS-BBM bidang pendidikan diwujudkan dalam bentuk beasiswa berlabel Bantuan Khusus Murid

(BKM) dan Bantuan Khusus Guru (BKG). BKG pada perjalanannya berubah menjadi bantuan insentif guru (2007). BKM diberikan kepada siswa miskin, melalui sekolah, berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah agar mereka tak putus sekolah. BKM juga diwujudkan dalam fasilitas dan sarana belajar siswa.

Mulai Juli 2005, digulirkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan berdasarkan jumlah murid, untuk satu tahun. Sasarannya adalah sekolah jenjang SD dan SMP. BOS SD besarnya Rp235.000/murid per tahun, sedangkan BOS SMP sebesar Rp324.500/murid per tahun untuk tingkat SMP. APBN 2005 mengalokasikan dana BOS periode Juli-Desember 2005 sebesar Rp5,136 triliun. Jumlah ini delapan kali lipat dibanding anggaran BKM untuk SD dan SMP periode Januari-Juni 2005.



BOS dikururkan juga untuk mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Maka sejak Juli 2005 itu, semua SD/MI, SMP/MTs, pesantren salafiyah, dan satuan pendidikan non-Islam yang menyelenggarakan Wajar Sembilan Tahun mendapat BOS. Program BOS merupakan embrio pendidikan gratis di SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri di seluruh Indonesia.

Besaran satuan biaya satuan BOS terus meningkat. Tahun 2007-2008 menjadi Rp254.000/murid. Tahun 2009-2011, besaran biaya satuan BOS dibedakan antara sekolah di kabupaten sebesar Rp400.000 dan Rp397.000 untuk kabupaten. Tahun 2012, 2013, dan 2014 meningkat menjadi Rp580.000. Hingga yang terakhir tahun 2015-2017 menjadi Rp800.000.

Foto: Dok. Dit. PSD

DASAR PELAKSANAAN, PENGERTIAN, DAN TUJUAN BOS

Dasar Pelaksanaan

Ketika awal digulirkan Juli 2005, BOS dijalankan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (sekarang disatukan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah). Buku *Panduan Pelaksanaan BOS* yang diterbitkan Ditjen Dikdas ini tetap menjadi pedoman pelaksanaan BOS selama kurun tahun 2005-2010.

Pada periode pelaksanaan BOS berikutnya, tahun 2011-2014, landasan hukum yang jadi dasar pelaksanaan BOS tidak lagi hanya aturan di tingkat lembaga eselon I namun sudah melibatkan antar kementerian. Dasar pelaksanaannya mengacu pada aturan: a) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah

serta pelaporannya; b) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah; serta c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.

Ketentuannya pelaksanaan BOS diperbarui lagi, yakni yang sudah dilaksanakan pada tahun 2015-2016 silam. Ketentuan pelaksanaannya mengacu pada: a) Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBN Tahun 2015; b) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang mekanisme penyaluran dana BOS dari pusat ke provinsi dan pelaporannya; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah; d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

Dasar Pelaksanaan Program BOS

2005-2010

- Buku Panduan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

2011 s.d. 2014

- Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah

2015-2016

- **Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian APBN Tahun 2015.**
- Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang mekanisme penyaluran dana BOS dari pusat ke provinsi dan pelaporannya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

Pengertian BOS

Awal digulirkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Juli 2005, BOS diartikan sebagai bantuan yang langsung dikelola oleh sekolah, meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya praktek. Biaya tersebut di atas tidak termasuk untuk biaya investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya untuk peningkatan mutu guru.

Sejumlah perubahan mengenai pengertian BOS dalam perkembangan selanjutnya adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2007, pengertian BOS ada tambahan "... mencakup komponen untuk biaya operasional non personil. Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi."

Pengertian BOS di era 2010 sampai tahun 2017 ini, adalah "Program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana wajar. Namun

demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS."

Tujuan Pelaksanaan BOS

Sejumlah perubahan pengertian BOS juga diikuti perubahan dari tujuan BOS, yakni sebagai berikut.

Pada Buku Petunjuk Pelaksanaan BOS (2005) menyatakan:

"Program BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat."

Pada Buku Panduan BOS (2006) dan Buku Panduan BOS dalam Rangka Wajar 9 Tahun (2007) menyatakan:

"Program bantuan Operasional sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun"

Pengertian BOS

2005-2006

- ▶ Bantuan Operasional Sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya praktek. Biaya tersebut di atas **tidak termasuk** untuk biaya investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya untuk peningkatan mutu guru

2007

- ▶ "... mencakup komponen untuk biaya operasional non personil, Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS **dimungkinkan** untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi."

2010 s.d. sekarang

- ▶ "Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana wajar. Namun demikian, ada beberapa jenis **pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS**"

Pada Buku Panduan BOS untuk Pendidikan Gratis dalam Rangka Wajar 9 Tahun yang Bermutu (2009 dan 2010) menuliskan:

"Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajar 9 tahun yang bermutu", "secara khusus bertujuan untuk: 1) menggratiskan seluruh siswa miskin ditingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah naik sekolah negeri maupun sekolah swasta; 2) menggratiskan seluruh siswa SD dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada sekolah RSBI dan SBI; 3) meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta".

Permendikbud No 101 Tahun 2013 dan Permendikbud 161 Tahun 2014 menegaskan:

"meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. Secara khusus : 1) membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah,"

Lampiran I Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 menyatakan:

".....membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekoah, kecuali pada RSBI dan SBI; membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari pungutan dalam bentuk apapun baik di sekolah negeri maupun swasta; meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta."

Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 menyatakan:

"...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 dan Permendikbud Nomor 76 Tahun 2012 menyatakan:

".....membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah kecuali pada RSBI dan SBI. Sumbangan/pungutan bagi sekolah RBSI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai nirlaba"

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1.	Pengembangan Peningkatan	21.110.000	
2.	Kegiatan dalam rangka Pemenuhan Peserta Didik Baru	3.500.000	
3.	Kegiatan Peningkatan dan Eksternalisasi Peserta Didik	3.162.500	
4.	Kegiatan Mengajar dan Ujian	6.710.000	
5.	Penelitian Tindakan - Giatan Ruket Paksi	5.151.300	
6.	Kegiatan Bina dan Jasa	1.184.000	
7.	Peningkatan Sekolah		
8.	Pembayaran Honorarium, Gaji, dan honor dan Kependidikan Honor	9.600.000	
9.	Pengembangan Staf dan Guru	2.200.000	
10.	Mentoring Peserta Didik miskin		
11.	Pembayaran Pengkutan BOS	1.500.000	
12.	Pembuatan dan Perawatan Perangkat Komputer		
13.	Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS		
JUMLAH		60.200.000	

Kepala Sekolah: *[Signature]*
 Komite sekolah: *[Signature]*
 Metro, 30/11/2015 - 20/12/2015
 Bendahara Sekolah: *[Signature]*
 NIP. 19600719193032006

(SPM) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM.”

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 menyatakan:

“...untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM”.

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 menyatakan:

- membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
- meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- dan/atau membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.



PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Dana BOS yang langsung dikelola sekolah merupakan salah satu bentuk penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS). Hal ini mengacu pada ketentuan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni Pasal 51 ayat (1), yang menyatakan “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

MBS merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan yang memberikan kewenangan lebih luas kepada sekolah untuk mengurus dirinya sendiri yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program sekolah. Dalam bidang pembiayaan atau keuangan, sekolah dapat



mengelola sepenuhnya dana BOS untuk mendukung operasional sekolah.

Pengelolaan dana BOS oleh sekolah harus memperhatikan beberapa prinsip manajemen yang meliputi: efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat. Prinsip efisien dimaksudkan agar dana BOS digunakan yang mencapai tujuan secara cepat. Penyaluran dana BOS tidaklah diberikan langsung seluruhnya kepada sekolah, tetapi disalurkan dalam beberapa tahap. Beberapa pertimbangannya antara lain, bahwa penyaluran dana didasarkan pada kebutuhan operasional sekolah yang tentu saja tidak hanya terjadi di awal tahun, tetapi kebutuhan berlangsung sepanjang tahun.

Melalui prinsip efisien ini, sekolah dapat memperoleh dana secara cepat dan juga dapat memanfaatkannya secara

cepat. Selain itu sekolah juga dapat membuat pertanggungjawaban secara cepat, sesuai dengan tahapan penyaluran. Hal ini memudahkan dan meringankan pertanggungjawaban sekolah terhadap penggunaan sebagian dana, karena pertanggungjawaban keuangan pada suatu tahap selesai sebelum tahap pencairan berikutnya.

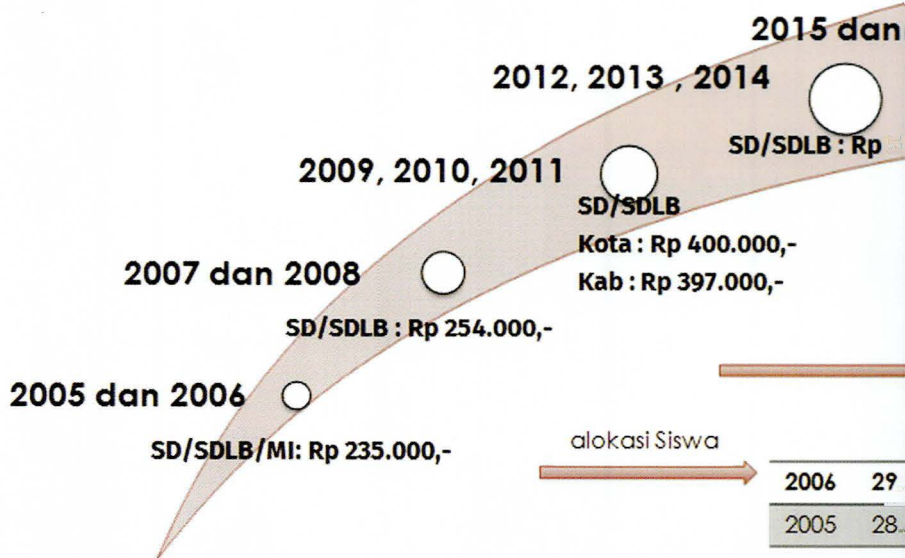
Prinsip efektif dalam penggunaan dana BOS dimaksudkan agar dana dimanfaatkan secara tepat guna sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam mendukung pembelajaran. Kebutuhan sekolah sendiri besar dan banyak. BOS belum dapat memenuhi semua kebutuhan sekolah, sehingga pengelola harus mampu menggunakan dana BOS untuk membiayai kebutuhan sekolah yang tepat dengan skala prioritas, dengan mengutamakan dukungan untuk proses pembelajaran.

Pembelanjaan sekolah yang kurang tepat dapat menimbulkan terjadinya pemborosan anggaran, dan bisa menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan prioritas sekolah. Untuk itulah sekolah perlu membedakan mana kebutuhan yang mendesak dan utama, dan mana kebutuhan yang bersifat tambahan. Dana BOS dapat dikelola dan digunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Prinsip transparan dimaksudkan agar ada keterbukaan dalam pengelolaan penggunaan dana BOS, yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi terkait BOS untuk menghindari adanya penyimpangan dan penyalahgunaan. Prinsip ini tidak berarti bahwa semua hal yang berkaitan dengan penggunaan BOS harus diberitahukan kepada masyarakat secara terbuka sampai kepada detail dan rinci, tetapi bahwa sekolah menerima BOS harus diberitahukan kepada masyarakat.





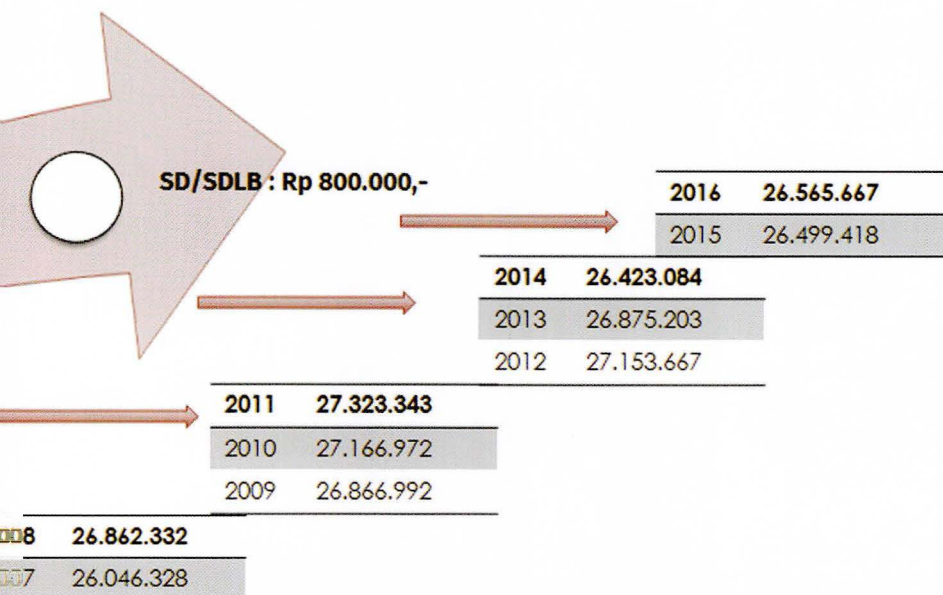


Penggunaan BOS oleh sekolah juga harus diumumkan (dana dan rincian penggunaan yang telah disepakati ditempel pada papan pengumuman di sekolah), sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diterbitkan. Hal-hal yang perlu diberitahukan kepada masyarakat tentang penggunaan BOS, terutama adalah program dan kegiatan sekolah yang dapat dibiayai oleh BOS. Kebutuhan sekunder sekolah yang tidak dapat dibiayai oleh BOS harus disampaikan sekolah kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ketidaktransparanan sekolah dalam pengelolaan BOS dapat mengakibatkan terjadinya salah paham di masyarakat, misalnya bahwa dengan adanya BOS maka semua urusan dan kegiatan

sekolah sudah dapat dibiayai. Padahal masih ada kegiatan sekolah yang tidak selalu dapat dibiayai oleh BOS seperti kegiatan rekreasi sekolah, atau penyediaan sarana ibadah yang perlu dukungan masyarakat.

Prinsip akuntabel adalah bahwa penggunaan dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya semua pengeluaran dana harus ada dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan. BOS bersumber dari APBN, sehingga penggunaannya juga harus mengikuti ketentuan pengelolaan anggaran negara. Sehingga setiap pengeluaran yang menggunakan dana BOS harus lengkap dan benar. Kelalaian dalam pembuatan dokumen pengeluaran dapat berakibat pada terjadinya

ya Satuan Dana BOS



kerugian negara, sehingga semua dokumen pendukung pertanggungjawaban harus siap untuk diaudit oleh pihak yang berwenang.

Prinsip kepatutan menuntut agar penggunaan dana BOS dimanfaatkan secara realistis dan proporsional sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan sekolah. Prinsip ini membantu sekolah agar dalam memanfaatkan dana bantuan disesuaikan dengan kepatutan, dan menghindari pembelajaran yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan kebutuhan langsung sekolah dalam mendukung pembelajaran. Misalnya, alat transportasi merupakan kebutuhan kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan tugas ke sekolah, tetapi hal tersebut sepertinya tidak patut untuk disediakan oleh sekolah melalui

dana BOS. Dengan demikian sekolah perlu mempertimbangkan dan memperhatikan agar penggunaan dana terhindar dari hal-hal yang dilarang sebagaimana disebutkan secara jelas dalam petunjuk teknis.

Prinsip manfaat mengharuskan sekolah agar menggunakan dana BOS dengan memperhatikan skala prioritas sehingga diperoleh manfaat yang optimal sesuai dengan program dan kegiatan sekolah. Orientasi penggunaan BOS harus pada manfaat yang diperoleh oleh siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itulah dana BOS harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendukung proses pembelajaran, sebagai inti dari semua proses pendidikan.

Komponen Pembiayaan BOS 2017

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
5. Pengelolaan Sekolah
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
7. Langganan Daya dan Jasa
8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
9. Pembayaran Honor
10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
11. Biaya lainnya

Perkembangan Penggunaan Dana BOS

2005

1. Uang formulir pendaftaran
2. Buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan
3. Biaya peningkatan mutu guru (MGMP, MKS, pelatihan, dll).
4. Ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan umum harian
5. Membeli bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum
6. Membayar biaya perawatan ringan
7. Membayar daya dan jasa
8. Membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer
9. Membiayai kegiatan kesiswaan (remedial, pengayaan, ekstrakurikuler)
10. Memberi bantuan siswa miskin untuk biaya transportasi
11. Khusus untuk salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS juga diperkenankan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.

2016

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS

KOMPONEN PEMBIAYAAN BOS DAN PENYALURANNYA

Peruntukan BOS terkini diatur dalam Bab V Penggunaan Dana BOS Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017. Secara umum, penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan/atau standar nasional pendidikan (SNP).

Ketentuan lain, penggunaan dana BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dengan satuan biaya yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bunga bank/jasa giro akibat adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Komponen pembiayaan BOS tahun 2017 sesuai ketentuan ada 11 komponen, yakni meliputi: pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor, pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran, serta biaya lainnya.

Komponen pembiayaan BOS 2017 lebih sedikit dari ketentuan BOS 2016, yang mencakup 13 komponen, yakni pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-





bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, membantu peserta didik miskin, pembiayaan pengelolaan sekolah, pembelian dan perawatan perangkat komputer, dan biaya lainnya jika seluruh komponen lainnya telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

"Kami berharap ke depan ketika biaya operasional sekolah betul-betul terpenuhi dari BOS, maka sekolah kita sudah indah karena mempunyai biaya rutin," kata Mukhlis, ST., Kepala Subdit Program dan Evaluasi Direktorat SD.

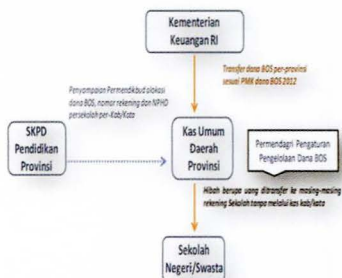
Penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode tiga bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli- September, dan Oktober-November. "Bagi wilayah yang secara

geografis sangat sulit (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS kepada sekolah tersebut dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester," kata Mukhlis.

Penyaluran dana BOS pada tahun 2005, didistribusikan langsung oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2008, distribusi dana BOS dialihkan ke Pemerintah Provinsi. Mekanisme penyaluran BOS berubah lagi, pada tahun 2011 dialihkan langsung ke Pemerintah Kabupaten. "Penyaluran dana BOS langsung ke daerah masing-masing, terkait dengan ketentuan Undang Undang Otonomi Daerah mengenai desentralisasi. Bappenas mengatakan bahwa sistem penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah langsung melalui daerah dapat menjadi semacam *try out* dari sistem desentralisasi, dan sistem penyaluran ini sudah cukup baik. Dari sekian program yang ada, penyaluran dana BOS yang paling bagus. Diharapkan, keberhasilan penyaluran dana BOS melalui sistem desentralisasi dapat memicu program-program pemerintah lainnya, misalnya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, dan lain-lain. Diharapkan, penyaluran tersebut dapat sesuai dengan empat target yakni cepat salur, cepat jumlah, tepat target, dan tepat laporan," kata Mukhlis menjelaskan panjang lebar.

Mekanisme Penyaluran Dana BOS

2005-2010 dan 2012-2016



2011



Catatan : Mekanisme penyaluran pada tahun 2011 mengalami permasalahan sehingga dirasa kurang efektif

PERMASALAHAN PENYALURAN BOS

Menurut Mukhlis, persoalan dana BOS ketika disalurkan lewat kabupaten, seringkali justru pada keterlambatan penyaluran ke sekolah, bahkan keterlambatan tersebut hingga mencapai 6 bulan. "Padahal logikanya kabupaten dengan sekolah lebih dekat. Tetapi faktanya penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah menjadi sangat terlambat," ujarnya.

Karena ketidakberhasilan tahun 2015 lalu, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengadakan evaluasi dalam meninjau penyaluran dana BOS di kabupaten/kota, hingga terurailah berbagai masalah yang ditemui di lapangan. Terdapat 421 kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana BOS ke satuan pendidikan dasar, dan hanya 71 kabupaten/kota yang sudah menyalurkannya.

Beberapa permasalahan daerah yang mengganggu penyaluran BOS tepat waktu, antara lain, karena Kabupaten belum memahami teknis pengelolaan dana BOS

dalam APBD (penyusunan RKA-SKPD & DPA-SKPD), APBD baru ditetapkan, data sekolah swasta belum tersedia, kurangnya koordinasi, belum dilaksanakannya penunjukan KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, masih menunggu proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), dan beberapa sekolah sudah ada yang sementara melakukan pinjaman, menunggu dana BOS 2011 disalurkan.

"Kebetulan saya ikut memantau yang di Papua, dan ternyata penyebabnya adalah mereka tidak mengikuti mekanisme kita. Kadang-kadang masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, akhirnya pada tahun 2012 diputuskanlah bahwa penyaluran dana BOS kembali dilakukan oleh provinsi," kata Mukhlis. Sejak kembali disalurkan Provinsi, penyaluran dana BOS relatif berjalan dengan lebih baik, setidaknya empat target penyaluran BOS tersebut lebih terpenuhi.

Pada tahun 2009/2010, sempat pula ada program BOS KITA (*Knowledge Improvement for Transparency and Accountability*). Program



ini melibatkan Bank Dunia, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Jaminannya adalah Program BOS. "Kita didampingi World Bank. World Bank mempelajari seperti apa program BOS diterapkan di Indonesia, untuk kemudian dicontoh atau diadaptasikan ke negara-negara di Afrika," katanya. Selain itu, World Bank juga meminta penyaluran dana BOS KITA tersebut diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Meski dana BOS ditujukan untuk semua siswa baik di sekolah negeri maupun swasta, beberapa sekolah swasta yang relatif besar menolak dana BOS. Sedangkan sekolah-sekolah negeri hampir keseluruhan menerima dana BOS. Dengan adanya dana BOS, biaya sekolah anak-anak keseluruhan benar-benar dibebaskan. Sementara di sekolah swasta,

biasanya mereka hanya membebaskan atau meringankan biaya sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu saja.

Untuk menyukseskan program dana BOS sesuai dengan target yang diinginkan, upaya dan langkah yang perlu dilakukan bersama pemerintah provinsi antara lain melakukan supervisi dan memonitor perkembangan penyaluran dana BOS Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing, membentuk semacam klinik (tim asistensi) untuk memberikan bantuan teknis mengatasi masalah pengelolaan dana BOS di Kab/Kota, dan pada kesempatan pertama, Pemerintah provinsi melaporkan (kepada Mendagri dan Mendikbud) tentang perkembangan atas penyaluran dana BOS ke satuan pendidikan dasar, terutama untuk penyaluran tahap I.

APLIKASI ONLINE DAN PENGUATAN LAYANAN PENGADUAN

Pengelolaan dana BOS di sekolah dasar, menurut Mukhlis, masih menyisakan persoalan karena terbatasnya pemantauan. "Dari sisi penggunaan dana BOS, kita merasa belum begitu mampu memantau secara keseluruhan dari seluruh sekolah. Kadangkala, ada intervensi dari teman-teman di Kabupaten dengan mendesain berbagai kegiatan yang menggunakan dana BOS," katanya.

Untuk mengantisipasi permasalahan, Mukhlis melihat bahwa transparansi pengelolaan dana BOS di sekolah harus terus didorong. Salah satu cara adalah dengan melibatkan Komite Sekolah. Selain itu, pengelola BOS di sekolah pun harus menyampaikan laporan maupun rencana penggunaan dana BOS pada papan pengumuman Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). "Ditambah lagi dengan cara yang saat ini kita galakkan, yakni memantau melalui aplikasi *online*. Setiap pengelola BOS di sekolah pun harus memberikan laporan secara *online* melalui *website* BOS," jelas Mukhlis.

Aplikasi laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tingkat sekolah ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan *Unites States Agency for International Development* (USAID/Indonesia). Aplikasi ini dapat digunakan secara gratis oleh sekolah. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan disusun sesuai dengan Juknis BOS. Dengan menggunakan aplikasi ini sekolah tidak perlu repot menyusun laporan-laporan yang wajib dilaporkan oleh sekolah. Dengan menggunakan aplikasi ini, tidak ada alasan lagi bagi sekolah untuk terlambat melaporkan penggunaan dana BOS baik secara *offline* maupun secara *online*.



Aplikasi ini dibuat dengan memperhatikan pengguna (*user*) yaitu para bendahara di setiap sekolah, dan dibuat sangat sederhana, mudah digunakan, serta mudah dipelajari secara mandiri. Dengan alasan itu pulalah maka aplikasi ini sengaja dibuat berbasis Microsoft Excel yang dilengkapi dengan Makro, karena pada umumnya semua sekolah sudah biasa menggunakan Excel dan hampir di semua komputer/laptop yang ada di sekolah pasti ada aplikasi Excel. Versi Excel yang mendukung aplikasi BOS ini adalah versi 2007 ke atas, dengan operating sistem minimal Windows XP.

Dalam *website* BOS online www.bos.kemdikbud.go.id, juga telah terdapat banyak informasi mengenai penyaluran dana BOS di sekolah-sekolah. Demikian pula laporan penyaluran dana BOS dari provinsi ke sekolah-sekolah. "Kita bisa melihat apakah di Provinsi ini sudah tersalur apa belum pada triwulan ke berapa, kapan tersalurnya, dan berapa uang yang sudah disalurkan. Semua sudah ada



laporannya di sana. Kemudian masing-masing Sekolah pun memberikan laporan setelah mereka menerima dan menggunakannya. Di samping itu, Pusat juga telah menyiapkan tim manajemen hingga ke level Kabupaten/Kota untuk memantau penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga sedang menguatkan layanan pengaduan. Siapa pun, baik dari masyarakat umum, orangtua, atau siswa dapat menyampaikan laporan pengaduannya melalui web www.bos.kemdikbud.go.id., email bos@kemdikbud.go.id., maupun call center bebas pulsa 0-800-140-1276 (untuk SD), atau melalui sms ke 1771.

“Kebetulan layanan pengaduan BOS ini sudah bekerja sama hingga dengan KPK. Jika ada pengaduan, misalnya dari kepala sekolah, maka masuknya terlebih dahulu ke Irjen, karena nanti Irijennya yang turun. Tetapi kalau terkait pemahaman tentang juknis-juknis yang ada, pengaduan tersebut diarahkan ke Direktorat

SD. Kami memiliki Tim manajemen BOS Pusat yang membantu jika ada pengaduan atau pertanyaan mengenai juknis-juknis. Dengan berbagai layanan mengenai Program Dana BOS, diharapkan dapat membantu segera tercapainya tujuan pendidikan nasional,” kata Mukhlis.

PERBAIKAN TATA KELOLA

Direktorat PSD sudah menerapkan e-purchasing dan cashless payment (pembayaran nontunai) untuk transaksi keuangan pada BOS dan DAK. Hal ini dilakukan sebagai upaya perbaikan tata kelola keuangan sektor pendidikan yang bermasalah di daerah. Transaksi non-tunai juga merupakan arahan Presiden. Kabupaten/Kota pelaksana piloting cashless payment adalah delapan kota, yakni Kota Palembang, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kota Makassar.



Tujuan dari piloting cashless adalah memberi rasa aman kepada sekolah. "Transaksi non tunai memastikan data transaksi tercatat dalam sistem perbankan, sehingga membantu sekolah dalam perbaikan tata kelola keuangan," kat Mukhlis.

Selain itu, juga meringankan beban administrasi sekolah dan mendorong ekonomi kerakyatan. "Ketersediaan data transaksi memungkinkan dikembangkan sistem pelaporan otomatis sehingga akan mengurangi beban administrasi sekolah. Transaksi non tunai juga mendorong penetrasi perbankan pada toko-toko di lingkungan sekolah, termasuk koperasi, sehingga meningkatkan geliat ekonomi warga sekitar," kata Mukhlis menambahkan.

Perbaikan lain tata kelola BOS adalah menyelenggarakan Bimtek pengelolaan dana BOS untuk menggantikan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Bimtek BOS bertujuan untuk meningkatkan pemahaman

dan kepatuhan dalam pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah dasar. Selain itu Bimtek juga untuk menyosialisasikan kebijakan BOS dan kebijakan pendidikan; menghimpun informasi tentang pelaksanaan BOS di Kabupaten/Kota; juga menghimpun informasi tentang pelaksanaan BOS di tingkat SD. Informasi dari sekolah yang diharapkan diaring meliputi: a) pelaksanaan BOS Tahun Anggaran 2016; b) kemampuan sekolah dalam menyusun kebutuhan sekolah secara efisien dan efektif; c) informasi penggunaan dana BOS yang belum tercakup dalam petunjuk teknis; d) komposisi setiap penggunaan dana BOS yang diselenggarakan oleh sekolah; dan e) ketercukupan dana BOS dengan kebutuhan operasional non-personalia di sekolah.

Sasaran utama kegiatan bimtek adalah SD negeri dan swasta dari 69 kabupaten/kota yang mencakup wilayah 3T, wilayah yang menjadi prioritas implementasi pembelanjaan non-tunai, wilayah yang menjadi prioritas KPK dalam penerapan tunas integritas, dan wilayah dengan tingkat partisipasi penyampaian laporan bos online kurang dari 60%. Jumlah sekolah peserta bimtek tiap kabupaten/kota sebanyak 10 sekolah dasar. Tahun 2018 mendatang, bimtek BOS akan diselenggarakan di 100 kabupaten/kota.



Narasumber yang dihadirkan berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ditjen Dikdasmen, dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Pelaksanaan Bimtek BOS tidak diadakan di hotel, melainkan di Dinas Pendidikan Kab/Kota atau di sekolah. Jika pelaksanaan di sekolah, maka disarankan bertempat di SD inti yang memiliki fasilitas pertemuan termasuk perlengkapan pendukungnya (LCD, Layar, Sound, dsb). Sekolah pelaksana kegiatan bimtek BOS dipilih sekolah pelaksana piloting Cashless yang memiliki fasilitas pertemuan termasuk perlengkapan pendukungnya (LCD, Layar, Sound, dsb).

Materi dari KPK berisi paparan tata kelola sekolah berintegritas, terutama disampaikan di Kabupaten/Kota wilayah program prioritas KPK, di antaranya Kota Palu, Kota Medan, Kota Banjarmasin, Kab Manokwari, dan Kota Pekanbaru. Untuk Kabupaten/Kota di luar wilayah program prioritas KPK, petugas Bimtek dapat menyampaikan materi tersebut sebagai materi tambahan.



DAMPAK BOS MENURUT BANK DUNIA

Pada tahun 2015 lalu, tepat satu dekade pelaksanaan BOS (2005-2015). Bank Dunia meluncurkan kajian pelaksanaan BOS selama satu dekade, dalam laporan berjudul *Assessing the Role of the School Operational Grant Program (BOS) in Improving Education Outcomes in Indonesia*.

Temuan utama laporan adalah sebagai berikut.

1. Beban keuangan bagi keluarga untuk menyekolahkan anak pada awalnya menurun.
 - a. Setelah program BOS diperkenalkan pada tahun 2005, keluarga yang memiliki anak di sekolah dasar dan menengah tingkat pertama mengeluarkan biaya 6% lebih sedikit pada tahun pertama BOS berjalan.
 - b. 20% keluarga termiskin mengalami penurunan biaya terbesar, begitu pula siswa yang bersekolah di sekolah pemerintah.
 - c. Penghematan semakin terlihat pada tingkat sekolah menengah pertama, dimana pengeluaran keluarga termiskin turun sebanyak 30%, dibandingkan 5% untuk tingkat sekolah dasar.







Foto: A. Fauzi Ramdani

d. Namun pada tahun 2009, ketika sekolah-sekolah semakin mengenal cara kerja program BOS, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh keluarga mulai naik. Menurut nilai biaya riil, rata-rata pengeluaran rumah tangga pada tahun 2012 menjadi 46% lebih tinggi di tingkat sekolah dasar dibandingkan pada tahun 2003 sebelum program BOS berjalan.

2. Semakin banyak anak yang bersekolah

- a. Angka partisipasi pada sekolah menengah tingkat pertama, khususnya siswa termiskin, naik secara signifikan setelah adanya program BOS. Antara tahun 2000 hingga 2005 sebelum adanya BOS, tingkat partisipasi siswa miskin pada sekolah menengah tingkat pertama menjadi stagnan. Sejak program BOS berjalan, angka partisipasi siswa miskin naik sebesar 26%.
- b. Program BOS diharapkan bisa meningkatkan peluang siswa untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun hingga sekolah menengah tingkat pertama. Namun, tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa program BOS telah secara signifikan meningkatkan transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama.



Foto: A. Fauzi Ramdani

3. Sekolah melakukan pengelolaan sekolah dengan lebih baik
 - a. BOS telah membantu terbentuknya komite sekolah, dan para anggota komite diharapkan mampu ikut mengelola pendanaan program.
 - b. Tetapi, anggota komite sekolah jarang dimintai masukan saat pembuatan keputusan terkait alokasi anggaran BOS. Yang lebih umum terjadi adalah kepala sekolah dan guru akan menentukan alokasi dana, kemudian menyampaikan keputusan mereka kepada ketua komite sekolah untuk mendapat persetujuan.

Laporan ini juga mengangkat empat bidang utama untuk memperkuat peran BOS dalam meningkatkan capaian pendidikan:

1. Meningkatkan fokus pada perbaikan mutu pendidikan
 - a. Dana BOS bisa dikaitkan dengan sistem penjaminan mutu, dengan memberikan insentif bagi sekolah yang berhasil dan bisa menjaga status akreditasi tertentu.
 - b. Mengkaji daftar penggunaan anggaran BOS agar sekolah memiliki fleksibilitas untuk melakukan investasi pada hal-hal yang bisa meningkatkan mutu pendidikan. Misalnya, sekolah sebaiknya boleh menggunakan dana untuk membeli peralatan audio-visual.



Foto: Mukti Ali

2. Memperkuat fokus program pada kemiskinan

a. Indonesia adalah negara yang luas dan beragam; memberikan dana dengan jumlah yang sama untuk siswa di daerah dengan biaya hidup yang lebih tinggi adalah sesuatu yang tidak adil. Di masa depan, program BOS bisa secara berkala menyesuaikan nilai bantuan dengan mempertimbangkan perbedaan harga-harga antar daerah, juga inflasi.

b. Menggunakan BOS berformula untuk memberikan dana lebih banyak bagi sekolah yang melayani siswa miskin dan daerah tertinggal.

3. Menggunakan dana BOS dengan lebih baik lewat koordinasi dengan sumber dana lain

a. Berbagai biaya dan pungutan di luar uang sekolah terus menjadi porsi terbesar biaya pendidikan bagi keluarga. Berbagai usaha untuk mengklarifikasi

aturan sumbangan sukarela harus terus dilakukan, begitu pula pertimbangan untuk memperkuat peran komite sekolah dalam mengatur jumlah sumbangan yang diminta.

b. Melakukan koordinasi dengan bantuan sekolah lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan standar sekolah agar dana yang terkumpul lebih besar dari pada yang diberikan hanya oleh BOS.

4. Merevitalisasi peran program BOS untuk memberdayakan sekolah dan masyarakat

Saat ini tim BOS di sekolah-sekolah bertugas mengelola dana BOS sehari-hari. Mengalihkan lebih banyak tanggung jawab ke komite sekolah dan memastikan perwakilan yang lebih baik melalui komite mempunyai potensi meningkatkan efektivitas dana BOS.



Foto: Taufik Ismail

LOMBA TATA KELOLA BOS

Pada tahun 2014, menjelang satu dekade pelaksanaan program BOS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa perlu mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan dana BOS yang baik yang dilaksanakan di sekolah. Perlu dicari sekolah yang dapat menjadi model atau contoh praktik terbaik pengelolaan dana BOS. Dengan latar belakang tersebut, Tim Manajemen BOS Pusat menyelenggarakan Lomba Tata Kelola BOS. Lomba ini menilai seluruh sekolah yang menerima dan mengelola dana BOS.

Lomba Tata Kelola BOS digelar dengan tujuan meliputi: a) mendorong kinerja pengelolaan program BOS di sekolah menjadi lebih baik; b) mencari model contoh sekolah

yang mengelola dana BOS secara transparan dan akurat; dan c) memotivasi sekolah lainnya untuk mengelola dana BOS lebih baik. Kegiatan lomba dilaksanakan secara bertahap dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Oleh karena itu, pelaksana kegiatan lomba meliputi pelaksana tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Pelaksanaan di tingkat pusat, penanggung jawab umum adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Di bawahnya ada penanggung jawab lomba jenjang SD adalah Direktur Pembinaan SD, sedangkan untuk Direktur Pembinaan SMP menjadi penanggung jawab lomba jenjang SMP. Pelaksana lomba di pusat terdiri dari Tim BOS Pusat dan Tim Penilai Pusat. Tim Penilai terdiri dari unsur perwakilan Direktorat



Pembinaan SD, perwakilan Inspektorat Jenderal Kemendikbud, perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dan perwakilan dari perguruan tinggi.

Seleksi peserta dimulai dari tingkat kabupaten/kota. Sekolah terbaik di kabupaten/kota mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Provinsi memilih tiga sekolah terbaik untuk mengikuti seleksi Lomba Tata Kelola BOS SD Tingkat Nasional. Tim penilai pusat kemudian melakukan visitasi ke 102 sekolah, di 34 provinsi. Hasil penilaian Tahap I ini akan diambil 50 sekolah terbaik, yang akan diundang ke Jakarta untuk menjalani penilaian Tahap II. Pada penilaian Tahap II, akan ditetapkan Juara 1, 2, dan 3, Juara Harapan 1, 2, dan 3, serta sekolah-sekolah yang masuk peringkat 50 terbaik.

Sejumlah penilaian pada Lomba Tata Kelola BOS, meliputi dua aspek utama, yakni ketepatan pengelolaan dana BOS serta aspek ketepatan administrasi dan dampak BOS. Aspek ketepatan pengelolaan dana BOS difokuskan pada bagaimana sekolah menyusun rencana penggunaan dana/anggaran di sekolah dan bagaimana penggunaan dananya. Setidaknya ada dua indikator penilaian untuk aspek ini, yakni indikator perencanaan yang baik dan indikator kesesuaian penggunaan dana BOS sesuai Petunjuk Teknis BOS.

Penilaian aspek ketepatan administrasi dan dampak BOS fokus pada bagaimana sekolah menyelenggarakan administrasi pengelolaan BOS di

sekolah, serta sejauh apa kegiatan yang disusun dan didanai BOS bisa memberikan dampak positif bagi mutu pembelajaran di sekolah. Indikator penilaian aspek ini meliputi kelengkapan administrasi pembukuan, indikator akuntabilitas laporan, dan indikator dampak BOS di sekolah.

Penilaian tata kelola BOS di sekolah mencakup seluruh tahap pengelolaan dana BOS, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pelaporan. Indikator perencanaan yang baik, meliputi:

- Data pokok pendidikan secara online dan akurat;
- Evaluasi diri;
- Penyusunan RKAS;
- Perencanaan penggunaan dana BOS;
- Sosialisasi penerimaan dan rencana penggunaan dana BOS di sekolah;
- Sosialisasi penerimaan dan rencana penggunaan dana BOS ke orang tua;
- Pembentukan Tim Manajemen BOS Sekolah.

Indikator kesesuaian penggunaan dana BOS, meliputi:

- Mekanisme pengambilan dana;
- Kebijakan pencairan dana;

- Penggunaan dana BOS;
- Mekanisme pembelian barang/jasa;
- Pengelolaan/pencatatan barang inventaris sekolah yang telah dibeli dari dana BOS.

Indikator kelengkapan administrasi pembukuan, meliputi:

- Penyusunan buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak;
- Penyusunan laporan realisasi penggunaan dana BOS;
- Penyusunan dan penyerahan laporan.

Indikator akuntabilitas laporan

- Pelaporan data penggunaan dana BOS ke dalam website BOS/Pelaporan BOS cara online;
- Kelengkapan bukti pengeluaran dana secara sah dan akurat sesuai laporan pengeluaran;
- Kelengkapan bukti setor pajak.

Indikator dampak BOS di sekolah

- Pungutan kepada orang tua peserta didik;
- Perawatan gedung sekolah;
- Perawatan sanitasi sekolah;
- Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- Tingkat kehadiran guru dan siswa.



Sepuluh sekolah peraih peringkat sepuluh besar Lomba Tata Kelola Bos Tahun 2014 adalah: 1) SDN 46 Hulontalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo; 2) SDN 20 Martapura, Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan; 3) SDN 21 Taluak Banuhampu, Kab. Agam, Sumatera Barat; 4) SDN 1 Gunung Madu, Kab. Lampung Tengah, Lampung; 5) SDN 021 Sunqai Kuning, Kota Samarinda, Kalimantan Timur; 6) SDN Cibuluh 1 Kota Bogor, Jawa Barat; 7) SD Inpres Abeale 1 Sentani, Kab. Jayapura, Papua; 8) SD N 2 Gianyar, Kab. Gianyar, Bali; 9) SDN 26 Payakumbuh, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat; 10) SDN Ungaran 05, Kab. Semarang, Jawa Tengah.

Yang istimewa, pada tahun 2015 Presiden RI Joko Widodo mengundang enam peringkat terbaik ke Istana Negara bersama para juara Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Nasional Tahun 2015. Peraih sepuluh besar Lomba Tata Kelola Bos Tahun 2015 adalah: 1) SDN 04 Birugo, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat; 2) SDN 02 Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara; 3) SDN No. 82 Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo; 4) SDN 1 Sigli, Kab. Pidie, Aceh; 5) SDN Penganjuran 04, Kota Banyuwangi, Jawa Timur; 6) SD Negeri 028 Tenggara, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur; 7) SDN Puntan 01 Kota Batu, Jawa Timur; 8) SDN 2 Kabila, Kab. Bone Bolango, Gorontalo; 9) SDN Indrasari 02, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan; 10) SDN 004 Bukit Agung, Kab. Pelalawan, Riau. ●

10

**INOVASI
TATA KELOLA
DAK**

SEKOLAH REGIONAL

Karibia Bouti
I. Timor Blok-J No. I-IV, Gg. Buntu, Medan T
061-4557

18 - 20 Me

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN



DAK Fisik Ciptakan Pemerataan Pendidikan

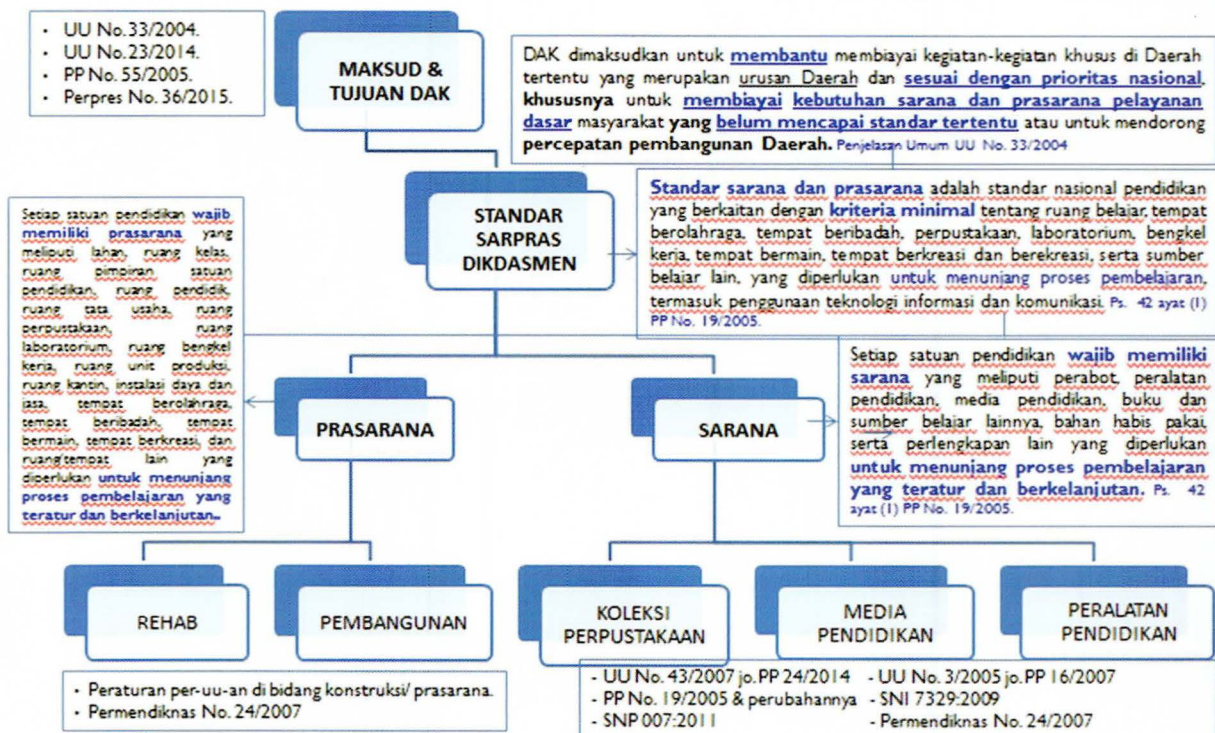
Sejak dilaksanakan otonomi daerah, pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar (SD) sebenarnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota. Namun pemerintah tetap memandang perlu untuk menggulirkan dana alokasi khusus (DAK) ke daerah yang hingga sekarang masih berlangsung. Transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah tersebut bertujuan untuk memastikan adanya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia termasuk di bidang pendidikan.

Sebagai gambaran, Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang APBN 2018, mencantumkan

target pendapatan negara Rp1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun. Dari angka belanja tersebut terdapat belanja yang ditujukan untuk transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun, yang diantaranya disalurkan untuk Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dengan pagu dana sebesar Rp62,4 triliun.

DAK Fisik tersebut digunakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pelayanan publik di daerah agar terjadi pemerataan pembangunan. Selain itu, dalam DAK Fisik terdapat afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pengalokasian DAK ini menggunakan mekanisme proposal based sesuai prioritas nasional.

DASAR KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN



Saat ini, DAK Fisik diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Dalam Perpres tersebut, DAK Fisik disebutkan sebagai dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penggunaannya, di antaranya untuk peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari: rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, dan/atau jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut

perabotnya atau tanpa perabotnya; dan/ atau pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan perabotnya. Untuk peningkatan sarana pendidikan, berupa pengadaan koleksi perpustakaan berupa buku pengayaan, referensi, dan buku panduan pendidik.

DAK Fisik sangat dibutuhkan mengingat banyaknya fasilitas pendidikan khususnya sekolah dasar yang masih memprihatinkan meski sudah triliunan rupiah dianggarkan untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Menurut Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Drs. Wowon Widaryat, M.Si dari 1.048.556 ruang kelas,

sebagian besar kondisinya kurang baik sesuai data Maret 2017. Kondisi kelas yang baik hanya 266.250 unit (25 persen). Sementara yang rusak ringan 589.359 unit (56 persen), rusak sedang 69.897 unit (7 persen), dan rusak berat 123.050 unit (12 persen).

Kondisi sarana lain, seperti perpustakaan juga belum sesuai keinginan. Dari 148.300 sekolah dasar di Indonesia, hanya 87.979 sekolah (59%) yang memiliki perpustakaan, sisanya 60.321 sekolah (41 persen) belum memilikinya.

Pemerintah berusaha membangun dan memperbaiki kelas-kelas baru untuk menutupi kekurangan tersebut. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, pemerintah memiliki target pembangunan kelas baru masing-masing 2.015 unit tiap tahunnya. Pemerintah juga menargetkan pembangunan sekolah dasar baru, yakni pada 2015 sebanyak 10 sekolah, 2016 (15 unit), 2017 (17 unit), 2018 (20 unit), 2019 (20 unit). Pemerintah pun melakukan rehabilitasi SD dengan target pada 2015 sebanyak 4.260 unit, 2016 (5.875), 2017 (5.875), 2018 (5.875), dan 2019 (5.875). Selain itu, pemerintah membangun perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) SD dengan target setiap tahunnya 1.220 unit selama periode 2015-2019.

Dalam kenyataannya, pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar seringkali terjadi penyimpangan di lapangan. Salah satu masalahnya terjadi karena Data Kondisi Fisik SD dalam Dapodik belum akurat. "Hal ini terjadi karena data diinput oleh operator Dapodik yang tidak faham teknis bangunan, dan data tidak menyajikan foto-foto sekolah yang akurat. Untuk mengatasi masalah ini

perlu terobosan baru dalam pendataan agar bantuan tidak salah sasaran," kata Wowon.

Ia menyatakan perlu dihasilkan data verifikasi sarana prasarana yang akurat dengan cara mengubah manajemen yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel. "Kita membutuhkan data akurat atau golden record agar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bisa dilakukan dengan akurat juga," kata Wowon. Ia kemudian menyuguhkan gagasan inovatif dengan cara pendataan yang melibatkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Anak-anak SMK dikerahkan untuk mencatat data sarana dan prasarana di SD dengan mengunjungi sekolah secara langsung. Mereka bertugas menyusun profil seluruh sekolah di Indonesia sekitar 148.000 SD. Semua data akurat itulah yang dipakai untuk menyusun program peningkatan prasarana Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan program tersebut diadakan kerjasama dengan Direktorat Pembinaan SMK.

Proses pendataan melibatkan 611 SMK jurusan teknik bangunan di seluruh Indonesia yang mengerahkan 6.000 guru dan 24.000 siswa kelas XII. Data yang dikumpulkan berupa gambar bangunan, foto sekolah berbagai sisi, (rencana anggaran biaya (RAB) sekolah berdasarkan IKK (indeks kemahalan konstruksi), dan data sekolah rawan bencana. Data lain juga dicatat seperti perpustakaan, sanitasi dan penataan lingkungan, unit kesehatan sekolah, dan lain-lain.

Data yang akurat tersebut menjadi dasar untuk memberi bantuan rehabilitasi ruang kelas SD, bantuan pembangunan perpustakaan, bantuan pembangunan RKB, dan revitalisasi.



Foto: Rihad Wiranto

MEMBANGUN DENGAN TUNTAS

DAK Fisik diprioritaskan untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah dasar dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Kalau akses ini belum selesai, maka layanan mutu pendidikan akan terhambat. "Strategi yang digulirkan pusat menekankan bahwa pembangunan fisik harus berorientasi tuntas dan berkualitas, bukan pemerataan. Jika memang ada bangunan sekolah harus dirubuhkan sebaiknya dirubuhkan saja, kemudian dibangun yang baru/revitalisasi. Hingga saat ini, faktanya masih cukup banyak bangunan SD berdiri dari zaman SD Inpres dulu dengan kondisi memprihatinkan," kata Wowon.

Bangunan-bangunan SD Inpres itu masih digunakan, hanya dilakukan permak di sana-sini. Makin lama, kualitas bangunan itu akan rapuh. "Jangan sampai terjadi lagi, seakan sekolah itu bagus dan masih digunakan anak-anak belajar, tiba-tiba ambruk, fenomena ini terjadi sebenarnya kualitas bangunan sudah tua dan rapuh," kata Wowon.

Penggunaan DAK Fisik ini harus berorientasi tuntas dan berkualitas, bukan pemerataan. Jika masih menggunakan pola pemerataan, kata Wowon, menunjukkan belum fokus melakukan pembenahan fisik SD. Misal dengan membagi rata untuk beberapa sekolah, tanpa fokus pembenahan di bagian mana. "Sebaiknya kita maksimalkan, satu persoalan kita tuntaskan. Jika sekarang fisik,



Foto: Dipo Handoko

itulah yang kita dahulukan, tahun berikut kita beralih ke peningkatan mutu,” lanjut Wowon. “Pengusulan DAK ini, telah ditentukan bahwa harus mendapat persetujuan bupati/walikota, tidak cukup hanya kepala dinas pendidikan setempat,” lanjutnya.

Khusus untuk bangunan SD, tujuan khususnya adalah pemenuhan sarana prasarana pendidikan dasar, kemudian memenuhi kebutuhan jumlah ruang kelas. Dengan diberlakukan penguatan pendidikan karakter (PPK), maka tidak ada lagi di SD-SD yang double shift. “Jika ruang kelas masih kurang, maka harus bangun kelas baru,” katanya.

Selanjutnya, pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah harus mengedepankan rasa aman dan nyaman bagi siswa.

Pencapaian ruang kelas harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan. Penataan kelas dan lingkungan harus saling

terkait dengan fungsi pembelajaran dan mendukung pelaksanaan PPK, di mana teori akan diterapkan sebesar 30% dan praktik sebesar 70%. Sekolah juga harus menyediakan sudut baca dan pojok-pojok baca. “Kantin sekolah harus rapi dan sehat. Jangan sampai kantin berdiri ngemper di pinggir sekolah. Satu lagi yang penting, adalah sanitasi sekolah. Tahun 2016 kita ada program untuk memindahkan sanitasi ke bagian depan sekolah, bukan lagi di belakang,” kata Wowon.

Harapannya, sanitasi dan jamban di bagian depan sekolah maka akan terawat dengan baik. Kondisi ini sekaligus menjadi media siswa untuk berlatih hidup bersih dan mencintai lingkungan. “Toiletnya bagus seperti hotel. Dilengkapi juga SOP bagi anak perempuan yang menstruasi. Jika toilet ini bersih dan tidak bau, anak-anak tidak akan menjauh. Inilah mimpi kita. Sekolah Dasar kita usahakan menjadi sekolah yang membuat anak-anak betah di sekolah,” ujar Wowon.

TINGKATKAN PERAN DAERAH

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, proses pembangunan kini dimulai dari pinggiran. Dengan cara demikian, konsentrasi pembangunan tidak lagi berada di perkotaan melainkan di daerah. Pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan publik akan dibangun secara merata di seluruh Indonesia. Di sinilah arti penting dari adanya DAK yang diharapkan akan semakin memajukan pembangunan hingga pelosok negeri. Dengan adanya DAK diharapkan akan mengurangi kesenjangan infrastruktur dan pelayanan publik antar daerah di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Muhammad Zainuddin, Kasi Data DAK Fisik I, Kementerian Keuangan dalam acara Sosialisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Hotel Allium, Serpong, Banten, pada Selasa, 23 Mei 2017.

Zainuddin menjelaskan, di bidang pendidikan, pada prinsipnya pembangunan sarana dan prasarana adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Namun kenyataannya masih banyak sarana dan prasarana yang kondisinya tidak sesuai harapan. Data menyebutkan, dari 1.719.468 ruang kelas SD hingga SMA/ SMK, hanya 25 persen yang kondisinya baik. Sementara yang rusak ringan mencapai 51%, rusak sedang 15%, rusak besar 4%, dan rusak total 4%.

Diharapkan peran optimal Disdik Kab/Kota dalam tata kelola prasarana SD, antara lain mendorong sekolah untuk mengisi Data Pokok Pendidik (Dapodik) secara optimal, terutama data sarana dan prasarana, mengupayakan seluruh SD untuk disurvei melalui sistem



Takola guna mendukung kebijakan Direktorat Pembinaan SD untuk menyusun "Golden Record" (master data prasarana 148.000 SD).

Pemda juga memfasilitasi dengan memberi izin, informasi/data/ bahan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan survey kepada SMK Jurusan Teknik Bangunan. Pemda juga mendukung program inovasi tata kelola peningkatan prasarana SD melalui Penyediaan Biaya Operasional bagi Pelaksanaan survey SD bekerjasama SMK Jurusan Bangunan.

Saat ini memang sudah diterapkan Dapodik yakni sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional. "Tapi menurut informasi, datanya belum bisa dijamin 100 persen akurat," kata Zainuddin.



Karena itu, ia menghimbau Dapodik diisi dengan data yang benar. Kan ada pameo, kalau yang masuk sampah yang keluar juga sampah. "Kalau datanya benar, maka bisa menjadi alat untuk membuat perencanaan yang lebih baik tahun berikutnya," katanya.

Selain akurasi data yang bermasalah, penyaluran DAK juga masih menemui kendala. Misalnya alokasi tidak sinkron antara apa yang diarahkan pemerintah pusat dengan yang dibutuhkan daerah. "Misalnya daerah membutuhkan kegiatan A, tapi pusat mengarahkan untuk kegiatan B," katanya memberi contoh.

Contoh lainnya, pembangunan sekolah berasrama sering bermasalah di belakang hari. Pascapembangunan, asrama terbengkalai karena pemerintah daerah tidak menyediakan

biaya pemeliharaan dan operasional. "Sebuah asrama memerlukan penjaga dan pengelola untuk mengawasi kegiatan sehari-hari," katanya.

Dari uraian di atas, sinkronisasi antara penyaluran dana dan pelaksanaan di lapangan perlu ditingkatkan. Mulai tahun 2016, penilaian laporan bukan bersifat gelondongan atau keseluruhan lagi. "Yang dinilai adalah laporan per bidang. Kalau bidang tertentu bagus akan menjadi pertimbangan positif alokasi tahun berikutnya, kalau jelek ya dipertimbangkan tidak diberi," katanya.

Selain itu, selama ini terjadi ketidaksinkronan antara laporan keuangan ke Kementerian Keuangan dengan laporan realisasi penggunaan dana yang disetorkan ke Kemendikbud. Faktanya, 95 persen laporan keuangan ke Kemenkeu sudah masuk, tapi hanya sekitar 50 persen kabupaten yang melaporkan realisasi di lapangan ke Kemendikbud. "Mulai tahun 2017, antara laporan keuangan dengan laporan realisasi output akan digabungkan menjadi satu," kata Zainuddin menjelaskan.

DISIPLIN LAPORAN

Hal lain adalah kedisiplinan waktu pelaporan akan ditingkatkan. Para pejabat terkait di kabupaten/kota harus memperhatikan dengan seksama terkait isi dan batas waktu pelaporan rencana dan realisasi DAK. Untuk tahun 2017, laporan tahun 2016 untuk penyaluran triwulan I paling lambat diserahkan lambat 31 Maret. Laporan triwulan I untuk penyaluran triwulan II paling lambat diterima 30 Juni dengan syaratnya 75 persen dana pada triwulan I sudah terserap dan ringkasan kontrak kegiatan.



Foto: Rihad Wiranto

Laporan triwulan II untuk penyaluran triwulan II disampaikan paling lambat 30 September dengan syarat 75 persen dana triwulan II sudah terserap dan realisasi output 30 persen. Laporan triwulan III untuk penyaluran triwulan IV dilaporkan 12 hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir dengan syarat 90 persen dana sudah terealisasi dan realisasi output fisik 65 persen.

Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima daerah. Kalau belum melaporkan hingga 31 Maret, maka alokasi DAK untuk seluruh tahun itu akan hangus. Jika gagal melaporkan 30 Juni, maka alokasi triwulan II, III, IV hangus. "Namun untuk 2017, ada keringanan. Batas akhir laporan yang mestinya 31 Maret diundur jadi 19 Mei, 30 Juni jadi 21 Juli, 30 September jadi 21 Oktober," katanya.

Mulai tahun 2017, penyampaian laporan DAK untuk permintaan penyaluran tahap berikutnya tidak harus ke Jakarta, cukup disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Di seluruh Indonesia ada 181 KPPN, dan 10 di antaranya ada di Jakarta. Silakan laporkan ke KPPN yang terdekat. "Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan good governance," katanya.

Zainudin membuat ilustrasi, jika laporan harus dibawa ke Kemenkeu, maka akan memboroskan biaya. "Saya hitung secara kasar, kalau ada 541 kabupaten/kota melaporkan empat kali ke Jakarta, biayanya bisa mencapai Rp500 miliar hingga Rp1 triliun," katanya menjelaskan.

Kedua, dengan pelaporan ke KPPN, maka governance bisa lebih baik dengan verifikasi yang lebih detail. Di Kemenkeu hanya sekitar 15 orang yang melakukan verifikasi untuk data sebanyak itu. Kalau diverifikasi oleh banyak petugas di KPPN, maka hasilnya akan lebih baik. "Mereka juga bisa melakukan uji petik dengan mengunjungi lokasi proyek untuk memastikan apakah laporannya sesuai dengan kenyataan atau tidak," katanya.

Terkait evaluasi 2016, terdapat kekurangan penyaluran DAK akibat ketidakdisiplinan daerah dalam penyampaian laporan. Dari alokasi DAK Fisik sebesar Rp89 triliun, yang disalurkan sebesar Rp75 triliun. Untuk mengatasi hal tersebut, sedang diusulkan alokasi kurang salur DAK Fisik TA 2016 dalam APBN TA 2017. Dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas, diperlukan verifikasi atas output kegiatan yang layak untuk dibayarkan melalui alokasi kurang salur. "Makanya diperlukan verifikasi fisik untuk memastikan

Dr. Hadiat, MA,
Direktur Pendidikan dan Agama,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Foto: Rihad Wiranto



apakah output kegiatan sudah benar-benar terjadi atau belum,” kata Zainuddin kembali.

Mulai tahun 2017 provinsi dilibatkan untuk melakukan verifikasi melalui aplikasi e-planning Usulan DAK 2018 dari kabupaten/kota di wilayahnya. Namun demikian, pengisian Usulan DAK masih ada yang kurang akurat. Misalnya jumlah proposal yang masuk ke Bappenas ternyata mencapai di atas Rp18 juta triliun, padahal APBN saja hanya sekitar Rp2.400 triliun. Setelah diteliti, ternyata terjadi kesalahan dalam penyebutan satuan rupiahnya. Contohnya, provinsi Banten mengusulkan sebesar Rp16 juta triliun.

Dengan bertambahnya alokasi anggaran pendidikan dari dana transfer ke daerah justru menyebabkan daerah mengurangi alokasi APBD murni dalam memenuhi ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20%. Beberapa daerah cenderung mengandalkan DAK untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Padahal, sesuai Undang-undang, seharusnya 20 persen APBD dialokasikan ke bidang pendidikan.

“Hanya dua kabupaten yakni Pangandaran, Jawa Barat dan Pontianak, Kalimantan Barat yang sudah mengalokasikan 20 persen dari APBD murni untuk pendidikan. Kami sangat mengapresiasi dua daerah tersebut dalam keseriusannya di bidang pendidikan,” kata Dr. Hadiat, MA, Direktur Pendidikan dan Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada kegiatan sosialisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Hotel Allium, Serpong, Tangerang, Banten, Senin (22/5/2017).

Sedangkan jika memasukkan dana transfer dari pusat, maka ada 354 kabupaten/kota yang sudah memiliki 20 persen anggaran pendidikan. Sementara yang memiliki anggaran pendidikan di kisaran 5-10 persen berjumlah 176 kabupaten/kota. “Seharusnya untuk membangun sarana dan prasarana, pemda tidak mengandalkan DAK. Sebenarnya itu menjadi kewenangan daerah. Peran pemda dalam pendidikan memang perlu ditingkatkan,” ujar Hadiat kembali.

Meskipun DAK dari pemerintah besar, tapi sampai sekarang belum mencukupi seluruh kebutuhan yang ada. Dari tahun ke tahun DAK bidang pendidikan mengalami peningkatan signifikan, yaitu dari semula Rp625,0 miliar pada tahun 2003 menjadi Rp10.041,3 triliun pada 2015. Tapi karena adanya kondisi keuangan yang tidak stabil, pada 2016 jumlah DAK bidang pendidikan menurun hingga 73% menjadi Rp2,6 triliun dan hanya diperuntukkan untuk membiayai SD.

Di sisi lain, penerima manfaat, jumlah kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan semakin banyak. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan daerah akibat pemekaran wilayah dan kondisi teknis pendidikan di daerah bersangkutan.



Foto: Rihad Wiranto

DIAWASI PRESIDEN

Mukhlis S.T, Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyatakan program DAK muncul sejak 2003. "DAK ini terus berkembang, jika dulu daerah hanya pasif, tahu-tahu mendapat kucuran dana, kemudian tahun 2016 ada perubahan, daerah harus membuat proposal tertulis kemudian dikaji, ditentukan mana yang mendapat bantuan serta berapa besarnya. Nah di tahun 2017 ini ada perubahan lagi, karena DAK ditetapkan oleh Presiden," jelas Mukhlis.

Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus, ditindaklanjuti Peraturan Mendikbud Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan. Selain itu, ada Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM. "Menindaklanjuti Inpres Nomor 9 Tahun 2016 ini, kami mengeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Sekolah Dasar bernomor 2799/D2/TU/2016 yang ditujukan kepada seluruh dinas pendidikan kabupaten/kota," kata Mukhlis.

Surat Edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen Dikdasmen

tentang pelibatan SMK program keahlian teknik bangunan dalam pendataan fisik sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan tata kelola bantuan dana pendidikan di lingkungan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

Direktorat Pembinaan SD memiliki aplikasi sistem data fisik secara online yang diberi nama Takola SD. Data teknis dalam Takola SD adalah data yang dihimpun Tim SMK Program Keahlian Bangunan di masing-masing wilayah Kab/Kota atau wilayah terdekat.

Takola meliputi data teknis gedung, gambar bangunan, foto sekolah dari berbagai sisi, rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), data sekolah rawan bencana, termasuk informasi pengembangan ruang kelas baru, revitalisasi, perpustakaan, sanitasi, Unit Kesehatan Sekolah, dan lain-lain, bagi sekolah dasar yang ada di seluruh Indonesia.

Mulai tahun anggaran 2017, semua permohonan bantuan tidak lagi menggunakan surat proposal dari dinas, lembaga maupun sekolah dasar, melainkan menggunakan data dalam Takola SD. Penentuan sasaran sekolah calon penerima bantuan ditentukan bersama dengan dinas pendidikan, sekaligus penandatanganan kerjasama pekerjaan didampingi Tim Teknis SMK.

Seluruh pelaksanaan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan menggunakan Sistem Takola SD secara online. Pengawasan dan pengendalian secara online dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara terbuka.

Mukhlis menambahkan aplikasi Takola berbasis Andorid sudah cukup familiar digunakan pada beragam smartphone. Dengan kemudahan dalam pengoperasian ponsel berbasis Android akan mudah memverifikasi sekolah rusak secara jelas, valid dan akurat. "Tahun 2017 mudah-mudahan SD-SD ini sudah ter-record semuanya. Jika sudah terekam, aplikasi ini akan dibuka secara umum. Masyarakat bisa membuka aplikasi ini. Jika menemukan sekolah dalam keadaan rusak, bisa langsung difoto dan unggah. Jika sudah sampai tahap itu, kita sudah memiliki data nasional yang sangat memudahkan untuk perencanaan dan kita sudah sampai pada golden record," ujar Mukhlis.

Mukhlis menekankan data harus benar-benar valid dan akurat. Teknologi informasi yang berkembang cepat harus bisa dimanfaatkan. "Pengajuan bantuan harus dengan e-planing. Dari situlah bantuan dan besarnya akan ditentukan. Tuntutannya adalah bagaimana Bapak Ibu siapkan, sekolah yang diprioritaskan butuh bantuan. Ini harus terdata secara valid dan up to date. Akurasi data ini sangat penting, agar bantuan yang diserahkan kepada daerah tepat sasaran," ujarnya.

KEBIJAKAN BARU PENYALURAN DAK FISIK 2018

Kebijakan transfer DAK Fisik dari tahun ke tahun selalu diperbaiki yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaannya di lapangan. Jika pada 2015/2016 pengajuan bantuan DAK dalam bentuk hard copy, maka untuk 2018 dilakukan dengan e-planning. Dengan cara demikian, diharapkan terjadinya penyaluran DAK yang tepat sasaran

Untuk menentukan besaran DAK ini dilakukan beberapa proses seperti sinkronisasi dan harmonisasi. Untuk tahun 2018, sesuai pengajuan dari daerah ke pusat, maka tercatat usulan proyek sekitar Rp20 triliun untuk pembenahan Sekolah Dasar.

Lalu Kementerian Keuangan mengadakan dua kali proses sinkronisasi untuk menyisir dan mempertajam usulan daerah tersebut. Hasilnya, usulan yang layak sekitar Rp3,5 triliun. Kemenkeu kemudian menganjukan usulan proyek Rp3,5 triliun ini ke DPR.

Mukhlis, ST,
Kasubdit Program Evaluasi
Foto: Rihad Wiranto





Foto: Rihad Wiranto

"Setelah itu baru dilaksanakan proses harmonisasi untuk memfinalkan output dan lokasi penerima DAK sesuai kabupaten dan kota," kata Mukhlis, ST, Kasubdit Program Evaluasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud.

Hasil dari harmonisasi ini lalu dibuatkan Surat Keputusan Menteri yang berisi secara lengkap daerah mana saja yang akan menerima DAK Fisik. Data ini oleh pemerintah daerah akan menjadi acuan pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). "Dengan proses yang lebih baik ini diharapkan pemda tidak akan mengajukan revisi lagi. Pemda diharapkan langsung mengerjakan proyek mulai Januari 2018," kata Mukhlis kembali.

Secara umum, untuk tahun 2018, kegiatan DAK Fisik Sekolah Dasar digunakan untuk peningkatan prasarana dan sarana pendidikan. Pembangunan prasarana antara lain berupa rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, ruang

perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabot atau tanpa perabot.

DAK juga dipakai untuk rehabilitasi jamban siswa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut sanitasi atau tanpa sanitasi. Bisa juga untuk membangun ruang kelas baru (RKB) beserta perabot, serta pembangunan jamban siswa beserta sanitasi.

Pada acara Harmonisasi Bantuan Pemerintah 2017 dan Finalisasi Rincian Lokasi Target Output DAK Fisik SD 2018, di Serpong, Tangerang, Banten, pada 6 sampai dengan 8 November 2017, Mukhlis menyatakan pembangunan tersebut dilaksanakan dengan swakelola dengan melibatkan Panitia Pelaksana di Sekolah (P2S), unsur sekolah, masyarakat di lingkungan sekolah, dibantu tim teknis yang dibentuk kabupaten/kota. "Jadi keliru kalau ada anggapan yang harus membangun adalah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)," kata Mukhlis. Siswa SMK

memang dilibatkan dalam pendataan sarana dan prasarana sekolah dasar untuk mengisi Data Pokok Pendidikan (dapodik) namun tidak dilibatkan dalam pembangunan berbagai sarana dan prasarana tersebut.

DAK 2018 ini juga diarahkan untuk peningkatan sarana pendidikan seperti pengadaan koleksi perpustakaan berupa buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik. Pengadaan barang ini dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

Mukhlis menyatakan pembangunan prasarana sekolah harus bersifat tuntas. "Pembangunan/Perbaikan Prasarana SD harus diselesaikan secara tuntas. Sekolah diperbolehkan mendapatkan lebih dari 1 menu DAK, serta pengalokasian bantuan prasarana APBN dan DAK harus menuntaskan kebutuhan pembangunan/perbaikan prasarana di suatu sekolah," kata Mukhlis lagi.

Selanjutnya, bantuan pemerintah akan difokuskan pada SD Rujukan. Jika masih memungkinkan diarahkan ke SD Model (Binaan LPMP- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan). Dan jika masih memungkinkan lagi, maka diarahkan ke SD Reguler.

"Sementara untuk pembangunan jamban, satu SD mendapat satu paket pembangunan jamban. Ketentuannya, satu paket pembangunan jamban seluas 4 x 7 meter persegi yang setara 8 unit jamban," katanya. Pembangunan jamban tersebut harus menyesuaikan dengan kebijakan "Pembangunan Sanitasi SD" yang menggunakan sumber dana APBN, dan berorientasi pada Paradigma Abad 21.

Pada 2018, ada ada tambahan proyek yang bisa dibiayai dengan DAK Fisik. Empat bidang tambahan pada DAK Reguler, yaitu air minum, sanitasi, pasar, dan jalan. Terdapat juga penambahan tiga bidang DAK Afirmasi, yakni pendidikan, air minum, dan sanitasi. Sedangkan untuk DAK Penugasan, ada tambahan satu bidang DAK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya berada di bawah bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi tahun 2017. Pemisahan bidang DAK ini dilakukan agar implementasinya di lapangan berjalan lebih baik.

Dengan penambahan tersebut, maka DAK Reguler untuk tahun 2018 memiliki 11 bidang yakni pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana, air minum, perumahan dan pemukiman, pasar, Industri Kecil Menengah (IKM), pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan jalan. DAK Reguler digunakan untuk pelayanan dasar sesuai UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan target pemenuhan standar minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk mencapai program ekonomi berkeadilan.

DAK Afirmasi untuk tahun 2018 terdiri dari kesehatan, perumahan dan pemukiman, transportasi, pendidikan, air minum, dan sanitasi. DAK Afirmasi bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada lokasi prioritas (kecamatan) pada kabupaten/ kota yang termasuk daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi.



Foto: Rihad Wiranto

DAK Penugasan untuk tahun 2018 terdiri sembilan bidang yakni pendidikan (SMK), kesehatan (Rumah Sakit-RS Rujukan dan RS Pratama), air minum, sanitasi, jalan, irigasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan. DAK Penugasan bertujuan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional tahun 2018 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup pekerjaan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.

Untuk tahun 2018, kebijakan DAK Fisik diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan; 1. Mempertajam fokus bidang/sub bidang DAK Fisik untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan; 2. Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan

usulan daerah (proposal based) dan prioritas nasional dengan memperhatikan perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi; 3. Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi; 4. Memperbaiki mekanisme penyaluran DAK Fisik berbasis kinerja penyerapan; 5. Melakukan sinkronisasi pengalokasian DAK, yaitu antar bidang/subbidang DAK, antar kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan provinsi, antara DAK dengan pendanaan lainnya selain DAK dengan mengoptimalkan peran Provinsi dalam pelaksanaan sinkronisasi tersebut; 6. Memberikan diskresi kepada daerah untuk menggunakan maksimal 5% dari pagu DAK Fisik untuk kegiatan penunjang yang bersifat nonfisik; 7. Menghilangkan kewajiban Daerah untuk menyediakan dana pendamping; 8. Mempercepat penetapan Juknis/Juklak DAK.



Foto: Rihad Wiranto

E-PLANING

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI, Joko Widodo mengenai “usulan dengan menggunakan teknologi informasi”, pemerintah telah merintis pengembangan aplikasi e-planning untuk pengusulan DAK Fisik Tahun 2018. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi satu portal pengusulan DAK Fisik dari pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder (lintas K/L dan lintas Pemerintah Daerah) yang merupakan bagian dari sistem e-planning secara keseluruhan.

Peran dalam e-planning DAK dilaksanakan dengan pembagian tugas masing-masing. Pemerintah Kab/Kota bertugas mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018, serta menyampaikan data realisasi DAK Tahun 2015, 2016 dan 2017. Pemerintah Provinsi bertugas mengusulkan proposal dan

data teknis DAK Tahun 2018 , memberikan rekomendasi terhadap usulan Pemerintah Kab/Kota, dan menyampaikan data realisasi DAK Tahun 2015,2016 dan 2017.

Kementerian PPN/ Bappenas berperan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara usulan pemerintah daerah dengan lokasi prioritas, serta melakukan penilaian terhadap usulan pemda berdasarkan kriteria kesesuaian dengan Lokasi Prioritas dan target pembangunan nasional.

Kementerian Keuangan memiliki peran melakukan verifikasi terhadap usulan pemda, melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan Negara, mengalokasikan DAK per-daerah sesuai hasil penilaian usulan



Kementerian Dalam Negeri bertugas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dengan urusan daerah (merupakan urusan daerah sesuai UU No.23 Tahun 2014) 5.

Sedangkan Kementerian/Lembaga (teknis) melakukan verifikasi terhadap usulan pemda sesuai dengan kebijakan dan target DAK 2018 yang telah dirancang, serta melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah.

TARGET BIDANG PENDIDIKAN

Target pembangunan bidang pendidikan khususnya sekolah dasar adalah mencapai Angka Partisipasi Murni (APM) hingga 82,8 persen pada 2017, dan mencapai 85,2 persen pada 2019. Angka Partisipasi Murni (APM)

adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Angka Partisipasi Kasar SD/SDLB/Paket A ditargetkan mencapai 98,0 persen pada 2017 dan 100,55 persen pada 2019. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Dari kiri ke kanan: Suhendri, M.Pd., Kepala Seksi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara

dan Sarnen Indra, Kepala Seksi Sarana Prasarana, Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat



Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Dengan adanya berbagai pembenahan terus-menerus, penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai target yang telah ditentukan.

TANGGAPAN PROGRAM DAK

Program DAK Fisik dinilai sangat membantu upaya perbaikan sarana dan prasarana di daerah. Hadijah, S.Pd., Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengadaan di Bagian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara menyatakan DAK Fisik sangat bermanfaat.

DAK dikdas untuk Padang Lawas sebesar Rp6,9 miliar, di antaranya untuk SD sebesar Rp3,4 miliar. "Yang untuk SD, sebagian untuk koleksi perpustakaan sebesar Rp1,3 miliar. Sisanya untuk ruang kelas baru," katanya.

Sarnen Indra, Kepala Seksi Sarana Prasarana, Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat merasakan manfaat DAK Fisik. Lima Puluh Kota yang memiliki 165 SD negeri dan 3 SD swasta mendapat DAK fisik dikdas Rp10,2 miliar. "Untuk SD sebesar Rp5,7 miliar untuk rehabilitasi, ruang guru, ruang belajar dengan total 37 paket yang tersebar di 16 SD. Ada yang mendapat bantuan untuk ruang guru dan rehabilitasi ruang kelas. Ada untuk ruang kelas baru saja," kata Sarnen.



Muhromin, Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau

Pendapat lainnya, Suhendri, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, menyatakan keberadaan tim SMK tidak perlu menjadikan risau Diinas Pendidikan Kabupaten/Kota. "Intinya mereka sama-sama ingin memperbaiki kualitas pendidikan di SD. Saya yakin dan percaya pendidikan paling fundamental untuk kita perbaiki adalah pendidikan dasarnya," katanya.

Di mata Hendri, jika pendidikan dasar kokoh dan kuat, maka tahap pendidikan selanjutnya pasti akan kuat juga. Sebaliknya, jika pendidikan dasarnya tidak kokoh, pendidikan selanjutnya akan rapuh. "Mudah-mudahan

Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini nantinya bisa merumuskan strategi agar bantuan yang diberikan Kemendikbud ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Hendri.

Muhromin, 33 tahun, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menyatakan DAK Fisik Bintan tahun 2017 sebesar Rp1,9 miliar.

Pria yang menjabat Kepala Seksi Sarana Prasarana sejak 2015 ini menyatakan DAK tersebut dipergunakan untuk menambah koleksi perpustakaan yang disebar di 12 paket di 12 sekolah senilai Rp580 juta. Di Bintan sendiri terdapat 98 SD negeri dan 8 SD swasta. Sisa DAK dipakai untuk rehabilitasi ruang kelas. ●

11

**LOMBA
BUDAYA MUTU
SEKOLAH DASAR**



Revitalisasi Lomba Budaya Mutu di Sekolah Dasar

Kualitas pendidikan di Indonesia selalu menjadi perhatian dan perbincangan berbagai masyarakat. Mereka senantiasa menakar besar anggaran yang telah digulirkan dengan mutu pendidikan yang dihasilkan. Secara umum, masyarakat menginginkan peningkatan kualitas pendidikan. Sangat tersinggung jika melihat fenomena hasil studi beberapa lembaga internasional yang mempertontonkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Apalagi melihat masih maraknya budaya tawuran antar pelajar, tawuran antar masyarakat yang berbeda suku, beda kepentingan politik, beda budaya dan agama. Juga maraknya kenalakan ramaja akibat dari pergaulan bebas. Masyarakat juga

gampang tersinggung jika melihat fasilitas sekolah sebagai tempat proses pendidikan berlangsung dalam keadaan jauh dari kata layak, bahkan rusak.

Fenomena ini seolah menempatkan pendidikan formal sebagai satu-satunya tempat berproses manusia dalam hidupnya paling bertanggung jawab. Padahal, sejatinya masih banyak ruang dan waktu yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam menggapai hasil pendidikan. Mulai dari lingkungan keluarga, hingga lingkungan masyarakat di sekitarnya. Kita tidak seharusnya membela diri atas perhatian masyarakat yang demikian. Hal tersebut tentu menjadi masukan sangat berharga bagi kita untuk terus memperbaiki kinerja.

Abad 21 sudah di pelupuk mata. Bukan lagi saat yang tepat bagi kita bersantai-santai menyambut kehadirannya. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pendidikan sudah semakin kuat. Hal ini disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan global yang semakin ketat, serta kesadaran masyarakat (orang tua siswa) akan pendidikan yang berkualitas semakin tinggi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga permasalahan dapat dipecahkan dengan mengupayakan penguasaan serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, seseorang kurang bisa mengantisipasi perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup yang selalu berkembang dengan pesat," kata Wowon Widaryat, M.Si, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar.

URGENSI BUDAYA MUTU SEKOLAH

Budaya mutu sekolah merupakan faktor yang paling penting dalam membentuk siswa menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, jujur, optimis, berani, terampil, berperilaku kooperatif, ulet, disiplin, beretos kerja yang tinggi, pandai menangkap peluang. Sekolah-sekolah yang memiliki keunggulan budaya mutu tertentu biasanya dapat dilihat dari beberapa variabel yang mempengaruhinya seperti prestasi, kondisi fisik, lingkungan sekolah, dan budaya sekolah.

"Untuk mewujudkan sekolah berbudaya mutu, faktor penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu perencanaan yang terukur, pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan secara berkelanjutan," jelas Wowon.

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar telah melaksanakan berbagai program peningkatan budaya mutu baik melalui penguatan pembelajaran yang bermutu, perbaikan sarana dan prasarana, penataan manajemen sekolah, program pendidikan karakter, program sekolah bersih dan sehat, program optimalisasi kinerja perpustakaan dan berbagai program lainnya. Direktorat juga telah melaksanakan berbagai jenis lomba sebagai bentuk apresiasi pada sekolah-sekolah yang berhasil, seperti lomba Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Sekolah Dasar bersih dan sehat, dan sebagainya.

LOMBA BUDAYA MUTU DI SEKOLAH DASAR

Lomba Budaya Mutu di Sekolah Dasar telah diinisiasi sejak tahun 1990an dengan nama Lomba Gugus Sekolah. Lomba Gugus Sekolah ini melombakan sekolah-sekolah gugus yang ada di kecamatan. Gugus Sekolah ini terdiri dari satu sekolah inti dan beberapa sekolah imbas. Setelah berjalan cukup lama, lomba gugus sekolah ini kemudian diperbarui menjadi Lomba Sekolah Karakter dan dimulai sejak tahun 2011. Lomba ini dilaksanakan pada zaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat oleh Ir. Mohammad Nuh, DEA.

Lomba Sekolah Karakter ini bertahan hingga tahun 2014, sebelum kemudian diganti menjadi Lomba Budaya Mutu (LBM). LBM dipandang memiliki bobot lebih baik lantaran tidak hanya menilai sekolah hanya dari salah satu komponen saja yakni pendidikan karakter di sekolah, tetapi jauh lebih kompleks. Mulai manajemen berbasis sekolah, pembelajaran, penerapan pendidikan karakter, ekstrakurikuler, lingkungan sekolah, perpustakaan dan lain-lain. Dari sekolah-sekolah terbaik hasil penilaian LBM tingkat nasional, ditentukan juga sekolah terbaik berkategori menyeluruh (whole school).

Pelaksanaan LBM juga untuk merekatkan NKRI dengan pelaksanaan tempat lomba berpindah-pindah. Pada tahun 2014 berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, tahun 2015 di Padang, Sumatera Barat, tahun 2016 berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan tahun 2017 berlangsung di Yogyakarta.

“Pelaksanaan LBM Sekolah Dasar tahun 2017 merupakan kelanjutan sekaligus perbaikan dari lomba sejenis yang sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Dalam Lomba tahun 2017 ini, seluruh sekolah peserta dievaluasi dari seluruh komponen budaya mutu secara komprehensif (*whole school assessment*) sehingga penilaian menjadi lebih terpadu,” terang Dr. Juandaniisyah, MA Kepala Sub Direktorat Kurikulum, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

Juandaniisyah juga mengatakan, bahwa lomba dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh provinsi di Indonesia untuk mengirimkan wakil-wakil sekolah terbaiknya, yang kemudian akan dipilih melalui tiga tahapan seleksi yaitu pra-seleksi dokumen, visitasi lapangan dan seleksi presentasi dan wawancara. “Keseluruhan proses tahapan seleksi kemudian digunakan untuk menetapkan sekolah berbudaya mutu tingkat nasional atau grand final yang kemudian diseleksi lagi untuk menentukan sekolah berbudaya mutu terbaik pada masing-masing komponen penilaian utama, serta memilih sekolah dengan predikat terbaik dari seluruh komponen (*whole school*),” katanya.

SEKOLAH DASAR BERBUDAYA MUTU

Mutu mengandung makna derajat/tingkat keunggulan suatu kinerja atau upaya baik yang tampak maupun yang tidak tampak, sedangkan mutu sekolah dimaknai sebagai layanan prima yang diberikan sekolah kepada peserta didik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pada tingkat sekolah, mutu mencakup *input* (segala hal yang diperlukan untuk berlangsungnya pembelajaran), proses (berubahnya peserta didik dari belum terdidik menjadi terdidik) dan *output* (prestasi belajar).

Budaya mutu adalah nilai dan keyakinan mutu dalam suatu masyarakat yang digunakan sebagai sumber penggalangan konformisme perilaku yang bermutu tinggi bagi masyarakat pendukungnya. Budaya Sekolah meliputi nilai-nilai dan keyakinan. Nilai merupakan penghayatan warga sekolah tentang apa yang dianggap benar-salah, baik-buruk, keindahan dan ketidakindahan, layak dan tidak layak. Sedangkan keyakinan merupakan sikap tentang bagaimana cara sesuatu seharusnya dilakukan. Untuk itu keyakinan merupakan sesuatu yang penting, berharga, bersifat konseptual yang harus diyakini dan dihayati sebagai dasar untuk bersikap dan bertindak. Dengan demikian budaya sekolah awalnya merupakan aturan dan tata tertib

Dr. Juandaniisyah, MA,
Kepala Sub Direktorat Kurikulum
Foto: Mukti Ali





Foto: Mukti Ali

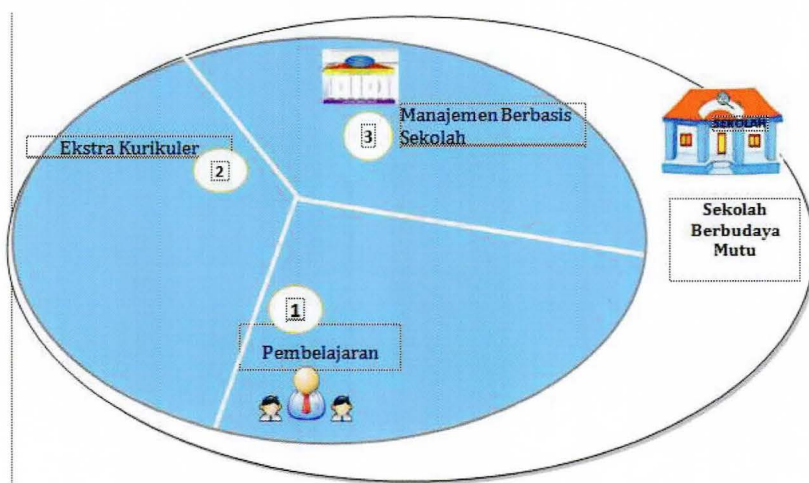
yang disepakati bersama oleh warga sekolah, dihayati dan dilakukan terus-menerus hingga menjadi kebiasaan.

Budaya sekolah memiliki *core culture* yaitu pengembangan karakter (budi pekerti) siswa, baik karakter religius, humanis, nasionalis, maupun demokratis yang didukung oleh pengelolaan manajemen yang baik, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat serta media belajar dan perpustakaan yang memadai.

Sekolah Dasar berbudaya Mutu adalah Sekolah Dasar yang memberikan layanan prima yang merefleksikan budaya mutu. "Budaya Mutu Sekolah Dasar tercermin pada komponen-komponen pembelajaran intrakurikuler yang efektif, kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter peserta didik, kepemimpinan kepala sekolah disertai dengan manajemen berbasis sekolah, pengelolaan perpustakaan yang mendukung pembelajaran yang efektif dan menumbuhkembangkan budaya baca warga sekolah, dan lingkungan sekolah yang merefleksikan kondisi bersih, rapih, dan sehat," kata lelaki yang akrab disapa Juanda ini.

Dengan demikian, lanjut Juanda, Sekolah Dasar yang mengimplementasikan budaya mutu sekolah secara optimal akan menjadi *benchmark* (patok duga) bagi sekolah lain di sekitarnya dan acuan pembinaan bagi Dinas Pendidikan. Budaya mutu sekolah dapat dikembangkan pada tataran spirit, teknis dan sosial. Oleh karena itu, budaya mutu sekolah dapat disebarluaskan, dilombakan bahkan diadaptasi oleh sekolah lain. Lomba Budaya Mutu merupakan kegiatan pembinaan melalui evaluasi kinerja sekolah dalam aspek pembelajaran, ekstrakurikuler, dan manajemen berbasis sekolah.

Untuk itulah, agar budaya mutu sekolah tersebut terus tumbuh dan berkembang serta berimbas pada sekolah-sekolah lain, perlu diadakan perlombaan yang dinamakan Lomba Budaya Mutu (LBM). "Meskipun demikian, sekolah-sekolah yang sudah mencapai kriteria tertentu secara keseluruhan dan memperlihatkan keunggulan dalam salah satu komponen budaya mutu, diberikan apresiasi dalam lomba. Keunggulan dalam komponen lomba termasuk pembelajaran, ekstrakurikuler, dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)," ujarnya.



Gambar Komponen Lomba Budaya Mutu Tahun 2017

TUJUAN LOMBA BUDAYA MUTU

Tujuan umum LBM di Sekolah Dasar ini adalah untuk mewujudkan Sekolah Dasar yang memiliki budaya mutu dalam memberikan layanan prima dan menjadi *benchmark* (patok duga) bagi sekolah lain di sekitarnya serta jadi acuan bagi pembinaan para pemangku kepentingan. Selain tujuan umum, LBM di Sekolah Dasar juga memiliki beberapa tujuan khusus, meliputi: untuk menemukan Sekolah Dasar yang memiliki budaya mutu dengan segala kekhasan dan keunggulannya masing-masing sebagai model yang baik (*good practices*) bagi sekolah lain. Juga untuk menghimpun berbagai pengalaman inspiratif dari Sekolah Dasar yang memiliki budaya dan lingkungan yang bermutu, mendokumentasikan dan menyosialisasikan pengalaman inspiratif pengembangan budaya mutu pembelajaran, praktik baik pendidikan karakter di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan manajemen berbasis sekolah kepada Sekolah Dasar di seluruh Indonesia, serta memotivasi para pemangku kepentingan, baik di satuan pendidikan Sekolah Dasar maupun Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan Sekolah Dasar yang memiliki

SASARAN SEKOLAH PESERTA

Sasaran Sekolah Dasar yang menjadi peserta LBM Sekolah Dasar terus mengalami perubahan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 dan 2015 lalu, sekolah yang menjadi sasaran LBM adalah SD Negeri Pembina/Rujukan, SD Negeri dan SD Swasta. Tahun 2016 mengalami perluasan sekolah sasaran yang mencakup SD Negeri/Rujukan, SD Negeri, SD Swasta, SD Negeri di wilayah 3T, dan SD Swasta di wilayah 3T. Dan tahun 2017 mengalami penyempitan sasaran sekolah tetapi tetap mewadahi semua sekolah. Sasaran SD tahun 2017 meliputi SD Negeri Rujukan yang ditetapkan tahun 2015 dan 2016, SD Negeri Rintisan PPK, dan SD Swasta Rintisan PPK.





NG
TASI
AN HEMAT ENERGI
Energi, Kini dan Na



KOMPONEN PENILAIAN

Penilaian Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar dimaksudkan untuk melihat kuantitas dan kualitas pelaksanaan seluruh program yang mendukung bertumbuhnya budaya mutu di sekolah. Komponen penilaian LBM SD tiap tahunnya juga mengalami perubahan disesuaikan isu nasional yang berlaku saat itu. Pada tahun 2014 dan 2015, komponen penilaian secara umum mencakup: profil sekolah sekaligus program sekolah, pembelajaran, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), perpustakaan, serta Usaha Kegiatan Sekolah (UKS) khusus untuk SD Pembina/Rujukan. Komponen penilaian utama pada grand final mencakup: pembelajaran, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), perpustakaan, serta UKS.

Pada tahun 2016, komponen penilaian mencakup: profil sekaligus program sekolah, pembelajaran, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), ekstrakurikuler, perpustakaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk SD Pembina/Rujukan, serta penilaian pada komponen

peran pembinaan. Komponen utama penilaian pada tahun 2016 ini meliputi pembelajaran, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), ekstrakurikuler, UKS serta peran pembinaan.

“Dan pada tahun 2017, komponen penilaian mencakup: profil sekolah, program sekolah, pembelajaran, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), serta Ekstrakurikuler. Komponen penilaian utama pada LBM SD 2017 ini mencakup, pembelajaran, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan ekstrakurikuler,” jelas Drs. Abdul Mukti, M.Pd, Kepala Seksi Pembelajaran, Subdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

Komponen penilaian utama diberlakukan saat grand final, untuk menentukan SD Berbudaya Mutu terbaik I, II, III, untuk kategori sesuai komponen utama penilaian yang diberlakukan. Juga untuk menghasilkan SD Berbudaya Mutu dengan predikat terbaik pada seluruh komponen utama penilaian (*whole school*) yang terbagi sesuai dengan sekolah sasaran peserta lomba.

MEMACU MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR

Hasnah, M.Pd tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah sekolah yang ia pimpin dinobatkan menjadi juara dengan predikat *Whole School* atau predikat menyeluruh pada ajang Lomba Budaya Mutu (LBM) Sekolah Dasar tahun 2017. Sekolah yang dipimpin Hasnah, M.Pd, yakni SD Negeri 20 Pekanbaru yang ikut pada kelompok Sekolah Dasar Negeri Rintisan PPK, Riau itu berhasil meraih nilai tertinggi dari tiga komponen utama penilaian. "Bangga dan senang sekali bisa meraih predikat *whole School* pada LBM 2017 ini. Kami dari awal memang yakin dan optimis akan meraih salah satu predikat, tetapi sama sekali tidak menyangka jika meraih predikat *whole school* atau predikat menyeluruh," ujar Hasnah, M.Pd sesaat setelah ia menerima penghargaan yang diberikan oleh Dr. Tamrin Kasman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Bersanding dengannya, ada dua sekolah lain yang juga meraih predikat *whole school* yakni SD Negeri 02 Kampung Baru, Majene, Sulawesi Barat (kelompok SD Negeri Rintisan PPK), serta SD Santa Maria, Kota Pekanbaru, Riau (kelompok SD Swasta Rintisan PPK).

TIGA KOMPONEN PENILAIAN

Dalam ajang grand final LBM Sekolah Dasar yang digelar tanggal 7-10 November di Sahid Rich Hotel Yogyakarta, peserta LBM terbagi dalam tiga kelompok, yakni Sekolah Rujukan, Sekolah Negeri Rintisan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan Sekolah Swasta Rintisan PPK. Terdapat tiga komponen utama penilaian diterapkan pada sekolah sasaran tersebut, meliputi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Pembelajaran, serta Ekstrakurikuler.



Secara keseluruhan, sekolah terbaik hasil penilaian pada grand final LBM 2017 ini sebanyak 21 sekolah. Terdiri dari SD Begeri Rujukan terbaik I, II, III pada masing-masing kategori, SD Negeri Rintisan PPK terbaik I, II, III pada masing-masing kategori, dan SD Swasta Rintisan PPK pada masing-masing kategori.

Dari tiga kelompok sasaran sekolah tersebut, juga ditetapkan tiga sekolah terbaik dengan predikat menyeluruh (*whole school*).

Ke-21 sekolah ini merupakan sekolah pilihan terbaik dari 217 sekolah yang bertanding dalam grand final LBM 2017. Jauh sebelum terpilih mengikuti grand final, telah dilakukan penilaian portofolio dan visitasi/kunjungan langsung ke tiap sekolah terhadap 540 sekolah yang terdaftar sebagai peserta LBM 2017. Sekolah-sekolah ini merupakan Sekolah Rujukan sebanyak 452 SD, Sekolah Negeri Rintisan PPK sebanyak 45 SD, dan Sekolah Swasta Rintisan PPK sebanyak 43 SD. Untuk Sekolah Rujukan ini adalah sekolah yang ditetapkan menjadi Sekolah Rujukan tahun 2015 dan 2016, sedangkan sekolah rintisan

PPK ditetapkan tahun 2016. Ke-217 sekolah ini kemudian terbagi dalam tiga kelompok, yakni Kelompok Sekolah Rujukan sebanyak 175 sekolah, kelompok Sekolah Negeri Rintisan PPK dan Sekolah Swasta Rintisan PPK masing-masing sebanyak 21 sekolah.

Kepada masing-masing sekolah terbaik, diberikan penghargaan berupa piala, sertifikat dan uang pembinaan. Besar uang pembinaan untuk sekolah terbaik III sebesar 20 juta rupiah, terbaik II sebesar 22,5 juta rupiah, dan terbaik pertama sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan kepada ketiga sekolah peraih predikat *whole school* masing-masing diberikan uang pembinaan sebesar 40 juta rupiah.

KIAT PERBAIKI NUTU DI SEKOLAH DASAR

LBM 2017 kali ini dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D. Dalam arahnya Hamid mengatakan bahwa LBM yang telah dilaksanakan sejak tahun



Foto: Mukti Ali

2014 berhasil bertahan hingga sekarang. "Karena persoalan mutu pendidikan memang sangat krusial. Dan pada jenjang SD menjadi salah satu pekerjaan rumah kita yang harus terus dibenahi, karena pendidikan di SD menjadi pondasi atau dasar untuk pendidikan selanjutnya," tegas Hamid.

Persoalan akses pendidikan, lanjut Hamid, bisa dikatakan telah usai. Saat ini sudah tidak ada perbedaan akses pendidikan bagi anak di daerah 3T dan daerah perkotaan, mereka sudah mampu mencapai akses pendidikan di SD. Persoalan akses SD saat ini sudah mencapai 95 %. "Artinya, untuk layanan akses di SD tidak perlu dipersoalkan lagi. Yang perlu mendapat perhatian adalah soal mutu, ini pekerjaan rumah yang harus kita tekuni, harus dimulai dari tiap sekolah di manapun berada. Mengapa demikian, karena anak kelas rendah di SD masih banyak yang belum bisa membaca, padahal seharusnya sudah bisa," ujar Hamid.

Hamid mengatakan hasil studi yang dilakukan oleh USAID tahun 2014 tentang kemampuan membaca dan menulis di Indonesia yang hasilnya cukup berbeda.

Penelitian itu terbagi dalam empat wilayah, yakni wilayah Sumatera, Jawa dan Bali, Sulawesi dan Kalimantan, serta wilayah Papua, Papua Barat, NTB, NTT hingga Maluku. Hasil penelitian di Jawa-Bali siswa yang tidak bisa membaca hanya 6%, hal ini berbanding terbalik untuk wilayah Indonesia timur yang tergolong dalam kuadran 4. "Kemampuan membaca pada wilayah ini berbanding terbalik dengan di Pulau Jawa dan Bali. Untuk itulah kenapa kita harus benar-benar fokus perbaikan pendidikan di wilayah tersebut," Hamid menegaskan.

Hamid juga memberikan tiga kiat perbaikan mutu di SD. Pertama, adalah perkuat pondasi pendidikan melalui karakter, kedua adalah membekali siswa dengan literasi, dan yang ketiga adalah menyiapkan siswa menjadi generasi yang tahan banting/bertahan pada 10-20 tahun mendatang.

Perbaikan mutu SD melalui pendidikan karakter, kata Hamid, terdapat tiga karakter yang harus diperkuat pada siswa di SD. "Pertama adalah karakter moral, kedua karakter kinerja, dan ketiga adalah karakter kebangsaan," katanya.







Dalam karakter moral, anak-anak SD harus diperkuat dengan akhlak mulia, taat beribadah, sopan santun, mentaati peraturan-peraturan, serta segala hal yang bersifat baik. "Kita tidak hanya membuat anak-anak didik kita menjadi cerdas, bisa menang ini dan itu. Hal itu penting, tetapi yang lebih penting adalah karakter moralnya. Tanpa karakter yang baik, target pendidikan tidak akan tercapai seperti yang kita harapkan," tegas Hamid.

Karakter kedua, lanjut Hamid, adalah karakter kinerja. Setiap sekolah, setiap guru dan kepala sekolah harus menyiapkan anak didiknya menjadi generasi yang tangguh, generasi yang bisa survive dengan masanya. "Jangan bikin anak kita menjadi lembek, dia harus tangguh, harus punya cita-cita yang tinggi, dorong anak kita menjadi generasi yang seperti itu. Dan sekolah lah yang mengantarkan anak dengan kinerja baik dan tangguh," lanjut Hamid.

Karakter ketiga, adalah kebangsaan. Hamid menegaskan, bahwa Bangsa Indonesia ini ada

karena diciptakan oleh kelompok-kelompok, oleh orang-orang yang berbeda-beda. Beda etnis, beda daerah, beda budaya dan beda bahasa. Hal ini harus dirawat, jangan sampai timbul benih perpecahan yang disemai sejak anak duduk di SD. "Oleh karena itu, cek betul buku-buku pelajaran yang digunakan siswa, jangan sampai ada materi yang mengarah pada perpecahan bangsa, itu harus kita singkirkan. Anak harus diajarkan dalam perbedaan, harus diajarkan nasionalisme. Rekatkanlah nasionalisme pada anak-anak, dan tiga kelompok karakter harus dibudayakan di sekolah," papar Hamid.

Tiga kelompok karakter tersebut, lanjut Hamid cukup penting, tetapi ada yang jauh lebih penting lagi, yakni karakter kejujuran. Kejujuran ini tidak bisa hanya diajarkan di dalam kelas, melalui ceramah. Jika diajarkan akan kembali seperti pola pengajaran zaman dulu, seperti menghafal P4, UUD 45 dan lain sebagainya. "Menghafal tidak jelek, tetapi alangkah baiknya jika diperbanyak contoh nyata, dipraktikkan," ujarnya.

Perbaikan mutu SD melalui literasi, Hamid menjelaskan, bahwa saat ini kampanye besar yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah literasi. Tetapi, ia menghimbau agar literasi tidak dianggap barang baru. Literasi dasar yang ada di SD adalah kemampuan baca tulis. "Perkuat anak-anak kita dengan baca tulis. Jangan sampai kita tidak paham dengan literasi dan dianggap barang baru. Kita dorong literasi sampai anak-anak gemar membaca dan menulis. Lomba penulisan artikel ini merupakan upaya gerakan kliterasi. Tetapi sesungguhnya literasi bukan sekedar baca tulis saja, ada istilah multiliterasi," katanya.

Multiliterasi, jelas Hamid, adalah mencakup banyak literasi, ada literasi *Information Technology* (IT), ada literasi seni budaya dan lain sebagainya. Sekolah harus memfasilitasi dan mengoptimalkan potensi siswanya. Sayang jika hanya mengajarkan pelajaran di dalam kelas saja. "Seolah-olah anak hebat itu yang pandai Matematika, dan pandai IPA. Anak yang hebat juga bisa lahir dari kemampuan bakat dan minatnya. Intinya, tegas Hamid, fasilitasi dan kembangkan potensi anak secara optimal sesuai kapasitas dirinya melalui literasi. Ini kewajiban bagi semua sekolah, bukan hanya sekolah rintisan dan rujukan saja," tegasnya.

BEKALI SISWA DENGAN 4C

Oleh karena itulah, Kemendikbud memberikan fasilitas/wadah untuk mengasah kompetensi siswa dalam berbagai bidang kemampuan. Misalnya, melalui Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan lain sebagainya. Kemendikbud sangat mengapresiasi siswa yang berprestasi sekaligus memfasilitasi dalam ajang-ajang bertaraf internasional. Hamid mengatakan juga, bahwa mungkin nanti akan diselenggarakan Festival Literasi Siswa Nasional.

Perbaikan mutu pendidikan di SD yang ketiga adalah mempersiapkan siswa menjadi generasi tahan banting dan bertahan pada kehidupan 10-20 tahun mendatang. "Mungkin kita tidak pernah membayangkan kehidupan sekarang pada 10 tahun yang lalu. Saat ini kita bisa dengan mudah berkomunikasi di media sosial, membuat grup dan lain sebagainya. Kehidupan 20 tahun mendatang mungkin akan sangat berbeda dan belum kita bayangkan sekarang. Oleh karena itu, ada 4 C untuk membekali siswa kita agar bisa survive dengan kehidupan barunya nanti. Empat C tersebut meliputi *Critical Thinking*, *Creativity*, *Communication*, dan *Colaboration*," kata Hamid.

Hamid menjelaskan, dalam *Critical Thinking*, anak harus diajari menjadi sosok yang kritis, jangan larang anak-anak bersuara, jangan ajarkan anak harus pendiam, karena itu masa lalu. "Ajarkan kepada anak didik cara berpikir kritis, guru dan siswa saat ini adalah saling belajar. Ketika guru tidak mengajar anak akan mencari sumber belajar lain yang mungkin guru tidak tahu. Sumbernya cukup banyak dan cukup mudah, internet salah satunya. Untuk itu, dorong anak kita menjadi anak yang berpikir kritis," ujar Hamid.

Kemudian dalam *Creativity*, guru harus memberi kesempatan kepada anak didik untuk bisa berkreasi. Jika tidak ada kreatifitas, generasi yang lahir akan menjadi generasi konsumtif seperti yang ada saat ini. "Orang luar sibuk membuat hal baru, kita hanya sibuk menjadi pengguna," katanya.

Kreatif, jelas Hamid, adalah berpikir lain, atau bertindak lain dengan tujuan tertentu tanpa mengikuti jalur mainstream atau jalur yang sudah ada. Terkadang, banyak orangtua yang langsung menstrap atau menghakimi anak lantaran berbuat sesuatu yang tidak sekehendak keinginan orangtua. Padahal sesuatu itu belum tentu menyalahi norma dan agama. Orangtua harus memberi kesempatan dan mendorong kreatifitas anak.

C selanjutnya, adalah *Communication*. Hamid berpesan supaya guru mengajarkan anak didiknya mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Banyak anak yang cukup pandai pelajaran bidang Matematika, Fisika dan lain sebagainya tetapi ia tidak bisa mengkomunikasikan ilmunya kepada orang banyak. "Pernah saya mengirim anak yang cukup pandai bidang Fisika, bahkan mampu menguasai materi Fisika hingga level S3. Tetapi saat saya minta membagi ilmunya, menyampaikan materi di depan orang banyak dia tidak bisa. Jadi ajak anak-anak berkomunikasi, ajak belajar di luar ruangan karena jika belajar di dalam ruangan terus akan membosankan," ujarnya.

Dan C terakhir adalah *Colaboration*. Hamid menegaskan, bahwa kompetisi adalah ajang yang cukup penting. Tetapi hal yang lebih penting dari kompetisi adalah kolaborasi. "Berkolaborasi menjadi sangat penting, jangan ajarkan anak-anak kita menjadi sosok egois, karena pekerjaan masa depan adalah pekerjaan yang bersifat kolaborasi bukan individualistik. Target utama kita adalah menghasilkan anak potensial secara holistik agar bisa survive dan bertahan di masa depan," pungkas Hamid.



JANGAN BERPUAS DIRI

Sementara itu, Dr. Tamrin Kasman, berkesempatan menghadiri LBM di penghujung pelaksanaan lomba. Ia juga yang sekaligus menutup secara resmi LBM 2017. Sebelum menutup, ada sepatah dua kata yang disampaikan. Ia mengatakan ada dua kata kunci dalam LBM dan Lomba Kepenulisan Artikel Sekolah Dasar. "Dua kata kunci itu, ada budaya dan menulis," katanya.



Budaya, terang Tamrin, adalah suatu yang diajarkan, suatu yang ditanamkan, diawasi dan dilaksanakan hingga menjadi budaya. Untuk bisa menjadi budaya, lanjutnya, harus dibarengi dengan rasa percaya diri keteladanan, sopan santun dan lain-lain yang tercakup dalam 18 unsur pendidikan karakter. "Delapan belas unsur pendidikan karakter itu harus dibudayakan dari hulu sampai hilir. Hulu adalah tempat pembibitan, yaitu di rumah tangga. Hilirnya adalah manusia seutuhnya yakni manusia yang cerdas. Kita ingin dari hulu sampai hilir bisa menciptakan manusia yang cerdas. Tetapi banyak masyarakat yang hanya melihat sikap manusia itu hanya dari pendidikan semata. Padahal banyak waktu di luar jam sekolah yang mampu mempengaruhi sikap dan perilaku setiap anak. Makanya jangan banyak menuntut hasil pendidikan itu hanya dari sekolah," terang Tamrin.

Tamrin lebih jelas memberikan beberapa contoh, ketika ada anak yang bersikap kurang sopan orang lain akan mudah mengatakan ini anak siapa, sekolah di mana. "Biasanya kan begitu, padahal begitu anak keluar rumah pergi ke sekolah, kalau tidak ada yang

mengantarkan siapa menjami dia akan sampai di sekolah tepat waktu. Begitupun sebaliknya," katanya.

Sedangkan kata kunci kedua adalah menulis. Tamrin berpendapat, bahwa menulis itu lahir dari sebuah pemikiran. "Jadi tidak mungkin tanpa berpikir seseorang bisa menulis. Seorang penulis pasti mengembangkan pikirannya terlebih dahulu sebelum menjadi tulisan. Menulis memerlukan kemampuan merangkai kata, mungkin seseorang tengah malam bertanya lagi, menyangga lagi, membandingkan, dan begitu seterusnya yang terjadi dalam ekosistem pikiran. Tetapi kalau tidak terbentuk pola pikir merangkai dan tanya jawab tidak mungkin akan berkembang bahkan tidak mungkin menjadi tulisan," papar Tamrin.

Dalam buku *Mind Map* karya Tony Buzman, lanjut Tamrin, bapak ibu bisa membaca dengan jelas bagaimana peta pikiran. Di sana dijabarkan mengapa begini mengapa begitu. Menulis itu lahir dari pikiran, dan pikiran lahir dari pengembangan. Pengembangan sendiri merupakan hasil pemikiran yang

tidak pernah puas. "Untuk itu, malam ini saya berpesan kepada bapak ibu kepala sekolah yang sekolahnya terpilih menjadi yang terbaik, jangan hanya berpuas dengan predikat yang diraih malam ini. Setelah pulang ke kampung halaman, pulang ke tempat tugas, kembangkan dan kembangkan lagi," pesan Tamrin.

WAHANA TEMUKAN MODEL SEKOLAH TERBAIK

Di awal grand final LBM 2017, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Wowon Widaryat, M.Si menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakan LBM Sekolah Dasar ini bertujuan untuk mewujudkan sekolah dasar yang memiliki budaya mutu dalam memberikan layanan prima dan menjadi *benchmark* (patok duga) bagi sekolah lain di sekitarnya serta jadi acuan bagi pembinaan para pemangku kepentingan. "Lomba Budaya Mutu di Sekolah Dasar ini juga dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan motivasi para pelaku pendidikan dalam melakukan pembinaan budaya mutu sekolah yang bermuara pada terwujudnya siswa yang berkepribadian unggul dan berprestasi," jelas Wowon.

Wowon juga menegaskan bahwa peningkatan Budaya Mutu di Sekolah Dasar terus dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Dirjen Dikdasmen. Menjadi wahana pembinaan untuk menentukan sekolah model terbaik yaitu Sekolah Berbudaya Mutu. Pemilihan ini difokuskan pada penilaian mutu pendidikan secara keseluruhan, yang mencakup: budaya mutu pembelajaran, budaya mutu ekstrakurikuler, dan budaya mutu manajemen berbasis sekolah (MBS).

Budaya mutu sekolah, lanjut Wowon, merupakan faktor yang penting dalam membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki sikap penuh optimisme, berani, terampil, berperilaku kooperatif, ulet, disiplin, beretos kerja tinggi, dan pandai menangkap peluang. Sekolah yang memiliki keunggulan budaya mutu dapat dilihat dari beberapa variabel seperti perilaku siswa, proses pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, prestasi akademik dan non akademik, kondisi fisik sekolah, kinerja perpustakaan, lingkungan sekolah, budaya sekolah, dan manajemen sekolah yang berpengaruh terhadap kinerja individu dan mutu sekolah.



TERIAN
N KEBUDAYAAN
INDONESIA

GRAND FINAL

LOMBANG

OMBA

JUARA III
Rp. 20.000.000,-

KORPORASI PERBATAJARAN
KATEGORI: MANULAN BAHAN BAKU KAYU
LOMBANG KULON
INDONESIA

JUARA MENYELURUH
Rp. 40.000.000,-

KATEGORI: JERAMBA DALAM RUMAH RUMAH
JOMBA KULON KULON
INDONESIA NASIONAL TAHUN 2017





DAFTAR JUARA LOMBA BUDAYA MUTU SEKOLAH DASAR 2017

Kategori Menyeluruh (whole school)

KELOMPOK LOMBA	NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH
SD Rujukan	SDN 02 Kampung Baru, Banggae Timur, Majene, Sulawesi Barat	H. Nurmaidah, M.Pd
SDN Rintisan PPK	SDN 20 Pekanbaru, Senapelan, Pekanbaru, Riau	Hasnah, M.Pd
SDS Rinrisan PPK	SD Santa Maria, Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Riau	Dorhot Meike Hutapea

SD NEGERI RUJUKAN Kategori Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

JUARA	NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH
I	SDN salatiga 06, Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah	Indriyati, S.Pd.SD
II	SDN Puntan 01, Bumiaji, Batu, Jawa Timur	Dra. Prihastutik
III	SDN kangenan 1, Pamekasan, Pamekasan, Jawa Timur	Haswati, S.Pd

SD NEGERI RUJUKAN Kategori Pembelajaran

JUARA	NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH
I	SDN 4 Purwodadi, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah	Widarti, M.Pd
II	SDN Ditotrunan 01, Lumajang, Lumajang, Jawa Timur	Suhartantiningsih, M.Pd
III	SDN 1 Sokanegara, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah	Tri Rudiwati, M.Pd

SD NEGERI RUJUKAN Kategori Ekstrakurikuler

JUARA	NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH
I	SDN Ungaran 01, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah	Sri Dwi Winarsih, M.Pd
II	SDN Pati Kidul 01, Pati, Pati, Jawa Tengah	Rinasih, M. Si
III	SDN Sukabumi 2, Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur	Agus Lithanta, M.Pd

SD NEGERI RINTISAN PPK Kategori Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

JUARA	NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH
I	SDN 003 Loa Kulu, Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Suwarni, M.Pd
II	SDN Menteng 01, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Edi Kusyanto
III	SDN Brosot, Galur, Kulon Progo, DI Yogyakarta	Sudariyah, S.Pd

SD NEGERI RINTISAN PPK Kategori Pembelajaran

JUARA	NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH
I	SDN 1 Karangduwur, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah	Dwi Martanti
II	SDN Percobaan Padang, Padang Barat, Padang, Sumatera Barat	Indra Gustadi, S.Pd
III	SDN Menteng 02, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Slamet

SD NEGERI RINTISAN PPK Kategori Ekstrakurikuler

JUARA	NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH
I	SDN Ujung Menteng 01 PG, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta	Sukasih
II	SDN Bhayangkara, Gondokusuman, Yogyakarta, DI Yogyakarta	Dewi Partini, M.Pd
III	SDN 85/IV, Jambi Timur, Jambi, Jambi	Ruda Hanim, S.Pd. I

SD SWASTA RINTISAN PPK Kategori Manajemen Bewrbasis Sekolah

JUARA	NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH
I	SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur	Ahmad Zainuddin
II	SDIT Nurul Ilmi, Telanaipura, Jambi, Jambi	Witzir Sumadisastro
III	SD GMIM Madidir, Madidir, Bitung, Sulawesi Utara	Revellyn Chery Rapar, MM

SD SWASTA RINTISAN PPK Kategori Pembelajaran

JUARA	NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH
I	SDIT Nurul Fikri, Cimanggis, Depok, Jawa Barat	Fathonah Januwiyati, M.Pd
II	Yayasan Pesantren Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Adi Kusnanto, S.Pd
III	SD Islam As-shofa, Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau	Kamil Malano

SD SWASTA RINTISAN PPK Kategori Ekstrakurikuler

JUARA	NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH
I	SDIT Ukhuwah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan	
II	SD Lematang Lestari, Rembang Dangku, Muara Enim, Sumatera Selatan	Sri Marita Aryani, MM
III	SD Global Islamic School, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta	Ahmad Siroj

RAGAM PENDAPAT SEMARAK LOMBA BUDAYA MUTU SEKOLAH DASAR 2017

Lomba Budaya Mutu di Sekolah Dasar tahun tingkat nasional tahun 2017 yang digelar di Sahid Rich Hotel, Yogyakarta usai sudah di gelar. Akan tetapi, kemasan acara yang begitu apik dan penuh semarak rasanya akan melekat hingga waktu yang cukup lama. Kurang lebih 500 orang perwakilan dari 217 sekolah peserta grand final hadir di acara tersebut. Mereka terbagi dalam tiga sekolah sasaran, Sekolah Negeri Rujukan, Sekolah Negeri Rintisan PPK, dan Sekolah Swasta Rintisan PPK. Selama lomba mereka memaparkan keunggulan sekolahnya masing-masing untuk menjadi yang terbaik, dan tentunya predikat *whole school*, atau predikat terbaik menyeluruh menjadi impian seluruh peserta.

Di bagian *lobby* hotel, terlihat puluhan stand pameran berdiri. Stand-stand tersebut memamerkan hasil produk dan kerajinan siswa dari berbagai Sekolah Dasar. Cukup unik dan menarik, ada produk yang terbuat dari barang-barang bekas, seperti dari bungkus kopi, bungkus pencuci piring, bungkus minyak

goreng dan lain-lain. Beberapa karya siswa dari anyaman, lukisan, hiasan dinding dari beras, padi dan kacang-kacangan terlihat menghiasi stand pameran. Ada pula kerajinan yang terbuat dari kertas semen.

Saat pembukaan dan penutupan yang berlangsung, peserta seolah dihipnotis oleh apiknya seluruh sajian acara dengan menyuguhkan sendra tari, tarian tradisional, lagu oleh siswa, dan lain sebagainya. Bahkan saat malam penutupan, tak terlihat peserta beranjak meninggalkan tempat kegiatan hingga acara benar-benar usai. Padahal saat itu, acara berakhir dan ditutup pada jam 11 malam lebih. Mereka masih melanjutkan dengan foto-foto dan bersenda gurau merayakan kemenangan. Hingga pukul 12 malam, ruangan baru benar-benar sepi.

Perhelatan LBM SD tahun 2017 ini, memunculkan beragam pendapat dari kalangan kepala sekolah. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:



Hasnah, M.Pd, **Kepala SDN 20 Pekanbaru, Riau**

MENERAPKAN PEMBELAJARAN ABAD 21 DENGAN 4C

Menurut saya LBM SD perlu diteruskan untuk tahun-tahun mendatang karena masih sangat relevan. Dengan adanya LBM SD sekolah di Indonesia berlomba-lomba memperbaiki mutunya, baik bidang manajemen, pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Manfaatnya bisa meningkatkan mutu sekolah, mutu guru, hingga mutu peserta didik yang ada di sekolah.

Kami mengikuti LBM pada kelompok SD Negeri rintisan PPK, kami harus bersaing dengan 21 sekolah rintisan PPK lainnya, dan itu sekolah terbaik semua. Dan alhamdulillah, kami terpilih dengan nilai cukup memuaskan dan mendapat predikat menyeluruh. Menurut kami, keunggulan yang ada di sekolah karena kami sudah menerapkan pembelajaran abad

21 yang memacu kompetensi siswa dengan 4C (kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi). Pembelajaran ini menghasilkan siswa kami banyak meraih prestasi. Selain itu, dari sisi manajemen, kami telah menerapkan MBS terpadu yang disusun sekolah sendiri dengan mengacu pada peraturan daerah dan pusat, kami rapatkan dengan seluruh warga sekolah kemudian membagi tugas yang masing-masing ada koordinatornya.

Dari sisi ekstrakurikuler, kami mempunyai program, visi misi dan struktur organisasi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kesemua itu dikoordinir oleh guru. Bagi siswa yang memerlukan skill khusus dapat memanggil pihak luar untuk membina ekstrakurikuler yang ada.



Sri Sayekti, M.Pd, **Kepala SD Muhammadiyah 1, Kota Surakarta**

VISITASI TERLALU SINGKAT

Alhamdulillah kami dapat mengikuti grand final Lomba Budaya Mutu (LBM) tahun 2017. LBM adalah ajang membangun silaturahmi. Menurut saya salah satu faktor keberhasilan membangun sekolah adalah kemampuan menjalin silaturahmi, belajar, dan membuka diri dari sekolah lain. Kami juga senang di ajang LBM ada Seminar Budaya Mutu, yang materinya sangat bagus. Tetapi sayangnya sekolah kami belum berhasil, tentu ada beberapa faktor penyebabnya, ini yang menjadi evaluasi kami.

Tetapi ajang ini telah memberi kepuasan tersendiri bagi kami karena bisa saling kenal dan mengenal lebih jauh sekolah lain beserta inovasi-inovasi yang dilakukan dalam mengembangkan sekolah. Untuk pelaksanaan LBM sendiri, sayangnya visitasi di sekolah kami menurut kami terlalu singkat. Dan sebaiknya saat grand final profil sekolah terbaik tahun sebelumnya ditayangkan, sekilas saja sehingga bisa menjadi tolok ukur kami.



Evie Amir Abubakar, S.Pd, **Kepala SDN 12 Wonosari, Bolaemo, Provinsi Gorontalo**

PULANG TANPA PIALA TAPI BELANJA IDE BARU

Kami ikut LBM SD tahun 2017 pada kelompok Sekolah Negeri Rintisan PPK. Ini adalah ikut yang kedua kalinya, yang pertama tahun 2016 ikut pada kelompok Sekolah Negeri Daerah 3T dan meraih juara II. Di kelompok SD Negeri Rintisan PPK kemarin jumlah peserta 21 orang, saya cukup deg-degan, karena semua sekolah bagus, mungkin cuma saya dari sekolah terpencil.

Sayangnya kami pulang dengan tangan hampa, belum bisa meraih salah satu penghargaan. Tetapi bukan berarti kami menjadi loyo, kami tetap semangat meningkatkan mutu sekolah yang kami pimpin. Bagi sekolah yang belum berhasil, cukup mendapat pengalaman baru, bisa kembali ke tempat tugas dengan berbagai ide-ide baru, benar-benar terpacu mengelola sekolah lebih baik hingga menjadi seperti sekolah yang meraih juara.



Suhartantiningsih, M.Pd, **Kepala SDN Ditotrunan 1, Lumajang, Jawa Timur.**

NGOS-NGOSAN DIKEJAR PERTANYAAN

Saya dan sekolah kami baru pertama kali ini lolos grand final LBM ini. Masuk grand final saja bagi kami sudah cukup membanggakan, apalagi mendapat juara II rasanya bersyukur banget. Keunggulan pembelajaran di sekolah kami hingga menjadi juara II itu yang tahu tim penilai ya mulai dari portofolionya dan saat kunjungan ke sekolah hingga saat grand final ini. Tetapi saya rasa, karena di sekolah kami menerapkan pembelajaran Enaktif atau pembelajaran secara nyata, itu menurut saya sangat cocok untuk anak SD khususnya di SD Ditotrunan 1. Selain itu kami juga mengenalkan penggunaan IT dengan baik dalam setiap materi pembelajaran.

Pada LBM 2017 kemarin kami ikut pada kelompok SD Negeri Rujukan. Rasanya, saat grand final benar-benar jantungan. Jurinya profesor dan sangat kalem, tetapi membuat suasana sangat mencekam, mungkin karena saking groginya ya. Baru kali ini, sepengalaman saya, ada juri yang begitu mengejar terus dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya lari mungkin sudah ngos-ngosan, jurinya tak berhenti bertanya. Tapi alhamdulillah, dengan kesiapan, kami bisa menjawab semaksimal mungkin sesuai keadaan sekolah kami.



Hadijah Mootinelo, M.Pd,
Kepala SDN 30 Kota Selatan, Provinsi Gorontalo

PENASARAN DENGAN SDN 20 PEKANBARU

Menjadi salah satu grand final LBM untuk SD Rujukan rasanya cukup berat, karena harus bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik dari provinsi lain, apalagi di Pulau Jawa, banyak sekali sekolah bagus. Tetapi, kami dari SDN 30 Kota Selatan Gorontalo datang ke Jogjakarta untuk bersiap menang, kami telah melakukan persiapan dengan cukup matang. Namun, apalah daya, kami harus menerima keputusan dewan juri bahwa sekolah kami masih harus kerja keras lagi.

Tidak menang dan tidak mendapat predikat terbaik untuk seluruh kategori tidak apalah, yang penting pengalaman berharga ini sudah kami dapatkan. Kebetulan kami datang dengan beberapa orang guru di sekolah kami, tujuannya untuk menggali pengalaman

dan ilmu sebanyak-banyaknya. Saya pribadi penasaran dengan SDN 20 Pekanbaru yang meraih whole school. Suatu saat kami akan datang ke sana akan menyerap ilmunya dan melihat langsung bagaimana mengelola sekolah hingga menjadi terbaik pada seluruh kategori. LBM ini sangat menarik dan mampu membangkitkan semangat kerja keras bagi semua kalangan di sekolah. Melalui LBM ini memang ada target penghargaan yang menjadi impian, tetapi saya rasa semua peserta semakin sadar bahwa target utama adalah memperbaiki mutu di sekolah tanpa harus mencari-cari penghargaan. Budaya mutu di sekolah sudah semakin mengakar dan, ini adalah hal positif yang kami lihat dari LBM SD ini.



Drs. I Nyoman Sudiatma, M.Pd.
Kepala SD Widyatmika, Bali

JANGAN SAMPAI ADA GRATIFIKASI

Lomba Budaya Mutu di SD bagi saya sangat relevan dilaksanakan, tetapi akan lebih baik jika dilaksanakan juga di daerah, baru tingkat nasional. Karena tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses yang berujung peningkatan kualitas SDM. Penilaian harus benar-benar obyektif, jangan sampai ada faktor kedekatan panitia maupun tim juri, termasuk jangan sampai ada gratifikasi. Kalau hal ini terjadi maka apapun yang dicanangkan pemerintah tidak akan pernah berhasil. Bisa saja nanti saat diundang grand final peserta tidak hadir lantaran pemenangnya sudah di atas kertas. Penilaian harus benar-benar obyektif.

Sekolah kami mengikuti LBM pada kelompok Sekolah Dasar Negeri Rintisan PPK. Sebetulnya kami rasa semua komponen di sekolah kami cukup menonjol, baik MBS, pembelajaran hingga ekstrakurikuler. Tetapi, yang paling menonjol saya rasa adalah pembelajaran, karena kualifikasi guru kami 80% S1 dan 20% S2, perangkat dan fasilitas pembelajaran cukup lengkap, tiap kelas punya pojok baca, muatan lokal kami ada lima, terdiri dari Bahasa Inggris, Jepang, Bali, Suplemen Sains, serta Suplemen Matematika. Dan sekolah kami terakreditasi amat baik dan tertinggi se-Bali dengan nilai 98. Tetapi sayangnya kami tidak terpilih.



Hudaya, S.Pd., M.Pd.
Kepala SDN 13 Baruga Kendari,
Sulawesi Tenggara

BANYAK GUNAKAN UANG PRIBADI

Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar, sangat baik. Tetapi harus dievaluasi lagi, karena banyak hal yang membuat saya bingung. Kemarin, ternyata gerai pameran dan isinya tidak dinilai, padahal banyak peserta menyiapkan pameran dengan kerja keras, banyak juga yang menyiapkan hasil terbaik karya siswa, termasuk ada karya siswa juara provinsi.

Waktu presentasi cukup singkat, rasanya juri tidak mungkin bisa menggali potensi dan keunggulan sekolah dan lain sebagainya. Sementara kami persiapan cukup lama, sejak bulan tujuh. Ke ajang grand final memerlukan biaya tinggi, kami banyak mengeluarkan uang pribadi. Saran saya sebaiknya grand final ini hanya diikuti satu sekolah tiap provinsi, artinya harus ada seleksi di provinsi.



Jena Alhamid, M.Pd., Kepala SD Inpres Fattolo
Kabupaten Seram Bagian Timur,
Provinsi Maluku

PENYUNTUK MOTIVASI TAPI PERLU JUARA HARAPAN

LBM merupakan pengalaman baru dan sangat menarik yang tidak bisa dilupakan. Kami dari sekolah di pelosok, jauh dari Ibu Kota, dapat bersama dengan sekolah rujukan lain terbaik se-Indonesia. Semua sekolah menampilkan berbagai macam kreasi yang dibuat peserta didik yang menjadi keunggulan sekolah.

LBM bagi kami juga menyuntikkan motivasi bagi sekolah-sekolah. Sebagai peserta grand final LBM, ada baiknya diberikan kesempatan dalam peringkat favorit atau harapan 1,2 dan 3 dan juara umum. Demikian kesan dan sarannya.



Baharuddin, M.Pd

Kepala SD Kemala Bhayangkari, Balikpapan, Kalimantan Timur

BANYAK SEKOLAH TAMAT RIWAYAT SETELAH JUARA

Saya hadir di LBM SD 2017 ini mendampingi sekolah-sekolah binaan di Kalimantan Timur yang masuk grand final, saya bukan peserta, sudah tidak boleh ikut lagi karena sudah whole school Tahun 2015 lalu. LBM SD menurut saya ajang yang cukup bagus karena sangat terasa bagaimana usaha sekolah memperbaiki dirinya memberi layanan pendidikan terbaik. Kepada sekolah yang meraih prestasi terbaik, sebaiknya dan wajib menjaga prestasinya. Artinya, kultur yang sudah dibangun dengan baik harus dipertahankan dan ditingkatkan. Karena, LBM SD digagas pemerintah untuk menghasilkan sekolah berbudaya mutu tinggi. Sekolah-sekolah ini harapannya menjadi contoh bagi sekolah di sekitarnya atau bahkan sekolah dari luar daerah. LBM itu bukan hanya sekedar meraih piala tapi untuk memperbaiki mutu pendidikan Indonesia. ●

12

PEMBELAJARAN ABAD 21

Transformasi Pendidikan Hadapi Perubahan Zaman

Dalam skala internasional, regional dan nasional, abad 21 ditandai oleh berbagai perubahan mendasar. Indonesia mengalami perubahan dalam sistem kenegaraan, pemerintahan, bahkan kemasyarakatan dan kebudayaan seperti adanya desentralisasi, otonomi daerah, demokrasi serta bonus demografi.

Indonesia pun mengalami keterbukaan dan interaksi global yang semakin intensif dan masif. Bagi Indonesia, pada tahun 2015 merupakan tahun terakhir agenda kebijakan Pendidikan untuk Semua (Education For All), Tujuan Pembangunan Milenium (Milenium Development Goals), dan agenda pendidikan nasional.

Sehubungan dengan itu, sendi-sendi pendidikan nasional perlu ditata kembali atau ditransformasikan sedemikian rupa, sehingga pendidikan nasional Indonesia semakin sanggup memberi kontribusi berarti bagi kiprah dan kemajuan Indonesia dalam abad 21. Transformasi pendidikan nasional Indonesia itu bertujuan untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas berbagai tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru sebagai konsekuensi berbagai keadaan kekinian.



Foto: Mukti Ali



KURIKULUM 2013

Salah satu langkah untuk menghadapi tantangan tersebut, mulai tahun pelajaran 2013/2014, Pemerintah memberlakukan Kurikulum 2013 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2006. Di bawah kepemimpinan Drs. Wowon Widaryat, M.Si, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melakukan berbagai kebijakan untuk melaksanakan Kurikulum 2013 agar sesuai dengan harapan.

Pada Bulan Desember 2015, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Pusat Penilaian Pendidikan dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan) telah menyusun dan menerbitkan Panduan Penilaian pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, di antaranya adalah Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar (SD).

Panduan penilaian tersebut dipergunakan sebagai rambu-rambu bagi para pendidik dan satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, juga menjadi pedoman untuk merencanakan, melaksanakan, mengolah, dan membuat laporan hasil penilaian secara akuntabel dan informatif.

Panduan Penilaian pada Sekolah Dasar (SD) memudahkan pendidik dan satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan serta memanfaatkan hasil penilaian baik aspek sikap, aspek pengetahuan, maupun aspek keterampilan. Hal ini sebagai jawaban atas kesulitan guru dalam merumuskan indikator instrumen penilaian, menentukan teknik penilaian yang tepat sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan, dan mengembangkan butir-butir instrumen penilaian dan rubrik penilaian.



BIMBINGAN TEKNIS TIM PENGEMBANG KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASAR TINGKAT PROVINSI

Allium Hotel, Tangerang | 14 s.d 18 Maret 2017

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Langkah ini merupakan jawaban atas tantangan di lapangan, di mana pendidik kesulitan melakukan penilaian sikap dengan berbagai teknik penilaian dalam waktu yang terbatas. Pendidik juga mengalami kesulitan dalam mengolah dan mendeskripsikan capaian hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Satuan pendidikan mengalami kesulitan dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), merumuskan kriteria kenaikan kelas, dan kriteria kelulusan peserta didik. Permasalahan lain yang sering muncul adalah penetapan KKM dan secara teknis menerapkannya pada setiap Kompetensi Dasar (KD) sebagai kompetensi minimal untuk selanjutnya menjadi KKM mata pelajaran. Di samping itu, pendidik mengalami kesulitan dalam menentukan nilai hasil remedial berkaitan dengan KKM.

Melalui artikel berjudul "Tiga Agenda Penting Implementasi Kurikulum 2013," Idris Apandi (Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat) menyatakan pada tahun 2017, implementasi kurikulum 2013 (K-13) memasuki tahun ke-4. Pada tahun 2016 lalu, K-13 sudah dilaksanakan di jenjang Sekolah Dasar (SD) di 37.034 sekolah. Pada Tahun 2017/2018 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan menargetkan sekolah yang melaksanakan K-13 sebanyak 52.572 sekolah, sekitar 35% dari sekolah sasaran baru. Diharapkan sebanyak 60% dari seluruh SD telah menerapkan K-13.

"Ada tiga hal penting yang menjadi agenda atau fokus dalam implementasi K-13, yaitu penguatan pendidikan karakter, penguatan literasi, dan pembelajaran abad 21," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Tingkat Provinsi, Hotel Allium, Tangerang, 14 Maret 2017. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan program pendukung Nawa Cita, yang menjadi visi Presiden Joko Widodo. Ada lima nilai yang menjadi fokus dalam PPK, yaitu nasionalis, integritas, mandiri, gotong rotong, dan religius.

Hamid Muhammad menyampaikan bahwa PPK meliputi tiga hal. Pertama, penguatan kejujuran dan integritas. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur dan berintegritas. Faktanya pada pelaku korupsi justru banyak berasal dari kalangan berpendidikan tinggi. Pendidikan yang tinggi tidak selalu identik dengan

kejujuran. Kesenakahan menjadi faktor utama terjadinya di kalangan orang pendidikan memiliki jabatan di lembaga-lembaga pemerintahan. Justru banyak orang yang berpendidikan rendah dan miskin jujur. Walau mereka kondisinya miskin, tapi hatinya kaya, masih memiliki nurani, memiliki rasa takut dan malu yang tinggi.

Kedua, penguatan sikap yang berkaitan dengan kinerja. Bangsa Indonesia dikenal kurang menghargai waktu dan kurang disiplin. Hal ini dapat kita lihat perilaku warga masyarakat di jalan raya. Pelaksanaan rapat yang sering terlambat karena peserta banyak yang terlambat hadir alias jam karet, terlalu banyak membuang waktu memperdebatkan yang kurang penting sehingga kurang produktif.

Ketiga, penguatan nasionalisme dan rasa kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa harus dikuatkan kembali. Hal ini bertujuan agar semangat untuk mencintai negeri sendiri semakin tumbuh dan kuat di tengah derasnya pengaruh budaya asing (barat) yang masuk ke Indonesia. Implementasi nilai-nilai religi, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan perlu ditanamkan, dikembangkan, dan dikokohkan kepada seluruh bangsa Indonesia.

Hamid Muhammad juga menegaskan bahwa karakter merupakan fondasi dalam implementasi K-13 sehingga perlu benar-benar diinternalisasikan dalam pembelajaran. Dan tentunya guru adalah sosok kunci yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam implementasinya. Selain itu, perlu diciptakan suasana yang kondusif dalam PPK di sekolah. Hal yang paling utama adalah adanya keteladanan dari kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan.

PEMBELAJARAN ABAD 21

Dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 diharapkan dapat menerapkan pembelajaran abad 21. Hal ini untuk menyikapi tuntutan zaman yang semakin kompetitif. Pembelajaran abad 21 mencerminkan empat hal. Pertama, kemampuan berpikir kritis (*critical thinking skill*). Guru jangan risih atau merasa terganggu ketika ada siswa yang kritis, banyak



bertanya, dan sering mengeluarkan pendapat. Hal tersebut sebagai wujud rasa ingin tahunya yang tinggi. Guru harus memberikan kesempatan secara bebas dan bertanggung bertanggung jawab kepada setiap siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan dan membuat refleksi bersama-sama.

Kedua, kreativitas (*creativity*). Guru perlu membuka ruang kepada siswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Kembangkan budaya apresiasi terhadap sekecil apa pun peran atau prestasi siswa. Hal ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk terus meningkatkan prestasinya. Tentu kita ingat dengan Pak Tino Sidin, yang mengisi acara menggambar atau melukis di TVRI sekian



tahun silam. Beliau selalu berkata “bagus” terhadap apa pun kondisi hasil karya anak-anak didiknya. Hal tersebut perlu dicontoh oleh guru-guru masa kini agar siswa merasa dihargai.

Peran guru hanya sebagai fasilitator dan membimbing setiap siswa dalam belajar, karena pada dasarnya setiap siswa adalah

unik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Howard Gardner bahwa manusia memiliki kecerdasan majemuk. Ada delapan jenis kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan matematika-logika, kecerdasan bahasa, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetis, kecerdasan visual-spasial, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis.

Ketiga, komunikasi (*communication*). Abad ke-21 adalah abad digital. Komunikasi dilakukan melewati batas wilayah negara dengan menggunakan perangkat teknologi yang semakin canggih. Internet sangat membantu manusia dalam berkomunikasi. Saat ini begitu banyak media sosial yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi. Melalui ponsel pintar yang dimilikinya, dalam hitungan detik, manusia dapat dengan mudah terhubung ke seluruh dunia.

Komunikasi tidak lepas dari adanya interaksi antara dua pihak. Komunikasi memerlukan seni, harus tahu dengan siapa berkomunikasi, kapan waktu yang tepat untuk berkomunikasi, dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Komunikasi bisa dilakukan baik secara lisan, tulisan, atau melalui simbol yang dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi.

Komunikasi dilakukan pada lingkungan yang beragam, mulai di rumah, sekolah, dan masyarakat. Komunikasi bisa menjadi sarana untuk semakin merekatkan hubungan antar manusia, tetapi sebaliknya bisa menjadi sumber masalah ketika terjadi miskomunikasi atau komunikasi kurang berjalan dengan baik. Penguasaan bahasa menjadi sangat penting dalam berkomunikasi.

Kegiatan pembelajaran merupakan sarana yang sangat strategis untuk melatih dan meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, baik komunikasi antara siswa dengan guru, maupun komunikasi antarsesama siswa. Ketika siswa merespon penjelasan



guru, bertanya, menjawab pertanyaan, atau menyampaikan pendapat, hal tersebut adalah merupakan sebuah komunikasi.

Keempat, kolaborasi (*collaboration*). Pembelajaran secara berkelompok, kooperatif melatih siswa untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Hal ini untuk menanamkan kemampuan bersosialisasi dan mengendalikan ego serta emosi. Dengan demikian, melalui kolaborasi akan tercipta kebersamaan, rasa memiliki, tanggungjawab, dan kepedulian antaranggota.

Sukses bukan hanya dimaknai sebagai sukses individu, tetapi juga sukses bersama,

karena pada dasarnya manusia disamping sebagai seorang individu, juga makhluk sosial. Saat ini banyak orang yang cerdas secara intelektual, tetapi kurang mampu bekerja dalam tim, kurang mampu mengendalikan emosi, dan memiliki ego yang tinggi. Hal ini tentunya akan menghambat jalan menuju kesuksesannya, karena menurut hasil penelitian Harvard University, kesuksesan seseorang ditentukan oleh 20% *hard skill* dan 80% *soft skill*. Kolaborasi merupakan gambaran seseorang yang memiliki *soft skill* yang matang.

"Diharapkan Kurikulum 2013 mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, dan melahirkan generasi bangsa yang memiliki kompetensi dari sisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis," kata Hamid.

SEKOLAH RUJUKAN

Hamid Muhammad mengungkapkan Direktorat Jenderal Dikdasmen melalui LPMP di setiap provinsi terus melakukan pemetaan, fasilitasi serta supervisi agar sekolah-sekolah dapat memenuhi delapan standar nasional pendidikan dan melahirkan program-program inovasi.

Sejak tahun 2016, menurut Dirjen Hamid, telah dilakukan penguatan melalui sekolah rujukan dan sekolah model yang diharapkan dapat menularkan ke sekolah di sekitarnya. Diharapkan dalam waktu tiga sampai enam tahun, sebagian besar sekolah di Indonesia dapat memenuhi standar nasional pendidikan.

"Sekolah-sekolah tersebut akan menerapkan program penguatan pendidikan karakter (PPK), program literasi, dan program-program lain yang menyiapkan anak didik dapat memiliki keterampilan abad ke-21," katanya.

Layanan pendidikan di sekolah dipandang sebagai sebuah wadah untuk memproses pengembangan potensi peserta didik dan sekaligus pembudayaan nilai-nilai. Karena itu, sekolah perlu memiliki manajemen sekolah yang mampu melayani kebutuhan

peserta didik untuk berkembang, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, dan program pembelajaran yang mengarah kepada pengembangan semua potensi peserta didik.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat, memiliki lebih dari 148.000 sekolah dasar. Kualitas layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar juga bervariasi mulai dari yang berkualitas tinggi sampai ke kualitas rendah. Karena itu diperlukan suatu strategi untuk membuat model-model layanan pendidikan bermutu, yang disesuaikan dengan keragaman kualitas masing-masing SD, yang dapat dijadikan sebagai acuan dan tolok ukur bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pengembangan sekolah dasar rujukan. Sekolah dasar rujukan terbentuk atas dasar keinginan untuk menciptakan sekolah bermutu yang dapat dijadikan model bagi sekolah lain.

Pengembangan sekolah dasar rujukan merupakan upaya untuk menghadirkan sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Dari sisi praktis, sekolah dasar rujukan diharapkan dapat menampilkan praktik-praktik yang baik yang dapat menjadi contoh atau model bagi pihak lain.

Sekolah dasar rujukan diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencakup prinsip demokratis dan berkeadilan, sistemik dan multimakna, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, keteladanan dan kreativitas, kompetensi baca-tulis-hitung, serta partisipatif dalam pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pengembangan sekolah dasar rujukan secara umum bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar yang memenuhi standar nasional pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menjadi *center of excellence* untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara khusus, kebijakan sekolah dasar rujukan dimaksudkan untuk mengembangkan layanan pendidikan bermutu yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi pemerintah maupun pemerintah daerah. Selain itu, pengembangan sekolah dasar rujukan dapat dijadikan sebagai model layanan pendidikan yang bermutu di tingkat kabupaten/kota yang dapat dijadikan contoh bagi sekolah lain melalui diseminasi berbagi pengalaman praktik-praktik yang pembelajaran baik.

Perlu diingat bahwa sekolah Dasar Rujukan merupakan sekolah dasar negeri yang diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan, contoh, atau model bagi sekolah lain di tingkat kabupaten/kota, sehingga sekolah dasar rujukan harus memiliki beberapa karakteristik sebagai sekolah model yang memenuhi delapan standar nasional pendidikan. Dari sisi

standar kelulusan, sekolah dasar rujukan harus memiliki prestasi akademik dan non akademik lebih dibandingkan sekolah lain. Prestasi lulusan peserta didik sesuai atau melebihi standar kompetensi lulusan yang ditentukan. Selain itu, sekolah mampu menyiapkan lulusan peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan khusus dan potensi masing-masing.

Pemenuhan standar isi, sekolah dasar rujukan, dicapai melalui pengembangan standar isi secara integratif dan komprehensif sesuai dengan prinsip pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Tingkat Kompetensi diintegrasikan dengan materi bela negara, hak asasi manusia, inklusifitas, multikultural, keadilan dan kesetaraan gender, disabilitas, jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak, anti korupsi, kolusi dan nepotisme, taat hukum, demokrasi, kewarganegaraan, pelestarian lingkungan, kebencanaan, dan literasi abad 21.

Sekolah dasar rujukan juga harus menerapkan standar proses, melalui pengembangan RPP berdasarkan pemetaan keterpaduan antar Kompetensi Dasar, termasuk menerapkan pembelajaran yang inklusif. Pembelajaran yang dipraktekkan harus dapat menciptakan sekolah yang ramah anak, menumbuhkan karakter dan budi pekerti baik serta memiliki nilai-nilai anti korupsi. Penerapan standar penilaian merupakan salah satu karakteristik sekolah dasar rujukan melalui penerapan prinsip-prinsip penilaian sebagaimana diatur dalam peraturan.





Dari segi peserta didik, pemenuhan standar pendidi dan tenaga kependidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sekolah dasar rujukan. Pendidik yang mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial serta memiliki keterampilan pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan hal yang harus dimiliki oleh sekolah dasar rujukan. Sedangkan kepala sekolah juga diharapkan memiliki kompetensi kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi akademik.

Dalam hal standar sarana dan prasarana, sudah sewajarnya bahwa sekolah dasar rujukan memiliki fasilitas layanan pendidikan yang lebih baik dari sekolah lain di wilayahnya. Artinya, sekolah dasar rujukan memiliki penampilan dan fasilitas yang dapat dijadikan standar pelayanan pendidikan yang bermutu, serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan.

Penerapan manajemen berbasis sekolah merupakan amanat dari Sistem Pendidikan Nasional yang dilaksanakan melalui standar pengelolaan. Karena itu, sekolah dasar rujukan harus dapat dijadikan model penerapan manajemen berbasis sekolah, dengan memiliki rencana pengembangan sekolah yang mencakup rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, dan rencana kerja anggaran sekolah. Pelaksanaan pengembangan sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya perlu melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Pengelolaan manajemen keuangan sekolah efektif, efisien, transparan dan akuntabel merupakan sebagian dari prinsip penerapan standar pembiayaan. Sekolah dasar rujukan harus memiliki karakteristik yang menunjukkan optimalisasi pembiayaan sekolah termasuk penggalan berbagai potensi partisipasi dari masyarakat serta dunia usaha dan industri.



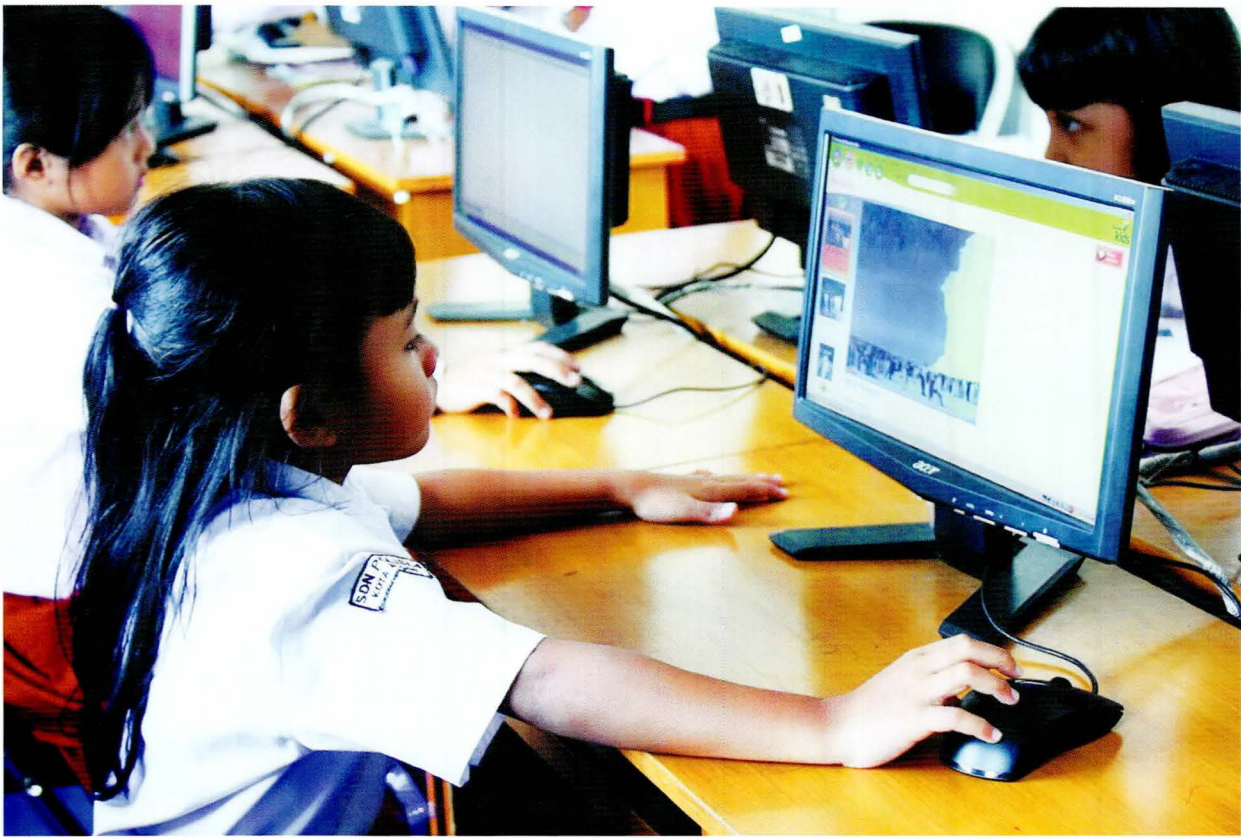
Sebagai sekolah model, sekolah dasar rujukan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menularkan dan mengimbaskan keberhasilan dan prestasi yang diraih kepada sekolah lain di lingkungannya. Pengimbasan dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, diskusi, kunjungan, atau pelibatan sekolah lain dalam kegiatan peningkatan kapasitas sekolah, seperti pelatihan untuk peningkatan profesionalisme guru.

Pengembangan sekolah dasar rujukan tidak dimaksudkan untuk melakukan pembinaan sekolah secara eksklusif, tetapi lebih kepada pembinaan sekolah dasar yang memenuhi standar nasional pendidikan. Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan, pelatihan, pendampingan dan bentuk pembinaan teknis yang lain. Melalui pengembangan sekolah dasar rujukan diharapkan muncul berbagai inovasi upaya peningkatan mutu pendidikan, baik inovasi di bidang manajemen sekolah, peran serta masyarakat, maupun pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, dalam rangka mencapai insan yang cerdas dan kompetitif.

Sekolah Rujukan diberlakukan di 514 Kabupaten/Kota, yang nantinya akan menjadi pusat pembelajaran bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Sekolah Rujukan akan dilengkapi laboratorium komputer.

PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggulirkan gagasan baru untuk menyempurnakan program-program sebelumnya yang diberi nama "Pengembangan Sekolah Dasar Rujukan". Gagasan baru tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa upaya pemerataan dan pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan memerlukan adanya sekolah rujukan sebagai patok duga, contoh, dan model bagi sekolah-sekolah lainnya.



Langkah ini adalah salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan manajemen penyelenggaraan pendidikan. "Sekolah Dasar Rujukan adalah satuan pendidikan di tingkat sekolah dasar yang memiliki keunggulan akademik dan non akademik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan sehingga menjadi tolak ukur (*benchmark*) bagi sekolah-sekolah di sekitarnya," kata Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Drs. Wowon Widaryat, M.Si.

Pengembangan SD Rujukan mengarah kepada terselenggaranya layanan Pendidikan Dasar yang berkualitas melalui pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). SD Rujukan diharapkan menjadi rujukan atau contoh bagi sekolah lain dalam pengembangan pengetahuan dan pelaksanaan praktik-praktik yang baik (*best practices*).

Sekolah Dasar Rujukan menjadi model bagi sekolah dasar yang berada di sekitarnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu. Keberadaan SD Rujukan diharapkan menjadi pemicu peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Indonesia.

Pengembangan SD Rujukan bertujuan: 1. menjadikan satuan pendidikan sebagai patok duga (*benchmark*) dalam pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah Dasar di Kabupaten/Kota; dan 2. mendiseminasikan hasil-hasil kinerja terbaik SD Rujukan ke sekolah lain di Kabupaten/Kota.

Dalam mengembangkan Sekolah Rujukan ini, penggunaan teknologi informasi diharapkan akan semakin mempermudah akses untuk mendapatkan informasi. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang

sangat pesat memberikan dampak positif bagi pengembangan pembelajaran di sekolah terutama di SD Rujukan. Penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran telah menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik baik saat ini maupun masa datang.

Penggunaan TIK dalam pembelajaran sangat menunjang efektivitas dan efisiensi peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah memberlakukan Kurikulum Tahun 2013 bagi seluruh SD Rujukan di Indonesia, dengan merealisasikan pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana peserta didik mampu berkreasi memecahkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran terutama di SD Rujukan tersebut, diperlukan sarana pendukung yang memadai, diantaranya berupa sarana pembelajaran berbasis TIK.

Pemerintah pun memberi bantuan untuk memperlancar pelaksanaan sekolah rujukan ini. Tujuan pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan adalah: 1. Menyediakan sarana pembelajaran TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK di SD rujukan; 2. Melengkapi sarana pembelajaran TIK untuk mendukung

pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK di SD rujukan; 3. Mendukung peran dan fungsi SD rujukan dalam melakukan inovasi pembelajaran; 4. Mendukung peran dan fungsi SD Rujukan dalam mendesiminasikan hasil-hasil kinerja terbaik ke sekolah lain.

Sebagai gambaran, sasaran penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 sebanyak 196 SD Rujukan.

Seperti tercantum dalam buku tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Sekolah Dasar Rujukan tahun anggaran 2017 disebutkan bahwa bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima oleh masing-masing sekolah adalah: laptop berikut perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi perkantoran, sebanyak 25 unit, komputer server 1 unit, layar monitor 1 unit, proyektor 1 unit, printer multifungsi 2 unit, modem router WIFI 5 unit, dan speaker aktif 4 unit .

Hasil yang diharapkan dari pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan adalah: 1. Tersedianya sarana pembelajaran berbasis TIK di SD Rujukan; 2. Terlengkapinya sarana pembelajaran berbasis TIK di SD Rujukan; 3. Tersedianya sarana pendukung bagi SD Rujukan dalam melakukan inovasi pembelajaran; 4. Tersedianya sarana pendukung bagi SD Rujukan dalam mendesiminasikan kinerja hasil terbaik ke sekolah lain.



Karakteristik program Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 adalah: 1. Bantuan yang diberikan kepada Sekolah penerima adalah berupa barang yaitu sarana pembelajaran berbasis TIK; 2. Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik (e-catalogue); 3. Sarana pembelajaran berbasis TIK hasil pengadaan dikirimkan ke sekolah penerima.

Prinsip pelaksanaan program Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 meliputi: 1. Efisien, yaitu mengupayakan penggunaan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran

yang ditetapkan; 3. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017.

Dalam pelaksanaan bantuan ini, sekolah akan dikenakan sanksi jika: 1. Sekolah penerima bantuan yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan laporan penerimaan barang sebagaimana diatur pada juknis, akan dipertimbangkan untuk tidak diberikan bantuan pada program pembinaan Sekolah Dasar berikutnya waktu-waktu yang akan datang; 2. Penyimpangan dalam pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

TEKNOLOGI UNTUK DAERAH 3 T

Untuk melayani materi pembelajaran di sekolah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Wowon Widaryat membuat terobosan baru. Terobosan tersebut berupa pembuatan materi pembelajaran berbasis TIK yang akan disalurkan ke sekolah di kawasan 3 T tersebut.

Pemberian bantuan peralatan TIK demi membantu sekolah khususnya di daerah 3T merupakan gagasan besar yang perlu dikukung semua pihak. Dr. Ngadirin M.Ed dari Direktorat Pendidikan Dasar dalam artikelnya berjudul "Rencana Induk Pengembangan Sekolah Dasar Rujukan," menyatakan Sekolah Dasar Rujukan merupakan sekolah dasar negeri yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menjadi sekolah rujukan/contoh/model bagi sekolah-sekolah lain di wilayahnya.

Kebijakan pengembangan SD rujukan merupakan suatu kebijakan pembinaan, sehingga sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah dasar rujukan juga tidak perlu mengubah nomenklatur. Status rujukan pada sekolah dasar yang telah ditetapkan tidak mengubah administrasi kelembagaan sekolah. Sekolah Dasar Rujukan adalah Sekolah Dasar Negeri, tidak berubah namanya, namun diberi pembinaan khusus melalui pengembangan dan pembinaan internal.

Rencana induk pengembangan SD Rujukan dikembangkan secara komprehensif dengan mengidentifikasi dan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam menemukan program dan strategi



peningkatan layanan mutu pendidikan, yang memerlukan keterlibatan dan dukungan semua pihak. Pengembangan dimulai dengan penyusunan grand disain, sosialisasi, seleksi, penetapan, pembinaan dan pengembangan inovasi, dan diseminasi hasil.

Proses penetapan sekolah dasar rujukan diawali dengan sosialisasi program kepada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, termasuk penyampaian kriteria sekolah dasar rujukan. Kegiatan tersebut diikuti dengan pengajuan 3 (tiga) calon sekolah dasar rujukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, melalui pengiriman portofolio sekolah yang diusulkan secara lengkap. Tahap berikutnya adalah seleksi administrasi (pra-seleksi) yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, berdasarkan kriteria dan aturan yang telah ditetapkan.

Verifikasi ke semua sekolah dasar yang diusulkan sebagai calon sekolah dasar rujukan oleh tim pusat merupakan tahap berikutnya untuk melakukan pengecekan terhadap portofolio yang dikirimkan dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil pra-seleksi administrasi dan verifikasi calon sekolah dasar rujukan, ditetapkan satu sekolah dasar rujukan di setiap kabupaten/kota dengan melibatkan dinas pendidikan provinsi.





Ngadirin menjelaskan bahwa pembuatan materi pembelajaran menggunakan teknologi informatika bertujuan untuk membantu sekolah yang berada di daerah 3 T yang mengalami kekurangan guru. "Materi video dibuat di kantor pusat sejak 2016. Video pembelajaran itu kemudian di upload di server pusat, lalu didownload oleh sekolah rujukan," katanya.

Sekolah rujukan ini akan menerima 25 komputer dan satu server. Dengan peralatan tersebut mereka akan bisa mendownload video dari server pusat. Dengan adanya server di sekolah, maka sekolah akan bisa menyalurkan berbagai materi pembelajaran ke sekolah imbas. "Diharapkan menjadi server lokal untuk melayani sekolah di sekitarnya yang mengalami kekurangan guru. Proses download dari di sekolah difasilitasi dengan bantuan pusat. Setelah didownload disharing ke sekolah imbas," katanya menambahkan. Untuk melayani sekolah kurang guru tersebut, maka mereka bisa belajar dengan menggunakan teknologi seperti *video conference*.

Saat ini ada sekitar 19 video pembelajaran yang sudah dibuat dan telah diseleksi. "Sekarang sudah ada 19 video dan diseleksi oleh teman-teman. Video yang sudah diupload sudah diseleksi dari sisi kualitas gambar, editing dan seterusnya. "Kami juga sudah membuat media pembelajaran animasi sekitar 10 video," katanya.

Saat ini, video dibuat berdasar tema-tema tertentu. Ke depan, video per mata pelajaran

juga akan dibuat. "Misalnya video tentang matematika yang masih terasa sulit bagi guru. Demikian juga dengan pelajaran IPA yang guru-guru masih memiliki konsep yang salah."

Ngadirin menyatakan saat ini pihaknya masih mempelajari software yang tepat untuk meningkatkan kualitas konten pembelajaran tersebut. Video-video yang telah diupload juga bisa didownload oleh siapapun. "Bagi yang nggak punya masalah internet, silakan. Yang kita sedang cari solusi adalah mereka yang ada di sekolah 3 T. Walaupun itu untuk daerah terpencil, tapi sekolah lain juga bisa memanfaatkannya," katanya.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kemendikbud membuat banyak video pembelajaran. "Kita bisa di-link-kan supaya terintegrasi. Ini gagasan besar tapi harus dijalankan setahap. Server di sini harus besar. Kita sedang mencari alat untuk menampung video yang banyak. Kita akan ujicoba kalau nanti sukses bisa dikembangkan ke daerah," katanya.

Konten ini sedang dibuat nanti kita punya standar yang jelas. "Nanti bisa dilombakan konten videonya. Di youtube banyak yang bisa membuat konten bagus. Tentu kita akan sesuaikan dengan ketentuan penganggaran yang ada di sini, karena kita menggunakan anggaran ABBN," katanya. Direktorat Pendidikan Dasar sedang mengadakan lomba membuat video masuk untuk sekolah yang menerima musik Yamaha semua sekolah rujukan. Mereka harus membuat video lalu diupload ke youtube.



PENGUATAN BUDAYA LITERASI

Kurikulum 2013 juga menekankan penguatan budaya literasi. Sebagaimana diketahui bahwa minat baca Indonesia masih rendah. Sebuah survei yang dilakukan Central Connecticut State University di New Britain yang bekerja sama dengan sejumlah peneliti sosial menempatkan Indonesia di peringkat ke-60 dari 61 negara terkait minat baca. Survei dilakukan sejak 2003 hingga 2014. Indonesia hanya unggul dari Botswana yang puas di posisi 61. Sedangkan Thailand berada satu tingkat di atas Indonesia, di posisi 59. (Media Indonesia, 30/08/2016).

Data statistik UNESCO pada 2012 juga menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya satu warga yang tertarik untuk membaca. Menurut indeks pembangunan pendidikan UNESCO ini, Indonesia berada di nomor 69 dari 127 negara.

Keprihatinan kita makin bertambah jika melihat data UNDP yang menyebutkan angka melek huruf orang dewasa di Indonesia hanya 65,5 persen.

Sebagai pembandingan, di Malaysia angka melek hurufnya 86,4 persen. Pada tahun 2015, melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Kemendikbud menjadikan Gerakan Literasi sebagai salah satu bentuk penumbuhan budi pekerti di sekolah. Salah satu bentuknya adalah pembiasaan membaca buku non pelajaran selama 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca di kalangan siswa.

Budaya literasi juga ditumbuhkan melalui integrasi dalam pembelajaran, utamanya dalam penerapan pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan yang dikenal dengan



5M. Skenario pembelajaran juga diharapkan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis (*critical thinking*) dan penilaian hasil belajar pada level kemampuan berpikir tingkat tinggi (*High Order Thinking Skill/HOTS*) siswa di mana arahnya pada menemukan dan menyelesaikan masalah. Hal tersebut tentunya harus tergambar pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru.

Literasi pada jenjang SD harus diperkuat, karena SD adalah fondasi dalam pendidikan siswa. Literasi merupakan pintu gerbang untuk menguasai materi pelajaran. Di kelas rendah (I-III) diajarkan membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*) yang notabene merupakan literasi yang paling mendasar.

Literasi secara sederhana diartikan sebagai keberaksaraan. Dalam perkembangannya, literasi bukan hanya diidentikkan dengan kemampuan *calistung*, tetapi juga pada aspek yang lain seperti kemampuan memilih dan memilah informasi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dalam masyarakat. UNESCO tahun 2003 menyatakan bahwa "Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis.

Literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya."

Walau pengertian literasi sudah berkembang, aktivitas membaca dan menulis merupakan hal yang paling mendasar dalam literasi. Mengapa demikian? Karena memilih dan memilah informasi tentunya dilakukan dengan membaca. Dan aktivitas membaca hanya dilakukan jika ada bacaan yang notabene karya para penulis.

FESTIVAL LITERASI

Sebagai ajang perayaan literasi dan menyosialisasikan lebih masif lagi Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Festival Literasi Sekolah tahun 2017. Festival tersebut resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, 27 Oktober 2017, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta.

"Literasi kini menjadi perhatian dunia internasional. Kompetensi literasi menjadi tolok ukur bagi kemajuan bangsa, dan menjadi kunci bagi pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan Festival Literasi Sekolah ini harus terus dilakukan. Di ruangan ini literasi dirayakan, dan semua terlibat, mari kita rayakan literasi," tutur Mendikbud, Muhadjir Effendi pada pembukaan Festival tersebut.

Mendikbud mengatakan, gerakan literasi ini harus menyeluruh, komprehensif, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. "Gerakan Literasi Sekolah, sebagai bagian dari Gerakan Literasi Nasional, menjadi pilar yang sangat penting karena menaungi siswa dan satuan pendidikan. Jumlahnya yang besar dan tersebar hingga kawasan 3T," ujar Mendikbud.

GLS, kata Mendikbud, tidak bisa berjalan sendiri. Gerakan ini harus di dukung dan bergerak bersama gerakan literasi lain, seperti Gerakan Indonesia Membaca, dan Gerakan Literasi Bangsa. "Dengan sinergi yang baik, Insya Allah Gerakan Literasi Nasional dapat mengubah wajah literasi di Indonesia menjadi baik. Kita adalah bangsa pemenang. Kalau kita

dapat mengembangkan dan memeliharanya, dan menjadikan literasi sebagai kendaraan untuk maju, maka akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dari bangsa lain," tutur Mendikbud.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, mengatakan terdapat lebih dari 30 mata acara yang terjadwal selama tiga hari, di antaranya dialog literasi, pelatihan literasi, dan peluncuran buku. Acara berlangsung di empat area berbeda, yaitu Panggung Utama, Pojok Literasi, Ruang Serbaguna Perpustakaan, dan Ruang Teater Perpustakaan Kemendikbud. Sebagian besar acara dilaksanakan secara paralel sehingga pengunjung dapat memilih acara sesuai minatnya.

Partisipan yang terlibat dalam acara ini adalah Sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan PKLK berbagi praktik baik literasi melalui poster dan stan literasi. Pengunjung dapat bertanya mengenai program literasi yang dijalankan di sekolah. Ada pula sekitar 30 mitra yang terlibat menyemarakkan acara ini antara lain komunitas literasi, penerbit, dan





lembaga internasional dalam bentuk stan literasi, diskusi, dan pelatihan. Panitia juga meluncurkan tujuh buku literasi yang ditulis oleh anggota Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah.

Festival Literasi Sekolah diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan lomba literasi jenjang SD, SMP, dan SMA. Pada jenjang SD, diselenggarakan Apresiasi Sastra Siswa di Bogor pada 26 - 29 Oktober 2017. Acara diikuti oleh 165 siswa SD. Pada jenjang SMP, diselenggarakan Olimpiade Literasi Siswa Nasional di Jakarta pada 26 - 30 Oktober 2017. Acara diikuti oleh 103 siswa SMP. Pada jenjang SMA, digelar Akademi Remaja Kreatif Indonesia di Bogor, 26 - 31 Oktober 2017. Acara ini diikuti oleh 60 siswa SMA.

LOMBA MENULIS

Untuk menggairahkan minat menulis, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mengadakan Lomba Penulisan Artikel Ilmiah

2017. Acara itu dilaksanakan bersamaan dengan digelarnya grand final Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar yang berlangsung di The Rich Jogja Hotel, Yogyakarta. "Lomba penulisan artikel ilmiah di sekolah dasar merupakan salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan pembinaan sekolah dasar," kata Dr. Juandaniisyah SE, MA, Kepala Subdirektorat Kurikulum, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh informasi, masukan, ide, dan gagasan yang bersifat ilmiah yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembinaan. Juga menjadi wahana untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran di Sekolah Dasar, termasuk pendidikan karakter warga sekolah, sanitasi dan kesehatan sekolah, inovasi pembelajaran serta budaya menulis peserta didik.



Foto: Mukti Ali

Kegiatan ini diselenggarakan dengan mengusung beberapa tujuan, diantaranya, untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang beragam komponen penting peningkatan mutu sekolah dasar. Juga untuk menumbuhkembangkan pelibatan publik dalam mewujudkan akuntabilitas tata kelola sekolah dasar, serta memberi apresiasi kepada peserta lomba yang telah menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu sekolah dasar. "Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar terus mencari terobosan baru melakukan perbaikan mutu di SD, salah satunya melalui lomba menulis ini," ujar Juanda.

Ada tiga lomba penulisan, yakni penulisan artikel ilmiah populer, penulisan feature untuk guru dan masyarakat umum. Selain itu, ada lomba artikel ilmiah sederhana (karangan khas) untuk siswa SD. Tiap tema pokok, terdapat beberapa subtema yang bisa dipilih, peserta pun boleh menulis lebih dari dua subtema. Tetapi akan dipilih mana yang terbaik untuk masuk grand final.

Lomba ini berhasil menjaring sebanyak 4.533 naskah, terdiri dari 999 naskah artikel ilmiah populer, 456 naskah artikel feature, dan 3.078 naskah karya siswa. Seleksi tahap awal dilakukan dengan mendeteksi kelengkapan administrasi, kemudian berlanjut ke substansi. Cukup melelahkan seleksi substansi kali ini, lantaran dari ribuan naskah hanya dipilih 65 naskah untuk dihadirkan pada grand final. Total peserta pada grand final ini sebanyak 80 orang, terdiri dari 65 peserta dan 15 orang pendamping untuk siswa.

Juri menguji kedalaman pemahaman dari yang ditulis, sekaligus untuk mengetahui orisinalitas tulisan. Ajang ini dilaksanakan dengan presentasi dan wawancara peserta dengan tim penilai. "Gampang-gampang susah menggali orisinalitas tulisan siswa. Kami harus menggelitik sehalus mungkin,



berputar dulu hingga siswa menjawab secara jujur. Menarik lagi ada beberapa siswa yang sudah melahap puluhan bahkan ratusan buku dan sudah menghasilkan beberapa karya tulis,” kata Syafrudin, salah satu juri dari unsur direktorat pada lomba penulisan pada siswa.

Selain dari unsur direktorat, tim juri juga berasal dari praktisi media di Indonesia. “Naskah boleh bagus, tetapi akan ketahuan jika hanya copy paste, atau bahkan tidak memahami apa yang ditulis. Kita mencari yang benar-benar orisinil, dan isinya mengandung gagasan-gagasan baru. Menentukan pemenangnya tidak gampang, benar-benar bedebat antar juri untuk mempertahankan argumennya,” ujar Saiful Anam, salah satu juri senior yang menilai pada artikel ilmiah populer.

Setelah melalui perdebatan yang melelahkan, berhasil ditentukan nama-nama peserta terbaik. Dalam lomba kali ini, pada tiga kategori lomba ditetapkan 3 peserta terbaik pertama, 5 peserta terbaik kedua, dan tujuh peserta terbaik ketiga.

Pemenang lomba pada tiga kategori (artikel ilmiah populer, feature, dan artikel sederhana siswa) terbaik pertama diberi uang pembinaan sebesar Rp20 juta, pemenang kedua sebesar Rp15 juta, dan pemenang ketiga Rp10 juta. Dan kepada 10 penulis naskah finalis pada masing-masing kategori diberikan uang pembinaan sebesar Rp2 juta. Selain uang pembinaan, peserta terbaik juga mendapatkan piala dan piagam. ●

13

**PENGGALAKAN
KOMPETISI
SISWA**



Berbagai Kompetisi Tingkatkan Kompetensi Siswa

Sebagai langkah strategis untuk mewujudkan generasi bangsa yang lebih baik di masa mendatang, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan berbagai kompetisi yang diikuti siswa dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan prestasi siswa SD dan atau yang sederajat di Indonesia.

Seperti diketahui, pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan telah berlangsung sejak 2001, dan sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan dilimpahkan ke daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Namun demikian, standarisasi mutu penyelenggaraan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Penguatan mutu jenjang sekolah dasar menjadi penting, mengingat pendidikan dasar merupakan fondasi bagi jenjang yang lebih tinggi. Upaya penguatan fondasi tersebut harus ditempuh dengan mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada peserta didik agar mampu berkreasi dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, kemampuan berpikir kritis dan sadar terhadap lingkungan harus diaplikasikan dalam setiap langkah pengembangan ke depan. Salah satu indikator peningkatan mutu pada suatu jenjang pendidikan adalah meningkatnya kemampuan peserta didik baik mengenai substansi pelajaran maupun perkembangan kreativitas, daya nalar, sikap, dan budi pekerti para peserta didik.



Foto: Dok. mondayreview.com

SAINS NASIONAL

Olimpiade Sains Nasional (OSN) menjadi salah satu wahana strategis untuk membentuk generasi yang selalu berusaha mengembangkan daya nalar, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis, sehingga pada saatnya nanti mereka tumbuh menjadi generasi yang berkepribadian kokoh, kompetitif, dan mandiri.

OSN yang terbaru diselenggarakan 2-8 Juli 2017 di Pekanbaru, Riau yang diikuti 1.280 siswa terdiri dari tingkat SD/MI sebanyak 204 siswa, SMP/MTs 396 siswa, dan SMA/MA 680 siswa. Apabila ditambah dengan pendamping, pembina, juri, asisten juri, panitia pusat, dan panitia daerah, maka jumlah keseluruhan partisipan OSN Tahun 2017 sebanyak 2.024 orang.

Lokasi lomba tersebar di beberapa tempat di kota Pekanbaru dan sekitarnya seperti

SMP Darma Yudha, SMA 1 Pekanbaru, SMAN 8 Pekanbaru, SMK Labor, SMA Plus Riau, SMA Cendana, Universitas Negeri Riau, Politeknik Caltek Riau, dan aula Hotel Furaya Pekanbaru.

OSN merupakan kompetisi bergengsi yang melombakan 11 kategori yakni Matematika, Ilmu Pengetahuan Alama (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Informatika/Komputer, Fisika, Kimia, Biologi, Kebumian, Geografi, Astronomi dan Ekonomi. Peserta memperebutkan 420 medali yakni 70 medali emas, 140 perak, dan 210 perunggu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, OSN dapat menguatkan karakter siswa. "Kompetisi sains seperti OSN diyakini dapat menguatkan karakter peserta didik. Kerja keras, tekun, teliti, dan jujur menjadi keniscayaan jika ingin menjadi ilmuwan hebat," kata Muhadjir, Senin 3 Juli 2017.

INTEGRITASMU ADALAH MASA DEPANMU



Foto: Dok. dropshot.com

Mendikbud berharap OSN akan menjadi ajang pemersatu bangsa. Prestasi yang akan lahir di sepanjang kompetisi ini bukan menjadi kebanggaan semata karena berhasil mengalahkan lawan, tetapi OSN menjadi wadah penyatu segala perbedaan. "OSN akan menjadi wadah penyatu segala perbedaan dan menjadi pijakan dalam meraih prestasi gemilang bersama-sama. Jadikan kegiatan ini sebagai arena untuk memacu dan mendorong sesama teman yang datang dari berbagai daerah untuk lebih mempererat wawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad mengatakan, penyelenggaraan OSN penting untuk

mengembangkan bakat, minat, dan prestasi peserta didik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. "Diselenggarakannya OSN juga bertujuan untuk membina karakter peserta didik agar berintegritas, jujur, pekerja keras, menghargai prestasi, tangguh, dan cinta Tanah Air," ujar Hamid. OSN juga dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan bakat, minat, dan prestasi peserta didik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kontingen Jakarta meraih gelar juara umum OSN 2017 yang memperoleh 16 medali emas, 36 perak, dan 21 perunggu. Jawa Tengah berada di peringkat kedua dengan 15 medali emas, 17 perak, dan 31 perunggu. Pada posisi ketiga, prestasi diraih Jawa Timur dengan perolehan sebanyak 10 emas, 20 perak, dan 27 perunggu.



Foto: Dok. sdit.nurul.fikri.sch.id

Selain mendapatkan medali dan piagam penghargaan, semua peserta yang meraih medali emas juga menerima hadiah uang tunai Rp7 juta untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Rp5 juta untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Rp4 juta untuk tingkat Sekolah Dasar (SD). Peserta yang meraih medali perak menerima uang tunai Rp6 juta untuk tingkat SMA, Rp4 juta tingkat SMP dan Rp3 juta tingkat SD. Sedangkan untuk peserta peraih perunggu menerima hadiah uang tunai Rp5 juta untuk tingkat SMA, Rp3 juta tingkat SMP dan Rp2 juta tingkat SD.

Dengan adanya OSN, semangat dan komitmen para praktisi pendidikan di daerah tetap terpelihara dan memungkinkan mereka selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. "Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD/MI dan atau yang sederajat telah dirintis sejak tahun 2003 merupakan salah satu wadah strategis untuk merealisasikan paradigma pendidikan di atas. Pelaksanaan olimpiade secara berkelanjutan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran sehingga

menjadi lebih kreatif dan inovatif," kata Direktur Pendidikan Dasar, Drs. Wowon Widaryat, M.Si.

Tujuan Umum OSN-SD bertujuan untuk menyediakan suatu wahana kompetisi dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bagi peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat, serta sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam penumbuhkembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi berprestasi. Kompetisi ini dirancang sebagai kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Sementara tujuan khusus OSN-SD adalah: a. Menyediakan wahana bagi peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang Matematika dan IPA sehingga peserta didik dapat berkreasi dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian dan kemampuannya; b. Memotivasi peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat untuk selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan norma-norma yang



Foto: Dok. jabaronline.com

sehat sehingga peserta didik dapat memacu kemampuan bernalar; c. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran Matematika dan IPA di SD/MI dan atau yang sederajat; d. Memotivasi institusi/ lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Perjalanan pelaksanaan OSN sudah cukup panjang. Berangkat dari keberhasilan penyelenggaraan IPhO ke 33 di Bali, Dr. Ir. Indra Djati Sidi, MSc, saat itu menjabat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Departemen Pendidikan Nasional meminta ajang prestisius tersebut membawa implikasi positif bagi pendidikan di dalam negeri. Karen itu, ia mengusulkan untuk mengembangkan lomba serupa di tanah air.

Direktorat Dikmenum, Ditjen Dikdasmen, kemudian merealisasikan kebijakan Indra Djati dengan menggelar OSN tingkat SMA di Yogyakarta, pada 2002. Bidang yang dilombakan adalah matematika, biologi, komputer, dan kimia. Bidang fisika tidak

disertakan karena baru saja dilombakan bersamaan dengan olimpiade internasional. Inilah untuk pertama kalinya OSN digelar yang polanya mengacu pada Olimpiade Sains Internasional pada setiap bidang yang dilombakan. Jumlah peserta saat itu sekitar 400 siswa SMA dari seluruh Indonesia.

Setelah sukses menyelenggarakan OSN tingkat SMA di Yogyakarta, berikutnya Indra Djati meminta Direktorat Pendidikan TK-SD dan Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama untuk menggelar kegiatan serupa yang melibatkan siswa SD dan SMP. Kegiatan ini juga menjadi media efektif untuk semakin mempopularkan sains sejak SD. Dengan demikian, anak-anak tidak takut dengan sains sejak dini. "Masa depan kita ditentukan oleh penguasaan sains dan teknologi. Mana ada bidang kehidupan yang tidak tersentuh dengan sains dan teknologi. Kalau kedua bidang ini lemah, bangsa kita tidak akan berdaya dalam menghadapi kompetisi global," kata Indra Djati saat itu yang dikutip dari buku "Indra Djati Sidi, Dari ITB untuk Pembaruan Pendidikan."



Foto: Dok. sultengterkini.com

Untuk mengikuti lomba ini, para siswa mengikuti seleksi ketat di daerah. Pusat hanya memnetukan standard dan polanya agar pelaksanaannya seragam dan serentak untuk semua tingkat. Dengan seleksi ketat ini, maka akan terjadi persaingan sehat antarsiswa, antarsekolah, antarkabupaten/ kota, antar provinsi.

Mulai tahun 2008, peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB) mulai bergabung mengikuti OSN, yang pembinaannya secara nasional ditangani oleh Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Keikutsertaan peserta didik SLB secara kepanitiaan berubah pada tahun 2011 menjadi terbagi dua yaitu kepesertaan PKLK Dikdas dan PKLK Dikmen.

Hal ini sebagai akibat dari dilakukannya reformasi birokrasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomenklatur Pendidikan Luar Biasa berubah menjadi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), yang secara organisasi pembinaannya dibagi menjadi dua, yaitu Direktorat Pembinaan PKLK Dikdas dan Direktorat Pembinaan

PKLK Dikmen. Kegiatan ini semakin semarak dengan masuknya peserta dari kalangan guru pada tahun 2011.

Selain penyelenggaraan OSN, pada tahun 2008 sampai dengan 2012 Direktorat Pembinaan SMK menyelenggarakan olimpiade sendiri dengan nama Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN). Namun pada tahun 2013, peserta didik SMK mulai bergabung ke OSN sehingga sejak itu untuk kategori peserta didik, semua jenis dan jenjang pendidikan formal bersatu menyelenggarakan OSN.

Direktorat Dikmenum, Ditjen Dikdasmen sejak 2003 juga menggelar Festival Sains. Kegiatan ini dikemas dengan menarik menggabungkan unsur hiburan sehingga sains terasa menyenangkan, gaul dan heboh sesuai dengan sifat anak-anak SMA. Acaranya dilaksanakan di mall sehingga lebih menarik bagi siswa. Acara ini juga menjadi wadah berkompetisi antassiswa, antarsekolah, dan antardaerah. Festival ini menjadi ajang efektif untuk mencari siswa berbakat yang bisa mampu berkompetisi di tingkat internasional.



Foto: Dok. dikdasmen.kemdikbud.go.id

OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN)

Selain seorang siswa pandai otaknya, mereka juga harus memiliki raga yang sehat. Untuk itu, kebiasaan berolahraga sangat perlu dikampanyekan sejak dini. Olahraga bisa menjadi ajang kompetisi untuk membiasakan siswa bersifat fair, mau menerima kekalahan dan kemenangan, salah satu caranya adalah dengan mengadakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Drs. Wowon Widaryat, M.Si., mengatakan O2SN merupakan ajang untuk mencari bibit-bibit unggul di dunia olahraga. O2SN juga merupakan sebuah tolok ukur keberhasilan pembinaan dan pengembangan olahraga di SD. Kegiatan dalam bentuk perlombaan atau pertandingan yang kompetitif, merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan motivasi, dan kecintaan terhadap olahraga sedini mungkin. "Antusiasme mereka sangat besar. Artinya, Indonesia memiliki bibit unggul dalam bidang olahraga," ujarnya.

Untuk pertama kalinya, O2SN diadakan di Jakarta, Agustus 2008. Olimpiade olahraga ini diikuti siswa SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Acara dikemas meriah. Pembukaan diakhiri pertunjukkan tarian kolosal dari Sumatera Barat, DKI Jakarta dan Papua. Para penarinya adalah ratusan pelajar SD dan SMP.

Ajang O2SN yang terbaru digelar di Medan, Sumatera Utara, berlangsung sejak 4 hingga 8 September 2017 dan kegiatan lomba akan berpusat di Universitas Negeri Medan (Unimed). Even ini diikuti ribuan peserta dari 34 provinsi se-Indonesia, baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK serta Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). Peserta yang tampil di O2SN Tingkat Nasional 2017 sebanyak 1.904 orang dengan rincian 408 peserta SD, 340 peserta SMP, 544 peserta SMA, 306 peserta SMK dan 306 peserta PKLK. Ada sekitar 4.543 orang yang akan terlibat dalam even ini, meliputi peserta lomba, ofisial, pendamping, pembina, juri/wasit, panitia pusat dan daerah.

Untuk kategori SD, SMP, SMA, dan SMK, cabang olahraga yang dipertandingkan yakni atletik, renang, bulutangkis, pencak silat dan karate. Sedangkan untuk PKLK ada atletik (khususnya lari), bulutangkis, bocce dan balap kursi roda.

Wowon Widaryat mengatakan pembentukan karakter bangsa harus disemai sejak dini terutama di tingkat SD. Pembinaan karakter dimaksud meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan kepribadian, moral, religius serta memiliki keterampilan hidup menuju generasi muda yang potensial, sportif, jujur, disiplin dan bermartabat.

Untuk menyuburkan tumbuhnya karakter bangsa agar tumbuh dan berkembang secara seimbang baik jasmani maupun rohani diperlukan sejumlah wadah yang mampu menggerakkan potensi diri sejak dini. "Kegiatan O2SN SD salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan wadah potensi dini berkembang dan berkreasi menampilkan prestasi, sportivitas, toleransi, empati dan berkreasi dengan karya kreatif dan inovatif," ujar Wowon di Hotel Polonia Medan, Rabu (6/9/2017).

Ia mengakui pembinaan dan pengembangan olahraga di sekolah dasar yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari empat pilar kebijakan pembangunan pendidikan nasional, yang meliputi olah hati

atau kalbu, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang dapat membangkitkan semangat, menumbuhkan sportivitas, persahabatan, dan persaudaraan.

Olahraga juga dapat memiliki arti yang strategis bagi nation and character building atau pembangunan watak bangsa. Dalam perspektif ini, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada penyiapan tenaga kerja, tetapi harus pula mampu membangun seluruh potensi kecerdasan manusia agar berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan pembangunan nasional termasuk pembangunan karakter dan jati diri bangsa.

Kegiatan O2SN SD bertujuan untuk memberikan wadah berkreasi dengan menampilkan karya kreatif dan inovatif peserta didik sekolah dasar dengan mengedepankan sportivitas dalam pengembangan diri secara optimal sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Di sisi lain kegiatan O2SN SD diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan memotivasi peserta didik untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Melalui kegiatan ini pula diharapkan dapat tetap terpeliharanya semangat dan komitmen para praktisi pendidikan di daerah, sehingga memungkinkan mereka selalu berupaya mengembangkan proses pendidikan.



FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N)

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Drs. Wowon Widaryat, M.Si., mengatakan pendidikan di sekolah dasar merupakan bagian dari sistem pendidikan yang menyeluruh dalam rangka pembinaan karakter anak agar tumbuh dan berkembang secara seimbang jasmani maupun rohani. “Pembinaan karakter anak yang dimaksudkan meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan kepribadian, moral, religius serta memiliki hidup menuju generasi muda yang potensial,” katanya.

Salah satu kegiatan untuk menumbuhkan karakter tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N). Kegiatan ini meliputi berbagai jenjang pendidikan termasuk sekolah dasar. FLS2N-SD bertujuan untuk memberikan wadah berkreasi dengan

menampilkan karya kreatif dan inovatif peserta didik sekolah dasar dengan mengedepankan sportivitas dalam pengembangan diri secara optimal sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Di sisi lain kegiatan FLS2N-SD diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, dan memotivasi peserta didik untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.

Melalui kegiatan FLS2N-SD ini pula diharapkan dapat tetap terpeliharanya semangat dan komitmen para praktisi pendidikan di daerah, sehingga memungkinkan mereka selalu berupaya mengembangkan proses pendidikan khususnya bidang seni dan budaya. Kegiatan FLS2N dilaksanakan untuk peserta didik tingkat sekolah dasar, secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. FLS2N diharapkan dapat menjadi salah satu pola pembinaan pendidikan di bidang seni



dan sastra di Indonesia. Di samping itu, akan menjadi ajang pembentukan karakter peserta didik agar mempunyai daya cipta, keuletan hati serta kecintaan seni dan budaya bangsa.

Tujuan diselenggarakannya FLS2N tingkat SD adalah: 1. Memberikan wadah untuk berkreasi dengan menampilkan karya kreatif dan inovatif peserta didik sekolah dasar dalam pengembangan diri secara optimal sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan; 2. Mengembangkan ekspresi seni sesuai dengan norma budi pekerti dan karakter peserta didik yang berbasis budaya bangsa; 3. Meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya; 4. Menanamkan dan membina apresiasi seni dan sastra, khususnya terhadap nilai-nilai tradisi yang berakar pada budaya bangsa; 5. Menumbuhkembangkan sikap sportivitas dan kompetitif peserta didik sejak dini, yang

merupakan bagian dari pendidikan karakter, serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi.

FLS2N adalah kegiatan tingkat nasional yang bertujuan untuk mewadahi para siswa dalam berkompetisi serta mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang seni dan sastra. Para peserta merupakan perwakilan dari masing-masing provinsi. Mereka adalah hasil seleksi mulai dari tingkat sekolah, tingkat kota/kabupaten, dan tingkat provinsi.

Dalam pelaksanaannya, dari tahun ke tahun selalu muncul kreativitas lomba yang berbeda-beda sesuai perkembangan jaman. Pada tahun 2017, FLS2N dilaksanakan di dua kota yakni Surabaya, Jawa Timur dan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digelar pada 25-29 September 2017.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat menutup ajang FLS2N



tahun 2017 di Kupang, menekankan bahwa para peserta tergolong luar biasa karena dari puluhan juta siswa, mereka menjadi yang terpilih mewakili provinsinya. Diingatkannya agar para peserta yang belum meraih trofi juara tidak perlu berkecil hati. "Setiap siswa pasti memiliki keunikan dan keistimewaan. Dan itulah yang membuat kamu kelak menjadi juara," kata Mendikbud.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menjelaskan bahwa FLS2N ini merupakan salah satu cara untuk membangun karakter kebangsaan dan rasa nasionalisme bagi anak-anak Indonesia. "Kita ingin membangun karakter kebangsaan. Melalui pendidikan seni dan budaya, karakter anak-anak itu akan dibentuk. Anak-anak kita akan dilatih berkolaborasi, mengapresiasi, dan berkreasi. Mereka ke sini dengan membawa kekhasan masing-masing, membawa kebinekaan dalam persatuan".

Hamid juga menjelaskan bahwa di ajang FLS2N, potensi setiap anak memperoleh perhatian yang sama. "Kita ingin menghargai potensi anak, baik di bidang sains dan teknologi, olahraga, maupun seni dan budaya," ujarnya.

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Wowon Widaryat berpendapat kegiatan ini sangat penting bagi perkembangan anak untuk membentuk karakter positif. Ia menjelaskan mengapa ajang FLS2N dilaksanakan di dua kota. "Bagi jenjang SD, SMP, dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) dipusatkan di Kota Surabaya. Sementara jenjang pendidikan menengah SMA/SMK diselenggarakan di Kupang," kata Wowon di Surabaya, Senin (25/9/2017).

Ia menjelaskan alasan digelarnya FLS2N secara terpisah adalah untuk memberi kesempatan daerah-daerah agar bisa menyelenggarakan FLS2N. Tahun depan mungkin daerah-daerah yang belum pernah menjadi tuan rumah akan diberi kesempatan. "Potensi-potensi daerah wisata bisa dikunjungi oleh anak-anak sebagai wisata edukasi. Jadi bisa mengenal seluruh Nusantara ini, bisa mengenal budaya-budaya daerah. Jadi, baru kali ini penyelenggaraannya dibagi dua daerah," ujar Wowon.



Foto: Nur Diansyah

Dalam FLS2N khusus SD tahun 2017 ada empat bidang lomba yakni lomba baca puisi, lomba menyanyi tunggal, lomba pantomim, dan lomba seni tari. Seluruh peserta merupakan hasil seleksi tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. "Jadi asalnya per sekolah per kecamatan. Kemudian dijangking tingkat kabupaten/kota, kemudian dijangking tingkat provinsi," ujar Wowon.

Ia mengungkapkan, peserta FLS2N merupakan yang terbaik sekaligus mewakili 26 juta siswa di seluruh Indonesia. Anak-anak yang memiliki bakat bidang seni ini, diharapkan akan berprestasi lagi bukan saja di tingkat nasional tapi juga internasional. Anak-anak SD ini akan terus berkembang di tingkat SMP maupun SMA hingga masyarakat. "Itu seiring dengan program pemerintah untuk memunculkan anak-anak berbakat di tingkat sekolah melalui ekstrakurikuler," tuturnya.

Dia menyebut bakat seni di tiap-tiap daerah bisa muncul, dan lomba-lomba ini diikuti seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Artinya, minat seni itu merata secara nasional. Hanya dua provinsi yang absen karena

masalah persiapan. "Tahun ini sebenarnya transisi berakhirnya pengelolaan SD dan SMP dari tangan provinsi," ucapnya. Atas kondisi itu, ada beberapa provinsi yang kurang siap mengoordinir kabupaten/kota di daerahnya karena masalah pembiayaan. Jadi, ada beberapa lomba yang tidak mereka ikuti.

Ke depan pihaknya akan membiayai dan juga fasilitasi agar semua provinsi bisa ikut acara yang sangat bermanfaat ini. "Diharapkan kabupaten/kota dan provinsi tetap menganggarkan untuk pembinaan. Tetapi untuk penyelenggaraan tingkat nasional itu dari pusat. Untuk mengoordinir provinsi dari kabupaten/kota akan diberi anggaran dari pusat agar tidak ada lagi provinsi-provinsi yang tidak mengirim utusannya," kata Wowon.

Pada mulanya kegiatan ini bernama Jambore Seni Siswa Nasional yang dimulai dari tahun 2004. Kemudian pada tahun 2008 ini di Bandung, Jawa Barat kegiatan tersebut berganti nama baru menjadi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau disebut FLS2N.



Foto: Dok. Kemdikbud.go.id

PRESTASI INTERNASIONAL DI BIDANG SAINS

Prestasi siswa sekolah dasar Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Kali ini tim Indonesia mendulang medali di ajang International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) Tahun 2017 yang diselenggarakan pada 20 sampai dengan 24 November 2017 di Singapura. Pada IMSO tersebut, Indonesia kembali berprestasi dengan meraih 3 emas, 6 perak, dan 3 perunggu, dengan total 12 medali.

Pada Olimpiade Matematika, medali emas diperoleh. Ryan Suwandi (SDS Tzu Chi wilayah 1 Jakarta Utara DKI Jakarta), Yedija Nicholas Kurniawidi (SD Karangturi, Kota Semarang Jawa Tengah), dan Kezia Stevani Gerrard Silalahi (SD Kristen 4 BPK Penabur wilayah 1 Jakarta Timur, DKI Jakarta).

Medali perak di bidang Matematika diperoleh Felicia Grace Angelyn Ferdianto (SD Cahaya Nur Kudus, Jawa Tengah), dan Noriko Khang (SD Nasional KPS, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur)

Medali perunggu di bidang Matematika diraih Matthew Allan (SDS Kristen 10 Penabur, Wilayah 1 Jakarta Utara DKI Jakarta)

Di bidang Ilmu Pengetahuan Alam Indonesia (IPA) memperoleh empat medali perak dan dua perunggu. Medali perak diperoleh Aliyya Pramesthi (SDI - Al Azhar 1 Kebayoran, Jakarta), Calvin Shevchenko (SD Bright Kiddie, Kota Surabaya Jawa Timur), Dilan Andanaputra Yusgiantoro (SDS Pangudi Luhur, Jakarta), dan Latif Anwar (SD Islam Terpadu Azzahra, Kab Sragen Jawa Tengah).

Sedangkan medali perunggu bidang IPA diperoleh oleh Arimbi Beta Kurniasari (SD Muhammadiyah Program Khusus. Kab. Boyolali. Jawa Tengah), dan Iqbal Firmansyah (SDIT Al Ummah Kab. Jombang, Jawa Timur).

Dalam IMSO di Singapura tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan tim yang terdiri Leader, 2 Deputy Leader, 2 Pembina, dan 12 siswa.



David Shane Goh
Peraih emas matematika IMSO 2016



Nabiel Shafa
Peraih emas sains IMSO 2016

Olimpiade tingkat internasional ini diikuti oleh perwakilan dari 22 negara, yakni Brunei Darussalam, Bulgaria, China, Hongkong, Nepal, India, Iran, Kazakhstan, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Mongolia, Belanda, Singapura, Afrika Selatan, Srilanka, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Filipina, Vietnam, serta Indonesia. Indonesia dalam kesempatan ini mengirimkan 12 delegasinya yang terdiri dari 6 anak bidang IPA dan 6 anak bidang Matematika.

JUARA OSN MATEMATIKA

Siswa yang dikirim ke ajang di Singapura ini sebelumnya adalah para juara di kompetisi tingkat nasional di tanah air. Ryan Suwandi dari SDS Tzu Chi Wilayah 1 Jakarta Utara yang memperoleh emas di Singapura adalah peraih The Best Overall untuk matematika pada ajang Olimpiade Sains (OSN) di Pekanbaru 2017.

Yedija Nicholas Kurniawidi, siswa SD Karangturi Kota Semarang, Jawa Tengah mengalami kemajuan prestasi. Ia meraih emas di Singapura, lebih baik dibanding raihan medali perak bidang Matematika di OSN 2017.

Prestasi lebih bagus juga diperoleh Kezia Stevani Gerrard Silalahi. Siswa SD Kristen 4 BPK Penabur Wilayah 1 Jakarta Timur DKI Jakarta itu memperoleh perak bidang matematika di OSN 2017 tapi ia kemudian mampu meraih emas di Singapura.

Sedangkan Felicia Grace Angelyn Ferdianto dari SD Cahaya Nur Kudus Kab. Kudus Jawa Tengah adalah peraih emas di OSN 2017 dan kembali berprestasi di IMSO Singapura dengan medali perak di bidang matematika.

JUARA OSN IPA

Prestasi cukup bagus diraih Calvin Shevchenko dari SD Bright Kiddie Kota Surabaya, Jawa Timur yang memperoleh perak di IMSO Singapura. Sebelumnya ia memperoleh emas di OSN 2017.

Dilan Andanaputra Yusgiantoro SDS Pangudi Luhur Wilayah 1 Jakarta Selatan juga meraih perak bidang IPA di IMSO Singapura. Prestasinya ini cukup bagus mengingat ia juga peraih perak di OSN 2017.

Peraih perak IMSO 2017 bidang IPA lainnya diperoleh Aliyya Pramesthi, pelajar SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Wilayah 2 Jakarta Selatan. Pada ajang OSN 2017, ia memperoleh medali perak juga.

Peraih perak selanjutnya di bidang IPA di IMSO Singapura adalah Lathif Anwar, siswa kelas 6 SDIT Az Zahra Sragen, Jawa Tengah. Lathif yang bertempat tinggal di Dedekan 02/1 Pelemgadung Karangmalang tersebut telah menyabet emas di ajang OSN tingkat nasional 2017. Kemudian mengikuti seleksi International



Foto: Dok. suararakyat.news

Mathematics and Science Olympiade for Primary School (IMSO) di Jakarta yang terdiri dari empat tahap.

Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober, anak dari pasangan Bapak Supriyadi dan Ibu Sumarni, dinyatakan lolos seleksi. Hal ini berarti Lathif mewakili Indonesia untuk maju tingkat internasional. Sebelum berlaga, Lathif beserta rekan-rekannya harus mengikuti serangkaian pembinaan yang dilakukan oleh tim lomba SDIT dan tim dari pusat.

Para pelajar yang menjadi juara OSN ini adalah hasil saringan ketat mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Para juara OSN ini kemudian diberi kesempatan untuk menjajal kompetisi di tingkat internasional. Salah satunya adalah IMSO di Singapura.

PERTASI IMSO 2016

Pada International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) ke-13 yang berlangsung di Hotel Allium, Tangerang sejak tanggal 9-13 November 2016, siswa Indonesia juga meraih banyak penghargaan.

Kala itu, acara dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Indonesia selaku tuan rumah berhasil menyabet 4 medali emas, 8 medali perak, dan 15 medali perunggu untuk bidang Matematika. Sedangkan pada bidang Sains mendapatkan 4 medali emas, 6 medali perak, serta 11 medali perunggu. Total sebanyak 48 medali berhasil dipersembahkan putra-putri terbaik bangsa.

Dalam sambutannya, Presiden mengaku bangga dengan adanya kompetisi IMSO. "Saya bangga untuk melihat anak-anak muda yang merupakan bibit-bibit calon pakar matematika dan para sains dunia yang mengikuti IMSO ini.



Foto: Dok. cdn.sindonews.net

Karena pakar matematika dan sains adalah kerangka utama kemajuan dan inovasi,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Presiden meminta kepada para delegasi yang terdiri dari 22 negara dapat saling bertukar pikiran, bertukar ilmu, dan bertukar pengetahuan sehingga dapat bermanfaat bagi kebaikan serta memperkuat rasa percaya diri dengan semangat untuk berbagi ilmu antara delegasi.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan, mengingat ilmu pengetahuan adalah dapat bermanfaat bagi kebaikan bersama, hendaknya ilmu tidak hanya disimpan dalam pikiran, dan untuk diri sendiri. “Jangan hanya pintar untuk diri sendiri atau pribadi, tapi bermanfaat untuk semua kalangan,” ucapnya.

Presiden berpesan, meskipun dalam ajang kompetisi tersebut ada perebutan medali, namun, yang paling penting adalah kegiatan ini menjadi ajang saling bertukar ilmu dan pikiran. “Ajang berbagi pengalaman, berbagi ilmu antar delegasi. Ini dijadikan kompetisi

yang positif. Yang penting adalah, semakin memperbanyak pengalaman berharga, dan kaya ilmu pengetahuan,” jelasnya.

Raden Ridwan Hasan Saputra, selaku Ketua Penyelenggara IMSO 2016 mengatakan, kompetisi siswa bidang Matematika terdiri atas tiga tes, yaitu tes teori 1 (isian singkat), tes teori 2 (essay), dan tes eksplorasi. Sedangkan untuk bidang IPA mendapat tiga tes, yaitu tes teori 1 (pilihan ganda dan isian singkat), tes teori 2 (essay), dan tes eksperimen.

Ridwan mengatakan, kegiatan ini merupakan kompetisi bergengsi di tingkat internasional karena tingkat kesulitan soalnya sangat tinggi, selain itu juga diikuti banyak negara. Total peserta yang mengikuti kompetisi ini mencapai 22 negara, termasuk Indonesia. “Sebetulnya dalam kejuaraan ini ada 23 negara. Tapi karena kondisi keuangan di negara Senegal sedang kurang baik. Maka negara tersebut tidak mengirimkan pesertanya dalam ajang internasional ini,” jelasnya.



Foto: Dok. darmayudha.com

Salah satu siswa yang berhasil menggondol medali emas bidang matematika adalah David Shane Goh, siswa SDK 11 Penabur Jakarta. "Soalnya lumayan susah, lumayan gampang. Tapi aku lupa gimana bentuk soalnya. Tapi yang penting aku menang," ujar David.

Lain lagi yang dirasakan oleh M. Nabel Shafa, siswa SDS Islam Terpadu Mutiara Pinggir Riau, yang meraih medali emas bidang Sains. "Saya berharap prestasi ini dapat memotivasi teman-teman saya. Bahwa kita semua berprestasi hingga kancah internasional," ungkapnya.

PRESTASI OLAHRAGA INTERNASIONAL

Di bidang olahraga, siswa Indonesia juga berprestasi di tingkat internasional. Enam siswa Sekolah Dasar (SD) mengharumkan nama Indonesia di ajang 2nd Edition of International Karate Open of Province de Liege

2017 yang diselenggarakan di Herstal, Belgia, pada 8-14 November 2017. Pada ajang tersebut tim Indonesia meraih empat emas, dua perak, satu perunggu untuk tim SD. Sedangkan tim SMA meraih dua emas, satu perak, dan dua perunggu. Mereka mampu bersaing bersama peserta dari 20 negara.

Empat medali emas dari jenjang SD diperoleh dari beberapa kelas. Emas pertama dari KATA Putra (Male U14) diraih oleh Hazel Ramadhan, siswa SD Busowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Emas kedua dari kelas KATA Putra (Male U12) diraih oleh Buffon Julianto Sinaga, siswa SD Marsudirini, Kabupaen Siak, Riau.

Selanjutnya, dua medali emas sekaligus yang disumbangkan oleh Luvena Milano Setiyaka. Siswi SD Lazuardi Kamila GIS, Surakarta, Jawa Tengah ini meraihnya pada kelas KATA Putri (Female U12) dan KUMITE Putri (Female U12).



Foto: Dok. menara62.com

Dua medali perak berasal dari Syafira Ramadhani pada kelas KATA Putri (Female U12), siswi SDN 004 Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau dan Denis Darmawan, siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'arif Mangunsari, Salatiga, Jawa Tengah dari kelas KUMITE Putra (Male U14). Selebihnya, satu medali perunggu diraih oleh Gebrina Najwa Andini, siswa SDN 27 Banda Aceh pada kelas KATA Putri (Female U12).

Ada dua kelas dalam turnamen karate tersebut, yaitu KUMITE dan KATA. KUMITE adalah pertandingan individu atau perorangan yang dilakukan dalam karate atau tanding melawan karateka lain. Sedangkan KATA adalah pertunjukan jurus dimana harus

menunjukkan kelembutan, tenaga, dan kecepatan seperti halnya kelembutan, ritme, dan keseimbangan. Dalam KATA terdapat nomor beregu tim terdiri dari tiga orang yang harus mendemonstrasikan kemampuan di semua aspek dari penampilan KATA secara bersama-sama.

Tim Karate Pelajar Indonesia secara keseluruhan berhasil menempati peringkat ke-4 klasemen perolehan medali. Urutan pertama ditempati oleh Belgia, selanjutnya Perancis serta Jerman. Enam negara di bawah Indonesia adalah Belanda, Luxembourg, Iran, Inggris, Polandia, dan Portugal.



Buffon Sinaga,
Juara 1 Karate antar negara yang
berlangsung di Belgia

Foto: Dok. merdeka.com dan
riaukepri.com

BERLATIH SEJAK KECIL

Buffon Sinaga, seorang murid Sekolah Dasar Swasta di Kecamatan Perawang, Kabupaten Siak, Riau, sangat senang bisa mengharumkan nama Indonesia di tingkat Internasional. Anak pasangan dari Tohap Sinaga dan Zuniar Simbolon ini meraih juara 1 karate antar negara yang berlangsung di Belgia. Dia bergabung dengan Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) Siak sejak tiga tahun lalu. Kala itu, Bufon masih duduk di kelas dua Sekolah Dasar.

Hingga kini, prestasi anak pedagang yang membuka warung kopi di desanya itu, termasuk luar biasa. Sebab, baru sekali warga Riau ikut event tingkat nasional dan keluar sebagai pemenang mewakili Indonesia di event Internasional. Pada 2 November 2017 lalu, dia berangkat ke Jakarta bergabung dengan atlet Indonesia lainnya, dan 9 November terbang menuju Belgia.



Foto: Dok. analisariau.com

Siswa lain, Hazel Ramadhan, pelajar SD Bosowa Bina Insani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, berhasil menorehkan prestasi di ajang kejuaraan yang sama. Perjuangan Hazel dimulai pada O2SN cabang karate tingkat Kecamatan Tanah Sareal, Desember 2016. Ia berhasil meraih juara 1. Bulan Maret 2017, ia berhasil menjadi juara pertama lomba karate tingkat Kota Bogor. Di ajang lomba karate tingkat Provinsi Jawa Barat pada bulan Agustus 2017, ia juga merebut juara pertama. Pada bulan September 2017, Hazel berhasil menjadi juara pertama lomba karate tingkat nasional. Puncaknya adalah lomba tingkat internasional pada event "2nd Edition of International Karate Open of Province de Liege Tahun 2017" di Herstal, Belgia.

Syafira Ramadhani (11) juga sukses meraih juara II pada kompetisi bergengsi tersebut. Juara ini tidak diraihinya dengan mudah. Sebelumnya dia bertarung dengan karateka asal Belanda pada kelas KUMITE. Dia kalah dalam pertarungan tersebut. Tidak cuma kalah, Fira juga mengalami cedera yang cukup parah. Bagian pinggang dan lututnya bermasalah dan bahkan karena itu dia sampai dirawat oleh tim medis.

Hendra, ayahnya menjadi figur yang berperan penting dalam membangkitkan semangat Fira. Dia mengatakan, sebenarnya putrinya itu tidak mau bertanding lagi. Namun, dia tetap membesarkan hati Fira dan membujuknya untuk melanjutkan pertandingan. Alhasil, Fira mampu mempersembahkan juara II pada kelas KATA U 12.



APRESIASI

Atas prestasi yang membanggakan itu, Buffon Sinaga mendapat penghargaan dari Bupati Siak, Riau, Syamsuar. Bupati berjanji membangun rumah dan kios untuk orang tua Buffon. "Atas prestasinya, saya akan membangunkan rumah dan kios untuk orang tua Buffon. Nilai ini rasanya belum seberapa atas prestasinya yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional," kata Bupati Siak, Syamsuar kepada media.

Rumah orang tua Buffon yang ada sekarang terbuat dinding papan bekas, dijadikan tempat warung berjualan. "Anak (Buffon) kita ini memang dari keluarga yang tak mampu. Walau demikian prestasinya luar biasa," kata Syamsuar.

Bupati mengutus petugas datang ke rumah Buffon. "Saya suruh tanyakan, apa kira-kira yang diinginkan orangtuanya," kata Syamsuar.

Dari keterangan utusan Dinas Koperasi, kata Syamsuar, orang tua Buffon ingin punya rumah yang layak huni. Warung minuman yang dikelola orangtuanya mulai lesu pembeli, sehingga ibu dari Buffon berharap bisa membuka dagangan di pasar yang dibangun Pemkab Siak.

"Lewat UMKM Dinas Koperasi Siak, akan kita berikan satu kios untuk orang tuanya. Begitu juga modalnya untuk usaha," kata Syamsuar.

"Semoga saja dengan punya kios di pasar, bisa menambah penghasilan buat orang tuanya," katanya.

Tohap Sinaga (46) ayah Buffon mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Bupati Siak. "Saya tak tahu mau ngomong apa lagi, saya ucapkan terima kasih sama Pak Bupati Syamsuar yang mau membantu kami sekeluarga," kata Tohap.



PRESTASI BIDANG SENI

Sebanyak 14 anak-anak Sekolah Dasar berkumpul untuk mengerjakan berbagai karya kreatif di sebuah ruangan di lantai dua, Hotel Ibis, Slipi, Jakarta Barat. Ketika Majalah Sekolah Dasar menemui mereka awal Mei lalu, terlihat mereka sedang sibuk menggunting kertas, mengelem kardus, melukis di atas tripleks, menyambung pipa paralon, mengecat kayu dan kesibukan lain.

Meski mereka begitu serius mengerjakan semua itu, senyum dan tawa khas anak-anak tetap terndengar. Para siswa tersebut sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba Odyssey of The Mind (Pengembaraan Pikiran), di Michigan, Amerika Serikat 24-27 Mei 2017. Mereka berlatih bersama para pembimbing yang berasal dari berbagai bidang, yakni

Muhsin, S.Sn, M.Sn (pengajar seni rupa Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB), Septian Dwi Cahyo (seniman pantomim), Hartati (Dewan Kesenian Jakarta), serta Dyah Ratna Permatasari (Direktur Doctor Rabbit Science Inc).

Tangan terampil anak-anak itu berhasil membuat tiruan lukisan kuno karya Vincent Willem van Gogh, bebatuan dari styrofoam, kotak besar berkerangka pipa paralon, topi-topi kertas, dan asesoris lain yang serba unik. Semua karya tersebut akan dibawa ke Amerika dalam rangka mengikuti lomba Odyssey of The Mind berskala internasional tersebut. Lomba yang diikuti ratusan tim dari berbagai negara ini terbuka untuk TK sampai perguruan tinggi. Namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini hanya mengirimkan tim anak-anak Sekolah Dasar.



Salah satu pembimbing, Dyah Ratna Permatasari menyatakan Odyssey of The Mind adalah kompetisi yang mengadu kreativitas, memadukan ilmu pengetahuan, rekayasa, teknologi, dan seni. Lomba ini sudah berlangsung sejak lama di Amerika, namun Indonesia baru berpartisipasi sejak 2012.

Pada tahun ini, panitia lomba menawarkan lima problem yang harus dipecahkan oleh tim peserta melalui solusi kreatif. Problem pertama, tim diminta merancang, membangun, dan menjalankan kendaraan dari parkir multi level ke tempat pertemuan rahasia. Kendaraan akan menempuh rute berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.

Problem kedua, peserta lomba diminta merancang, membangun, dan mengoperasikan robot yang menunjukkan

karakteristik manusia saat melakukan tugas.

Problem ketiga, peserta diminta menciptakan dan menyajikan pertunjukan tentang perjalanan waktu yang menampilkan karya seni hebat dari masa lalu hingga masa depan.

Problem keempat, peserta diminta merancang, membangun, dan menguji struktur yang terbuat dari kayu balsa dan lem untuk menyeimbangkan dan mendukung bobot sebanyak mungkin.

Problem kelima, tim diminta menyajikan pertunjukan lucu tentang superhero yang bertugas menyelamatkan kreativitas dari gangguan para penjahat.

Dalam lomba kali ini, Indonesia akan mengirim dua tim masing-masing terdiri dari

tujuh anak. Satu tim akan berlomba pada problem ketiga dan tim lainnya berkompetisi di problem kelima. "Mereka akan tampil selama delapan menit," kata Dyah yang sudah melatih tim Odyssey Indonesia sejak 2012.

Tim problem ketiga akan menampilkan kisah perjalanan waktu yang menggambarkan perkembangan karya seni dari jaman kaisar China, masa van Goh, hingga ke masa depan. Untuk keperluan tersebut, anak-anak sudah membuat kotak mesin waktu yang membawa penonton ke masa lalu dan masa depan. "Pada masa depan, akan muncul seniman asal Indonesia namanya si Udin, seorang pembuat patung. Tapi bukan sembarang patung. Patung karya Udin ini unik karena bisa bergerak-gerak," kata Dyah tersenyum lebar.

Sementara tim problem kelima akan menampilkan superhero asal Indonesia, Si Tompel. "Ide Si Tompel ini juga seratus persen dari anak-anak. Kebetulan salah satu peserta, Nibras punya tompel kecil di wajah. Maka Nibras pun mengusulkan dirinya jadi superhero," kata Dyah mengisahkan.

Selama tampil, rasa humor juga dinilai. "Jadi harus ada lucunya. Si Tompel kita bikin punya banyak tompel di wajahnya. Tapi tompelnya sangat ampuh. Misalnya dengan menyentuh tompel itu, orang sakit bisa sembuh," lanjut Dyah, sarjana Kimia Universitas Indonesia tersebut.

Dewan juri menilai penampilan tim dari segala sisi, seperti kreativitas, kekompakan, kerapian penampilan, kerjasama dan seterusnya. "Bahkan perilaku mereka juga dinilai, misalnya apakah saling menolong satu

sama lain atau tidak," kata Dyah. Juri juga sangat memperhatikan keaslian dari properti panggung karya anak-anak. Jika ketahuan salah satu properti dibuatkan oleh orang lain, maka tim akan mendapat pengurangan nilai. Seluruh biaya pembuatan properti tidak boleh melebihi US\$125 atau sekitar Rp1,6 juta. Karena itu tim Indonesia banyak memanfaatkan barang-barang bekas.

Pembimbing lain, Muksin, S.Sn, M.Sn., menyatakan tim Indonesia cukup bersaing, karena mereka adalah gabungan dari juara Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, Olimpiade Sains Nasional, dan International Mathematic and Science Olympiad. "Ini merupakan perpaduan antara otak kanan dan otak kiri. Mereka akan mampu bekerja bersama dalam memecahkan problem yang dihadapi dalam kompetisi," kata pakar di bidang Seni Lukis dan Teknik Kertas Seni ini.

Lomba Odyssey of The Mind sangat penting bagi perkembangan anak. "Kompetisi ini melatih berfikir kreatif dalam menghadapi segala persoalan, keberanian tampil, kerja sama, kemandirian dan tanggungjawab. Selain itu merupakan pengalaman penting yang tak pernah terlupakan atas prestasi yang pernah mereka raih untuk masa depan mereka," katanya.

Dalam lomba tahun ini, tim Indonesia menargetkan menjadi juara. "Setidaknya jangan lebih rendah dari tahun lalu yang mampu menjadi nomor lima dunia untuk kategori pementasan (problem kelima)," katanya. Lomba 2017 rencananya diikuti 825 tim berasal dari seluruh penjuru Amerika Serikat serta 31 negara lain.

& LOMBA GUGUS DEPAN UNGGUL FESTIVAL PENGGALANG CERIA SEKOLAH DASAR TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017



Foto: Dok. twitter.com/kemdikbud_ri

LOMBA GUGUS DEPAN DAN PENGGALANG CERIA

Dalam rangka menyiapkan generasi yang berkarakter, cerdas dan berdaya saing, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Lomba Gugus Depan dan Festival Penggalang Ceria Tingkat Nasional Tahun 2017. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, tanggal 17-21 Oktober 2017, di Bogor, Jawa Barat. Pembukaan resmi bertempat di Grand Mulya Resort dan Convention Hotel, Bogor, Jawa Barat.

Penyelenggaraan Lomba Gugus Depan dan Festival Penggalang Ceria ini berkat kerjasama antara Kemendikbud dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Dirancang dengan tujuan sebagai berikut:

- Memperkuat pembinaan tata kelola Gugus Depan yang berpangkalan di Sekolah Dasar melalui kegiatan kompetitif Lomba Gugus Depan Unggul.
- Memberikan penghargaan kepada pengelola Gudep yang telah mengelola Gudepnya hingga memiliki keunggulan dalam bidang; Sumber Daya Manusia, Manajemen dan Administrasi, Dana, Sarana, dan Prasarana, Kegiatan, Proses, Prestasi, dan Kemitraan.
- Memperkuat pembinaan peserta didik melalui kegiatan kompetitif-rekreatif Festival Penggalang Ceria.
- Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di bidang keterampilan kepramukaan melalui Festival Penggalang Ceria.



Foto: Dok. tribunnews.com

Sebanyak 34 Gugus Depan terbaik dari tiap provinsi mengikuti kegiatan ini. Sebelum bertanding tingkat nasional, mereka diseleksi terlebih dahulu di tingkat provinsi yang salah satunya berbentuk visitasi, atau kunjungan langsung ke lokasi. Visitasi ini berlangsung pada bulan Agustus 2017 lalu. Total peserta sebanyak 714 orang dengan rincian, 170 peserta dewasa dan 544 peserta anak-anak.

Peserta tersebut tersebar pada dua kegiatan, yakni Lomba Gugus Depan dan Festival Penggalang CERIA. Pada Lomba Gugus Depan, materi lomba berupa presentasi cerita terbaik (best practice) pengelolaan gugus depan, dan pameran keunggulan gugus depan, dan presentasi pengembangan gugus depan. Sedangkan pada Festival Penggalang CERIA pesertanya terbagi dalam dua regu/kelompok, putra dan putri. Terdapat 12 jenis lomba yang harus diikuti regu Penggalang CERIA, meliputi:

- Lomba Tata Laksana Perkemahan
- Lomba Pionering Proyek Gapura Perkemahan
- Lomba Kemampuan Indera Manusia (KIM)
- Lomba Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Lomba Sandi dan Isyarat
- Lomba Membuat Poster
- Lomba Kemampuan Ilmu Menaksir
- Lomba Yell CERIA
- Lomba Sirkuit Ketangkasan
- Lomba Menulis Logbook
- Kuis CERIA Siap Sedia

Setelah berjibaku mengikuti perlombaan, peserta disegarkan dengan suplemen berupa

Tour Edukasi ke Taman Mini Indonesia Indah. Melalui tour ini peserta tersegarkan kembali pikirannya dengan mengenali keragaman budaya Indonesia di TMII tersebut.

Perlombaan Lomba Gugus Depan dan Festival Penggalang Ceria ini dinilai oleh tim penilai yang sudah sangat ahli di bidang kepramukaan. Mereka berasal dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kwarnas Gerakan Pramuka yang dikoordinasi oleh Kakak Prof. Dr. Suyatno, M.Pd. Selanjutnya, dipilih peserta terbaik I, II, III, Harapan I, II, dan III. Kepada peserta terbaik ini diberikan piala, sertifikat dan uang pembinaan.

Untuk Lomba Gugus Depan, besar nya uang pembinaan yang diberikan sebagai berikut:

- Juara I mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp30.000.000,-
- Juara II mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp25.000.000,-
- Juara III mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp20.000.000,-
- Harapan I, II, III mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp15.000.000,-
- Finalis mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp10.000.000,-
- Dan, 23 Gudep peserta lainnya mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp 5.000.000,- tiap Gudep.

Sedangkan besar uang pembinaan untuk juara Festival Penggalang Ceria adalah sebagai berikut:

- Juara I mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp30.000.000,-
- Juara II mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp25.000.000,-
- Juara III mendapatkan dana pembinaan sebesar R 20.000.000,-
- Harapan I, II, III mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp15.000.000,-
- Kepada 23 regu peserta lain yang belum menjadi yang terbaik diberikan uang pembinaan masing-masing sebesar Rp5 juta rupiah.

PILAR PENDIDIKAN KARAKTER

Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Mendikbud, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP dengan pemukulan kentong. Mendikbud menyampaikan pesan yang cukup bermakna. "Air segar di pegunungan tidak akan pernah sampai membasahi tenggorokan kita bila tidak ada lembah, ngarai, dan sungai yang menghantarkannya ke tempat yang memudahkan kita untuk menikmatinya. Demikian pula, semua program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan pernah sampai pada tujuannya, bila tidak ada penghantarnya. Salah satu penghantar itu adalah bapak/ibu dan kakak-kakak yang ada di hadapan saya ini," tulis Mendikbud.



Kontingen kwardajateng dalam Lomba Gudep Unggul dan Festival Penggalang Ceria Putri Sekolah Dasar Tingkat Nasional 2017 meraih Prestasi "Juara 1"

Foto: Dok. kwardajateng

Oleh karena itu, lanjut Mendikbud, melalui Lomba Gugus Depan dan Festival Penggalang Ceria tahun 2017 menyampaikan beberapa hal yang menjadi prioritas Kemendikbud dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemendikbud berkonsentrasi pada Penguatan Pendidikan Karakter sebagai inti dari pendidikan. Oleh karena itu, pilar-pilar pendukung penguatan pendidikan karakter harus kita bangun dan tegakkan

bersama-sama. "Kepramukaan adalah salah satu pilar kuat pendidikan karakter. Melalui kepramukaan, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik anak-anak kita dilatih terus menerus hingga menemukan jati dirinya. Ini adalah proses pendidikan yang mahal," katanya.

Karena itu, Mendikbud berharap kepada kepala sekolah, para pembina pramuka agar senantiasa memperkuat proses pembinaan

adik-adik kita di gugus depan. "Buatlah sanggar-sanggar yang membuat adik-adik kita betah dan nyaman di sekolah. Agar sekolah betul-betul menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita. Agar sekolah menjadi taman belajar yang menyenangkan bagi mereka. Dengan demikian, anak-anak akan belajar dengan kesadaran bukan paksaan, mereka akan tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya."

Pendidikan karakter, lanjut Mendikbud, merupakan jalan panjang yang harus terus menerus diperjuangkan dengan segala daya dan kemampuan. "Janganlah ada pemikiran bahwa ini hanyalah program yang sebentar akan berganti dengan program lain. Pendidikan karakter itu kunci keberlangsungan Indonesia. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan Indonesia di masa depan. Tetapi, dengan menguatkan pendidikan karakter terhadap generasi Indonesia, hal ini dapat menjadi jaminan keberlangsungan Indonesia," Mendikbud menegaskan. "Karena cita-cita kemerdekaan Indonesia bukan hanya untuk seratus tahun, tetapi cita-cita Indonesia merdeka adalah abadi sepanjang masa," lanjutnya.

Dari Lomba Gugus Depan Unggul dan Festival Penggalang Ceria ini, Mendikbud agar nilai-nilai positif dalam kegiatan ini dapat dikembangkan dan disebarluaskan kepada gugus depan lain yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan ini. "Mari kita jadikan gugus depan sebagai garda terdepan penguatan pendidikan karakter di sekolah. Untuk anak-anakku, dimanapun berada selalu saya pesankan, teruslah belajar, belajar, dan belajar. Proses belajar memang selalu melelahkan dan kadang menjenuhkan. Tapi percayalah, Jika kalian tidak sanggup menahan lelah karena belajar, maka bersiap-siaplah menahan derita karena kebodohan," ujar Mendikbud. "Indonesia gemilang membutuhkan generasi terpelajar dan terampil yang kuat karakter keindonesiaannya, kokoh karakter kebangsaannya, dan tangguh jiwa raganya dalam menghadapi segala tantangan di masa depan".



Dr. Thamrin Kasman, SE., M.Si.,
Sekretaris Ditjen Dikdasmen

Foto: Dok. kemdikbud.go.id

GENERASI TANGGUH

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Dr. Thamrin Kasman, SE., M.Si ini berlangsung sangat meriah. Dalam pengarahannya, Thamrin agar setiap sekolah memperkuat karakter anak didiknya. "Saya mengajak kepada semua yang hadir untuk bersama-sama menguatkan proses pembinaan anak-anak kita di gugus depan yang berpangkalan di sekolah dasar. Latihlah anak-anak kita untuk berkarakter positif dalam kesadaran, mandiri dalam kenyataan bukan kepura-puraan, dan memiliki keteguhan, serta kecintaan yang mendalam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia," pesan Sesditjen Dikdasmen.

Pada kesempatan lain, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Drs. Wowon Widaryat, M.Si, mengatakan rasa terimakasihnya kepada Kwarnas Gerakan Pramuka yang turut serta dalam membina anak-anak Sekolah Dasar melalui kegiatan pramuka. "Pramuka di Sekolah Dasar sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib. Saya melihat pramuka memberikan penguatan sikap pada diri anak, mulai disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerjasama, kreatif, komunikasi, gotong royong, kepemimpinan, mencintai alam, hingga kemampuan bertahan hidup. Melalui pramuka, anak akan terlatih menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di masa depan," ujar Wowon. ●

14

**PENGUATAN
INTEGRITAS
DAN
AKUNTABILITAS**



Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Sejak era reformasi pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan tata kelola penyelenggaraan negara, termasuk birokrasi pemerintahan. Tujuannya agar setelah masa era reformasi penerapan good governance di Indonesia diharapkan bisa berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi. Namun sampai saat ini masih banyak ditemukan kelemahan dalam melakukan pelayanan dan pengelolaan keuangan negara. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tata kelola pemerintahan saat ini belum pada kondisi yang ideal. Karena prinsip-prinsip good governance di Indonesia saat ini belum dilakukan secara optimal.

Sehingga sangat perlu disadari bahwa dalam mewujudkan good governance diperlukan penciptaan good public governance, good corporate governance, dan good civil society. Untuk itu, dalam governance terdapat tiga komponen atau pilar utama yang harus terlibat, yaitu: 1) public governance yang merujuk pada lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif,

dan yudikatif), sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan, 2) corporate governance yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan atau kewirausahaan yang baik di dunia usaha, dan 3) civil society atau masyarakat, yang diartikan dengan terciptanya tata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bermartabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat ini, sebagai salah satu upaya mewujudkan good governance, pemerintah Indonesia telah berupaya melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan organisasi publik. Pemerintah Indonesia telah membuat Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

ANCANGAN PEMBANGUNAN NA INTEGRITAS



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH

ENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

YOGYAKARTA, 23 OKTOBER 2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR



Pada butir menimbang UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab dengan adanya keterbukaan informasi publik, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi birokrasi sebagai salah satu upaya mendorong reformasi birokrasi. Ujung muaranya adalah untuk tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Reformasi pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance. Sebab pelayanan publik menjadi ranah interaksi antara negara yang diwakili pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah (masyarakat sipil dan mekanisme pasar). Serta berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara lebih mudah pada ranah pelayanan publik, sekaligus lebih mudah dinilai kinerjanya.

Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang saat ini dipimpin oleh Drs. Gesit Mulyawan, M.Pd., memiliki tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit dibidang ketatausahaan. Meliputi urusan persuratan, perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat PSD.

Dalam rangka meningkatkan layanan, Direktur PSD Drs. Wowon Widaryat, M.Si., beserta Kepala Subbag TU melakukan langkah-



Foto: Dok. Dit. PSD

PENCANGANGAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)

Secara resmi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), di Gedung E Lantai 18, Komplek Kemdikbud, Senayan, Jakarta.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada lembaga mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya.

Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP., Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dr. Thamrin Kasman, S.E., M.Si., Direktur Pembinaan SD Drs. Wowon Widaryat, M.Si., Direktur Pembinaan SMP Dr. Supriano, M.Ed., Direktur Pembinaan PKLK Dra. Poppy Dewi Puspitawati, M.A., serta perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK, dan seluruh eselon III dan IV serta staf di lingkungan Direktorat PSD. Hadir pula tamu undangan dari Suku Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, pengawas dan kepala sekolah.

langkah dan terobosan dalam mempermudah kinerja dan layanan ketatausahaan. Sehingga reformasi birokrasi bisa berjalan sesuai harapan untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Inovasi ketatausahaan tersebut meliputi, inovasi pengelolaan keuangan melalui sistem pengendalian internal (SPIN), Kartu Identitas Multifungsi, Sistem Kehadiran Terintegrasi lewat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Meningkatkan Profesionalisme dan pembinaan SDM serta pengembangan surat elektronik dan pembayaran elektronik melalui aplikasi e-dokumen dan e-filing. Bahkan salah satu program terbaru yang saat ini digulirkan oleh Direktorat PSD melakukan deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, pada akhir Oktober 2017.



Foto: Dok. Dit. PSD

Dalam sambutannya, Mendikbud berpesan agar para pegawai memantapkan hati dan niat yang sungguh-sungguh dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik melalui pencanangan Zona Interitas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ini. "Saya sangat senang dan mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Direktorat SD ini. Saya minta ada perbaikan-perbaikan," terang Muhadjir yang juga mendorong direktorat lain untuk mengikuti langkah yang dilakukan Direktorat PSD.

Muhadjir juga mengajak seluruh pegawai agar selalu berhati-hati dan selalu saling mengingatkan kepada orang lain. Karena

menurutnya, celah antara yang batil dan hak itu jaraknya sangat tipis sehingga sangat mudah sekali orang itu berbuat salah. Oleh karena itu, ia menghimbau, agar para pegawai untuk berpegang pada keyakinan agamanya masing-masing. Serta selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa untuk meminta petunjuk agar ditunjukkan hal yang benar dan salah, serta meminta petunjuk agar dapat menjauhi hal yang tidak benar. "Karena yang benar menurut kita, belum tentu benar menurut Allah," tuturnya. "Selamat atas kebulatan tekadnya."



Foto: Dok. Dit. PSD



Menurut penjelasan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, PhD., pencangan ZI menuju WBK ini telah dimulai sejak tahun 2015. Pembinaannya dikoordinasi oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan diikuti oleh eselon I hingga IV di seluruh unit kerja Kemendikbud. "Kita semua sepakat, Kemendikbud harus memulai dan menjadi contoh sebagai wilayah yang bebas dari korupsi. Pelaksanaannya ini dikawal oleh Inspektorat dan KPK, dan ini sudah mengelilingi hingga UPT di daerah. Jadi mulai dari LPMP dan UPT sudah berkomitmen agar semua unit kerja kita terbebas dari korupsi," papar Hamid.

Hamid menyebut, Direktorat PSD merupakan direktorat pertama yang memulai

deklarasi. Sebelumnya, Direktorat PSD telah melewati proses panjang untuk bertekad menciptakan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Sehingga deklarasi ini bukan hanya sekedar deklarasi. Selain itu, deklarasi ini juga pintu masuk untuk mengumumkan bahwa Direktorat PSD itu bebas dari wilayah korupsi.

Hamid mengingatkan, jika setelah deklarasi ini ada yang melakukan pelanggaran, ia sepakat jika itu pejabat harus mundur tanpa peringatan. Jika itu staf, semua konsekuensi harus ditanggung oleh semuanya. "Sehingga apa yang diharapkan oleh Presiden, bahwa kita memang harus betul-betul bebas dari semua tindak korupsi ini bisa kita penuhi dengan sebaik-baiknya," terang Hamid.



Foto: Dok. Dit. PSD

Direktorat PSD dibawah kepemimpinan Wowon Widaryat, lanjut Hamid, telah melakukan acara bersih-bersih selama beberapa tahun terakhir, dan ini akan terus dilakukan. "Kita tidak mungkin meminta orang lain untuk bersih kalau diri kita sendiri belum bersih," ujarnya. "Intinya apa yang diamanatkan kepada kita harus dinikmati oleh sekolah, anak-anak kita dan guru-guru kita. Ini dimulai dari Direktorat PSD dan direktorat lain akan melakukan hal yang sama dan penekanannya itu adalah tindakan dan sikap kita," lanjutnya.

Direktur Pembinaan SD Wowon Widaryat mengatakan, pencangan ZI menuju WBK ini merupakan upaya reformasi birokrasi sebagai langkah awal sebagai pembentukan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik efektif dan efisien sehingga dapat

melayani masyarakat secara tepat cepat dan profesional. Oleh karena itu, Direktorat PSD berkomitmen untuk menjadi salah satu instansi yang menerapkan ZI menuju WBK agar terus menjadi lebih baik.

Direktorat PSD tambah Wowon, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan sekolah dasar. Direktorat PSD memiliki unit kerja yang terdiri dari Subdit Program dan Evaluasi, Subdit Kurikulum, Subdit Peserta Didik, Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta Subbagian Tata Usaha. Dengan jumlah karyawan sebanyak 187 orang, yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, dan 9 pejabat eselon IV serta 173 orang staf.



Foto: Dok. Dit. PSD



Menurut Wowon, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah. Hingga saat ini, Direktorat PSD telah menerapkan beberapa program untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Program tersebut di antaranya Sistem Pengendalian Internal Keuangan melalui Aplikasi SPIN Keuangan, Aplikasi e-Monev dalam pemantauan (monitoring) dan evaluasi program pembinaan SD, dan inovasi manajemen pemberian bantuan prasarana SD melalui Aplikasi Takola.

Wowon menyebut, penerapan inovasi manajemen pemberian bantuan prasarana SD melalui Aplikasi Takola yang bekerja sama dengan SMK Jurusan Teknik Bangunan di seluruh Indonesia. Sistem terbukti dapat mengatasi masalah salah sasaran karena data hasil verifikasi akurat dan valid. "Dengan aplikasi ini, pencaloan proposal dapat dihilangkan karena melalui Takola tidak ada lagi proposal, sehingga tepat sasaran, dan manajemen bantuan prasarana menjadi lebih efisien, lebih efektif, akuntabel, dan terintegrasi dengan Aplikasi JAGA dari KPK," ujarnya.

Terkait kepegawaian, Direktorat Pembinaan SD juga lanjut Wowon, sudah menyediakan basis data pegawai melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)



Foto: Dok. Dit. PSD

yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian di Biro Kepegawaian Kemendikbud. Melalui aplikasi ini, pejabat terkait dapat menelusuri berbagai data dan informasi tentang kepegawaian Direktorat PSD. Selain itu, terdapat juga aplikasi E-Presensi dan E-SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang berbasis pada log harian, sehingga dapat menumbuhkan kedisiplinan dan kejujuran, meningkatkan kinerja, dan pemetaan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki secara berkesinambungan dan terukur.

Wowon menambahkan, Direktorat PSD juga sudah mengembangkan aplikasi untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang mampu memudahkan pengolahan dan penyajian data yang cepat dan akurat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas PIP.

Selain itu, Direktorat PSD juga sedang menyusun program perubahan lainnya yang akan dikembangkan, seperti di Subbag TU akan dikembangkan e-dokumen dan e-filing sistem berbasis TIK. Pada Subdit Program

dan Evaluasi akan dikembangkan sistem penganggaran terpadu dan emonev berbasis android. Pada subdit peserta didik akan dibuat pengembangan aplikasi penyajian penelusuran bakat peserta didik. Di Subdit Kurikulum akan dikembangkan e-rapot, e-ijazah dan e-media pembelajaran. Sedangkan di Subdit Kelembagaan dan Sapras Takola sistem manajemen bantuan pemerintah akan terus dikembangkan.

"Hal ini dibuat semata-mata untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih menuju good governance," tutur Wowon. "Kami segenap pimpinan dan seluruh staf berkomitmen untuk mewujudkan Direktorat Pembinaan SD yang berpredikat sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK," lanjutnya.

Wowon berharap melalui program pencanangan ini, pada tahun 2018 Direktorat SD mendapatkan penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari BPK.



Foto: Dok. Dit. PSD

Dalam kesempatan berbeda ketika melakukan persiapan workshop persiapan pembangunan ZI menuju WBK, Wowon mengatakan, penancangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan sistem reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat PSD. Selain itu, agenda ini merupakan komitmen teguh mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi yang saat ini marak terjadi di berbagai kementerian dan lembaga. "Harus diperhatikan bahwa saat ini terjadi perubahan, di mana Presiden mengingatkan agar tidak main-main dengan pengelolaan uang negara," tutur Wowon.

Zona Integritas menuju WBK ini juga merupakan program untuk melakukan upaya perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara di Direktorat PSD ke arah yang lebih baik. Ia ingin, dengan adanya program ini para pegawai bisa bekerja dengan tenang dan menyenangkan tanpa dibayang-bayangi rasa takut. "Pekerjaan yang kita

hadapi selalu berhubungan dengan masalah hukum dan pengawasan. Oleh karena itu kita harus mengikuti aturan yang berlaku," tutur Wowon.

Menurut Wowon, jika ingin menjadi WBK diperlukan perubahan sistem manajemen, tatalaksana, SDM, pengendalian dan pengawasan penguatan akuntabilitas. "Kita harus menjadi direktorat percontohan minimal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kita niatnya ingin ada perubahan, dengan niat lahir batin ini saja merupakan percontohan bagi direktorat lain," jelas Wowon.

Wowon menyebut, program ini juga merupakan kado pengabdian darinya yang akan segera mengakhiri masa jabatannya. "Diharapkan dengan memperkenalkan tonggak sistem yang lebih baik membuat kepala subdit, para kepala seksi dan para staf



Foto: Mukti Ali

bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan budaya dan kinerja kita menjadi lebih baik lagi dalam akuntabilitas dan layanan publik. Karena sebagai pelayan kita harus meningkatkan layanan kepada sekolah dan peserta didik," tambahnya.

Ia berpesan agar program ini tak sebatas niat dan selogan, tetapi juga kerja nyata untuk bisa menciptakan sistem yang mempermudah pekerjaan. "Kita ingin banyak pekerjaan terselesaikan tapi tidak repot dan tidak capek," terang Wowon. "Karena dengan banyak pekerjaan kita banyak dokumen yang tertinggal sehingga mengganggu kinerja," lanjutnya.

Dengan menjadikan Direktorat PSD menjadi zona bebas korupsi akan menambah tunjangan kinerja (Tukin) pegawai hingga 80%. Tapi menurut Wowon, yang utama dengan adanya pencangan ini adalah rasa nyaman dan aman dalam bekerja. Selain itu, program ini memberikan pelajaran bagi peningkatan

kompetensi pegawai, karena sekarang calon pegawai baru diseleksi melalui persyaratan yang luar biasa. "Dulu orang tak diterima di swasta masuk ke pemerintah, tapi sekarang kondisinya terbalik," tutur Wowon.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPIN) KEUANGAN

Sistem Pengendalian Internal (SPIN) Keuangan merupakan salah satu terobosan ketatausahaan yang patut dibanggakan Direktorat PSD. Pasalnya, SPIN Keuangan adalah pembaharuan sistem tata kelola anggaran melalui sebuah aplikasi yang bisa mengontrol setiap pengajuan dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh setiap subdirektorat di lingkungan Direktorat PSD.

Sistem ini merupakan proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tujuannya



Foto: Mukti Ali

untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 12, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Drs. Wowon Widaryat, M.Si. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar menyebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian internal. Sedang berdasarkan UU No. 15 tahun 2006 Pasal 1, menyatakan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dalam Bab 1, Pasal 1, Butir 1, untuk memberikan keyakinan hal-hal yang harus dilakukan adalah efektivitas

dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, SPIN Keuangan pada Dit. PSD memiliki beberapa karakteristik yaitu, holistik atau integral. Karakter ini memiliki lima komponen utama yaitu lingkungan pengendalian





Foto: Dok. ditpsd.kemdikbud.go.id

(control environment), penilaian risiko (risk assessment), kegiatan pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi (information and communication), dan pemantauan (monitoring). Selanjutnya proses SPIN Keuangan ini terintegrasi dan melibatkan seluruh tingkatan manajemen. Serta sesuai dengan tujuan organisasi sebagai pengarah (objective - driven approach).

Wowon mengatakan, lingkungan pengendalian ditujukan kepada kepala satuan kerja dan seluruh pegawai di Direktorat PSD. Melalui aplikasi ini, mereka harus menciptakan dan melihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi sehingga menimbulkan perilaku positif, mendukung pengendalian internal, serta manajemen yang sehat. "Lingkungan pengendalian ini diselenggarakan dengan integritas dan nilai etika, komitmen pada kompetensi, kepemimpinan, struktur organisasi, wewenang dan tanggung awab, kebijakan SDM, peran auditor intern yang efektif, serta hubungan kerja yang baik," ujarnya.

Untuk penilaian risiko, berfungsi memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian tersebut dilakukan dengan penetapan tujuan instansi, penetapan tujuan kegiatan, identifikasi risiko, dan analisis risiko.

Wowon menambahkan, sistem pengendalian ini digunakan untuk membantu memastikan apakah arahan pimpinan instansi pemerintah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini dilakukan melalui review kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik dan asset, penetapan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi dan kejadian, pencatatan akurat dan tepat waktu, pembatasan akses terhadap sumber daya, akuntabilitas terhadap sumber daya, serta dokumentasi atas SPIN Keuangan.

Oleh karena itu, dalam upaya mendukung ketiga komponen awal di atas, informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk

melaporkan kepada pimpinan instansi atau pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu dengan tepat waktu sehingga pimpinan dapat melaksanakan pengendalian dan tanggung jawab. Sedangkan pemantauan difungsikan untuk menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan ini dilaksanakan melalui pemantauan rutin, evaluasi, dan tindak lanjut.

Sementara itu, Gesit menyampaikan, untuk menjamin efektivitas penerapan SPIN Keuangan, setiap rencana anggaran yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus dimasukkan ke dalam sistem sebelum diverifikasi oleh Sistem Aplikasi Satker (SAS) milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, yang bertugas untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM). Sehingga setiap jajaran pimpinan wajib membuat pernyataan berdasarkan SPIN yang memadai serta diungkapkan pada setiap pelaporan pelaksanaan tugasnya.

Gesit menambahkan, masing-masing PPK di setiap subdirektorat yang akan mengajukan anggaran untuk kegiatan atau kontrak wajib memasukkan rencana kegiatannya dalam SPIN. "Jika berkas tidak lengkap maka kita kembalikan. Jika tidak melakukan input SPIN maka kita kembalikan dan tidak akan kita proses ke SAS. Kecuali kalau server SPIN bermasalah, kita beri tanda dispensasi agar segera langsung diproses. Tapi nanti harus tetap dimasukkan ke SPIN," ungkapnya.

Gesit berharap semua berkas pengajuan anggaran dapat terkomputerisasi sehingga bisa dengan mudah mengetahui jumlah penggunaan anggaran di semua subdirektorat hanya dengan membuka aplikasi SPIN di internet. "Aplikasi ini juga mencegah kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang fiktif dan tidak diharapkan. Kita bisa tahu, suatu kegiatan itu sudah mengambil uang berapa, untuk apa peruntukannya, dan apakah sudah sesuai dengan mata anggarannya atau tidak. Jadi setiap kegiatan itu tidak kelebihan atau minus kurang ambil uang. Jadinya pas," ujar Gesit.

Hasilnya, pada tahun 2016 lalu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III mengumumkan pemenang hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja dalam Wilayah Pembayaran KPPN Jakarta III Semester I Tahun 2016. Raihan ini sungguh membanggakan bagi Direktorat PSD karena dinyatakan sebagai pemenang Peringkat 1 Kategori Pagu Belanja Nonpegawai di atas Rp 1 triliun. Peringkat 2 juga diraih satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

"Pemberian penghargaan untuk satker diberikan setahun dua kali atau per semester. Di KPPN III Penyusunan peringkat baru dilakukan sekarang. Di tahun-tahun sebelumnya hanya mengambil satker teladan bagi satker yang memenuhi kualifikasi meliputi realisasinya tinggi, patuh dan akurat dibandingkan dengan satker lainnya," kata Edy Prayitno, S.E., Kepala KPPN Jakarta III.



Menurut penjelasan Edy Prayitno, pemenang hanya dipilih dua terbaik, berdasarkan empat kategori, yakni Kategori Belanja Non-Pegawai di Bawah Rp 10 Miliar, Kategori Belanja Non-Pegawai Rp 10-100 Miliar, Kategori Belanja Non-Pegawai Rp 100 Miliar-Rp 1 Triliun, dan Kategori Belanja Non-Pegawai di atas Rp 1 Triliun.

Selain mendapat piagam penghargaan, para pemenang juga mendapat akses bebas antrean. "Artinya satker pemenang didahulukan untuk pelayanan di front office. Jika penyampaian laporan seperti LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) telat, maka yang terjadi adalah penundaan proses SPM (Surat Perintah Membayar)-nya. Jadi walaupun bebas antrian, persyaratan dalam pengajuan layanan tetap harus dipenuhi," ujar Edy yang sebelumnya pernah menjabat Kepala KPPN Yogyakarta ini.

Menurut Edy, keberhasilan Direktorat Pembinaan SD menjadi yang terbaik berdasarkan kriteria penilaian, meliputi realisasi anggaran, kepatuhan/ketepatan waktu, dan akurasi/ketepatan. Realisasi anggaran yang dilihat adalah untuk berapa yang sudah terealisasi menjadi Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) untuk pagu belanja non pegawai. Aspek kepatuhan meliputi ketepatan waktu penyampaian LPJ, e-Rekon, SPM gaji, LPJ dan saldo rekening. "Sedangkan penilaian akurasi/ketepatan dilihat dari SPM tanpa penolakan, SPM tanpa retur dan juga ADK Rekon dan LPJ yang akurat dan tepat waktu," kata Edy menjelaskan.

Satker dengan penilaian kinerja pengelolaan keuangan yang buruk memang tidak ada sanksi khusus. "Kami berharap penilaian yang kami lakukan dapat menjadi feedback bagi satker untuk meningkatkan kinerjanya. Kami tidak menghitung berapa persen yang mendapat penilaian buruk, kami berharap dengan penilaian tersebut maka akan menjadi pendorong bagi satker untuk terus menjadi lebih baik," kata Edy.

Tentu saja satker yang tak melaksanakan kewajiban dengan baik akan merugi sendiri. Misalnya, Satker yang telat menyampaikan LPJ ataupun saldo rekening, maka SPM-nya tidak akan diproses. "Yang SPM gajinya sering terlambat akan dikenakan sanksi dengan memproses gaji induk menjadi gaji susulan," ujar Edy



Foto: Dok. Dit. PSD

SISTEM KEHADIRAN TERINTEGRASI LEWAT SIMPEG

Tak hanya menciptakan terobosan, Direktorat PSD juga turut serta dalam menerapkan program kehadiran terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian Kemendikbud. Gesit mengatakan, melalui sistem ini kehadiran seluruh pegawai dapat dilihat oleh Biro Kepegawaian dan Sekretariat Jenderal, Kemendikbud.

Penggunaan sistem kehadiran ini dalam rangka mengimplementasikan program reformasi birokrasi dalam penataan sistem manajemen SDM serta tindak lanjut terhadap Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, Permendikbud No. 14 tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kemendikbud, dan Surat Edaran Mendikbud No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemendikbud.

Biro Kepegawaian sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan program tersebut telah membuat sistem pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja individu dengan menggunakan sistem kehadiran terintegrasi. "Sistem pemberian tunjangan kinerja ini terintegrasi melalui sistem kehadiran yang dapat diakses melalui laman www.kehadiran.sdm.kemdikbud.go.id dengan aplikasi Elektronik Sasaran Kinerja Pegawai (E-SKP) yang dapat diakses melalui laman www.skp.sdm.kemdikbud.go.id," ujar Gesit.

Gesit berpesan, melalui sistem ini diharapkan para pegawai masuk dan pulang sesuai jam kerja yang berlaku. "Apabila dia ada kegiatan lain, maka harus ada surat izin dan surat penugasannya, termasuk disposisi dari pimpinan. Karena hal itu merupakan dasar untuk penghitungan tunjangan kinerja mereka setiap bulannya," ujar Gesit. "Karena terintegrasi dengan Setjen dan Biro Kepegawaian Kemendikbud, jadi semua dapat mengakses data, sehingga tidak ada yang bisa berbohong lagi, karena saat ini kodenya sudah berupa NIP masing-masing pegawai," lanjutnya.



Menurut Gesit, dengan adanya sistem kehadiran terintegrasi ini, data kehadiran pegawai dapat dimonitor di Biro Kepegawaian, sehingga Kepala Seksi (Kasie) dapat secara langsung memantau kehadiran pegawai di unit kerja atau bawahannya. "Jika stafnya absen masuk kerja lewat dari ketentuan jam masuk, pegawai yang lalai itu dapat langsung diperingati oleh Kasienya masing-masing," jelas Gesit.

Ia juga mengungkapkan bahwa setiap bulannya sudah ada rekam data, sehingga pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan bisa dikenakan teguran hingga sanksi. "Apabila lebih dari sehari, maka pegawai tersebut bisa diberikan peringatan lisan, jika lebih dari tiga hari maka bisa dikenakan peringatan tertulis," katanya.

Gesit mengatakan, sanksi yang dapat diberikan kepada pegawai yang lalai tersebut

paling ringan adalah penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkatnya. "Sedangkan untuk sanksi langsung itu pengurangan tunjangan kinerjanya," jelasnya.

Saat ini tunjangan kinerja terbagi dua, untuk kinerja dan disiplin. Gesit menyatakan, jika pegawai itu tidak disiplin, maksimal separuh tunjangan kinerjanya sudah tidak didapat. "Jadi jika dia tidak berangkat bekerja maka tidak memperoleh tunjangan kinerjanya karena sudah ada aturannya. Jadi nanti kita lampirkan Peraturan Menteri," katanya.

Gesit menambahkan, bentuk absen terintegritas ini tak jauh beda dengan sistem kehadiran sebelumnya. "Kalau kemarin kan begitu diprint sidik jarinya ada diminta kode tertentu, kalau saat ini sudah langsung nomor induk pegawai (NIP) yang bersangkutan. Selain itu, nanti juga akan diintegrasikan dengan pendeteksi wajah," ungkapnya.

KARTU IDENTITAS MULTIFUNGSI

Pada awal tahun 2017, Direktorat PSD bekerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menerbitkan kartu identitas multifungsi bagi karyawan. Kartu multifungsi ini adalah bentuk dukungan Direktorat PSD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pegawai. Selain berfungsi sebagai tanda pengenal pegawai, kartu ini juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran atau kartu debit. Tak hanya itu, kartu yang bernama BRI-ID ini bisa juga digunakan untuk kartu isi ulang BRI-Brizzi, serta sebagai kartu akses masuk tol (e-toll).

Terintegrasinya kartu pengenal Direktorat PSD dengan Bank BRI ini adalah bagian dari bentuk perwujudan program transformasi kelembagaan yang bertujuan untuk mempermudah pegawai saat menerima honor. "Ketika ada kegiatan di suatu daerah, kita tak perlu terkendala karena harus membawa uang dengan membayar cash. Sehingga dapat mempermudah pembayaran," tutur Kasubbag TU.

Menurut Gesit, penggunaan kartu multifungsi ini merupakan yang pertama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kita baru piloting. Diharapkan ke depannya semua honor bisa lewat bank, dan yang masuk ke bank itu sudah dihitung pajaknya," kata Gesit. "Sistem ini juga mempermudah direktorat dalam melakukan pengarsipan dana yang telah dicairkan. Karena sewaktu-waktu laporan itu pasti akan diminta," tambahnya.

Selain itu, bentuk kerjasama dan penggunaan kartu ini dapat menjadi sarana dalam melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/P/2016 tentang Pembentukan

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016, serta Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah, bahwa untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas Wilayah bebas dari Korupsi (ZIWBK) di seluruh satuan kerja di lingkungan Kemdikbud.

"Zona Integritas menuju WBK adalah sebuah komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," tutur Gesit.

Selain itu, pembangunan zona ini adalah sebuah upaya perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara di semua aspek di lingkungan Kemdikbud, agar terus meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan sampai dengan penilaian evaluasi Satuan Kinerja Pegawai (SAKIP).





MENINGKATKAN KUALITAS SDM

Direktorat PSD menyadari peningkatan kualitas efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi tidak hanya tergantung kepada peralatan dan sistem. Namun diperlukan juga SDM yang memiliki kualitas dan profesionalisme yang tinggi, khususnya dalam pelayanan publik. Oleh karenanya, demi meningkat kemampuan SDM, Diterktorat PSD melaksanakan pelatihan dan seminar peningkatan kemampuan profesional pegawai, seperti menyelenggarakan workshop pelayanan prima.

Workshop ini adalah upaya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan profesional meningkatkan pelayanan publik. Kegiatan ini dirasakan sangat penting, terlebih bagi instansi pusat yang menyediakan informasi dan menjadi sumber informasi bagi stakeholder di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Posisi strategis Direktorat PSD sebagai institusi pusat yang membawahi Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini harus diawali dengan meyamakan pemahaman dan pola pikir yang positif mengenai segala informasi yang masuk, khususnya materi pelatihan, sehingga materi yang diberikan dapat betul-betul dimaknai dan bermanfaat bagi penyelenggaraan, khususnya pelayanan kegiatan perkantoran yang lebih baik.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Arch, Bogor, pada tanggal 23 hingga 26 Agustus 2016. Peserta kegiatan ini adalah perwakilan dari masing-masing Subdirektorat dan Subbagian Tata Usaha sebanyak 4 orang, sehingga jumlah keseluruhan adalah 40 orang. Pegawai yang mengikuti kegiatan ini memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan informasi dengan lebih baik, yang menuntut teknik komunikasi yang lebih baik juga.



Pelayanan prima merupakan strategi mewujudkan budaya kualitas dalam pelayanan publik demi mendapatkan pengakuan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman yang mampu melebihi harapan. Budaya dalam memberikan pelayanan prima merupakan suatu bentuk pengabdian yang perlu diperhatikan setiap individu yang terlibat dalam proses pelayanan prima, baik dari kemampuan berkomunikasi yang persuasif, memiliki kompetensi yang diperlukan, memberikan respon yang cepat, integritas, konsistensi, dan sopan santun. Yang tak kalah penting adalah bagaimana memberikan pelayanan dengan tulus dan dengan rasa empati yang tumbuh dari dalam diri. Hal ini haruslah dipahami dengan baik demi menciptakan kesan positif dalam benak pelanggan. Tujuannya hanya satu, pelanggan merasa terpuaskan dan bahkan melebihi harapan mereka ketika berinteraksi.

Menurut Gesit, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para peserta tentang pengertian dan tujuan pelayanan prima, memberikan pemahaman kepada peserta akan pentingnya layanan prima kepada para pelanggan, dan memberikan pengetahuan kepada peserta tentang teknik-teknik pelayanan prima secara tepat.

Metode pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan profesional pegawai (Pelayanan Prima/Service Excellent) antara lain pre assesment, pemetaan, dan pelaksanaan pelatihan. Pelatihan dibuka dengan membuka mindset peserta tentang hal yang paling prinsip terkait pelatihan yang akan membuka jalan bagi peserta untuk dapat menyerap semua materi pelatihan dengan sempurna. Setelah itu akan masuk kepada inti dari pelatihan. "Untuk materi dan metode penyampaian akan sangat disesuaikan agar mendapatkan hasil optimal," terang Gesit.



Ada tiga fungsi pelayanan umum (publik) yang dilakukan pemerintah yaitu *environmental service*, *development service* dan *protective service*. Pelayanan oleh pemerintah juga dibedakan berdasarkan siapa yang menikmati atau menerima dampak layanan baik individu maupun kelompok. Konsep barang layanan pada dasarnya terdiri dari barang layanan privat (*private goods*) dan barang layanan kolektif (*public goods*). Sejalan dengan hal itu, pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain sehingga melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin.

Sedangkan untuk menguatkan integritas dan tali kekeluargaan di antara para pegawai, secara rutin setiap tahunnya Direktorat PSD melakukan kegiatan di alam terbuka (*outbond*). Melalui kegiatan ini, selama tiga hari para pegawai diberikan motivasi dan pengetahuan. Selain itu peserta juga melakukan berbagai kegiatan *outbond*, seperti peningkatan kebugaran jasmani dengan melakukan

olahraga. Mereka juga diberikan materi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas seluruh pegawai di lingkungan Direktorat PSD.

Gesit menegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun kebersamaan dan kekompakan para pegawai dalam bekerja agar mampu bekerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai program ataupun tujuan dan visi misi Direktorat PSD. Karena SDM merupakan aset yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu lembaga.

Melalui kegiatan ini, harapannya setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan sebuah semangat baru sehingga membuat kedisiplinan dan kerja keras pegawai terus meningkat lebih baik dari waktu ke waktu demi mencapai tujuan yang sama. "Kegiatan ini memberikan rasa tanggung jawab, kepedulian, saling bantu dan mendukung sehingga mampu menciptakan rasa kekeluargaan. Selain itu membentuk jiwa kepemimpinan dalam diri mereka," tutur Gesit.

PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



MERINTIS E-DOKUMEN DAN E-FILLING

Selain program yang telah berjalan, ke depan Subbagian TU Direktorat PSD sedang merintis aplikasi untuk pengembangan surat elektronik dan pembayaran elektronik melalui aplikasi e-dokumen dan e-filing. Tujuannya agar seluruh ruang di lingkungan Subdirektorat dan Subbagian Direktorat PSD minim dokumen arsip berupaya tumpukan kertas, karena dokumen telah di-elektronikkan melalui informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui media komputer atau sistem elektronik.

"Kelebihan e-dokumen dan e-filling dibandingkan dengan dokumen biasa adalah paperless. Hal ini mendorong penghematan kertas serta ramah lingkungan karena kertas berasal dari sumber daya alam," kata Gesit. Kelebihan lainnya adalah timeless,

menghemat waktu karena bisa lebih cepat dalam pencarian informasi yang ada dalam sebuah dokumen.

E-dokumen juga lebih mudah disebarluaskan atau dibagikan. Selain itu, e-dokumen lebih aman disimpan dengan metode elektronik signature. Hal lain yang tidak kalah penting dalam e-dokumen adalah penataan ruangan yang semakin rapi dan tertib karena berkurangnya tumpukan kertas maupun berkardus-kardus dokumen di dalam ruangan dan lingkungan sekitar kantor.

Pembuatan e-dokument pun tidak terlalu rumit, dokumen asli yang berupa kertas atau hard document dijadikan file komputer dengan cara di-scan kemudian data diverifikasi untuk dikelompokkan berdasarkan daftar isi yang bertujuan untuk memudahkan pencarian data. Dalam indexing dilakukan kategorisasi berupa tipe dokument, tanggal, nama pembuat serta kata kunci. Sistem indexing bisa dilakukan dengan metode manual atau otomatis.



PUBLIKASI MEDIA

Media publikasi menjadi bagian penting dalam penyebarluasan informasi Direktorat PSD, baik menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Selain itu, Direktorat PSD juga menginformasikan kegiatan-kegiatan dan praktik yang dilaksanakan di sekolah dasar, serta peristiwa dan perkembangan pendidikan, khususnya sekolah dasar.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik, bahwa yang dimaksud dengan Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Saat ini Direktorat PSD menggunakan Buku, Majalah dan website sebagai media informasi yang dapat diakses masyarakat.

Melalui buku, Direktorat PSD telah mencetak berbagai judul buku di antaranya, Bragam Jurus Pembudayaan Budi Pekerti: Profil 18 Sekolah Dasar Berbudhi Pekerti, Best Practices Tata Kelola Dana BOS di Sekolah Dasar: Profil 10 Sekolah Terbaik Lomba Tata Kelola BOS, dan Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar: Best Practices Rintisan PPK di 12 Sekolah Dasar.

Buku-buku ini memberikan informasi dan contoh mengenai sekolah-sekolah dasar rujukan terbaik di Indonesia. Melalui buku-buku ini sekolah-sekolah dasar lain diharapkan dapat mengambil pelajaran dan contoh untuk diterapkan di sekolahnya masing-masing.

Sejak tahun 2016, Direktorat PSD menerbitkan majalah dengan nama Majalah Sekolah Dasar. Majalah ini memberikan informasi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja, Subag dan Subdit di Direktorat PSD. Ada pula profil sekolah dan siswa yang telah meraih prestasi sehingga menjadi motivasi bagi yang membacanya.

Di era digitalisasi seperti saat ini, selain buku dan majalah, publikasi sudah merambah ke dunia digital. Salah satu langkah yang dilakukan Direktorat PSD adalah dengan membuat suatu portal website. Dengan

adanya website, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dapat dilakukan melalui internet.

Melalui internet, masyarakat dapat mengakses informasi Direktorat PSD melalui laman resmi ditpsd.kemdikbud.go.id. Lewat web ini masyarakat dapat dengan mudah melakukan cross-check informasi mengenai kebijakan serta kegiatan yang akan dan telah dilakukan oleh Direktorat PSD. Selain itu, melalui laman ini juga terdapat buku serta majalah berbentuk e-book yang dapat diunduh. Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses informasi dan layanan pemerintah. Selain itu, untuk melihat rekapitulasi PIP bisa diakses lewat pipsd.kemdikbud.go.id dan informasi tentang pelaksanaan program sistem Takola SD diakses lewat takola.ditpsd.net.

Ada beberapa manfaat yang dihasilkan melalui penggunaan web ini, seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan

mobile dimanapun tanpa harus hadir secara langsung. Fungsi ini disebut sebagai fungsi pelayanan pemberian informasi secara G2C (Government to Citizen). Fungsi lainnya adalah G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government).

Dalam Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang berangkat dari pemikiran tentang pertimbangan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses pemerintahan yang diyakini akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan terwujudnya website yang bersifat dinamis, diharapkan akan diperoleh aliran informasi yang optimal antara pemerintah-masyarakat dan sebaliknya. Sehingga akan terbangun rasa memiliki dan rasa kebutuhan akan website tersebut sebagai penyambung aspirasinya. Seiring dengan itu dengan adanya kemanfaatan website tersebut akan semakin meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Optimalisasi pelaksanaan e-government disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. ●



**Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Gedung E Lt 17-18 Kompleks Kemdikbud Senayan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta - 10270
Telp: 5725641, 5725642, Faks: 5725635, 5725637, 5725989
Laman: ditpsd.kemdikbud.go.id



Call Center: 0800-140 -1276



www.ditpsd.kemdikbud.go.id



www.facebook.com/ditpsd

ISBN 978-602-9412-77-2



9 786029 412772